

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, serta dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
43. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024;
 - b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 untuk:

- a. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 6 Juli 2023

Pt. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

9. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Selanjutnya, agar RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... 10

1.4 Maksud dan Tujuan..... 11

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 15

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah..... 15

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 15

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 21

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum..... 37

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... 85

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD..... 103

2.2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Tahun 2022..... 106

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018-2022..... 111

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah tahun 2017-2022..... 132

2.2.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... 135

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... 154

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 154

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... 156

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... 163

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 163

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017-2022..... 163

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2023..... 165

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024..... 173

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 199

3.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah..... 199

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... 201

3.2.3 Arah Pembiayaan Daerah..... 204

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 205

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 205

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024..... 239

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2024..... 239

4.2.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... 244

4.2.3. Saran dan Masukan Forum konsultasi Publik..... 246

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2024..... 251

4.2.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024.. 259

4.3 Inovasi Daerah..... 487

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... 492

5.1 Program Pembangunan Tahun 2023-2026..... 492

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 499

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 523

BAB VII PENUTUP..... 530

LAMPIRAN I PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

LAMPIRAN II EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

DAFTAR TABEL

2.1	Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022.....	16
2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2022.....	19
2.3	Rata–Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Minggu)	26
2.4	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat beserta Komponennya Tahun 2017-2022.....	30
2.5	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2022.....	33
2.6	Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2022.....	35
2.7	Jumlah Seniman Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017, 2020, dan 2021	36
2.8	Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017, 2020, dan 2021.....	36
2.9	Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	39
2.10	Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	41
2.11	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2020-2022.....	61
2.12	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2020-2022.....	62
2.13	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MT) Tahun 2020-2022.....	62
2.14	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021.....	65
2.15	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	66
2.16	Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Tahun 2020-2022.....	67
2.17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021.....	67
2.18	Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020.....	68
2.19	Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	71
2.20	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2022.....	72
2.21	Keadaan Keuangan Koperasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	73
2.22	Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	74
2.23	Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022.....	77
2.24	Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	78

2.25	Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	79
2.26	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	79
2.27	Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	80
2.28	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	80
2.29	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	81
2.30	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	82
2.31	Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.....	83
2.32	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	84
2.33	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Rupiah).....	87
2.34	Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022 (Rupiah).....	89
2.35	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	92
2.36	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	95
2.37	Jumlah Sekolah, Guru, Rombongan Belajar pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2022/2023.....	96
2.38	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan 2022.....	97
2.39	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021 dan 2022.....	98
2.40	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Tahun 2020-2022.....	99
2.41	Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	101
2.42	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022.....	107
2.43	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	112
2.44	Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	134
2.45	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	137
3.1	Distribusi Persentase PDRB kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020.....	164

3.2	Proyeksi dan Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2024.....	171
3.3	Proyeksi dan Target PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha untuk Tahun 2023-2024.....	172
3.4	Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	190
3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021 s.d Tahun 2025.....	200
3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 s.d Tahun 2025.....	203
3.7	Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2022 serta Proyeksi/Target Murni Tahun 2023-2025.....	204
4.1	Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran RPJMN dan RPD Jawa Barat.....	212
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bekasi dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026.....	215
4.3	Hasil Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DRPD Tahun 2023	244
4.4	Isu Strategis Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024	252
4.5	Keterkaitan antara Arah kebijakan Nasional dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	259
4.6	Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dan Kaitannya dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat.....	260
4.7	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran, dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	261
4.8	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Nasional Tahun 2024.....	324
4.9	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten bekasi dengan Prioritas Jawa Barat Tahun 2024.....	413
4.10	Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	414
4.11	Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	487
4.12	Peringkat Sepuluh Besar dalam Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	490
5.1	Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	499
5.2	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	516
5.3	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Penunjang Pencapaian Target SPM Tahun 2024.....	518
6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	524
6.2	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	525
6.3	Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.....	529

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang...	11
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bekasi.....	15
2.2	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022.....	17
2.3	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020.....	17
2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	18
2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2022.....	20
2.6	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)	21
2.7	Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022.....	22
2.8	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa).....	23
2.9	10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2022.....	23
2.10	Garis Kemiskinan serta Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	24
2.11	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2022.....	25
2.12	Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)	27
2.13	Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)	28
2.14	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)	28
2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi beserta Komponennya Tahun 2017-2022.....	29
2.16	10 Kabupaten/Kota dengan Angka Melek Huruf Terendah di Jawa Barat.....	31
2.17	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2022.....	32
2.18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2022.....	33
2.19	Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dan 2022.....	34
2.20	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022.....	34
2.21	Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	64
2.22	Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	65
2.23	Jumlah Posyandu di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	66
2.24	Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2022 (km).....	69
2.25	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2022 (km).....	69

2.26	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	70
2.27	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2022.....	72
2.28	Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.....	74
2.29	Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	75
2.30	Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.....	76
2.31	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022.....	76
2.32	Jumlah Pasar Tradisional menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022.....	83
2.33	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010 Tahun 2017-2022 (Persen).....	86
2.34	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 5 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	90
2.35	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran, dan Pendapatan pada Industri Mikro dan Kecil menurut 12 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	91
2.36	Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2020.....	93
2.37	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021 dan 2022.....	94
2.38	IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	102
2.39	Persentase Penduduk Miskin pada 11 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	102
2.40	11 Kabupaten/Kota dengan Angkatan Kerja Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022.....	103
3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)	163
3.2	Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2022.....	165
4.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025.....	211

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke dua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 sampai menunggu terpilihnya Bupati Bekasi yang baru melalui pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Meski Covid-19 belum

sepenuhnya hilang, namun semakin menurunnya ketakutan masyarakat, melonggarnya kebijakan pemerintah atas pencegahan penyebaran, serta vaksinasi telah mendorong perekonomian Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Semakin membaiknya kondisi ini juga mempengaruhi proses penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, yang mana pada tahapan-tahapan yang membutuhkan diskusi dan mengumpulkan banyak orang yang sebelumnya sempat terkendala karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa harus dilakukan secara daring ataupun hybrid.

Membaiknya kondisi ini juga tentunya perlu didorong oleh Pemerintah Daerah agar dapat semakin membaik ke depannya. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang sebelumnya terkendala dengan adanya Covid-19 mulai kembali ditingkatkan. Juga penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2024 juga perlu untuk diantisipasi agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan tema pembangunan di tahun 2024 dengan **Peningkatan Pelayanan Publik dan Infrastruktur, serta Pemeliharaan Kondusivitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak**. Selain diarahkan pada tema pembangunan tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan juga diarahkan pada prioritas pembangunan tahun 2024, proyek strategis, serta program strategis utama, yaitu: penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengentasan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta digitalisasi.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 telah melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 s.d. 5 Januari 2023, dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah, dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, LSM dan *stakeholder* lainnya;

- c. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023;
- d. Musrenbang RKPD di Kecamatan pada tanggal 14-21 Februari 2023 yang dihadiri oleh Bupati Bekasi, Anggota DPRD pada masing-masing daerah pemilihan, Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, LSM, Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kecamatan;
- e. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d. 13 Maret 2023 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) agenda acara, yakni pembukaan pada tanggal 27 Februari 2023, sidang kelompok pada tanggal 28 Februari s.d. 10 Maret 2023, dan penutupan pada tanggal 13 Maret 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bekasi, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perwakilan kecamatan dan perwakilan DPRD. Tujuan penyelenggaraan forum ini adalah untuk menyelaraskan usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil dari penyelarasan ini adalah disepakatinya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diakomodir dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- f. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 14-20 Maret 2023. Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan sidang kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret dan diakhiri dengan acara puncak sekaligus penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret. Adapun peserta yang diundang untuk mengikuti acara puncak, antara lain: Kepala Perangkat Daerah, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah, Kepala Desa dan *stakeholder* lainnya. Hasil dari Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten dijadikan dasar untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- g. Review Inspektorat;
- h. Fasilitasi Provinsi Jawa Barat;
- i. Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

Selanjutnya, RKPD yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan dan penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta penyusunan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8

- Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah

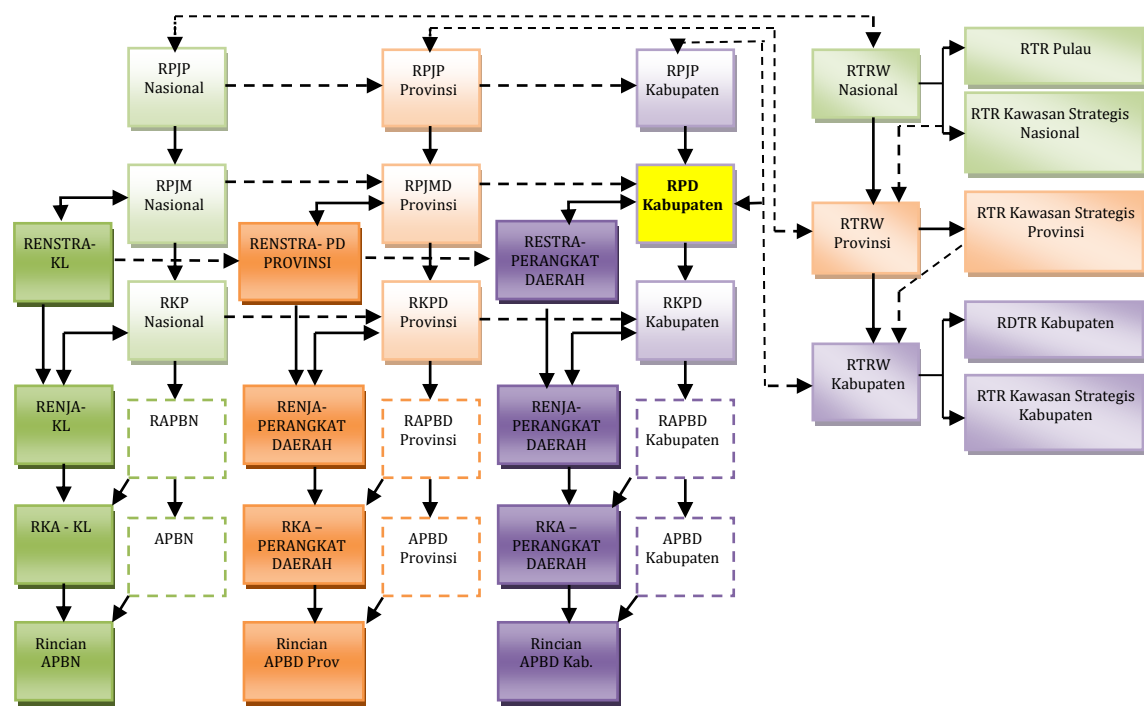
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
43. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Namun, dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan belum dapat disusunnya RPJMD yang baru karena kosongnya kepala daerah definitif akibat pemilihan kepala daerah yang direncanakan akan dilaksanakan serentak di tahun 2024, maka rencana pembangunan daerah selama kekosongan RPJMD digantikan dengan Rencana Pembangunan Daerah atau disebut dengan RPD, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. RPD sebagaimana RPJMD, juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memperhatikan rencana tata ruang daerah, rencana pembangunan regional, dan rencana pembangunan nasional. Namun berbeda dengan RPJMD, RPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Walaupun begitu, RPD tetap merupakan dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dengan kata lain, RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Selain sebagai penjabaran RPD, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, hubungan antardokumen rencana pembangunan disajikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang



1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyusun KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Sementara tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah antarwilayah dan antarsektor pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menggambarkan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah, meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPJMD/RPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan Tahun 2023-2026

Menjelaskan program-program pembangunan daerah yang telah dan akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada RPD.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Makro Daerah.

BAB VII PENUTUP

Berisi penjelasan dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

LAMPIRAN I PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

LAMPIRAN II EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak pada posisi $6^{\circ}10'53''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur. Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 1.273,88 km² yang terbagi ke dalam 23 kecamatan, 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Secara administratif, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, antara lain sebagai berikut:

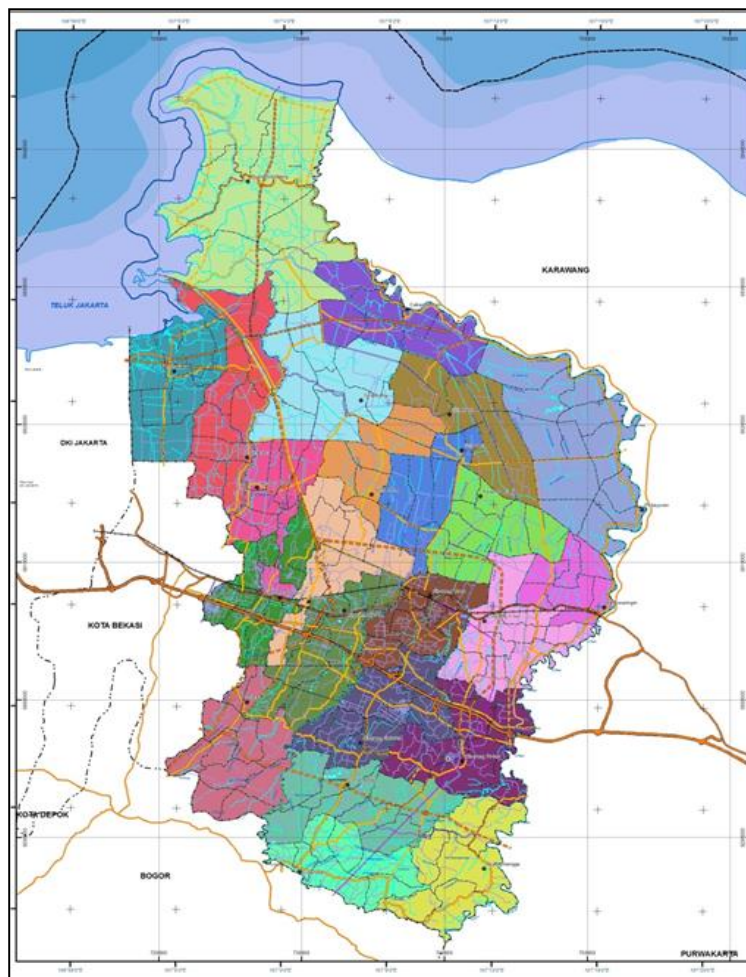
Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi

Timur : Kabupaten Karawang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

Dari 23 kecamatan yang ada, kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas wilayah sebesar 140,09 km², dan terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin dengan luas wilayah sebesar 31,53 km². Topografi Kabupaten Bekasi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan dengan ketinggian lokasi antara 6-115 meter, serta kemiringan 0-25°. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Kecamatan Bojongmangu dengan ketinggian 95 mdpl, dan terendah Kecamatan Muaragembong dengan ketinggian 3 mdpl. Sedangkan untuk kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muaragembong dan Cabangbungin, dan terdekat adalah Kecamatan Cikarang Pusat.

Tabel 2.1
Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2022

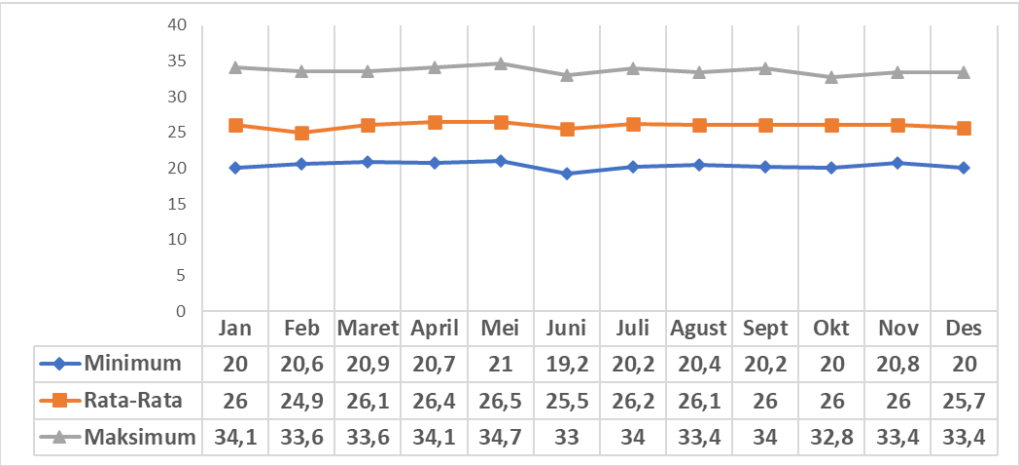
No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Setu	62,16	40	25
2.	Serang Baru	63,8	59	12
3.	Cikarang Pusat	47,6	46	1
4.	Cikarang Selatan	51,74	15	8
5.	Cibarusah	50,39	65	15
6.	Bojongmangu	60,06	95	15
7.	Cikarang Timur	51,31	16	13
8.	Kedungwaringin	31,53	15	20
9.	Cikarang Utara	43,3	16	4
10.	Karangbahagia	46,1	4	30
11.	Cibitung	45,3	41	15
12.	Cikarang Barat	53,69	35	20
13.	Tambun Selatan	43,1	19	26
14.	Tambun Utara	34,42	16	47
15.	Babelan	63,6	7	45
16.	Tarumajaya	54,63	5	58
17.	Tambelang	37,91	6	23
18.	Sukawangi	67,19	4	40
19.	Sukatani	37,52	11	24
20.	Sukakarya	42,4	8	30
21.	Pebayuran	96,34	7	30
22.	Cabangbungin	49,7	4	63
23.	Muaragembong	140,09	3	65
	JUMLAH	1.273,88		

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Suhu udara di Kabupaten Bekasi berkisar antara 19°-34°C. Di tahun 2022, suhu udara terendah selama setahun tercatat sebesar 19,2°C yang terjadi di bulan Juni dan tertinggi mencapai 34,7°C yang terjadi di bulan Mei. Selain kedua

bulan tersebut, suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Bekasi berkisar antara 31-32°C.

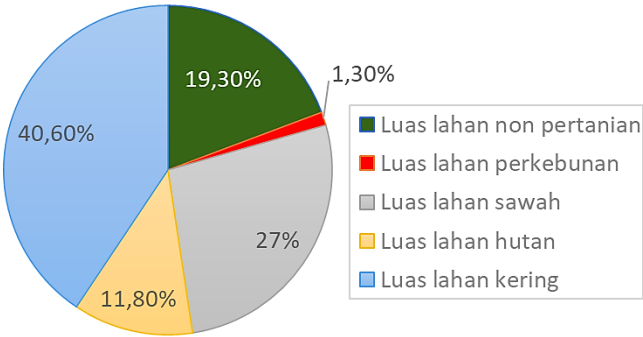
Gambar 2.2
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Untuk tahun 2020, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 40,6% lahan kering, 27% lahan sawah, 19,3% lahan non pertanian, 11,8% lahan hutan, dan 1,3%. Di tahun ini terjadi perubahan luas penggunaan lahan, dimana luas permukiman dan perkebunan masing-masing meningkat sebesar 5,81% dan 2,14%. Di sisi lain, luas lahan perikanan dan sawah justru berkurang sebesar 11,92% dan 14,37%. Sedangkan lahan hutan di Kabupaten Bekasi pada tahun yang sama berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari hutan rakyat seluas 915 Ha dan kawasan hutan negara seluas 9.666,91 Ha, yang terbagi kembali menjadi hutan lindung seluas 4.772,11 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 4.894,81 Ha.

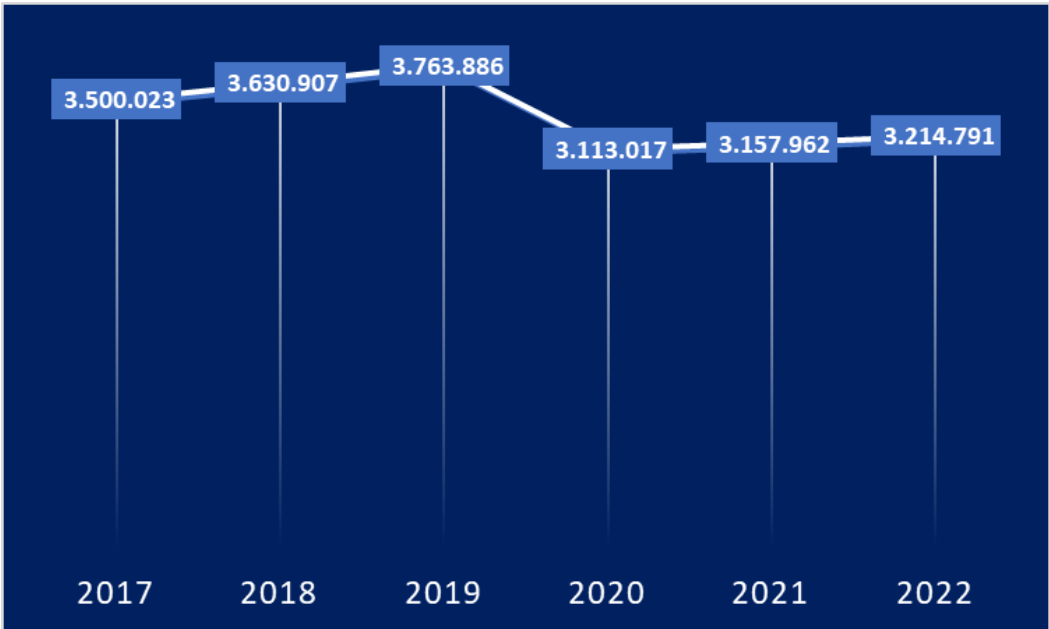
Gambar 2.3
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020



Sumber: [https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan/2020/jawa-barat/kabupaten - bekasi](https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan/2020/jawa-barat/kabupaten-bekasi)

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi dengan peningkatan penduduk terjadi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yakni dari sebanyak 3.500.023 jiwa di tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 3.763.886 jiwa di tahun 2019. Jumlah ini menurun menjadi sebanyak 3.113.017 di tahun 2020 yang disinyalir terjadi akibat adanya kebijakan *work from home* maupun PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil atau gulung tikar, juga yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Penduduk di Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 3.157.962 jiwa di tahun 2021 dan 3.214.791 jiwa di tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah-wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian. Untuk tahun 2022, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 431.547 jiwa dan kepadatan sebesar 10.012,69 jiwa/km, semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan kepadatan sebesar 9.990 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan jumlah

penduduk sebanyak 28.247 jiwa. Meski Kecamatan Bojongmangu merupakan kecamatan dengan penduduk paling sedikit, namun kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan 293,46 jiwa/km² akibat wilayahnya yang luas.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi
berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2022

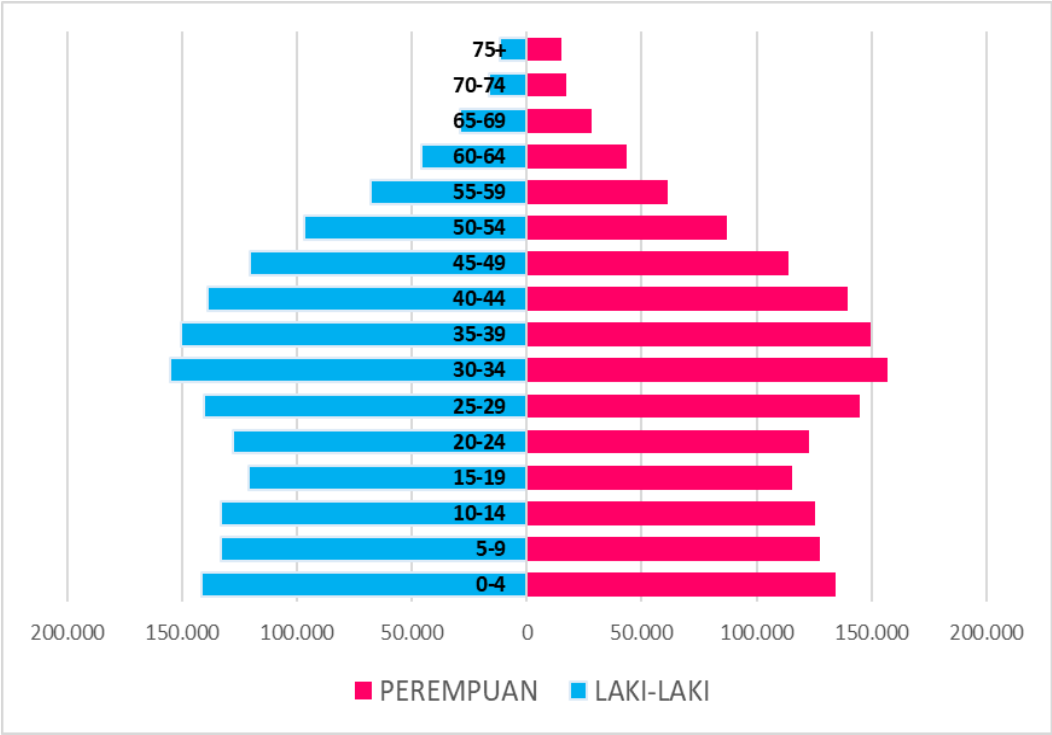
No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (ribu)			Kepadatan Penduduk (per km2)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Tambun Selatan	43,1	431,038	430,565	431,547	10.001	9.990	10.012,69
2.	Babelan	63,6	270,05	275,572	282,156	4.246	4.333	4.436,42
3.	Cibitung	45,3	242,557	246,602	251,562	5.354	5.444	5.553,25
4.	Cikarang Utara	43,3	228,937	230,645	233,15	5.287	5.327	5.384,53
5.	Cikarang Barat	53,69	205,333	205,372	206,105	3.824	3.825	3.838,80
6.	Tambun Utara	34,42	194,405	200,225	206,916	5.648	5.817	6.011,50
7.	Setu	62,16	173,656	180,46	188,163	2.794	2.903	3.027,08
8.	Cikarang Selatan	51,74	161,534	162,746	164,521	3.122	3.145	3.179,76
9.	Serang Baru	63,8	149,527	154,27	159,7	2.344	2.418	2.503,13
10.	Tarumajaya	54,63	132,756	134,698	137,129	2.430	2.466	2.510,14
11.	Karangbahagia	46,1	123,238	126,411	130,103	2.673	2.742	2.822,19
12.	Cikarang Timur	51,31	106,478	107,608	109,117	2.075	2.097	2.126,62
13.	Pebayuran	96,34	102,285	102,808	103,682	1.062	1.067	1.076,21
14.	Cibarusah	50,39	94,802	96,612	98,789	1.881	1.917	1.960,49
15.	Sukatani	37,52	93,491	95,694	98,28	2.492	2.550	2.619,40
16.	Kedungwaringin	31,53	69,437	70,636	72,098	2.202	2.240	2.286,65
17.	Cikarang Pusat	47,6	67,336	68,166	69,238	1.415	1.432	1.454,58
18.	Cabangbungin	49,7	55,488	56,048	56,805	1.116	1.128	1.142,96
19.	Sukakarya	42,4	52,016	52,819	53,816	1.227	1.246	1.269,25
20.	Sukawangi	67,19	49,649	50,115	50,757	739	746	755,42
21.	Tambelang	37,91	40,862	41,258	41,799	1.078	1.088	1.102,59
22.	Muaragembong	140,09	40,321	40,646	41,111	288	290	293,46
23.	Bojongmangu	60,06	27,821	27,986	28,247	463	466	470,31
	JUMLAH	1.230,78	3.113,02	3.157,96	3.214,79	2.444	1.644	2.523,62

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Dilihat dari proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bekasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 103,07 atau semakin turun bila dibandingkan tahun 2021 dan 2020 dengan nilai sebesar 103,14 dan 103,2. Rasio ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk wanita, terdapat 103 orang penduduk laki-laki atau secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bekasi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Walaupun lebih besar, namun jumlah antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bekasi tidak terpaut terlalu jauh atau cukup seimbang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.631.660 jiwa dan perempuan sebanyak 1.583.131 jiwa.

Sementara apabila dilihat dari kelompok usia, penduduk Kabupaten Bekasi di tahun 2022 sebagaimana tahun sebelumnya didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebanyak 2.302.126 jiwa atau sebanyak 71,61%, meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah sebelumnya sebanyak 2.258.518 jiwa. Sementara untuk usia non produktif memiliki proporsi sebesar 28,39% dengan jumlah sebanyak 912.665 jiwa, juga meningkat bila dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 899.444 jiwa. Adapun rasio ketergantungan untuk tahun 2022 adalah sebesar 39,64%, menurun dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 39,82%. Dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Bekasi menanggung 39-40 orang usia non produktif. Banyaknya usia produktif tersebut dapat menjadi potensi bila dimanfaatkan secara optimal mengingat Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri masih membutuhkan banyak sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun di sisi lain, bila tidak termanfaatkan maka akan menjadi beban daerah dalam pengangguran, kemiskinan, dan potensi meningkatnya kejahatan. Dengan rasio ketergantungan yang masih masuk ke dalam kategori rendah, penduduk usia produktif di Kabupaten Bekasi seyogyanya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya pengembangan dirinya untuk meningkatkan status ekonomi dan sosialnya di masyarakat.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2022



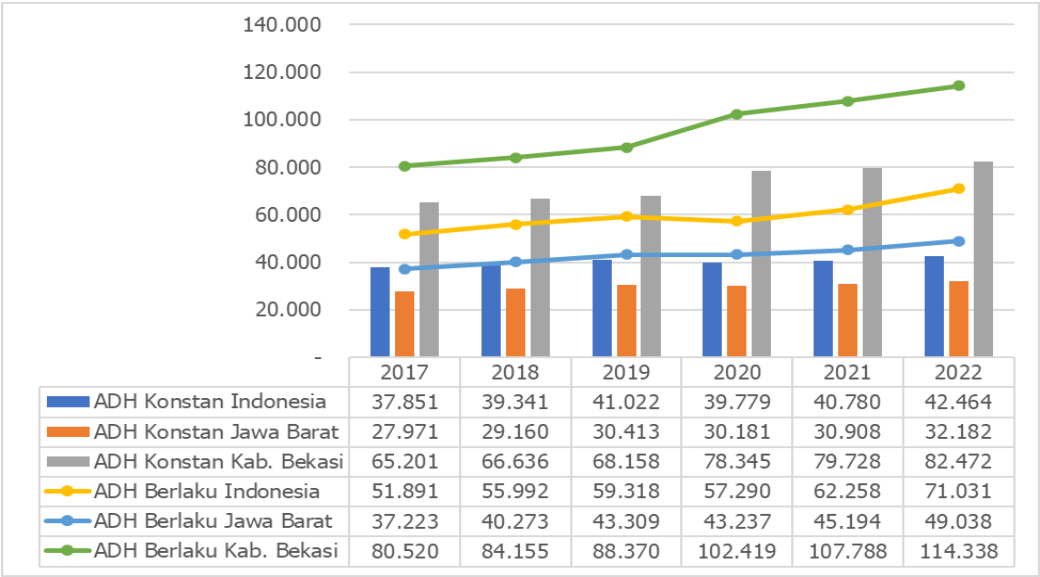
Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada aspek kesejahteraan, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bekasi di tahun 2022 sebagaimana tahun 2020 dan 2021 masih merupakan yang terbesar ke-2 di Jawa Barat setelah Kota Bandung, mengalahkan Kabupaten Karawang yang selama tahun 2017-2019 berada di urutan ke-2 terbesar untuk nilai PDRB per Kapita. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp.114.338.000,- meningkat dibandingkan 2021 dan 2020 dengan nilai sebelumnya masing-masing sebesar Rp.107.788.000,- dan Rp.102.419.000,-. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan yang meningkat ke angka Rp.82.472.000,- dibandingkan 2021 dan 2020 dengan nilai sebesar Rp.79.728.000,- menjadi sebesar Rp.78.345.000,-. Dibandingkan Jawa Barat dan nasional, PDRB per kapita Kabupaten Bekasi jauh di atas keduanya dan meski laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi di tahun 2020 menurun tajam akibat Covid-19, namun PDRB per kapita Kabupaten Bekasi tetap meningkat. Untuk lebih jelasnya, PDRB per kapita Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)

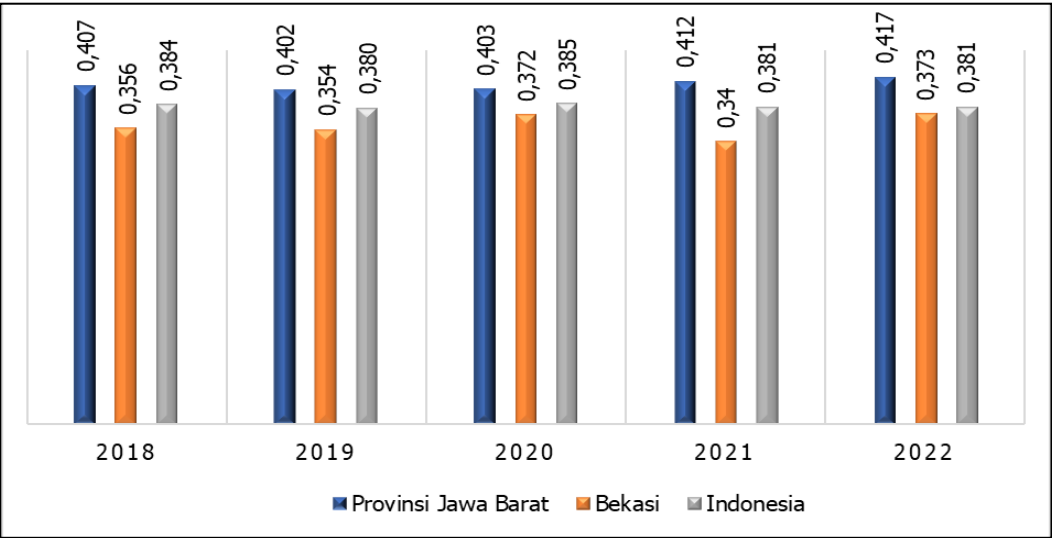


Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Pada gini ratio, nilai gini ratio Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2022 berada pada kisaran 0,34 sampai dengan 0,37 atau dalam kategori rendah, masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,4. Hal ini

menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Bekasi lebih kecil bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Bahkan ketika Covid-19 melanda Kabupaten Bekasi dan Indonesia di tahun 2020, gini ratio Kabupaten Bekasi hanya naik 0,018 poin ke angka 0,372 dari sebelumnya sebesar 0,354 di tahun 2019 dengan posisi masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat. Ketika kondisi ekonomi sedikit membaik di tahun 2021, gini ratio Kabupaten Bekasi pun ikut menurun ke angka 0,34 yang menunjukkan bahwa ketimpangan ikut berkurang sejalan dengan membaik perekonomian daerah. Sayangnya, angka gini ratio di Kabupaten Bekasi kembali meningkat ke angka 0,373 di tahun 2022. Peningkatan ini diduga terjadi akibat meningkatnya pengeluaran penduduk dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang ikut mendorong peningkatan harga barang lainnya, sementara pendapatan yang diterima oleh penduduk tetap. Walaupun demikian, dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat, gini rasio Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah gini rasio nasional dan Jawa Barat.

Gambar 2.7
Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

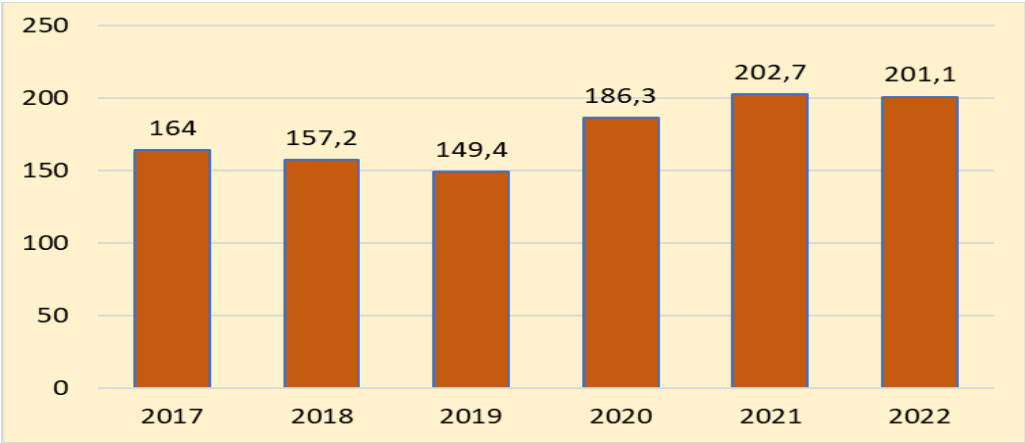


Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Adapun terkait dengan kemiskinan, posisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Bekasi tahun 2022 di Jawa Barat naik 1 peringkat dari ranking 8 ke ranking 7 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2021, yakni dari 202.700 jiwa menjadi sebanyak 201.100 jiwa. Urutan 1 sampai dengan 6 ditempati oleh Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, dan Indramayu. Penurunan jumlah penduduk miskin hampir dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, kecuali Kota Depok yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin dari jumlah penduduk miskin sebanyak 63.900 jiwa menjadi sebanyak 64.400 jiwa.

Adapun menurunnya ranking Kabupaten Bekasi disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang yang cukup signifikan di tahun 2022, yakni dari 210.800 jiwa menjadi sebanyak 199.900 jiwa.

Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022 (Ribuan Jiwa)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Meski demikian, bila dilihat dari persentase penduduknya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 berada pada posisi ke-4 terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2022, Kabupaten Bekasi masih berada pada urutan ke-4 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,01% atau turun sebesar 0,2% dibandingkan tahun 2021. Untuk tahun 2022, posisi pertama kabupaten/kota di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin terendah ditempati oleh Kota Depok dengan nilai sebesar 2,53%. Posisi ke-2 ditempati oleh Kota Bandung dengan 4,25%, dan posisi ke-3 ditempati oleh Kota Bekasi dengan 4,43%. Untuk lebih jelasnya, 10 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin terendah dapat dilihat melalui gambar berikut:

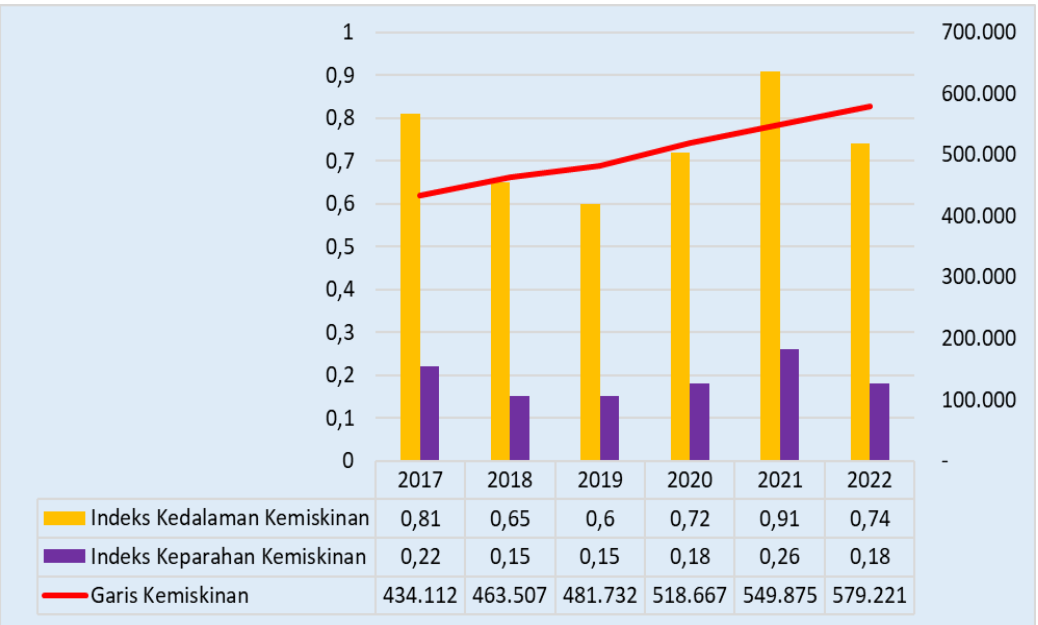
Gambar 2.9
10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin
Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.549.875/kapita/bulan menjadi Rp.579.221/kapita per bulan dengan terus meningkatnya harga komoditi makanan. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang meningkat di tahun 2020 dan 2021 akibat menurunnya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19, kembali menurun di tahun 2022 dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,74 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,18.

Gambar 2.10
Garis Kemiskinan serta Indeks Keparahannya dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022



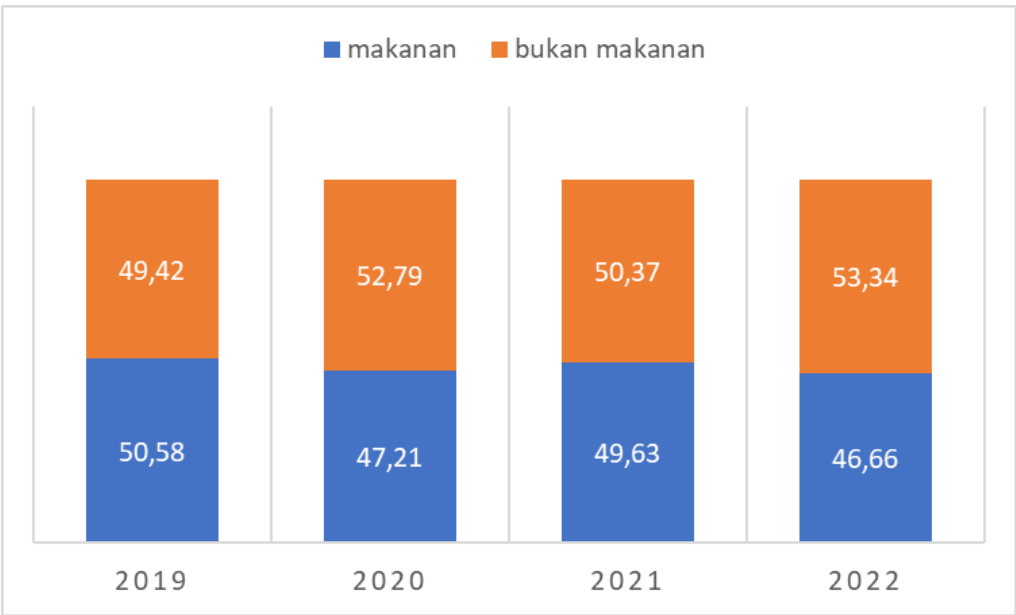
Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, pengeluaran untuk produk makanan semakin menurun, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, maka pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan semakin meningkat.

Selama tahun 2019-2022 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dipisahkan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan berfluktuasi. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan adalah sebesar 49,42%, jumlahnya meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 52,79% untuk turun kembali menjadi 50,37% di tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi sebesar 53,34% di tahun 2022. Sementara pengeluaran untuk kelompok makanan adalah sebesar 50,58% di tahun 2019, turun menjadi 47,21% di tahun 2020 akibat meningkatnya pengeluaran untuk non makanan, naik kembali menjadi 49,63% di tahun 2021

dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 46,66%. Berdasarkan proporsi pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk makanan dan bukan makanan yang hampir seimbang dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bekasi berada pada kelompok menengah.

Gambar 2.11
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2022



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2020-2023

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok makanan di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021, terjadi perubahan pola konsumsi makanan akibat di tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan konsumsi untuk makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, sayur-sayuran, telur dan susu, bahan minuman, serta bahan makanan lainnya. Sedangkan di tahun berikutnya, kecuali sayur-sayuran, bahan minuman dan bahan makanan lainnya, seluruhnya kembali mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat berubah ketika Covid-19 melanda, yakni masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman jadi yang lebih murah dan mudah didapat serta rokok dan tembakau, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat. Sementara dengan semakin baiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat, makanan dan minuman jadi serta rokok dan tembakau mulai kembali dikurangi yang dapat dilihat melalui peningkatan bahan makanan pokok seperti padi, sayur, ikan, daging, dan lainnya.

Untuk tahun 2022, kelompok makanan yang naik secara signifikan adalah daging, dari Rp.6.971/kapita/minggu menjadi Rp.10.304/kapita/minggu.

Sebagian besar rata-rata pengeluaran per kapita seminggu masing-masing kelompok makanan di Kabupaten Bekasi di tahun 2022 mengalami kenaikan, kecuali pada sayur-sayuran, telur dan susu, bahan minuman, serta bumbu-bumbuan.

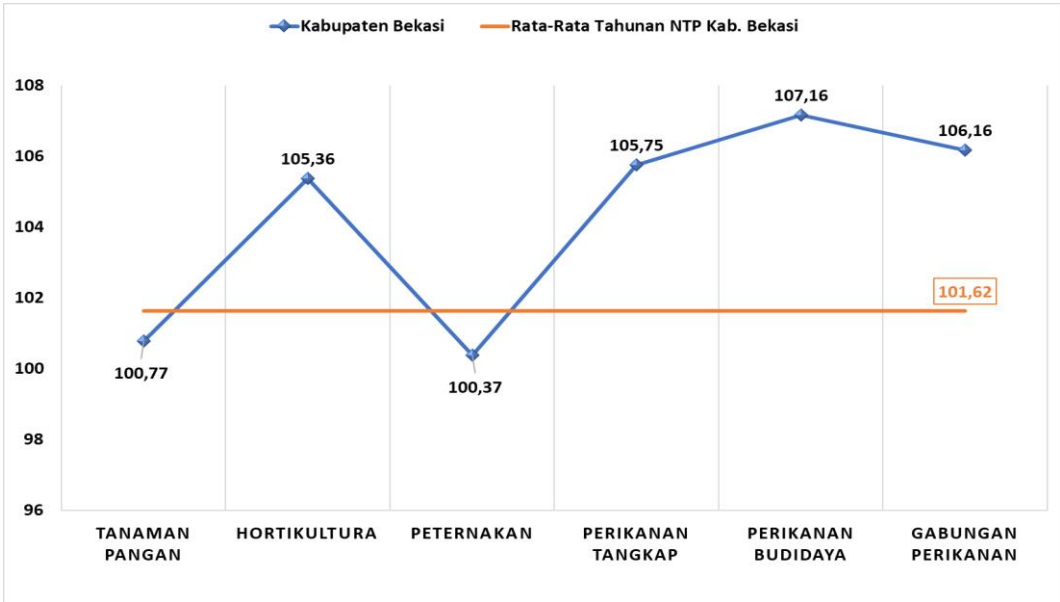
Tabel 2.3
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Minggu)

No.	Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Makanan dan Minuman Jadi	71.735	75.366	85.936	71.740	71.909
2.	Rokok dan Tembakau	17.642	17.617	20.589	19.203	19.668
3.	Sayur-Sayuran	10.685	11.838	11.941	17.126	15.250
4.	Padi-Padian	14.627	15.283	14.355	15.663	16.663
5.	Ikan	9.241	13.236	10.612	12.717	14.195
6.	Telur dan Susu	8.549	12.015	12.084	11.010	10.404
7.	Buah-Buahan	7.652	7.966	8.258	7.380	8.854
8.	Daging	6.149	8.157	6.808	6.971	10.304
9.	Bahan Minuman (Gula, Teh, Kopi dan Lainnya)	3.843	4.106	4.179	4.899	4.826
10.	Bahan Makanan Lainnya	2.615	2.989	3.451	4.199	4.312
11.	Bumbu-Bumbuan	2.763	2.967	2.963	4.109	4.060
12.	Minyak dan Kelapa	2.760	3.258	3.082	3.905	5.048
13.	Kacang-Kacangan	3.109	3.181	2.965	3.655	3.821
14.	Umbi-Umbian	942	1.364	926	1.392	1.739

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Khusus untuk petani di Kabupaten Bekasi, nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani menunjukkan angka positif di atas 100 selama tahun 2018-2020, yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani di Kabupaten Bekasi masih lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk biaya konsumsi dan produksi. Meskipun begitu, untuk tahun 2020 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi turun ke angka 101,62, yaitu turun sebesar 2,7 poin dibandingkan tahun 2019, dan turun sebesar 3,77 poin dibandingkan tahun 2018 akibat lesunya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19. Di antara sub sektor pertanian, petani yang menerima keuntungan terendah di tahun 2020 adalah peternak dengan nilai tukar petani sebesar 100,37 dan petani tanaman pangan dengan nilai sebesar 100,77.

Gambar 2.12
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)

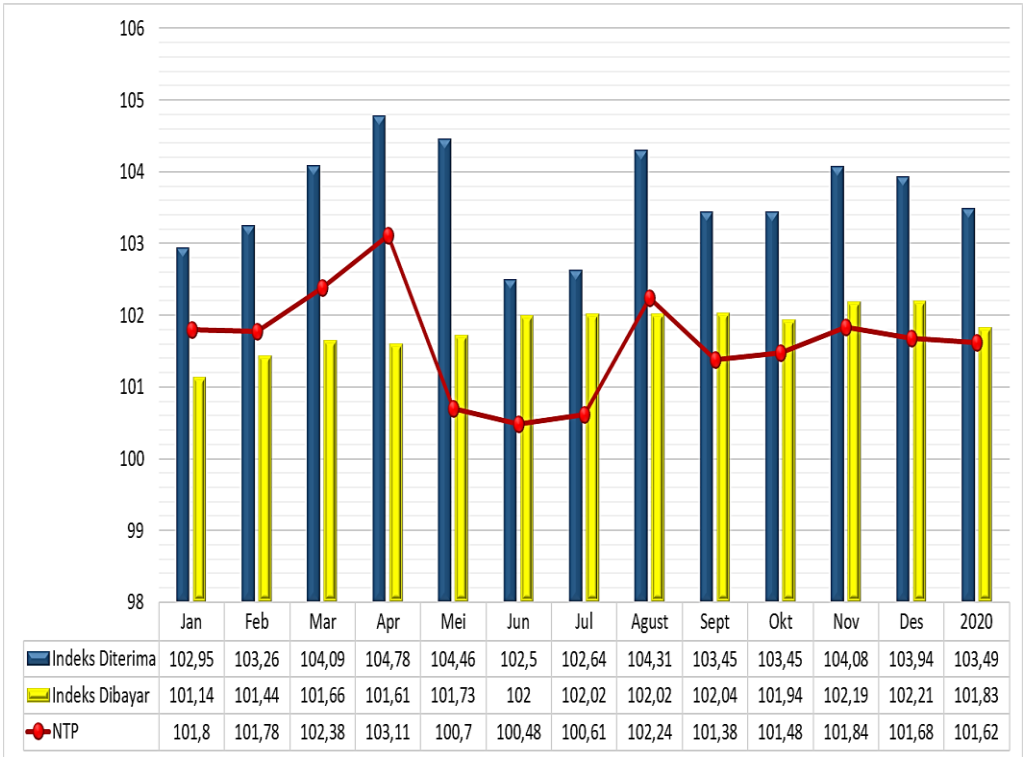


Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Sementara bila dilihat dari perkembangan bulanan di tahun 2020, dapat dilihat bahwa nilai tukar petani berfluktuasi setiap bulannya yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani tidak tetap setiap bulannya. Pendapatan tertinggi petani diterima di bulan April dengan nilai tukar petani sebesar 103,11, dan terendah di bulan Juni dengan nilai tukar petani sebesar 100,48. Fluktuasi nilai tukar petani salah satunya dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti musim kemarau misalnya, serta hari-hari besar keagamaan yang menyebabkan permintaan terhadap komoditas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan meningkat.

Pada momen seperti Ramadhan dan Idul Fitri, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk berkumpul meski di tengah terjangan Covid-19 telah membuat permintaan terhadap komoditas bahan makanan pokok meningkat meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan harga bahan makanan pokok dan sandang di bulan Ramadhan dan lebaran juga menyebabkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas terbiasa untuk membeli bahan kebutuhan pokok sebelum momen-momen tersebut yang menyebabkan permintaan ikut meningkat dan menaikkan harga-harga barang bahkan sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, yang pada akhirnya ikut menaikkan indeks yang diterima oleh petani. Untuk lebih jelasnya, indeks yang diterima, indeks yang dibayar, dan nilai tukar petani bulanan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 dapat dilihat melalui gambar berikut:

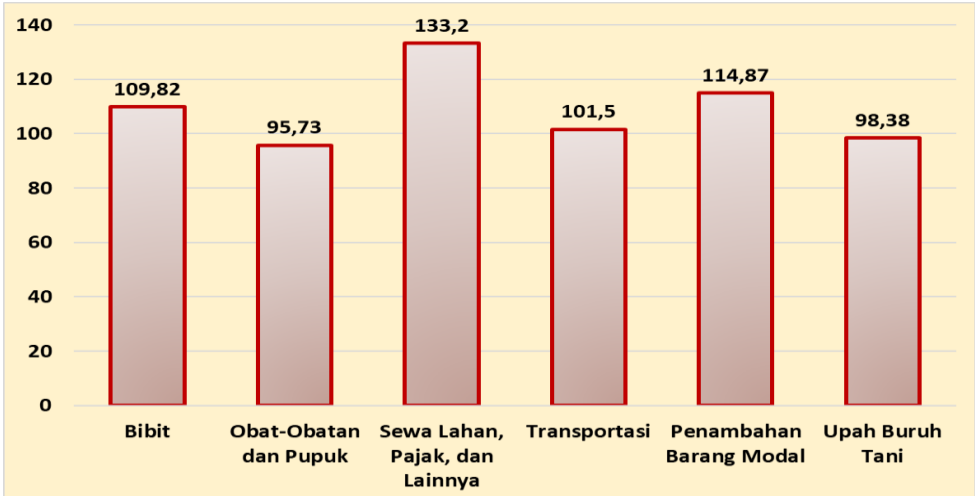
Gambar 2.13
Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Pada sisi pengeluaran, pengeluaran petani di tahun 2020 berdasarkan data BPS didominasi oleh biaya sewa lahan, pajak dan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran tertinggi lainnya didominasi oleh penambahan barang modal, bibit, dan transportasi. Sedangkan pengeluaran terendah yang dikeluarkan petani adalah pengeluaran untuk obat-obatan dan pupuk dengan besar masing-masing indeks sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)

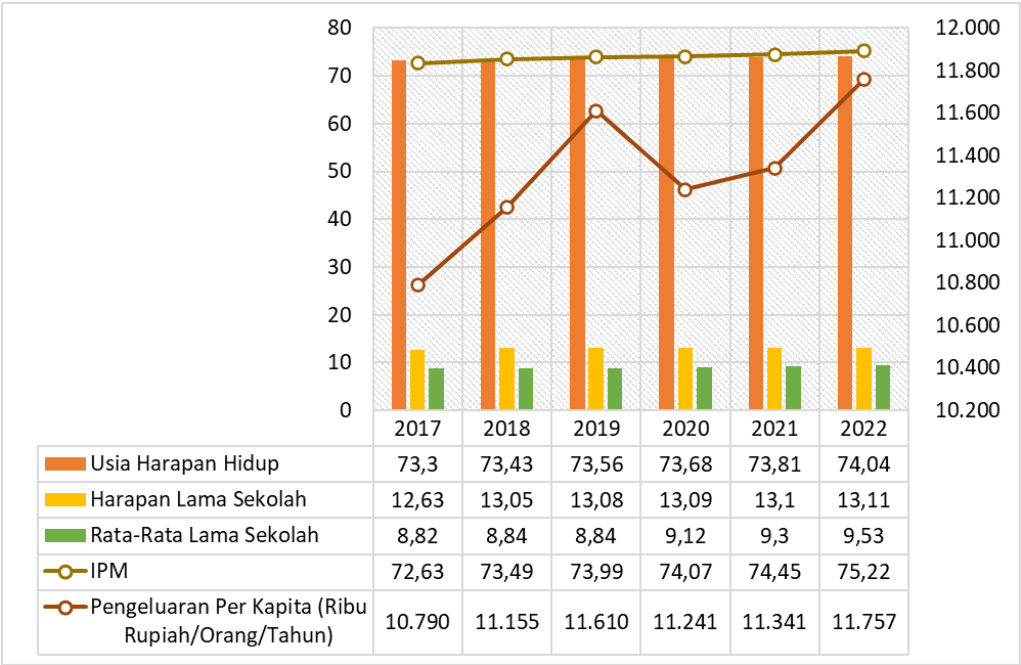


Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu dari 72,63 di tahun 2017 menjadi sebesar 75,22 di tahun 2022. Meskipun perekonomian daerah melambat di tahun 2020 akibat Covid-19, namun pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui nilai IPM Kabupaten Bekasi yang tetap meningkat ke angka 74,07 di tahun 2020 dan 74,45 di tahun 2021, dari sebelumnya sebesar 73,99 di tahun 2019. Dari seluruh komponen IPM, komponen yang mengalami penurunan di tahun 2020 adalah pengeluaran per kapita masyarakat, yang menurun dari Rp.11.610.000,-/orang/tahun menjadi Rp.11.241.000,-/orang/tahun. Dengan semakin membaiknya ekonomi daerah di tahun 2021 dan 2022, seluruh komponen IPM kembali meningkat, termasuk pengeluaran per kapita masyarakat yang naik sebesar Rp.100.000/orang/tahun di tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp.11.341.000,- dan kembali meningkat sebesar Rp.416.000/orang/tahun di tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp.11.757.000,-.

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi beserta Komponennya
Tahun 2017-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara khusus perempuan, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan tipis dari 88 di tahun 2017 menjadi 88,28 di tahun 2018 dan 88,68 di tahun 2019, menurun menjadi 88,58 di tahun 2020, meningkat kembali menjadi 88,88 di tahun 2021

dan 89,37 di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan IPG Jawa Barat dan Indonesia, capaian IPG Kabupaten Bekasi selama 6 tahun terakhir masih berada di bawah IPG Jawa Barat dengan nilai di tahun 2022 sebesar 89,80 dan Indonesia dengan nilai sebesar 91,63. Meski di bawah Jawa Barat dan Indonesia, namun rata-rata kenaikan nilai IPG Kabupaten Bekasi selama 6 tahun terakhir masih lebih baik, dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,274 poin. Sementara kenaikan IPG Jawa Barat hanya sebesar 0,124 poin, dan Indonesia sebesar 0,134 poin.

Sedangkan pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilainya yang sempat turun dari 57,16 menjadi 57,02 di tahun 2018 naik kembali di tahun 2019, 2020, dan 2021 menjadi sebesar 60,83 di tahun 2019, 62,46 di tahun 2020, dan 65,24 di tahun 2021. Nilai ini kembali turun menjadi sebesar 63,62 di tahun 2022 dengan menurunnya nilai komponen perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Selain itu, nilai indeks tersebut juga masih jauh di bawah IDG Jawa Barat dan Indonesia dengan nilai di tahun 2022 masing-masing sebesar 71,22 dan 76,59.

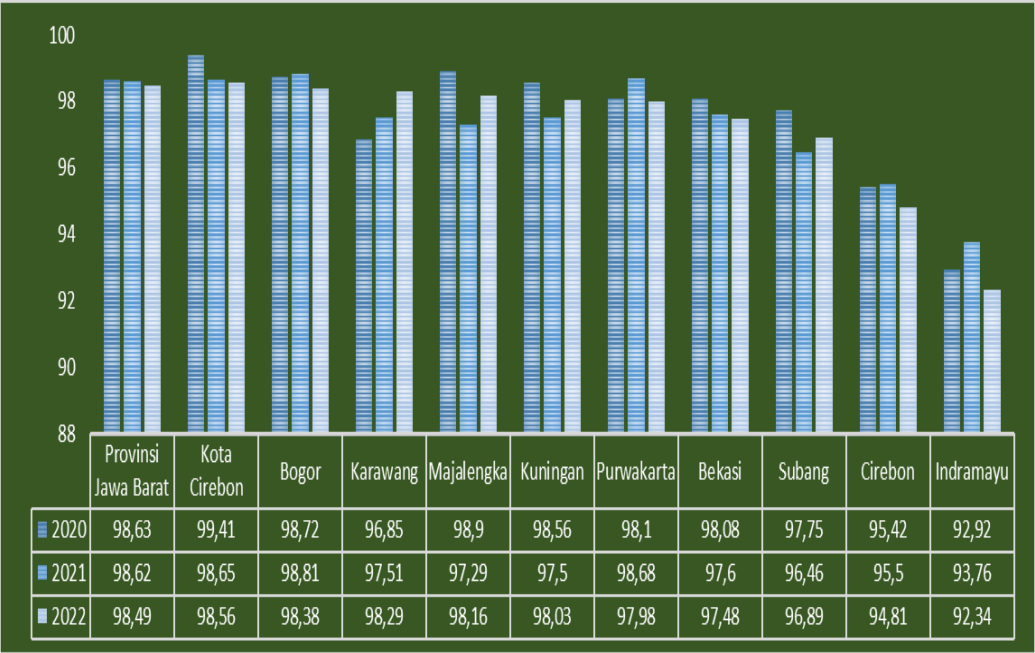
Tabel 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat
beserta Komponennya Tahun 2017-2022

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)			Perempuan Sebagai Tenaga Profesional			Sumbangan Pendapatan Perempuan			IDG		
	Indon esia	Provinsi Jawa Barat	Bekasi	Indon esia	Provinsi Jawa Barat	Bekasi	Indon esia	Provinsi Jawa Barat	Bekasi	Indon esia	Provinsi Jawa Barat	Bekasi
2017	17,32	22,00	12,00	46,31	41,60	43,22	36,62	29,45	24,18	71,74	70,04	57,16
2018	17,32	22,00	12,00	47,02	41,38	41,33	36,70	29,51	24,26	72,1	70,20	57,02
2019	20,52	20,00	16,00	47,46	41,55	37,44	37,10	29,94	24,39	75,24	69,48	60,83
2020	21,09	20,83	18,00	48,76	43,02	37,77	37,26	30,10	24,56	75,57	70,24	62,46
2021	21,89	20,83	20,00	49,99	45,35	42,63	37,22	30,04	24,43	76,26	70,62	65,24
2022	21,74	21,85	20,00	48,65	42,91	38,37	37,17	30,00	24,28	76,59	71,22	63,62

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Pada indikator kesejahteraan sosial lainnya, angka melek huruf Kabupaten Bekasi untuk tahun 2022 berada di urutan ke-4 terendah di Jawa Barat dengan angka melek huruf sebesar 97,48%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berada di bawah Jawa Barat dengan angka melek huruf sebesar 98,49%. Sementara kabupaten lainnya yang juga berada pada urutan terendah antara lain: Kabupaten Indramayu di urutan pertama dengan angka sebesar 92,34%, Kabupaten Cirebon dengan angka sebesar 94,81% di urutan ke-2, dan Kabupaten Subang dengan angka sebesar 96,89% di urutan ke-3.

Gambar 2.16
10 Kabupaten/Kota dengan Angka Melek Huruf Terendah di Jawa Barat

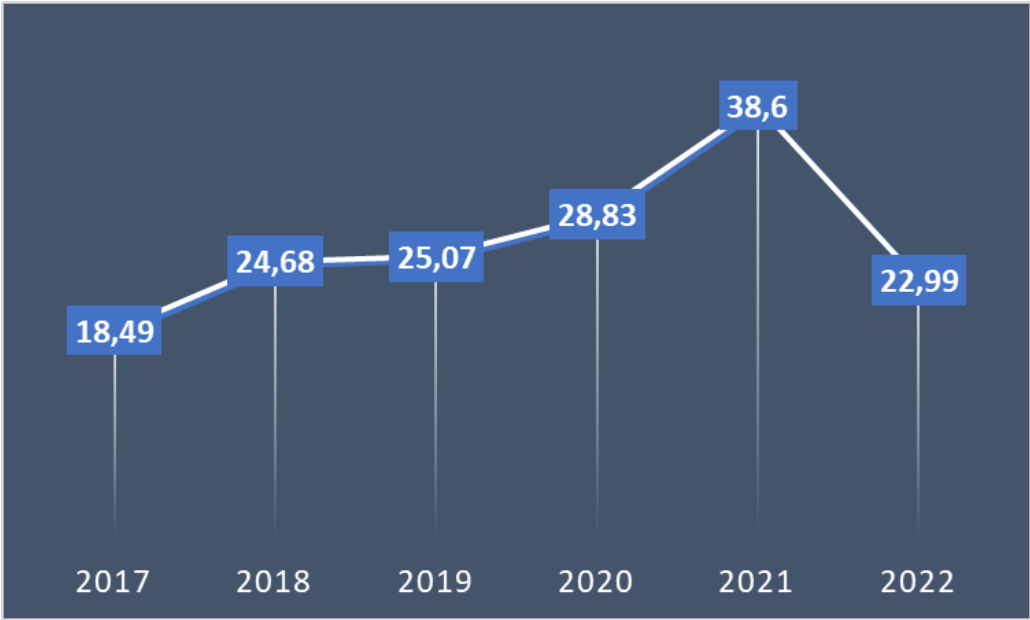


Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Meski derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi bila dilihat berdasarkan angka harapan hidup selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2017 berada pada angka 73,3 tahun, pada tahun 2021 berada pada angka 73,81 tahun dan 2022 pada angka 74,04 tahun, namun prevalensi stunting mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2021 dengan masing-masing menjadi sebesar 20,9% dan 21,5%. Angka ini menurun menjadi sebesar 17,8% dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan stunting. Meski demikian, kasus kematian bayi masih terjadi di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019, jumlah kasus yang terjadi adalah sebanyak 116 kasus, menurun di tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 112 kasus, dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan total kasus sebanyak 121 kasus.

Di samping itu, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama tahun 2017-2021 juga mengalami peningkatan. Di tahun 2017, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Bekasi hanya sebanyak 18,49%. Sedangkan di tahun berikutnya, persentase tersebut tumbuh menjadi 24,68 persen dan terus meningkat menjadi 38,6% di tahun 2021. Angka ini menurun di tahun 2022 dengan nilai sebesar 22,99%.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2022



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk yang dijamin dengan bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Pada tahun 2021, persentase penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan meningkat sebesar 5,66% menjadi 30,26%. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan PBI, maka jumlah penerima jaminan kesehatan daerah pun berkurang dari 32,37% menjadi 24,25% untuk mencegah terjadinya bantuan ganda kepada orang yang sama. Sayangnya persentase peserta jaminan kesehatan lainnya, yaitu non-PBI dan asuransi swasta juga mengalami penurunan di tahun 2021, yang diperkirakan disebabkan akibat kenaikan tarif BPJS di awal Januari serta *saving* yang dilakukan oleh masyarakat dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan pengalihan dana untuk membiayai pengeluaran lainnya yang meningkat akibat Covid-19. Pada tahun 2022, proporsi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berdasarkan jenis jaminan kesehatan kembali mengalami perubahan. Persentase penduduk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan menurun sebanyak 11,59% menjadi sebanyak 18,67%. Begitu pula pada penduduk non penerima yang juga menurun menjadi hanya sebanyak 22,98%. Sebaliknya, penduduk penerima Jamkesda justru mengalami kenaikan sebesar 26,42% menjadi sebanyak 50,67%.

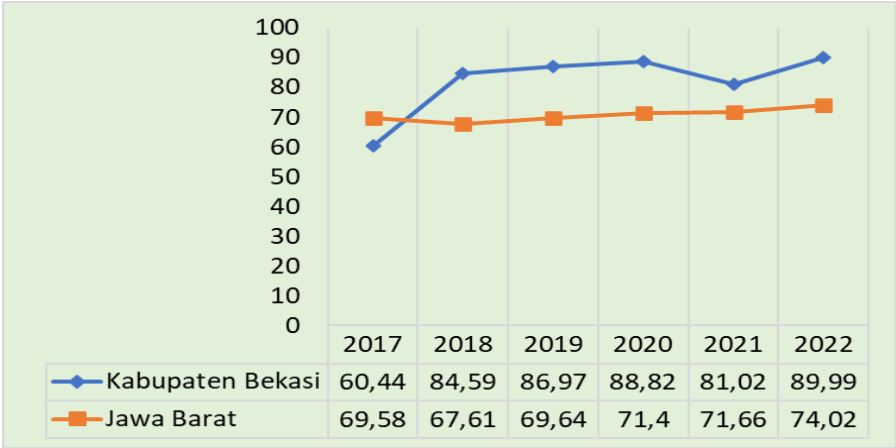
Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2022

No.	Jenis Jaminan	2020	2021	2022
1.	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	24,6	30,26	18,67
2.	BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)	34,08	34,02	22,98
3.	Jamkesda	32,37	24,25	50,67
4.	Asuransi Swasta	5,82	1,93	-
5.	Perusahaan/Kantor	8,38	8,38	-

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Sementara pada indikator penunjang kesehatan masyarakat lainnya, yakni sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 60,44% di tahun 2017 menjadi 88,82% di tahun 2020, justru mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 81,02%. Namun angka ini kembali kenaikan di tahun 2022 dengan nilai sebesar 89,99%. Dibandingkan dengan Jawa Barat secara keseluruhan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bekasi masih lebih besar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 2.18
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2022

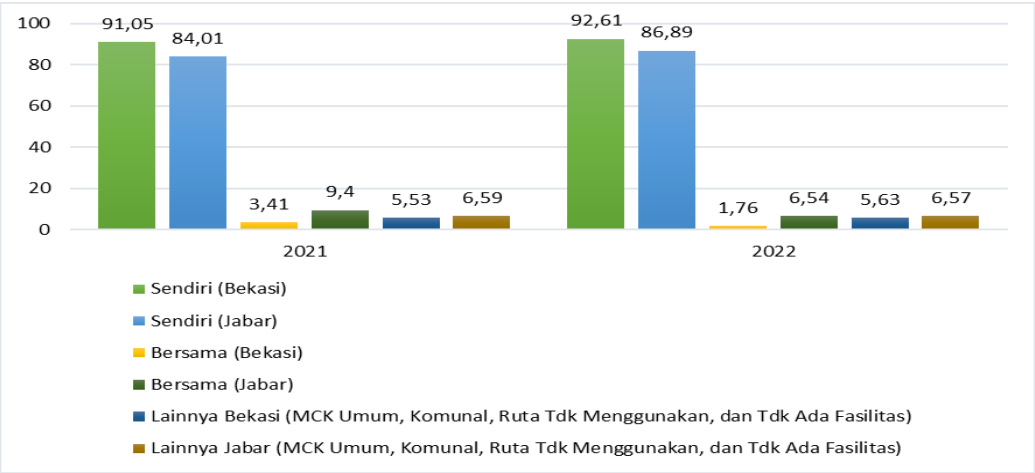


Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Sebagaimana halnya dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang mengalami kenaikan di tahun 2022, persentase rumah tangga yang telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri juga mengalami kenaikan dari 91,05% menjadi sebesar 92,61%. Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar Bersama mengalami penurunan dari 3,41% menjadi sebanyak 1,76%. Sedangkan yang menggunakan fasilitas lainnya (MCK umum, komunal, ruta tidak menggunakan

dan tidak ada fasilitas) yang seharusnya berkurang masih mengalami sedikit peningkatan di tahun 2022, dari 5,53% menjadi sebanyak 5,63%. Walaupun begitu, kondisi di Kabupaten Bekasi masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Jawa Barat secara keseluruhan.

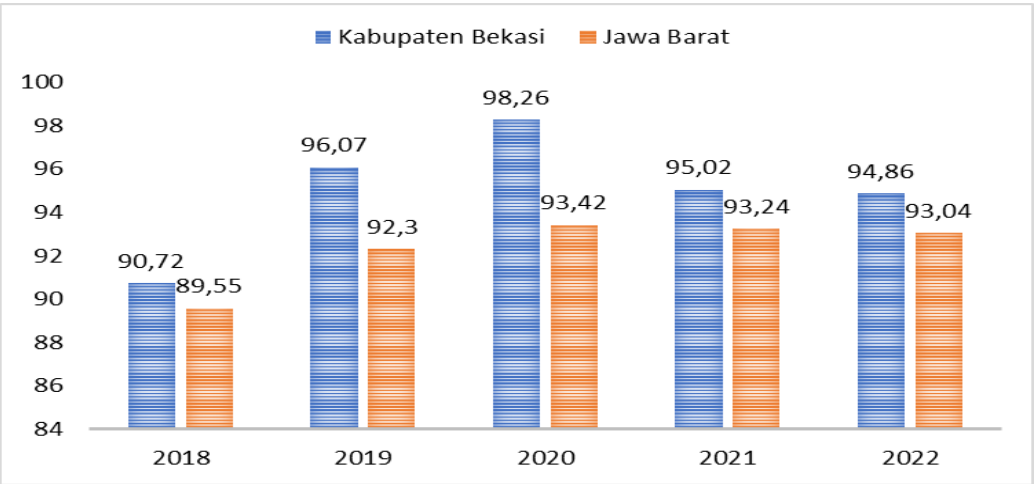
Gambar 2.19
Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Penurunan terjadi pada akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di tahun 2022. Dimana sebelumnya sempat meningkat dari 90,72% di tahun 2018 menjadi sebanyak 98,26% di tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir menjadi sebanyak 95,02% di tahun 2021 dan turun kembali menjadi sebanyak 94,86% di tahun 2022. Meski demikian, bila dibandingkan dengan Jawa Barat secara keseluruhan, kondisi di Kabupaten Bekasi masih lebih baik sebagaimana ditunjukkan dengan persentase yang masih lebih besar bila dibandingkan dengan Jawa Barat.

Gambar 2.20
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Adapun pada fokus kesejahteraan masyarakat desa yang diukur melalui indeks desa membangun (IDM), Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori berkembang dengan nilai IDM sebesar 0,7419, naik dibandingkan tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,6806. Pada tahun 2022, kategori IDM Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan menjadi maju dengan meningkatnya nilai IDM menjadi sebesar 0,7553. Di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, terdapat peningkatan status pada 3 kecamatan dari maju menjadi mandiri, antara lain: Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Selatan, dan Babelan sehingga terdapat 3 kecamatan yang masuk ke dalam kategori mandiri di tahun 2022. Sisanya yaitu sebanyak 14 kecamatan masuk ke dalam kategori maju, dan tersisa 5 kecamatan masuk ke dalam kategori berkembang. Untuk lebih jelasnya, IDM per kecamatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.6
Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2022

No.	Kecamatan	Capaian IDM				Status IDM 2022
		2019	2020	2021	2022	
1.	Tambun Selatan	0,8066	0,8474	0,8668	0,8953	Mandiri
2.	Cikarang Barat	0,7084	0,7104	0,7898	0,8464	Mandiri
3.	Cikarang Selatan	0,7574	0,7476	0,7971	0,8413	Mandiri
4.	Babelan	0,7489	0,6957	0,7207	0,8208	Mandiri
5.	Cikarang Pusat	0,7075	0,7049	0,7666	0,8101	Maju
6.	Cikarang Utara	0,6734	0,6885	0,7130	0,7896	Maju
7.	Tambun Utara	0,6534	0,6867	0,7038	0,7848	Maju
8.	Tarumajaya	0,6890	0,6997	0,7135	0,7753	Maju
9.	Kedungwaringin	0,6764	0,6704	0,6914	0,7721	Maju
10.	Karangbahagia	0,6781	0,6724	0,6916	0,7635	Maju
11.	Serang Baru	0,6937	0,7145	0,7150	0,7449	Maju
12.	Setu	0,6315	0,6560	0,6776	0,7424	Maju
13.	Cibitung	0,6189	0,6674	0,6880	0,7375	Maju
14.	Cibarusah	0,7377	0,7026	0,7105	0,7365	Maju
15.	Cikarang Timur	0,6653	0,6558	0,6558	0,7279	Maju
16.	Sukatani	0,6523	0,6814	0,6915	0,7172	Maju
17.	Cabangbungin	0,6526	0,6551	0,6635	0,7150	Maju
18.	Sukakarya	0,6416	0,6798	0,6958	0,7105	Maju
19.	Pebayuran	0,6667	0,6567	0,6530	0,6893	Berkembang
20.	Muaragembong	0,6575	0,6564	0,6608	0,6790	Berkembang
21.	Bojongmangu	0,6615	0,6638	0,6647	0,6758	Berkembang
22.	Tambelang	0,6361	0,6590	0,6590	0,6674	Berkembang
23.	Sukawangi	0,6954	0,6342	0,6419	0,6672	Berkembang
	Kabupaten Bekasi	0,6806	0,6881	0,7063	0,7553	Maju

Sumber: Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2022

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada seni dan budaya, jumlah bidang kesenian yang tercatat ada atau pernah ada selama tahun 2017-2021 adalah sebanyak 11 bidang kesenian, yakni

karawitan, kontemporer, lukis, pedalangan, pertunjukan, pertunjukan lainnya, rupa, sastra, tari, teater, dan musik. Pada tahun 2020, jumlah seniman terbanyak di Kabupaten Bekasi adalah seniman pertunjukan lainnya dengan jumlah sebanyak 2.813 orang. Sedangkan seniman terbanyak selanjutnya adalah seniman musik dengan jumlah sebanyak 1.590 orang. Pada tahun 2021, sebagian besar jumlah seniman tidak mengalami perubahan, kecuali pada bidang pertunjukan yang meningkat menjadi sebanyak 2.771 seniman, musik yang berkurang dari 1.590 seniman menjadi hanya sebanyak 161 seniman, dan pertunjukkan lainnya.

Tabel 2.7
Jumlah Seniman Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017, 2020, dan 2021

No.	Bidang Kesenian	2017	2020	2021
1.	Karawitan	55	80	80
2.	Kontemporer	300	-	-
3.	Lukis	10	-	-
4.	Pedalangan	300	503	503
5.	Pertunjukan	1.530	-	2.771
6.	Rupa	10	-	-
7.	Sastra	25	20	20
8.	Tari	100	330	330
9.	Teater	30	30	30
10.	Pertunjukan Lainnya	-	2.813	-
11.	Musik	-	1.590	161
	Jumlah	2.360	5.366	3.895

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Sejalan dengan penambahan jumlah seniman di Kabupaten Bekasi, jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 juga mengalami penambahan dari 198 organisasi di tahun 2017 menjadi 216 organisasi di tahun 2020. Di 2021, organisasi kesenian di Kabupaten Bekasi kembali meningkat jumlahnya dengan penambahan organisasi musik sebanyak 2 organisasi menjadi total keseluruhan sebanyak 218 organisasi. Organisasi terbanyak adalah organisasi musik dengan jumlah sebanyak 161 organisasi, sedangkan bidang pertunjukan dengan jumlah seniman terbanyak justru tidak memiliki organisasi. Sementara di bidang sejarah, tercatat hanya terdapat 1 organisasi sejarah di Kabupaten Bekasi di tahun 2021, tidak bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 2.8
Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017, 2020, dan 2021

No.	Bidang Kesenian	2017	2020	2021
1.	Karawitan	11	4	4
2.	Musik	47	159	161
3.	Pedalangan	15	17	17

No.	Bidang Kesenian	2017	2020	2021
4.	Pertunjukan	102	0	0
5.	Rupa	5	0	0
6.	Sastra	5	2	2
7.	Tari	10	33	33
8.	Teater	3	1	1
	JUMLAH	198	216	218

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Pada bidang olahraga, jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 23 unit dari sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 99 unit. Sedangkan jumlah lembaga pengelola olahraga hingga tahun sejak tahun 2017 tidak mengalami penambahan yaitu sebanyak 1 lembaga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Keempat belas indikator tersebut terdiri dari:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Mutu pelayanan di Kabupaten Bekasi dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 76,61 – 88,30. Selama tahun 2018-2021, mutu pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Bekasi secara umum dikategorikan baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai yang tercapai sebesar 76,7 meningkat menjadi 79,78 di tahun 2019, 80,03 di tahun 2020, dan 83,04 di tahun 2021.

Demikian halnya di tahun 2022. Berdasarkan pengukuran sampel terhadap 5 perangkat daerah, 5 kecamatan, dan puskesmas, mutu pelayanan di Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata IKM sebesar

89,97. Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan ke depannya untuk seluruh perangkat daerah. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

No.	Perangkat Daerah	2018		2019		2020		2021		2022	
1	2	3		4		5		6		7	
1	Kecamatan Sukawangi	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,22	Baik	96,13	Sangat Baik
2	Kecamatan Cikarang Barat	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,46	Baik	95,89	Sangat Baik
3	Kecamatan Sukatani	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	87,78	Baik	95,85	Sangat Baik
4	Kecamatan Tambun Utara	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,08	Baik	95,08	Sangat Baik
5	Dinas Lingkungan Hidup	76,67	Baik	81,01	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	90,35	Sangat Baik
6	Kecamatan Sukakarya	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	78,35	Baik	89,36	Sangat Baik
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,56	Baik	83,22	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	87,1	Baik
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,03	Baik	78,19	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	86,09	Baik
9	Dinas Ketenagakerjaan	80,97	Baik	80,69	Baik	79,18	Baik	86,17	Baik	85,96	Baik
10	Dinas Perdagangan	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	84,57	Baik	87,68	Baik	84,13	Baik
11	Puskesmas	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,72	Baik
12	Kecamatan Bojongmangu	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	95,19	Sangat Baik	-	Tidak dihitung
13	Kecamatan Setu	70,39	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	87,83	Baik	-	Tidak dihitung
14	Kecamatan Tarumajaya	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	86,34	Baik	-	Tidak dihitung
15	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	86,29	Baik	-	Tidak dihitung
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	Tidak dihitung	83,53	Baik	79,54	Baik	85,84	Baik	-	Tidak dihitung
17	Kecamatan Cabangbungin	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	85,62	Baik	-	Tidak dihitung
18	Kecamatan Tambun Selatan	73,86	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	85,44	Baik	-	Tidak dihitung
19	Dinas Kesehatan	80,97	Baik	-	Tidak dihitung	82,14	Baik	85,35	Baik	-	Tidak dihitung
20	Kecamatan Cikarang Utara	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,73	Baik	-	Tidak dihitung
21	Kecamatan Serang Baru	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,69	Baik	-	Tidak dihitung
22	Kecamatan Kedungwaringin	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,8	Baik	-	Tidak dihitung
23	Kecamatan Cikarang Selatan	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,59	Baik	-	Tidak dihitung
24	Kecamatan Cibirusah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,54	Baik	-	Tidak dihitung
25	Dinas Pemadam Kebakaran	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,56	Baik	81,26	Baik	-	Tidak dihitung

No.	Perangkat Daerah	2018		2019		2020		2021		2022	
1	2	3		4		5		6		7	
26	Kecamatan Muaragembong	67,5	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,56	Baik	-	Tidak dihitung
27	Kecamatan Karangbahagia	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,22	Baik	-	Tidak dihitung
28	Kecamatan Cikarang Pusat	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,96	Baik	-	Tidak dihitung
29	Kecamatan Cikarang Timur	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,72	Baik	-	Tidak dihitung
30	Kecamatan Babelan	70,5	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,67	Baik	-	Tidak dihitung
31	Kecamatan Cibitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,66	Baik	-	Tidak dihitung
32	Dinas Pendidikan	63,08	tidak Baik	-	Tidak dihitung	82,74	Baik	77,94	Baik	-	Tidak dihitung
33	Dinas Perhubungan	-	Tidak dihitung	69,81	Kurang Baik	70,78	Kurang Baik	73,74	Kurang Baik	-	Tidak dihitung
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	74,25	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
35	Badan Pendapatan Daerah	79,24	Baik	82,47	Baik	83,24	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,26	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
37	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	74,94	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,67	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,39	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
40	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	74,92	Kurang Baik	76,92	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
41	Dinas Sosial	82,22	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
42	RSUD Cabangbungin	89,44	sangat Baik	79,86	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
43	RSUD Cibitung	81,22	Baik	82,08	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
44	Kecamatan Pebayuran	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
45	Kecamatan Tambelang	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
	Nilai Rata-Rata IKM	76,7	Baik	79,78	Baik	80,03	Baik	83,04	Baik	89,97	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2023

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga telah dilakukan pengukuran terhadap pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian target standar pelayanan minimal Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PENDIDIKAN																			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar	Seluruh WNI Usia 7- 15 tahun	344.307	382.026	90%	509.761	509.761	100%	534.035	486.761	110%	530.779	516.276	103%	539.409	554.602	102,82%	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Seluruh WNI Usia 7- 18 tahun	-	-	0%	4.777	486.195	1%	4.956	65.925	8%	2.877	20.768	14%	10.394	5.542	53,32%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Seluruh WNI Usia 5-6 tahun	130.101	188.007	69%	97.268	97.268	100%	58.168	106.646	55%	76.788	113.492	68%	114.571	98.364	85,85%	
URUSAN KESEHATAN																			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil																	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	75.278	81.869	92%	83.495	83.495	100%	81.956	85.125	96%	80.437	80.374	100%	82.661	82.661	100,00%	
2	Pelayanan Kesehatan Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan																	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	75.278	78.148	96%	79.700	79.700	100%	78.956	81.255	97%	76.721	76.720	100%	78.903	78.903	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																	
		Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	75.278	78.148	96%	78.677	78.677	100%	78.014	77.386	101%	76.801	73.067	105%	75.146	75.146	100,00%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar																	
		Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	308.272	274.681	112%	375.959	375.959	100%	270.988	383.886	71%	280.587	271.420	103%	363.119	310.275	85,45%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	70.225	74.681	94%	109.535	109.535	100%	79.090	109.535	72%	463.161	478.449	97%	478.449	478.449	100,00%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																	
		Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	422.494	1.736.626	24%	1.434.711	1.434.711	100%	377.667	1.727.486	22%	546.161	1.921.655	28%	2.010.459	656.498	32,65%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																	
		Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	87.057	106.287	82%	215.118	215.118	100%	179.116	232.477	77%	243.508	251.690	97%	269.548	240.897	89,37%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar																	
		Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	49.296	767.771	6%	529.954	529.954	100%	53.994	484.801	11%	62.507	658.978	9%	699.765	93.107	13,31%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																	
		Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	16.901	36.561	46%	129.108	129.108	100%	20.173	180.655	11%	25.171	37.185	68%	38.392	35.628	92,80%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar																	
		Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.042	1.102	95%	8.845	8.845	100%	2.567	5.267	49%	2.520	4.032	63%	4.232	2.799	66,14%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar																	
		Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	23.381	23.381	100%	4.932	4.932	100%	8.366	42.648	20%	8.247	37.909	22%	39.968	21.347	53,41%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar																	
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	4.746	5.173	92%	13.039	13.039	100%	10.352	16.795	62%	9.280	9.303	100%	93.586	16.872	18,03%	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																			
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari																	
		Jumlah total warga negara yang terlayani	jumlah total warga negara yang harus terlayani	594.364KK	707.600K	84%	972.549KK	972.549KK	100%	714.342 rumah tangga	860.321 rumah tangga	83%	417.596 rumah tangga	958.401 rumah	44%	958.401	828.655	86,46%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh Pelayanan Pengolahan air limbah domestik																	
		Jumlah total warga negara yang terlayani	jumlah total warga negara yang harus terlayani	559.354KK	707.600K	79%	324KK	972.549 KK	0,033%	40.431 rumah	72.771 rumah	56%	19.448 warga negara	3.022.787 warga negara	1%	958.372	927.285	96,76%	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT																			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	100%	100%	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah yang direhabilitasi	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	100%	100%	100,00%	
URUSAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	2.640.570	2.750.000	96%	1.750	1.750	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	3.022.787	3.022.787	100,00%	
2	Pelayanan Perda dalam semua aktivitas	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas	Jumlah warga terlayani	2.640.570	2.998.000	88%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi Tahun 2021	-	-	0%	2.640.570	2.640.570	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	3.147.268	3.147.268	100,00%	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi yang berada di kawasan rawan bencana	-	-	0%	2.640.570	2.640.570	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	3.147.268	3.147.268	100,00%	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah keseluruhan korban bencana di kabupaten Bekasi	-	-	0%	711.063	711.063	100%	266.948	266.948	100%	102.134	102.134	100%	70.762	70.762	100,00%	
6	Layanan Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Waktu tanggap (respon time) penanganan penanggulangan kebakaran	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dalam 12 Bulan	27Menit	30Menit	90%	-	-	0%	-	-	0%	18menit	18menit	100%	15menit	17menit	88,24%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Layanan pelaksanaan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	-	-	0%	1.920	1.920	100%	588	588	100%	446	446	100%	441	441	100,00%	
8	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	Jumlah wilayah bencana kebakaran	307 Kejadian	192 Kejadian	160%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
		Jumlah Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	281	286	98%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
		Jumlah mobil pemadam	Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	22	106	21%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
URUSAN SOSIAL																			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	1.865	2.213	84%	895	895	100%	669	669	100%	664	664	100%	970	970	100,00%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah anak terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	624	7.202	9%	543	543	100%	522	522	100%	1.173	1.173	100%	554	554	100,00%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang berhak Mendapatkan rehabilitasi sosial	470	20.744	2%	310	310	100%	350	350	100%	3.644	3.644	100%	490	490	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			2022			Ket.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Jumlah tunasosial yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	456	1.621	28%	75	75	100%	50	50	100%	226	226	100%	289	289	100,00%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1.600	1.600	100%	-	-	0%	1.566	1.566	100%	168.333	168.333	100%	29	29	100,00%	
6	Rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan dan bencana sosial	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial yang mendapatkan layanan dukungan psikososial	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial berhak mendapatkan rehabilitasi	825	870	95%	975	975	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

Dari 6 urusan dengan standar pelayanan minimal, urusan kesehatan merupakan yang terendah dengan capaian sebesar 70,93%. Hal ini terjadi karena adanya 3 pelayanan dasar yang capaiannya di bawah 50%, yaitu: pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian sebesar 32,65%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian sebesar 13,31%, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan capaian sebesar 18,03%. Pada urusan Pendidikan dengan capaian SPM sebesar 80,66%, pelayanan yang masih harus ditingkatkan adalah pendidikan kesetaraan dengan capaian di 2022 hanya sebesar 53,32%.

Dalam penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Bekasi hingga tahun 2022 masih ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan capaian target tidak maksimal. Meski demikian, perangkat daerah pelaksana telah melakukan solusi upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, antara lain sebagai berikut:

I. Bidang Urusan Pendidikan

1) Pendidikan Kesetaraan

Permasalahan : latar belakang dan kondisi sosial ekonomi warga yang rendah sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang putus sekolah juga rendah

Solusi : menyediakan kebutuhan anggaran yang mencukupi untuk operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga jangkauan layanan kepada masyarakat dapat diperluas lagi

2) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Permasalahan : masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung proses belajar mengajar seperti meja, kursi, peralatan laboratorium, alat peraga/praktek, buku tulis, dan alat belajar lainnya

Solusi : pengadaan mebeulair, peralatan dan perlengkapan belajar lainnya dianggarkan secara kontinyu dan bertahap setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas siswa dan pemenuhan layanan SPM di sekolah

II. Bidang Urusan Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Cakupan pelayanan dapat mencapai target dikarenakan:

- Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan KIA dan KB
- Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan KIA dan KB
- Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin, Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir
- Orientasi E-Kohort
- Buku KIA
- Pertemuan Pemanfaatan Maternal Neonatal
- Monitoring dan Evaluasi

Solusi:

Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin. Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin telah mencapai target, dikarenakan:

- Pembentukan Tim AMPSR
- SK Bupati tim teknis audit maternal neonatal
- Jaminan persalin bagi masyarakat tidak mampu
- Pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal
- Monitoring dan evaluasi

Solusi:

Masing-masing Puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah mencapai target dikarenakan:

- Orientasi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
- Orientasi kalakarya MTBS petugas Puskesmas
- Monitoring dan evaluasi

Solusi:

Masing-masing Puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2022 sebesar 85,45%, capaian tersebut sudah mencapai target, dikarenakan:

- Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak
- Pemantauan Pertumbuhan
- Pemberian Kapsul Vitamin A
- Pemberian ASI Eksklusif

Solusi:

Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 sebesar 100,00%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya capaian tersebut diantaranya:

- Pengembangan posyandu remaja
- Penguatan UKS/M
- Penjaringan kesehatan anak sekolah
- Pemberian tablet tambah darah remaja putri
- Pembinaan kader kesehatan remaja
- Buku saku kesehatanku
- Monitoring dan evaluasi

Solusi:

- Pemeriksaan kesehatan dengan metode google form
- Edukasi kesehatan dengan media aplikasi WhatsApp wali murid
- Melakukan penjaringan berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi.

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 sebesar 32,65%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk skrining usia produktif
- Kurangnya kegiatan di luar gedung seperti skrining di sekolah
- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan skrining lapangan (Posbindu)

Solusi:

- Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung skrining usia produktif
- Menggerakkan UPTD Kesehatan untuk lebih giat melakukan skrining di luar gedung

- Menggerakan UPTD Kesehatan untuk lebih gencar melakukan promosi kesehatan di masyarakat

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2022 sebesar 89,37%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut diantaranya:

- Belum aktifnya Komda Lansia (Komisi Daerah Lanjut Usia) sebagai wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Kabupaten
- Belum adanya regulasi yang mengatur kebijakan tentang upaya penanganan pada Lansia di Kabupaten
- Kesehatan pada lansia belum menjadi program prioritas

Solusi:

- Pembentukan Komda lansia di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan beberapa OPD terkait sebagai wadah untuk mengkoordinasikan dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan pada lansia.
- Adanya kebijakan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang peningkatan upaya kesehatan pada lansia di Kabupaten.
- Membangun dan mengembangkan kemitraan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan LP, LS, Lembaga Pendidikan, media dalam penyebaran informasi, lembaga profesi, dunia usaha dan pihak terkait.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Bekasi tahun 2022 jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 93.107 jiwa (13,31%). Capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya alat pemeriksaan tekanan darah di UPTD Kesehatan, baik untuk pemeriksaan di dalam maupun luar gedung
- Kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan secara rutin
- Kurangnya Kader terlatih untuk melakukan pelayanan kesehatan di Masyarakat

Solusi:

- Melakukan pengadaan alat pemeriksaan tekanan darah
- Menggerakan Kader Kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)

Jumlah penyandang DM di Kabupaten Bekasi tahun 2022 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35.628 jiwa (92,80%). Capaian ini dibawah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya alat pemeriksaan gula darah (stick gula darah)
- Kurangnya kesadaran penderita DM untuk melakukan pemeriksaan secara rutin
- Masih sedikit jumlah penderita DM yang datang ke Posbindu

Solusi:

- Melakukan pengadaan strip gula darah sesuai dengan sasaran yang ada
- Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan secara rutin
- Melakukan promosi tentang kegiatan Posbindu

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Bekasi tahun 2022 yaitu 2.799 jiwa (66,14%). Capaian tersebut kurang dari target karena:

- Pencatatan dan pelaporan di layanan puskesmas belum berjalan berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan dan kurangnya SDM Kesehatan Jiwa
- Kurang memenuhinya kebutuhan obat jiwa dari jumlah target
- Tidak adanya anggaran khusus penanganan ODGJ dan ODMK
- Tidak adanya pelaksanaan skrining deteksi dini langsung di masyarakat
- Tidak adanya layanan Klinik khusus jiwa di Puskesmas
- Tidak adanya psikolog di Puskesmas

Solusi:

- Adakan pelatihan training pelaporan dan pencatatan dan bimbingan teknis kesehatan jiwa
- Penggunaan anggaran untuk kebutuhan obat dan skinning
- Terlaksananya skrinning deteksi dini kesehatan jiwa di masyarakat
- Tersedianya klinik khusus jiwa di puskesmas
- Tersedianya psikolog di Puskesmas Kabupaten Bekasi

11) Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)

Adanya kenaikan capaian dari 21,75% di tahun 2021 naik menjadi 53,41% di tahun 2022, walaupun belum maksimal sampai 100% capaian dikarenakan:

- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan kasus TBC di semua fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit swasta (yang sudah MOU maupun yg belum MOU), DPM/klinik.
- Belum adanya Peraturan Bupati mengenai tata laksana TBC di Kabupaten Bekasi
- Kegiatan pencarian kasus TBC di puskesmas masih secara pasif
- Rendahnya capaian Investigasi kontak yang dilakukan oleh puskesmas dan kader

Solusi tindak lanjut kondisi di atas antara lain:

- Sosialisasi kembali ke semua fasilitas pelayanan kesehatan mengenai surat edaran wajib lapor kasus TBC
- Penyusunan Peraturan Bupati akan dilaksanakan tahun 2023
- Menekankan kepada seluruh puskesmas agar menganggarkan kegiatan ACF menggunakan dana BLUD
- Mengoptimalkan petugas kader dan mengalokasikan anggaran untuk melakukan investigasi kontak di setiap wilayah

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kabupaten Bekasi tahun 2022 tercapai (18,03%). Capaian belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan ada permasalahan, yaitu:

- Pencatatan dan pelaporan di layanan PDP dan konseling belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan
- Perubahan pencatatan dan pelaporan HIV dari SIHA 1.7 ke SIHA 2.1 yang memerlukan penyesuaian bagi layanan sehingga data belum valid.
- Belum adanya subkegiatan yang khusus menangani ODHIV
- Adanya kegiatan mobile vct yang di luar jam kerja layanan
- Adanya penurunan tes HIV baik yang akses kelayanan maupun secara mobile
- Belum adanya kolaborasi pentahelix (akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media) dengan mengambil

peran dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk peningkatan target SPM

- Masih sedikinya jumlah PDP (Perawatan dan pengobatan)
- Belum semua ibu hamil melakukan screening HIV
- WBP (warga binaan pemasyarakatan) belum melakukan screening HIV

Solusi tindak lanjut kondisi di atas antara lain:

- Melakukan OJT bagi layanan yang belum maksimal terhadap capaian SPM
- Melakukan supevisi ke layanan
- Pengajuan anggaran untuk pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Melakukan konfirmasi ketika mau VCT untuk populasi kunci di luar jam layanan
- Butuh penguatan SDM terkait HIV dan mendorong kerjasama dengan faskes swasta (SPKS) dalam melakukan screning HIV pada Ibu Hamil
- Pelibatan seluruh stakeholder pentaholix (akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media) terkait dalam upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif kegiatan lainnya dalam capaian SPM HIV di Kabupaten Bekasi
- Penambahan jumlah PDP di layanan (Perawatan dan pengobatan)
- Puskesmas melakukan MoU yang berlakukan dengan program HIV dalam rangka screening ibu hamil
- MoU program HIV antara Dinkes (Puskesmas) dengan Lapas kelas II B

III. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi terkait penerapan SPM pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- d. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.

- e. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- f. Belum tersedianya *database* yang akurat di setiap urusan.
- g. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.
- h. Kegiatan rutilahu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat miskin ekstrem dan stunting, tetapi tidak dialokasikan terhadap rumah korban bencana.

Sedangkan solusi yang dilakukan pihak pelaksana penerapan dan pencapaian SPM bidang ini di Kabupaten Bekasi, diantaranya:

- a. Berupaya untuk dapat menganggarkan dan mengalokasikan kegiatan SPM sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan Rutilahu
- c. Meningkatkan kualitas hidup bagi Masyarakat yang terdampak korban bencana di Kabupaten Bekasi.
- d. Perlunya penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait petunjuk teknis dan standar mutu penerapan SPM serta memperhatikan aspek konsep umum SPM, kriteria indikator, fokus area layanan, levelling indikator, penentuan target, serta mekanisme dan waktu pencapaian target SPM berdasarkan tipologi wilayah.

IV. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penyediaan dan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bekasi, antara lain:

- Terbatasnya aktivitas pelayanan penyedotan dan pengolahan air limbah di UPTD PALD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi akibat pandemi Covid-19. Beberapa kecamatan yang terletak di perbatasan menggunakan jasa layanan penyedotan dan pengolahan air limbah ke kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2022, UPTD PALD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi hanya melayani 16 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

- Masih tingginya angka BABS. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PHBS, terutama menyangkut limbah, serta rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pentingnya mendidik masyarakat untuk ber-PHBS.
- Masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten dan penegakannya sehingga terjadinya pelayanan penyedotan air limbah oleh kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
- Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat.
- Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah.
- Masih rendahnya tingkat pelayanan limbah terpusat.
- Terbatasnya pendanaan di tingkat kabupaten untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah sistem terpusat.
- Jumlah truk tinja yang belum memadai. Saat ini UPTD PALD hanya memiliki 6 unit truk tinja untuk melayani masyarakat se-Kabupaten Bekasi.
- Sistem pengolahan yang seharusnya sudah ditingkatkan dengan mempergunakan sarana penunjang yaitu mesin pengolahan yang lebih modern.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat melakukan pengolahan air limbah domestik.
- Sarana dan prasara penunjang di UPTD PALD masih belum memadai.

Solusi:

- Peningkatan peran dan fungsi tenaga kesehatan lingkungan sebagai agen perubahan perilaku menuju PHBS.
- Peningkatan fungsi puskesmas dan posyandu serta sekolah sebagai pusat informasi PHBS dan STBM.
- Peningkatan peran satuan perangkat daerah termasuk perangkat desa dalam implementasi PHBS dan STBM.
- Peningkatan peran dan fungsi Tim Penggerak PKK dalam mempromosikan PHBS dan STBM.
- Peningkatan peran sekolah dan pesantren dalam mempromosikan PHBS.

- Pemanfaatan media promosi berupa media sosial dan/atau advertising untuk sosialisasi PHBS.
 - Pemberian bantuan stimulan pengadaan jamban keluarga yang layak skala rumah tangga bagi keluarga tidak mampu.
 - Penyusunan dan penegakan regulasi di bidang pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Bekasi.
 - Revitalisasi dan optimasi kapasitas IPLT eksisting.
 - Penambahan dan perbaikan armada pengangkutan limbah tinja.
 - Pengawasan dalam peningkatan kualitas teknologi pengolahan limbah tinja pada IPLT.
 - Memisahkan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase.
 - Mendorong untuk mewajibkan pemasangan jaringan perpipaan air kotor skala permukiman bagi perumahan/permukiman baru yang terkoneksi dengan jaringan perpipaan air kotor skala kota yang aman.
 - Penyediaan sarana berupa IPALD dengan konsep cluster, dengan prioritas di permukiman padat perkotaan.
 - Penyusunan standar teknis dan SOP pengolahan air limbah pada IPALD dan IPLT, serta mekanisme pemeliharaan, dan quality control IPLTD dan IPLT.
 - Peningkatan kapasitas SDM teknis dalam pengelolaan air limbah.
 - Perbaikan dan pemeliharaan SPALD baik sistem setempat maupun terpusat, yang meliputi pemeliharaan rutin dan berkala.
 - Peningkatan kerjasama dengan lembaga swasta, NGO, dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.
- 2) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Permasalahan:
- Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
 - Masih terdapat perbedaan Indikator SPM dengan target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan Anggaran
 - Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
 - Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.

- Belum tersedianya *database* yang akurat terkait indikator capaian SPM.
- Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

Solusi:

- Berupaya untuk dapat menganggarkan dan mengalokasikan kegiatan SPM sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BUMD, UPT, UPTD dan Kelompok Masyarakat dalam pengumpulan data sehingga di peroleh data capaian SPM yang akurat.
- Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring terkait penerapan SPM sehingga target SPM 100 % dapat tercapai.

V. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan yang dihadapi terkait Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan penerapan SPM antara lain:

- Proses pengumpulan data sulit dilakukan karena kurangnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pendataan secara cepat dan valid, terutama pada saat terjadi dan pasca bencana
- Padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi berdampak pada banyaknya kegiatan yang tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga berakibat pada terhambatnya proses pengumpulan data penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana sulit dilakukan karena basis data informasi rawan bencana dan rencana kontijensi belum tersusun secara komprehensif
- Dalam penghitungan kebutuhan personil, banyaknya regulasi dan kebutuhan di lapangan berdampak pada sulitnya melakukan penghitungan logis kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi
- Dalam renstra, yang sudah termuat hanya indikator Standar Pelayanan Minimal sedangkan subindikator pendukungnya belum

termuat dalam indikator kegiatan sehingga pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan personil untuk pelayanan dasar Sub Urusan Bencana tidak dapat dianggarkan yang pada akhirnya membuat Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat menetapkan indikator SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertibam Umum menjadi indikator program/*outcome* karena dikhawatirkan akan membawa dampak pada penganggaran tahun 2022

- Kurangnya sarana dan prasarana operasional BPBD dan kurangnya SDM kebencanaan yang terlatih dan tersertifikasi menjadi kendala utama dalam pemberian layanan Sub Urusan Bencana Rasio pemenuhan barang/jasa dan personil anggota Satpol PP yang ada belum sesuai dengan jumlah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 sehingga dikhawatirkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak bisa mempertahankan kondisi zero korban terdampak Penegakan Perda dan Perkada di tahun-tahun berikutnya
- Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bekasi belum optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana karena kepala pelaksana BPBD masih dijabat oleh eselon III yang dimana seharusnya untuk kepala pelaksana BPBD harus eselon II sesuai dengan provinsi Jawa Barat

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan:

- Jumlah personil yang tidak memadai
- Jumlah personil yang terlatih khusus di bidang penanggulangan bencana masih sangat minim
- Anggaran yang belum sesuai kebutuhan
- Dukungan *stakeholder* terkait penanggulangan bencana masih belum optimal

Solusi:

- Pemenuhan sumber daya manusia yang memadai
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani bencana
- Pemenuhan anggaran yang sesuai kebutuhan

- Dukungan *stakeholder* dalam menangani bencana perlu dilibatkan dan berkontribusi
- 3) Dinas Pemadam Kebakaran
- Permasalahan yang dihadapi terkait layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran antara lain:
- Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari pos pelayanan pemadam kebakaran yang pada sampai saat ini baru memiliki 6 pos pemadam kebakaran selain dari kantor pemadam kebakaran
 - *Traffic Line* yang sulit di kendalikan
 - Kecilnya jalan-jalan yang di lalui oleh Kendaraan Pemadam
 - Kebakaran

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya (2023), telah dilakukan upaya berupa penambahan pos pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta karya, sebanyak 3 pos di Stadion Wibawa Mukti, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Serang Baru. Dengan dibangunnya tambahan Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, diharapkan respon time dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

VI. Bidang Urusan Sosial

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bekasi diantaranya:

- a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani.
- b. SDM dan sarana prasarana pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Sedangkan solusi yang dilakukan pihak pelaksana penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bekasi diantaranya:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS/PPKS;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS/PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS/PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Meningkatkan pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial

- d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS/PPKS.

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pada fokus urusan pendidikan, jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) selama tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan, dimana jumlah TK bertambah dari 632 sekolah menjadi sebanyak 661 sekolah, dan RA dari 330 sekolah menjadi sebanyak 390 sekolah. Begitu pula pada jumlah murid. Murid TK pada tahun 2021 bertambah dari 24.225 siswa menjadi sebanyak 24.876 siswa, sedangkan RA dari 12.507 siswa menjadi sebanyak 13.149 siswa. Sementara pada jumlah guru, meski jumlah TK dan murid TK mengalami penambahan di tahun 2021, namun jumlah guru TK justru mengalami penurunan dari 2.648 orang menjadi sebanyak 2.634 orang. Sedangkan pada RA, sejalan dengan penambahan jumlah RA dan murid RA jumlah guru RA juga mengalami kenaikan dari 1.397 orang menjadi sebanyak 1.697 orang. Sayangnya jumlah RA, guru, dan murid RA kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah RA menjadi sebanyak 331 sekolah, murid RA sebanyak 13.146 siswa, dan guru RA sebanyak 1.524 orang. Sedangkan pada TK, jumlah sekolah dan murid TK mengalami kenaikan di tahun 2022 meski jumlah guru TK kembali berkurang dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebanyak 2.323 orang.

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2020-2022

Uraian	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)			(3)			(4)		
TK	3	3	4	629	658	859	632	661	863
RA							330	390	331
Jumlah							962	1.051	1.194
Murid TK	270	277	N/A	23.955	24.599	N/A	24.225	24.876	31.426
Murid RA							12.507	13.149	13.146
Jumlah							36.732	38.025	44.572
Guru TK	33	32	N/A	2.615	2.602	N/A	2.648	2.634	2.323
Guru RA							1.397	1.697	1.524
Jumlah							4.045	4.331	3.847

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/> dan <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Pada tingkat sekolah dasar, jumlah Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 1.015 sekolah menjadi sebanyak 1.036 sekolah, sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 221 sekolah. Sementara pada

jumlah murid, murid SD juga mengalami penambahan dari 325.261 siswa menjadi sebanyak 334.593 siswa. Begitu pula pada murid MI yang bertambah dari 53.498 siswa menjadi sebanyak 56.718 siswa. Jumlah guru SD juga bertambah di tahun 2022 dari 14.522 orang menjadi sebanyak 14.786 orang. Sedangkan guru MI justru mengalami penurunan dari 3.077 orang menjadi sebanyak 2.973 orang meski jumlah muridnya bertambah.

Tabel 2.12
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2020-2022

Uraian	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)			(3)			(4)		
SD	708	710	714	279	305	322	987	1.015	1.036
MI	1	1	1	218	220	220	219	221	221
Jumlah	709	711	715	497	525	542	1.206	1.236	1.257
Murid SD	241.877	242.083	247.078	81.431	83.178	87.515	323.308	325.261	334.593
Murid MI	683	642	557	51.188	52.856	56.161	51.871	53.498	56.718
Jumlah	242.560	242.725	247.635	132.619	136.034	143.676	375.179	378.759	391.311
Guru SD	9.910	9.583	9.472	4.575	4.939	5.314	14.485	14.522	14.786
Guru MI	23	31	34	2.556	3.046	2.939	2.579	3.077	2.973
Jumlah	9.933	9.614	9.506	7.131	7.985	8.253	17.064	17.599	17.759

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Pada tingkat menengah pertama, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertambah dari 364 sekolah menjadi sebanyak 397 sekolah di tahun 2022. Demikian halnya pada jumlah murid SMP yang juga meningkat dari sebanyak 121.374 siswa menjadi sebanyak 122.346 siswa. Hal yang sama terjadi pada jumlah guru SMP yang ikut bertambah dari sebanyak 6.189 orang menjadi sebanyak 9.188 orang.

Berbanding terbalik dengan SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tahun 2022 justru mengalami penurunan meski jumlah MTs tetap, yakni dengan jumlah murid yang berkurang dari 53.727 siswa menjadi sebanyak 30.355 siswa, serta guru yang berkurang dari 2.869 orang menjadi sebanyak 2.585 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP lebih tinggi dibandingkan di madrasah pada tahun 2022.

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Madrasah Tsanawiyah (MT) Tahun 2020-2022

Uraian	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)			(3)			(4)		
SMP	98	98	110	240	266	287	338	364	397
MT	4	4	4	139	141	141	143	145	145
Jumlah	102	102	114	379	407	428	481	509	542

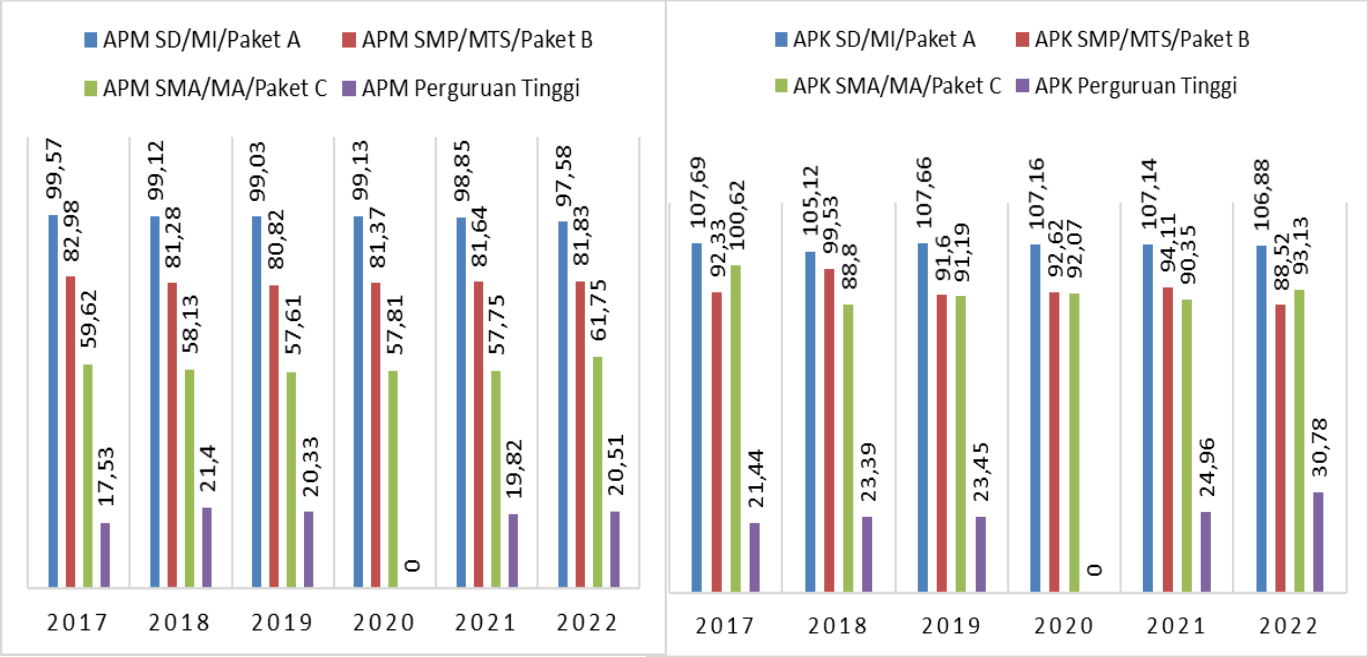
Uraian	Negeri			Swasta			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)			(3)			(4)		
Murid SMP	80.580	81.114	82.910	39.611	40.260	39.436	120.191	121.374	122.346
Murid MT	3.105	643	2.798	29.907	53.084	27.557	33.012	53.727	30.355
Jumlah	83.685	81.757	85.708	69.518	93.344	66.993	153.203	175.101	152.701
Guru SMP	3.380	3.421	2.917	2.626	2.768	6.271	6.006	6.189	9.188
Guru MT	197	262	204	2.249	2.607	2.381	2.446	2.869	2.585
Jumlah	3.577	3.683	3.121	4.875	5.375	8.652	8.452	9.058	11.773

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Selain itu, hal lain yang masih menjadi perhatian adalah angka partisipasi siswa. Angka partisipasi murni (APM) dan kasar (APK) siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 menunjukkan angka yang berfluktuasi. APM SD/MI/ sederajat menurun dari angka 99,12% di tahun 2018 menjadi 99,03% di tahun 2019. Kembali mengalami peningkatan ke angka 99,13% di tahun 2020, dan menurun lagi di tahun 2021 dan 2022 ke angka 98,85% dan 97,58%. APM SMP/MTs/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 80,82% di tahun 2019, namun kembali meningkat di tahun 2020, 2021, dan 2022 ke angka 81,37%, 81,64%, dan 81,83%. APM SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 57,61% di tahun 2019, meningkat ke angka 57,81% di 2020, kembali menurun ke angka 57,75% di tahun 2021, dan kembali meningkat di 2022 dengan nilai sebesar 61,75%.

Demikian halnya pada APK, nilai APK siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 berfluktuasi, dimana APK SD/MI/ sederajat di tahun 2019 berbanding terbalik dengan APMnya mengalami peningkatan ke angka 107,66%, meski kemudian kembali mengalami penurunan di 3 tahun berikutnya ke angka 107,16%, 107,14%, dan 106,88%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, sebagaimana dengan APMnya mengalami penurunan ke angka 91,6% di tahun 2019 untuk kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sebesar 92,62% dan 94,11%. APK SMP/MTs/ sederajat, kembali menurun di tahun 2022 dengan nilai sebesar 88,52%. Lebih lanjut di jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, APK tingkat pendidikan tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2017-2022, dari 88,8% di tahun 2018 menjadi 92,07% di tahun 2020, untuk kembali menurun di tahun 2021 dengan nilai sebesar 90,35%. APK SMA/SMK/MA/ sederajat kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan nilai sebesar 93,13% atau naik sebesar 2,78%.

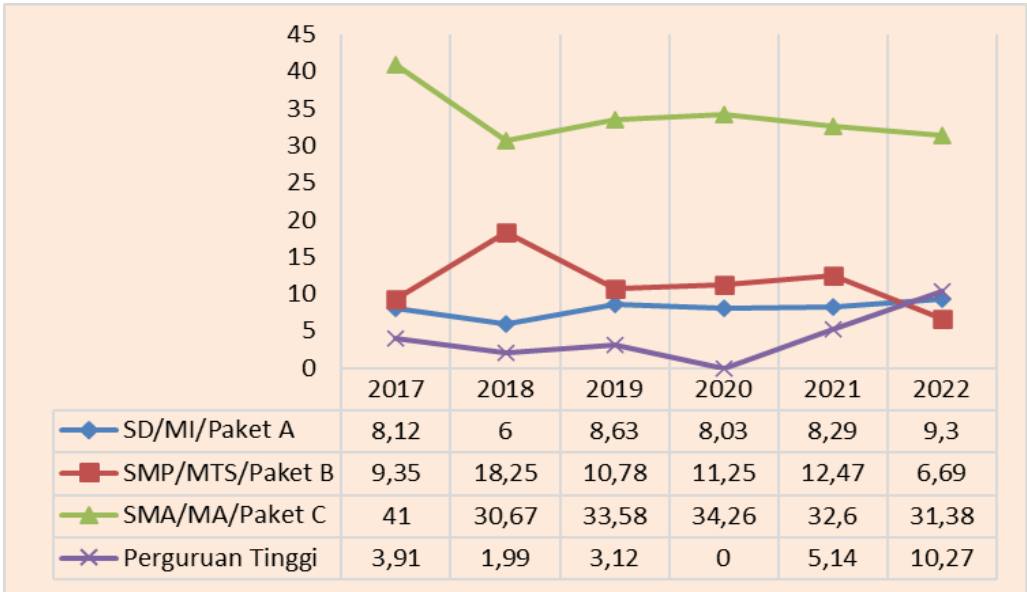
Gambar 2.21
Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Selisih antara APK dan APM merupakan jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Selama tahun 2017-2022, jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat adalah sebanyak 6% di tahun 2018, 8,63% di tahun 2019, 8,03% di tahun 2020, dan 8,29% di tahun 2021, dan 9,3% di tahun 2022. Sementara pada SMP/MTs/ sederajat, jumlahnya adalah sebanyak 18,25% di tahun 2018, menurun menjadi 6,69% di tahun 2022, setelah meningkat di tahun 2020 dan 2021 ke angka 11,25% dan 12,47%. Pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, jumlah tiap tahunnya kurang lebih hampir 2 kali lipat dari jenjang SMP/MTs/ sederajat. Untuk tahun 2018, jumlahnya adalah sebanyak 30,67%. Jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah sebanyak 33,58% dan 34,26% untuk kemudian menurun di tahun 2021 dengan jumlah sebesar 32,6%. Untuk tahun 2022, selisih APK dan APM SMA/SMK/MA/ sederajat mengalami penurunan ke angka 31,38%.

Gambar 2.22
Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>, diolah

Pada urusan kesehatan, jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bekasi selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi. Rumah sakit meningkat dari 33 di tahun 2019 menjadi sebanyak 40 rumah sakit di tahun 2021. Rumah sakit bersalin sebaliknya, justru berkurang dari 20 di tahun 2019 menjadi 17 rumah sakit bersalin di tahun 2021. Poliklinik yang di tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 156 kembali berkurang di tahun 2021 menjadi sebanyak 149 poliklinik. Puskesmas juga mengalami peningkatan dari 47 menjadi sebanyak 50 puskesmas di tahun 2021. Puskesmas pembantu yang bertambah di tahun 2020 kembali berkurang di tahun 2021 dari 61 puskesmas pembantu menjadi 51 puskesmas pembantu. Sedangkan untuk apotek selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penambahan dari 75 apotek di tahun 2019 menjadi sebanyak 92 apotek di tahun 2021. Sementara di tahun 2022, jumlah fasilitas kesehatan yang tercatat terdiri dari 53 rumah sakit, 3 rumah sakit khusus, 4 puskesmas rawat inap, 42 puskesmas non rawat inap, dan 391 klinik pratama.

Tabel 2.14
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021

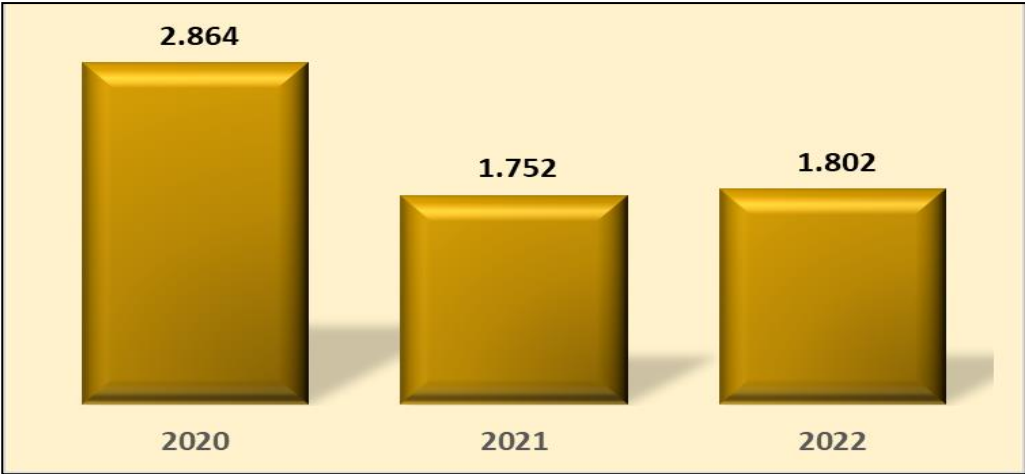
No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Rumah Sakit	33	37	40
2.	Rumah Sakit Bersalin	20	19	17
3.	Poliklinik	133	156	149
4.	Puskesmas	47	47	50

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
5.	Puskesmas Pembantu	56	61	51
6.	Apotek	75	87	92
	Jumlah	364	407	399

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Sementara untuk posyandu, jumlahnya menurun di 2021 dari 2.864 posyandu menjadi sebanyak 1.752 posyandu. Di tahun 2022, jumlah posyandu kembali mengalami penambahan menjadi sebanyak 1.802 posyandu.

Gambar 2.23
Jumlah Posyandu di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023

Untuk tenaga kesehatan, jumlah perawat, bidan, dan tenaga kefarmasian meningkat di tahun 2022. Perawat bertambah dari 3.662 orang menjadi sebanyak 4.463 orang. Bidan bertambah dari 2.083 orang menjadi sebanyak 2.124 orang. Dan tenaga kefarmasian meningkat dari 474 orang menjadi sebanyak 882 orang. Sedangkan untuk dokter jumlahnya menurun di tahun 2022 dari 1.681 orang menjadi sebanyak 1.357 orang, dan dokter gigi dari 156 orang menjadi sebanyak 148 orang. Begitu pula dengan tenaga gizi yang berkurang dari 169 orang menjadi sebanyak 143 orang.

Tabel 2.15
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Dokter	1.173	1.681	1.357
2.	Dokter Gigi	N/A	156	148
3.	Perawat	3.365	3.662	4.463
4.	Bidan	1.343	2.083	2.124
5.	Tenaga Kefarmasian	461	474	882
6.	Tenaga Gizi	96	169	143

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021-2023

Selanjutnya, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang menggunakan jasa dokter untuk membantu persalinan di tahun 2022 menurun jumlahnya bila dibandingkan tahun 2021, dari 41,65% menjadi sebanyak 39,57%. Sedangkan yang menggunakan jasa bidan dan tenaga kesehatan lain mengalami kenaikan dengan bidan dari 52,66% menjadi 56,17%, dan tenaga kesehatan lain dari 0,36% menjadi sebanyak 1,19%. Sementara yang menggunakan jasa dukun dan lainnya menurun, yakni dari 4,79% menjadi 2,71% untuk jasa dukun, dan dari 0,54% menjadi 0,36% untuk jasa lainnya, yang menunjukkan bahwa kesadaran wanita berumur 15-49 tahun untuk melahirkan dengan menggunakan jasa Kesehatan meningkat dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.16
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Tahun 2020-2022

No.	Penolong Persalinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Dokter	39,5	41,65	39,57
2.	Bidan	58,1	52,66	56,17
3.	Tenaga Kesehatan Lain	-	0,36	1,19
4.	Dukun	2,41	4,79	2,71
5.	Lainnya	-	0,54	0,36

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021-2023

Di sisi lain, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan sebutan PPKS jumlahnya menurun di tahun 2021 dari sebanyak 643.594 orang di tahun 2019 dan 2020 menjadi hanya sebanyak 64.432 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial telah menghasilkan dampak yang positif. Meski demikian, upaya pemerintah akan terus dioptimalkan agar angka tersebut akan semakin menurun untuk ke depannya.

Tabel 2.17
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

No.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Korban Bencana Alam	136	136	57.084
2.	Anak Terlantar	7.906	7.906	1.433
3.	Penyandang Disabilitas	1.309	1.309	1.309
4.	Korban Bencana Sosial	-	-	800
5.	Pemulung	697	697	697
6.	Anak Jalanan	6.290	6.290	629
7.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	367	367	367
8.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	349

No.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun		
		2019	2020	2021
9.	Anak dengan Kedisabilitasan	-	-	349
10.	Pengemis	77	77	185
11.	Tuna Susila	181	181	181
12.	Kelompok Minoritas	-	-	169
13.	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	169
14.	Korban Tindak Kekerasan	-	-	165
15.	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	160
16.	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	160
17.	Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin	578.922	578.922	87
18.	Gelandangan	69	69	69
19.	Orang dengan Hiv/Aids (ODHA)	-	-	53
20.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	26.282	26.282	12
21.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3	3	3
22.	Korban Trafficking	-	-	2
23.	Anak Balita Terlantar	559	559	-
24.	Lanjut Usia Terlantar	20.796	20.796	-
	Jumlah	643.594	643.594	64.432

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Sementara itu, sarana sosial yang ada di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 tidak mengalami penambahan, dimana sejak tahun 2017 jumlah panti sosial asuhan anak adalah sebanyak 71 unit, panti sosial penyandang cacat/disabilitas sebanyak 2 unit, dan panti sosial tresna wedha sebanyak 69 unit dengan total sarana sosial sebanyak 142 unit.

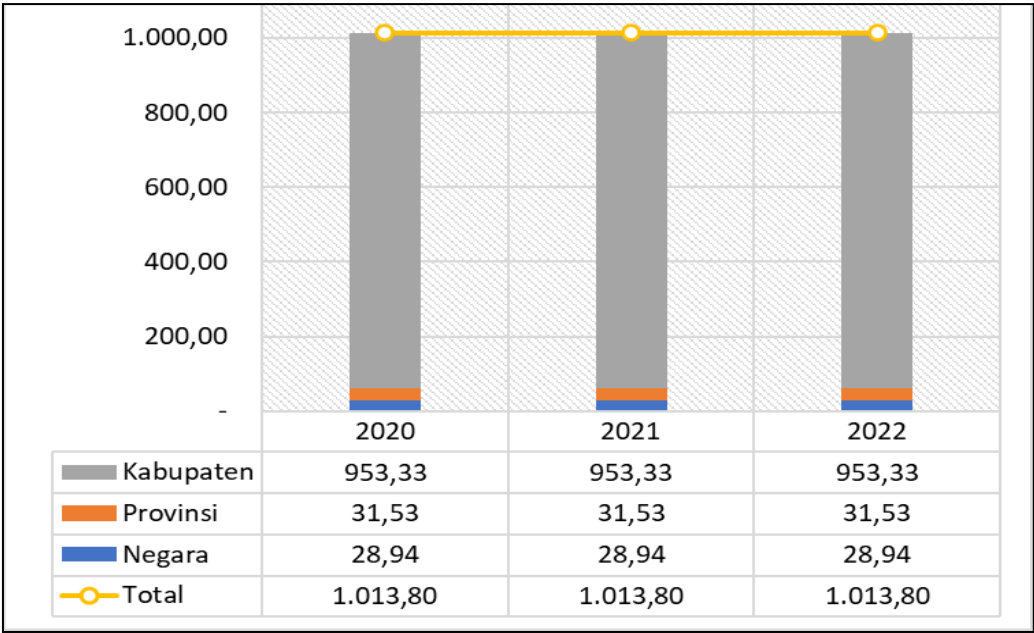
Tabel 2.18
Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

No.	Sarana Sosial	2017	2018	2019	2020
1.	Panti Sosial Asuhan Anak	71	71	71	71
2.	Panti Sosial Penyandang Cacat/ Disabilitas	2	2	2	2
3.	Panti Sosial Tresna Werdha	69	69	69	69
	Jumlah	142	142	142	142

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Terkait dengan infrastruktur wilayah, jalan di Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 4 kewenangan, yakni desa, kabupaten, provinsi, dan nasional atau negara. Untuk tahun 2020 sampai dengan 2022, panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sejauh 953,33 km, sedangkan untuk jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sejauh 31,53 km, dan untuk jalan negara adalah sejauh 28,94 km.

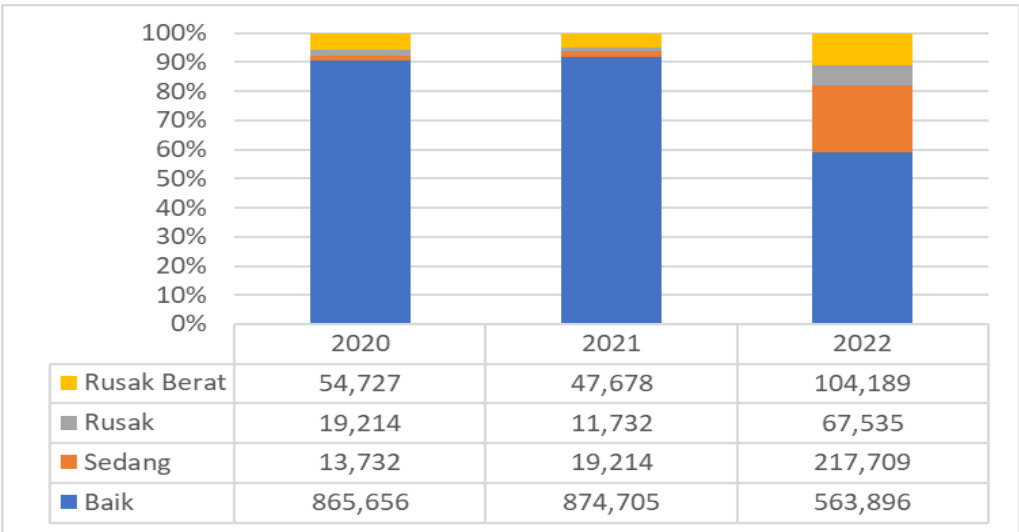
Gambar 2.24
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022 (km)



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan kondisinya, jalan kabupaten di Kabupaten Bekasi yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2022 menurun dari 91,75% menjadi hanya sebanyak 59,15%. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang meningkat dari 2,02% menjadi sebesar 22,84%. Demikian halnya pada jalan yang rusak, persentasenya meningkat dari 1,23% menjadi sebesar 7,08%. Jalan rusak berat juga meningkat dua kali lipat dari 5% di tahun 2021 menjadi sebanyak 10,93%. Untuk lebih jelasnya, kondisi jalan kabupaten selama tahun 2020-2022 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 2.25
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022 (km)

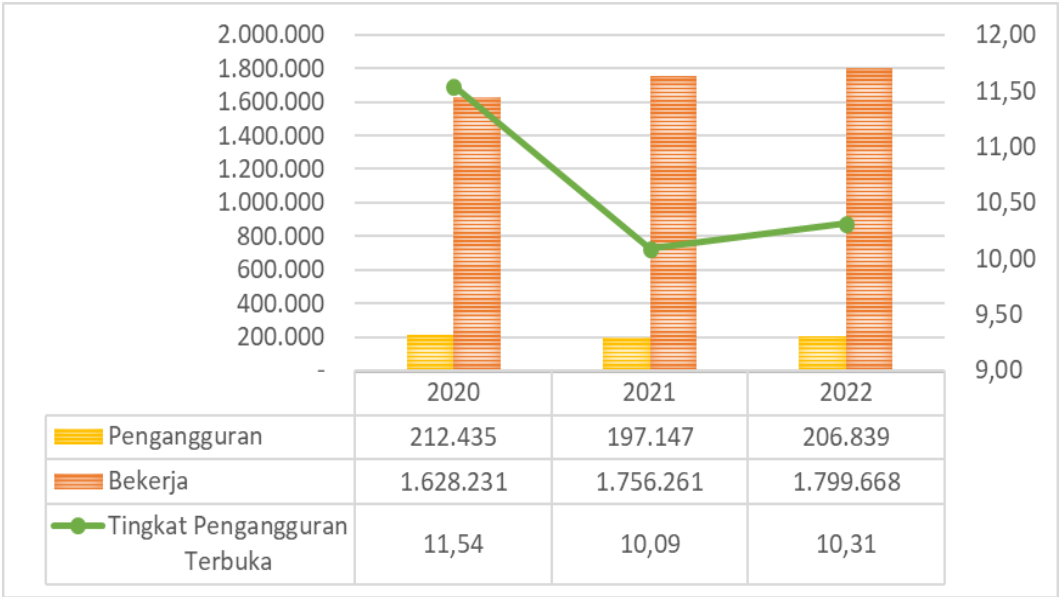


Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2021-2023

Adapun pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi. Di tahun 2022 jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2021, dari sebanyak 197.147 orang menjadi sebanyak 206.839 orang. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 0,22% dari 10,09% menjadi sebesar 10,31%.

Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 dari kabupaten/kota di Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbesar di Jawa Barat dengan nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,31% di tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-13 dengan angka pengangguran sebesar 10,09%. Angka pengangguran yang terus menurun selama tahun 2017-2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat Covid-19. Penurunan di tahun 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang cukup baik, yang mungkin disebabkan oleh semakin membaiknya perekonomian di Kabupaten Bekasi dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga industri kecil, menengah, maupun besar yang sebelumnya tidak dapat beroperasi dengan normal sekarang dapat bangkit kembali. Namun, dengan kembalinya pencari kerja dari luar daerah yang belum tentu mendapatkan pekerjaan menyebabkan beban pengangguran daerah menjadi lebih besar, sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan nilai tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022.

Gambar 2.26
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, pencari kerja di Kabupaten Bekasi didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan SMA dengan proporsinya di tahun 2022 sebesar 92,27%. Sedangkan terbesar ke-2 adalah penduduk dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah sebanyak 3,82%, diikuti dengan SMP dan sederajat dengan jumlah sebanyak 1,98%, akademi sebanyak 1,25%, serta SD dan sederajat sebanyak 0,68%. Selama 3 tahun terakhir, pencari kerja di Kabupaten Bekasi didominasi oleh pencari kerja lulusan SMA dan sederajat. Dengan standar perusahaan yang terus meningkat, latar belakang pendidikan pencari kerja yang berada di bawah standar perusahaan menyebabkan pencari kerja di Kabupaten Bekasi sulit untuk bersaing dengan pencari kerja luar daerah yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.19
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tidak Lulus SD	-	-	-
2.	SD dan Sederajat	200	105	204
3.	SMP dan Sederajat	691	446	596
4.	SMA dan Sederajat	25.746	16.333	27.832
5.	Akademi (DI/DII/DIII)	380	341	378
6.	Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)	905	903	1.153
	Jumlah	27.922	18.128	30.163

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2023

Menurut status pekerjaan utamanya, 56,95% pekerja atau sebanyak 1.024.871 orang di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, 20,73% lainnya atau sebanyak 373.118 orang berusaha sendiri, 7,05% atau sebanyak 126.962 orang merupakan pekerja bebas, 6,59% atau sebanyak 118.572 orang tidak dibayar karena bekerja dengan keluarga, 5,62% berikutnya atau sebanyak 101.178 orang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, serta 3,05% atau sebanyak 54.967 orang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Pada tahun 2022, status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, sementara pekerjaan utama lainnya menurun. Hingga saat ini asumsi masyarakat tentang bekerja adalah menjadi buruh/karyawan/pegawai pada perusahaan. Padahal menjadi wirausaha merupakan alternatif lainnya yang dapat dipilih masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, mendirikan usaha sendiri juga dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru

meskipun bila dilihat dari data yang ada, masyarakat yang memiliki usaha sendiri cenderung untuk mempekerjakan anggota keluarganya yang tidak dibayar untuk mengurangi biaya produksi. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa usaha mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi hingga tahun 2022 masih berskala kecil sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai untuk membantu pekerjaannya.

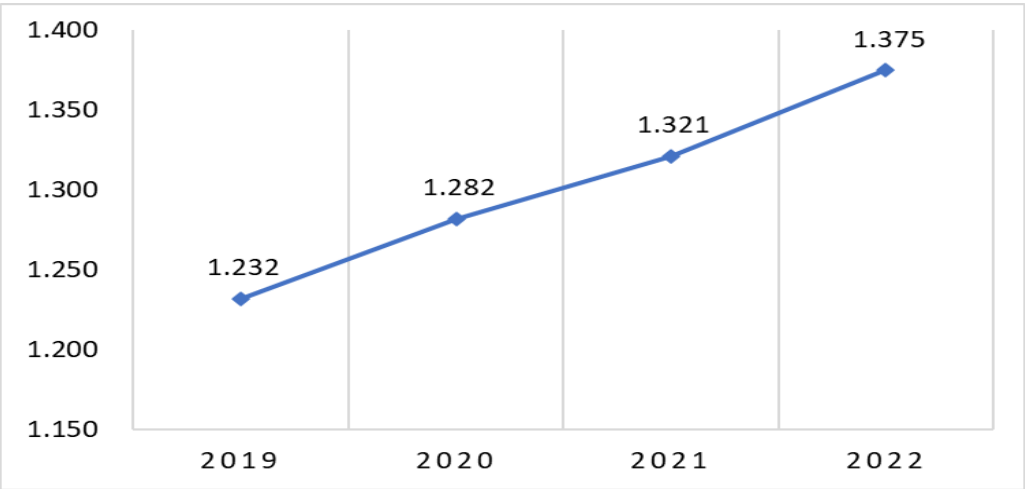
Tabel 2.20
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2022

Status Pekerjaan Utama	Tahun	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Berusaha Sendiri	2021	185.988	198.027	384.015
	2022	170.012	203.106	373.118
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	2021	31.510	71.288	102.798
	2022	38.358	62.820	101.178
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2021	8.515	40.338	48.853
	2022	6.905	48.062	54.967
Buruh/Karyawan/Pegawai	2021	325.674	669.889	995.563
	2022	277.613	747.258	1.024.871
Pekerja bebas	2021	17.342	84.610	101.952
	2022	23.362	103.600	126.962
Pekerja keluarga/tak dibayar	2021	86.041	37.039	123.080
	2022	83.838	34.734	118.572

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022 dan 2023

Selain wirausaha, koperasi merupakan salah satu alternatif kemandirian ekonomi masyarakat lainnya. Selama 4 tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan yang menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 1.232 unit, meningkat menjadi sebanyak 1.282 unit di tahun 2020, menjadi sebanyak 1.321 unit di tahun 2021, dan 1.375 unit di tahun 2022.

Gambar 2.27
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2022



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Dilihat dari keadaan keuangan, keadaan keuangan koperasi di Kabupaten Bekasi juga menunjukkan capaian positif yang dapat dilihat melalui peningkatan volume usaha koperasi selama 3 tahun terakhir, dari sebesar Rp.988.234.187.378,- di tahun 2020 menjadi sebesar Rp.1.357.551.542.771,- di tahun 2022. Begitu pula dengan modal usaha, peningkatan koperasi aktif dan volume usaha tentunya membutuhkan modal usaha yang lebih besar sehingga mendorong peningkatan modal di tahun 2022, dimana modal sendiri meningkat dari Rp.586.940.243.635,- menjadi sebesar Rp.594.139.748.256,-, dan modal luar meningkat dari Rp.450.900.323.915,- menjadi sebesar Rp.509.259.783.732,-. Namun demikian, SHU koperasi di tahun 2022 justru berbanding terbalik dengan modal dan volume usaha yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp.67.004.714.194,- menjadi sebesar Rp.64.110.099.394,-. Menurunnya SHU ini diperkirakan terjadi akibat usaha untuk meningkatkan volume usaha koperasi.

Tabel 2.21
Keadaan Keuangan Koperasi di Kabupaten Bekasi
Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Modal Sendiri	414.234.349.008	586.940.243.635	594.139.748.256
Modal Luar	326.987.449.570	450.900.323.915	509.259.783.732
Volume Usaha	988.234.187.378	1.118.556.437.200	1.357.551.542.771
SHU	48.660.356.573	67.004.714.194	64.110.099.394

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021-2023

Sementara terkait dengan penanaman modal daerah, jumlah penanaman modal asing (PMA) yang telah meningkat di tahun 2021 setelah turun selama tahun 2019 dan 2020 kembali menurun di tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar USD2.031.287.700,-. Sedangkan pada penanaman modal dalam negeri, nilai investasi ini menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah sebelumnya turun di tahun 2020. Untuk tahun 2022, nilai penanaman modal dalam negeri yang tercatat adalah sebesar Rp.17.880.344.800.000,-.

Meski di tahun 2022 nilai penanaman modal asing mengalami penurunan, namun penyerapan tenaga kerja oleh investasi ini mengalami kenaikan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat dari 19.492 orang menjadi 20.381 orang. Sedangkan pada penanaman modal dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dengan adanya investasi ini ikut meningkat sejalan dengan peningkatan nilai penanaman modal dalam negeri di tahun 2022 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat dari 6.354 orang menjadi 11.967 orang.

Tabel 2.22

Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

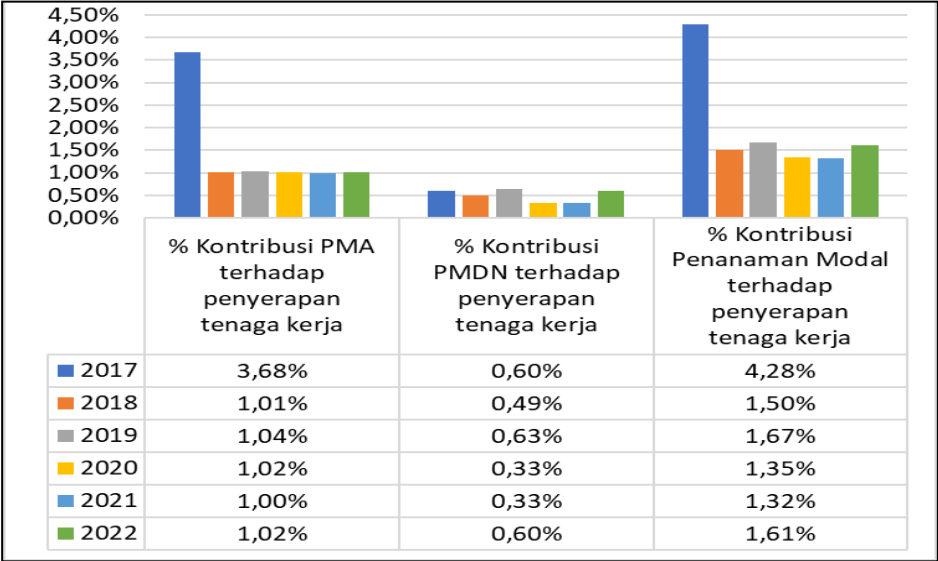
URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penanaman Modal Asing/ PMA (US Dollar)	1.979.447.000	2.914.675.000	1.810.168.800	1.799.475.800	2.156.574.400	2.031.287.700
Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (Ribu Rupiah)	6.183.341.166,7	15.000.981.300	20.206.857.700	11.411.416.100	11.777.338.500	17.880.344.800
Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	57.759	16.485	18.351	18.790	19.492	20.381
Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	9.498	7.953	11.243	6.018	6.354	11.967
Angkatan Kerja (Orang)	1.571.668	1.629.297	1.771.709	1.840.666	1.953.408	2.006.507

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Selama tahun 2017-2022, kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah. Kontribusi tertinggi hanya terjadi di tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 4,28%, sedangkan selama 2018-2022 kontribusi penanaman modal hanya berkisar antara 1,3-1,7% dengan kontribusi tertinggi sebesar 1,67% di tahun 2019. Meski meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 1,61%, namun nilai yang dicapai di tahun 2022 masih belum mampu melebihi capaian tahun 2017 dan 2019. Adapun kontribusi terbesar pada penyerapan tenaga kerja dalam penanaman modal masih didukung oleh penanaman modal asing dengan kontribusi di atas 1%, sedangkan penanaman modal dalam negeri hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 1%. Untuk lebih jelasnya, kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.28

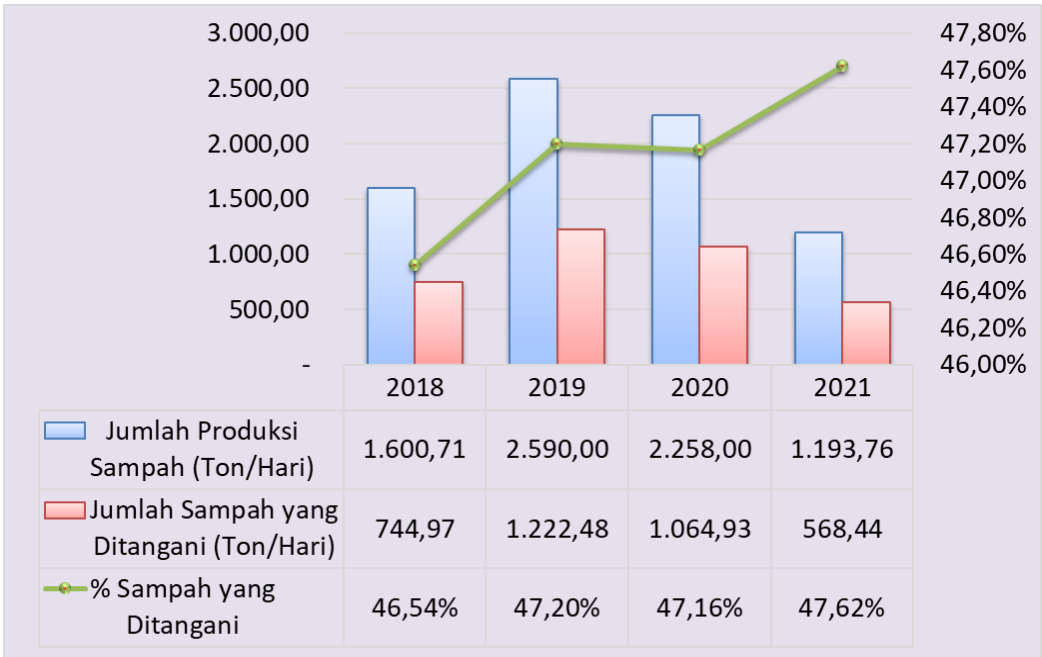
Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada urusan lingkungan hidup, salah satu masalah utama di Kabupaten Bekasi adalah terkait masalah pengelolaan sampah. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, jumlah sampah yang dapat ditangani hanya berkisar antara 46-47% dari total produksi sampah per harinya. Pada tahun 2021, jumlah produksi sampah di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 1.193,76 ton/hari, menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1600,71 ton/hari di tahun 2018, 2.590 ton/hari di tahun 2019, dan 2.258 ton/hari di tahun 2020.

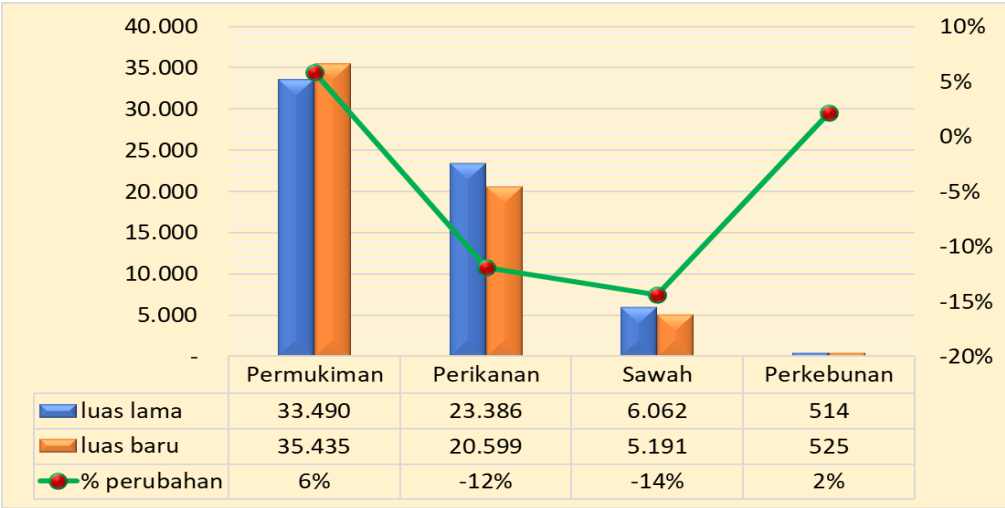
Gambar 2.29
Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Di samping itu, masalah lainnya yang dihadapi adalah perubahan lahan, khususnya peralihan fungsi dari lahan sawah dan perikanan menjadi permukiman. Pada tahun 2020, luas lahan sawah berkurang sebesar 14% dari 6.062 Ha menjadi 5.191 Ha. Lahan perikanan berkurang sebesar 12% dari 23.386 Ha menjadi 20.599 Ha. Di sisi lain, lahan perkebunan dan permukiman bertambah sebesar 2% dan 6%. Peralihan penggunaan lahan menjadi perkebunan mungkin justru akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, namun perubahan menjadi permukiman akan mengurangi luas lahan untuk penyerapan air yang dikhawatirkan ke depannya akan dapat memicu perluasan titik-titik banjir di Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.30
Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020



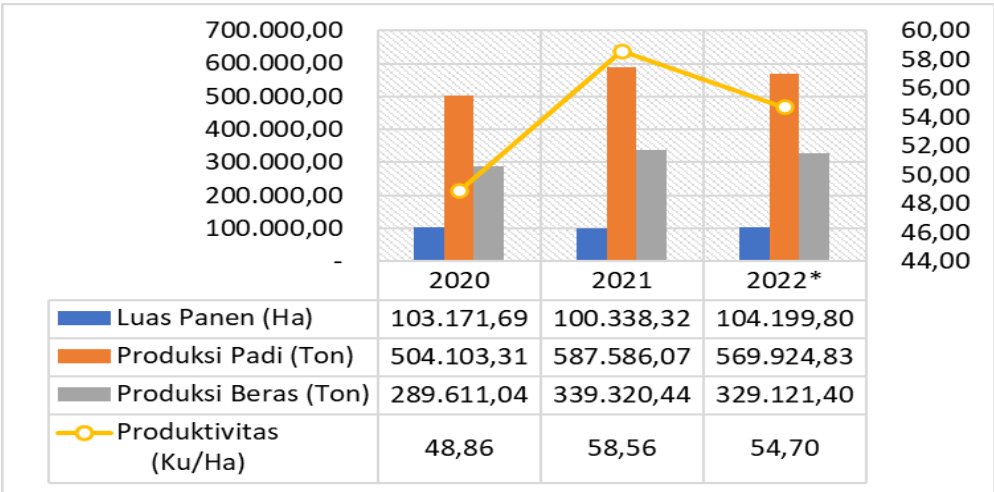
Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/>

Terakhir terkait dengan kependudukan dan catatan sipil, penduduk yang memiliki KTP mengalami kenaikan selama tahun 2019-2021, yaitu dari 81,15% di tahun 2019 menjadi sebanyak 82,15% di tahun 2020, dan 82,32% di tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di tahun 2021 adalah sebanyak 228.276 jiwa.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pada sektor pertanian, luas areal panen padi di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari seluas 100.338,32 Ha menjadi seluas 104.199,8 Ha atau naik sebesar 3,85%. Meski luas areal panen meningkat, namun produktivitas pertanian justru mengalami penurunan dari 58,56% menjadi sebesar 54,7% dengan jumlah produksi padi dan beras di tahun 2022 sebesar 569.924,83 ton beras dan 329.121,4 ton padi.

Gambar 2.31
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Selain padi, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan semusim. Di antara jenis tanaman sayuran yang ditanam, kangkung merupakan jenis sayuran terbanyak yang ditanam oleh petani, meski produksinya berbanding terbalik dengan peningkatan luas panen, justru menurun di tahun 2022 dari 100.237 kuintal menjadi sebanyak 59.471 kuintal. Selain kangkung, bayam merupakan tanaman ke-2 terbesar dengan luas panen dan hasil produksi sebesar 1.404 Ha dan 53.735 Kuintal. Sedangkan jenis tanaman sayuran yang paling sedikit ditanam oleh petani adalah bawang merah dengan luas panen dan hasil produksi di tahun 2022 hanya sebesar 5 Ha dan 252 Kuintal.

Sementara pada buah-buahan semusim, di tahun 2022 sebagaimana tahun sebelumnya, tampaknya minat petani untuk menanam blewah sama sekali tidak ada. Sedangkan semangka justru meningkat di tahun 2022 dengan luas panen meningkat dari 8 Ha menjadi 32 Ha dan dengan produksi dari 527 Kuintal menjadi sebesar 2.396 Kuintal.

Tabel 2.23
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Kuintal)				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
Sayuran										
Kangkung	963	1.069	1.192	1.321	1.412	84.384	80.660	86.241	100.237	59.471
Bayam	757	664	741	1.022	1.404	57.435	48.512	52.476	51.376	53.735
Cabai Besar	25	19	8	95	92	629	637	435	14.568	10.788
Ketimun	205	153	129	115	117	24.801	15.657	13.139	13.196	13.505
Petsai	45	74	83	191	315	3.192	4.158	4.377	11.218	22.317
Terung	181	84	77	56	79	4.837	5.280	3.650	7.800	9.293
Cabai Rawit	22	27	16	54	52	938	946	516	5.806	4.620
Kacang Panjang	105	120	109	63	95	9.196	9.629	8.002	5.032	10.954
Kembang Kol	137	77	82	44	33	6.565	4.535	5.066	4.729	4.621
Bawang Merah	-	5	2	6	5	-	418	233	548	252
Buah–buahan										
Blewah	30	15	15	-	-	3.894	3.900	5.700	-	-
Semangka	65	41	32	8	32	1.825	3.709	4.030	527	2.396

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022 dan 2023

Berikutnya, selain yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan tanaman biofarmaka dan tanaman hias. Untuk tanaman biofarmaka, jenis yang paling banyak ditanam selama 2 tahun terakhir adalah kencur dengan luas panen di tahun 2022 seluas 504.300 m² dan hasil produksi sebanyak 682.495 kg. Meski secara luas panen kencur merupakan jenis tanaman

dengan luas panen terluas, namun jumlah produksi terbesar untuk tahun 2022 adalah lengkuas dengan produksi sebesar 1.661.800 kg meski dengan luas panen yang hanya seluas 251.025 m². Secara keseluruhan, sebagian besar jenis tanaman biofarmaka meningkat produksinya, kecuali pada kencur yang justru menurun.

Tabel 2.24
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Luas Panen (m ²)					Produksi (Kg)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kencur	336.000	406.500	453.000	647.500	504.300	692.000	892.640	702.700	693.850	682.495
Lengkuas	115.225	574.200	234.735	52.800	251.025	222.985	1.456.505	550.190	185.600	1.661.800
Kunyit	31.200	46.800	63.600	29.200	33.100	61.265	163.235	141.730	65.500	157.530
Lempuyang	13.000	16.500	18.500	14.500	15.500	26.000	45.277	40.500	15.760	34.497
Temulawak	10.700	19.500	19.400	10.200	10.700	19.145	66.700	38.800	10.000	32.100
Temukunci	25.100	41.900	39.600	4.700	16.700	50.200	99.800	84.700	3.000	50.100
Jahe	6.000	6.000	7.500	-	5.372	13.359	29.040	14.000	-	20.030
Lidah Buaya	-	-	1.000	-	-	-	-	2.000	-	-
Mengkudu	1.704	1.704	704	-	-	1.440	1.381	3.520	-	-

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022 dan 2023

Pada tanaman hias, hampir di semua jenis tanaman hias mengalami penurunan produksi di tahun 2021, kecuali pada jenis pisang-pisangan yang justru mengalami kenaikan dari 90 tangkai menjadi 275 tangkai. Sedangkan 3 jenis tanaman hias dengan produksi terbesar di tahun 2020, yakni melati, mawar, dan philandendron, jumlah produksinya jatuh drastis di tahun 2021. Pada tanaman melati, meski luas panen meningkat hampir 2 kali lipatnya, namun jumlah produksinya justru turun lebih dari 2 kali lipatnya. Sementara pada tanaman adenium yang jumlah produksinya terbesar di tahun 2018 dan 2019, di tahun 2021 justru tidak tercatat produksi dan luas panennya sama sekali. Sementara untuk tahun 2022, jenis tanaman yang mengalami peningkatan produksi adalah mawar yang meningkat 4 kali lipat dari 482 tangkai menjadi 2.060 tangkai, pisang-pisangan yang juga meningkat hampir 4 kali lipat dari 275 tangkai menjadi 1.048 tangkai, serta philodendron yang meningkat 2 kali lipat dari 70 tangkai menjadi 140 tangkai. Sementara produksi melati justru turun hampir setengahnya dari 514 tangkai menjadi 252 tangkai. Peningkatan dan penurunan produksi tanaman hias tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkat atau menurunnya luas panen tanaman hias, kecuali pada pisang-pisangan yang luas panennya menurun namun jumlah produksinya justru mengalami peningkatan.

Tabel 2.25
Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

Tanaman Hias	Luas Panen (m ²)					Produksi (tangcai)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Melati	-	3	269	406	146	-	46	1.307	514	252
Mawar	-	164	517	384	714	-	164	1.783	482	2.060
Pisang-pisangan	130	55	73	175	148	130	80	90	275	1.048
Philodendron	-	47	113	70	140	-	47	1.616	70	140
Soka	169	100	42	16	-	2.145	358	80	16	-
Anggrek	16	2	-	-	-	124	50	-	-	-
Euphorbia	50	30	5	-	-	716	120	35	-	-
Adenium (Kamboja Jepang)	1.410	608	175	-	-	37.887	2.209	465	-	-

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022 dan 2023

Pada sektor perikanan, perikanan tangkap yang di tahun 2019 mengalami kenaikan volume dan nilai kembali mengalami penurunan di tahun 2020. Volume perikanan tangkap di laut yang naik dari 6.526 ton menjadi 8.731 ton, turun ke angka 5.422 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.155.777.702.000,-. Sedangkan untuk perikanan perairan umum daratan berhasil mempertahankan volume dan nilai produksinya sebesar 49 ton dan Rp.1.044.632.000,-.

Untuk tahun 2021, volume perikanan tangkap di laut mengalami kenaikan menjadi sebesar 6.025 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.176.714.531.000,-. Begitu pula pada perikanan perairan umum daratan yang naik menjadi sebesar 53 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.1.306.645.000,-. Secara keseluruhan, jumlah volume produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan di tahun 2021 adalah sebesar 6.078 ton dengan nilai sebesar Rp.178.021.176.000,-.

Tabel 2.26
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Tahun	Uraian	Perikanan Tangkap di laut	Perikanan Perairan Umum Daratan	Jumlah
2018	Volume (ton)	6.526	10	6.536
	Nilai (000 Rp)	189.863.293	159.346	190.022.639
2019	Volume (ton)	8.731	49	8.780
	Nilai (000 Rp)	248.907.416	1.044.632	249.952.048
2020	Volume (ton)	5.422	49	5.471
	Nilai (000 Rp)	155.777.702	1.044.632	156.822.334
2021	Volume (ton)	6.025	53	6.078
	Nilai (000 Rp)	176.714.531	1.306.645	178.021.176

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Dibandingkan perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi menunjukkan volume yang lebih besar. Produksi perikanan

budidaya dari kegiatan pembesaran di tahun 2021 adalah sebesar 75.470 ton yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 62.381 ton. Sedangkan untuk pembenihan dan ikan hias juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan masing-masing sebanyak 19.930.000 ekor dan 2.055.000 ekor.

Tabel 2.27
Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Tahun	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 Ekor)	Ikan Hias (1000 Ekor)
2018	57.607	19.639	1.882
2019	62.421	18.572	2.052
2020	62.381	16.189	1.876
2021	75.470	19.930	2.055

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2023

Sementara berdasarkan jenis budidaya yang dilakukan, tambak sederhana selama 4 tahun terakhir merupakan jenis budidaya yang menghasilkan volume dan nilai terbanyak selama tahun 2018-2021, dengan nilai volume dan produksi di tahun 2021 sebesar 66.387 ton dan Rp.565.455.803.000,-. Sedangkan pada tambak insentif, meski menghasilkan volume paling sedikit, namun nilainya ternyata dapat melebihi jenis budidaya laut lainnya yang memiliki volume lebih besar, yang berarti bahwa tambak insentif lebih menguntungkan dibandingkan budidaya laut lainnya.

Sedangkan bila dilihat dari jenis komoditasnya, hasil perikanan budidaya terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi adalah rumput laut dengan volume di tahun 2021 meningkat dari 44.134 ton menjadi sebanyak 53.352 ton. Meski demikian, secara ekonomis rumput laut masih kalah menguntungkan bila dibandingkan jenis komoditas lainnya dengan volume yang lebih kecil, seperti bandeng dan udang yang nilainya lebih besar meski dengan volume produksi yang lebih kecil. Hal serupa juga berlaku pada lele.

Tabel 2.28
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Uraian	2018		2019		2020		2021	
	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
Jenis Budidaya								
Tambak Sederhana	50.808	548.609.831	54.993	343.931.679	54.879	323.442.651	66.387	565.455.803
Kolam Air Tenang	3.778	68.105.581	4.118	69.885.131	4.194	77.242.653	5.087	96.500.444
Tambak Semi Intensif	1.640	29.801.926	1.795	33.465.758	1.792	36.999.360	2.153	48.231.349
Laut Lainnya	806	6.433.890	887	887.334	889	888.754	1.080	2.636.414

Uraian	2018		2019		2020		2021	
	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
Jaring Apung Tawar	545	11.429.639	594	11.734.665	594	14.998.738	721	16.473.784
Tambak Intensif	30	1.949.227	33	1.645.800	33	1.750.225	42	2.462.520
Komoditas Utama								
Rumput Laut	39.853	239.309.495	44.210	66.314.366	44.134	22.762.135	53.352	157.224.532
Bandeng	9.538	170.307.624	9.610	172.972.872	9.583	191.667.640	11.608	252.805.316
Lele	1.770	28.802.001	2.019	34.325.057	2.065	35.980.966	2.504	47.572.143
Udang	2.030	150.273.615	2.040	122.084.875	2.030	127.070.215	2.462	181.934.810
Nila	1.324	27.514.474	1.431	28.612.700	1.445	37.400.555	1.752	40.973.002
Patin	4.057	48.682.560	899	10.793.028	901	11.078.448	1.095	14.021.752
Ikan Lainnya	-	-	2.037	22.425.850	196	8.819.145	2.483	31.708.799
Ikan Mas	161	3.994.791	175	4.021.619	177	5.131.394	214	5.519.960
Gurame	69	2.647.457	-	-	-	-	-	-

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2023

Pada sektor pariwisata, mayoritas wisatawan yang datang ke obyek wisata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 adalah wisatawan nusantara. Sementara wisatawan mancanegara yang pernah datang dan tercatat hanya sebanyak 3 orang di tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang datang jumlahnya berfluktuasi, yaitu sebanyak 49.740 orang di tahun 2017, 2.043.000 orang di tahun 2018, 11.682 orang di tahun 2019, 127.500 orang di tahun 2020, 1.730.651 orang di tahun 2021, dan 945.028 orang di tahun 2022.

Tabel 2.29
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

Tahun	Wisatawan	Jumlah
2017	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	49.740
	Jumlah	49.740
2018	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	2.043.000
	Jumlah	2.043.000
2019	Wisatawan Mancanegara	3
	Wisatawan Nusantara	11.679
	Jumlah	11.682
2020	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	127.500
	Jumlah	127.500
2021	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	1.730.651
	Jumlah	1.730.651
2022	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	945.028
	Jumlah	945.028

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2023

Sementara untuk yang mengunjungi akomodasi di Kabupaten Bekasi, jumlahnya selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat, dari hanya sebanyak 250.236 orang wisatawan di tahun 2017 menjadi sebanyak 1.327.531 orang di tahun 2022. Namun jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah kunjungan sebanyak 3.015.231 orang.

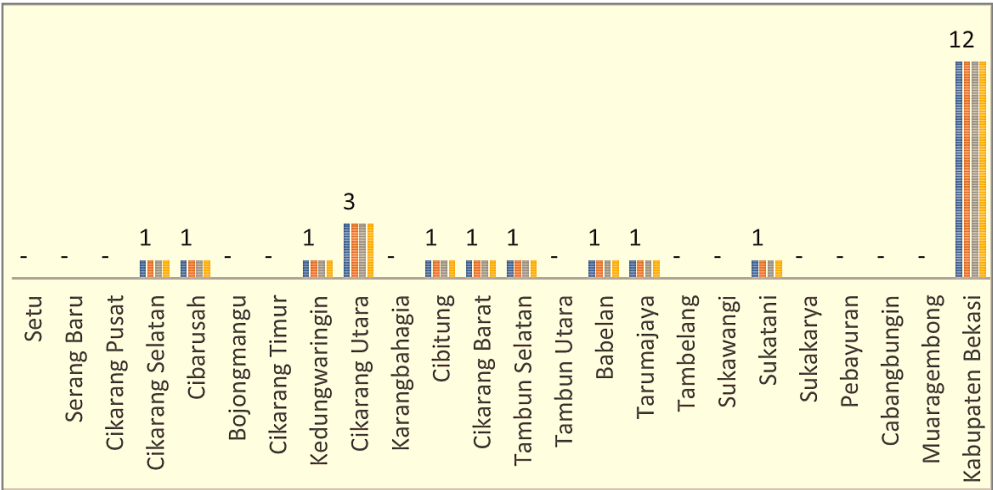
Tabel 2.30
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

Tahun	Wisatawan	Jumlah
2017	Wisatawan Mancanegara	63.246
	Wisatawan Nusantara	186.990
	Jumlah	250.236
2018	Wisatawan Mancanegara	25
	Wisatawan Nusantara	2.043.000
	Jumlah	2.043.025
2019	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	2.083.860
	Jumlah	2.083.860
2020	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	1.699.274
	Jumlah	1.699.274
2021	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	3.015.231
	Jumlah	3.015.231
2022	Wisatawan Mancanegara	118.056
	Wisatawan Nusantara	1.209.475
	Jumlah	1.327.531

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2023

Pada sektor perdagangan, jumlah pasar tradisional yang terdata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan jumlah total sebanyak 12 unit. Pasar terbanyak terdapat di Kecamatan Cikarang Utara dengan jumlah sebanyak 3 unit. Kecamatan lain yang memiliki pasar tradisional adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Cibarusah, Kedungwaringin, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Babelan, Tarumajaya, dan Sukatani dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 unit. Sisa kecamatan lainnya berdasarkan data BPS belum memiliki pasar tradisional.

Gambar 2.32
Jumlah Pasar Tradisional menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2022



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2023

Sementara pada sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan data Kementerian Perindustrian terdapat 10 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas lahan terbesar dimiliki oleh *MM2100 Industrial Town BFIE* dan *Greenland International Industrial Center* dengan lahan masing-masing seluas 1.700 Ha. Sedangkan kawasan terkecil adalah Kawasan Industri Gobel yaitu seluas 54 Ha.

Tabel 2.31
Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

No.	Kawasan Industri	Pengelola	Luas Lahan
1.	Kawasan Industri Terpadu Indonesia China	PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China	205 Ha
2.	Bekasi International Industrial Estate	PT. Hyundai Inti Development	200 Ha
3.	MM2100 Industrial Town BFIE	PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. Bekasi Mitra IE, PT. Bekasi Surya Pratama	1.700 Ha
4.	MM2100 Industrial Town MMID	PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev.	805 Ha
5.	Kawasan Industri Jababeka	PT. Jababeka Infrastruktur	2.267 Ha
6.	East Jakarta Industrial Park	PT. East Jakarta Industrial Park	320 Ha
7.	Kawasan Industri Gobel	PT. Gobel Dharma Nusantara	54 Ha
8.	Kawasan Industri Marunda Center	PT. Tegar Primajaya; PT. Multikaryasilprima	600 Ha
9.	Greenland International Industrial Center (GIIC)	PT. Puradelta Lestari, Tbk ; PT. Pembangunan Deltamas	1.700 Ha
10.	Kawasan Industri Lippo Cikarang	PT. Lippo Cikarang Tbk	1.645 Ha

Sumber: <https://kemenperin.go.id/kawasan>

Pada industri besar dan sedang, jumlah perusahaan yang tercatat di tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, dari 1.930 perusahaan menjadi sebanyak 1.919 perusahaan. Berkurangnya jumlah perusahaan mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang diserap, dari sebanyak 496.898 orang menjadi sebanyak 436.140 orang. Dengan melambatnya ekonomi daerah akibat Covid-19, pendapatan perusahaan juga mengalami penurunan dari Rp.771.235.430.078.000,- menjadi hanya sebesar Rp.39.378.293.948.000,- di tahun 2020.

Sebaliknya pada industri mikro dan kecil, jumlah perusahaan yang ada di tahun 2020 meningkat hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2018, dari hanya sebanyak 10.523 perusahaan menjadi sebanyak 20.315 perusahaan. Perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.568 orang di tahun 2018 dan 43.283 orang di tahun 2020. Meski jumlahnya meningkat di tahun 2020, namun ternyata pendapatan yang dihasilkan di tahun tersebut justru menurun hampir setengahnya dibandingkan tahun 2018, dan juga hampir setengah dari pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di tahun 2020 atau dapat dikatakan bahwa perusahaan pada industri mikro dan kecil cenderung merugi di tahun tersebut. Hal ini diperkirakan terjadi akibat Covid-19 yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk karyawannya, sementara bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar. Namun dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah di tahun 2021, pendapatan perusahaan pada industri mikro dan kecil kembali mengalami peningkatan dengan pendapatan sebesar Rp.3.763.175.896.000,- dan pengeluaran sebesar Rp.1.980.309.615.000,- yang menandakan adanya surplus yang diterima oleh perusahaan. Bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, maka kontribusi industri besar dan sedang dalam penyerapan angkatan kerja yakni sebesar 37% di tahun 2017, 27% pada tahun 2019, dan 23,69% di tahun 2020. Sementara industri mikro dan kecil berkontribusi sebesar 2% di tahun 2018, 2,35% di tahun 2020, dan 3,39% di tahun 2021.

Tabel 2.32
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan
pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja	Pengeluaran (ribu rupiah)	Pendapatan (ribu rupiah)
Industri Besar dan Sedang				
2017	2.503	588.010	N/A	N/A
2019	1.930	496.898	381.518.614.319	771.235.430.078
2020	1.919	436.140	31.183.797.269	39.378.293.948

Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja	Pengeluaran (ribu rupiah)	Pendapatan (ribu rupiah)
Industri Mikro dan Kecil				
2018	10.523	24.568	1.297.322.859	2.490.622.648
2020	20.315	43.283	3.673.331.668	1.697.866.626
2021	20.610	66.311	1.980.309.615	3.763.175.896

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2023

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

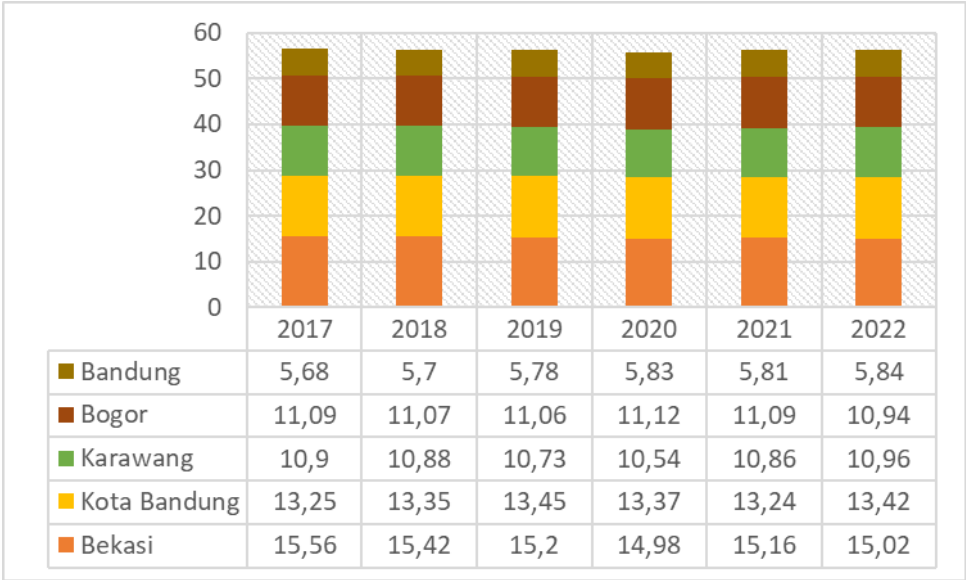
Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang, khususnya pada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pengendalian dan evaluasi, serta pengadaan barang jasa, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggunakan aplikasi atau sistem informasi. Pada perencanaan daerah, telah digunakan aplikasi perencanaan sejak tahun 2013 yang disebut dengan RKPD online. Aplikasi tersebut kemudian diganti dengan aplikasi perencanaan berikutnya yang disebut dengan Sipdah di tahun 2017. Adapun dengan adanya aplikasi baru terpusat yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, aplikasi tersebut tidak lagi digunakan, diganti dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang mulai digunakan pada tahun 2020. Pada Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri kembali melakukan perubahan pada SIPD, dimana SIPD lama tidak lagi digunakan untuk perencanaan tahun 2024 dan seterusnya, digantikan dengan SIPD berbasis *microservice* sebagaimana disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 600.5.4/48/SJ Tanggal 6 Januari 2023 Hal Implementasi SIPD. Sementara pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggunakan SIMDA sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini akibat belum siapnya seluruh fitur pada SIPD dalam menunjang penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Pada pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan aplikasi yang disebut dengan P5D yang kemudian digantikan dengan SIMPPD di tahun 2021. Sedangkan pada pengadaan barang jasa, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah menggunakan aplikasi LPSE.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, PDRB Kabupaten Bekasi selama 6 tahun terakhir merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Jawa Barat dengan nilai distribusi sebesar 15,02%

di tahun 2022. Sedangkan Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung berada di tingkat selanjutnya dengan nilai distribusi masing-masing sebesar 13,42% untuk Kota Bandung, 10,96% untuk Kabupaten Karawang, 10,94% untuk Kabupaten Bogor, dan 5,84% untuk Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi Kabupaten Bekasi akan memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai perekonomian Jawa Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Gambar 2.33
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010
Tahun 2017-2022 (Persen)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Selanjutnya, data menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Kabupaten Bekasi juga dapat bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, dimana Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal terbesar di Jawa Barat setelah Kota Bekasi, Depok, dan Bogor dengan rata-rata upah/gaji bersih sebulan sebesar Rp.4.532.121,-. Pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta konstruksi, Kabupaten Bekasi berada di urutan terbesar ke-2 setelah Kota Bekasi dengan rata-rata upah/gaji bersih sebulan sebesar Rp.5.384.059,-. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-5 dengan rata-rata upah/gaji bersih sebulan sebesar

Rp.3.772.524,-. Terakhir pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 dengan rata-rata upah/gaji bersih sebulan sebesar Rp.1.970.427,-.

Tabel 2.33
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut
Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		1	2	3	
1.	Kota Bekasi	N/A	5.496.927	5.152.663	5.279.675
2.	Kota Depok	N/A	5.097.827	4.929.233	4.979.902
3.	Kota Bogor	N/A	4.765.496	4.622.802	4.628.945
4.	Bekasi	1.970.427	5.384.059	3.772.524	4.532.121
5.	Kota Cimahi	N/A	3.839.699	3.940.655	3.898.964
6.	Karawang	1.876.386	4.707.452	2.992.927	3.845.039
7.	Purwakarta	2.577.843	4.158.795	2.950.748	3.560.596
8.	Bogor	1.710.980	3.679.091	3.440.874	3.514.172
9.	Kota Bandung	N/A	3.103.985	3.655.464	3.487.569
10.	Bandung Barat	2.079.977	3.092.510	3.106.052	3.064.555
11.	Bandung	1.784.216	2.789.890	3.351.738	3.000.425
12.	Kota Cirebon	N/A	3.713.014	2.737.570	2.941.185
13.	Kota Sukabumi	2.626.419	2.803.581	3.004.279	2.936.799
14.	Subang	2.436.350	3.093.737	2.750.861	2.876.785
15.	Indramayu	2.134.572	2.794.244	2.504.605	2.539.700
16.	Sumedang	2.215.134	2.672.749	2.443.756	2.529.518
17.	Sukabumi	1.866.145	2.695.616	2.499.786	2.524.716
18.	Kota Banjar	N/A	2.069.520	2.489.449	2.303.102
19.	Kota Tasikmalaya	1.056.187	1.811.626	2.580.244	2.265.694
20.	Cianjur	1.698.033	2.385.260	2.197.577	2.211.153
21.	Cirebon	1.525.910	1.974.710	2.272.543	2.123.711
22.	Majalengka	2.237.521	1.924.529	2.306.644	2.114.662
23.	Kuningan	781.129	2.180.422	2.100.458	2.075.760
24.	Garut	1.117.417	1.994.370	2.171.791	2.066.635
25.	Tasikmalaya	1.053.649	1.871.081	2.255.005	2.056.863
26.	Ciamis	1.725.159	1.801.948	2.066.605	1.935.748
27.	Pangandaran	1.364.131	1.704.333	2.054.817	1.897.628
	Jawa Barat	1.933.385	3.651.790	3.526.004	3.533.613

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Keterangan : 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan.

2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Pada pekerja informal, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Bekasi sebagaimana halnya pekerja formal berada pada posisi terbesar ke-4 setelah Kota Bekasi, Depok, dan Bogor dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja sebesar Rp.2.404.396,-. Pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta konstruksi, Kabupaten Bekasi berada di urutan terbesar ke-5 setelah Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bogor dan Depok dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan sebesar Rp.2.504.404,-. Pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 setelah Kota Depok, Bekasi, dan Bogor dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan sebesar Rp.2.470.723,-. Terakhir pada pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-3 setelah Kabupaten Karawang dan Kota Depok dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan sebesar Rp.1.674.331,-.

Dengan semakin besarnya rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja formal dan informal di Kabupaten Bekasi, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bekasi juga semakin besar. Dengan semakin besarnya daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin besar, termasuk permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih mahal. Hal tersebut dapat pula berarti bahwa peluang untuk perkembangan bisnis dan usaha di Kabupaten Bekasi lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang rata-rata upah/pendapatan bersih pekerjanya lebih kecil sehingga dapat menarik pembukaan usaha baru dan investasi. Namun di sisi lain, tingginya rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja di Kabupaten Bekasi juga merupakan daya tarik bagi para pencari kerja dari luar daerah untuk datang dan mencari kerja di Kabupaten Bekasi. Hal ini harus disikapi secara hati-hati karena selain meningkatkan persaingan bagi para pencari kerja lokal, bila tidak ditangani secara baik juga dapat menambah beban bagi pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran bila ternyata para pencari kerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Bekasi, yang dapat berujung meningkatkan pula angka kemiskinan dan kriminalitas di Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.34
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		1	2	3	
1.	Kota Bekasi	NA	3.435.021	2.911.742	3.014.772
2.	Kota Depok	1.762.184	2.528.516	2.977.458	2.895.486
3.	Kota Bogor	NA	2.539.097	2.508.670	2.493.000
4.	Bekasi	1.674.331	2.504.404	2.470.723	2.404.396
5.	Karawang	1.990.017	2.668.122	2.417.223	2.334.853
6.	Kota Bandung	NA	2.034.252	2.385.530	2.325.257
7.	Kota Cimahi	NA	1.934.156	2.382.597	2.275.948
8.	Bandung	1.244.147	2.205.642	2.112.224	2.046.094
9.	Bogor	1.143.781	2.128.758	2.227.264	2.030.305
10.	Kota Sukabumi	1.585.087	2.101.835	2.012.847	2.012.715
11.	Purwakarta	1.372.501	2.434.577	1.965.977	1.957.779
12.	Subang	1.645.823	2.197.712	2.071.105	1.948.730
13.	Indramayu	1.593.006	2.295.269	1.940.793	1.901.275
14.	Sukabumi	1.318.972	2.346.667	1.934.856	1.890.323
15.	Kota Cirebon	NA	2.168.245	1.784.851	1.849.590
16.	Cirebon	1.424.553	2.068.594	1.827.629	1.835.970
17.	Bandung Barat	1.110.345	2.152.993	1.907.736	1.775.068
18.	Kota Tasikmalaya	722.355	1.673.839	1.892.436	1.727.815
19.	Sumedang	1.105.957	1.941.464	1.663.630	1.601.751
20.	Kuningan	1.056.397	2.085.308	1.691.575	1.585.507
21.	Garut	988.010	1.921.498	1.741.423	1.577.196
22.	Majalengka	1.263.208	1.915.036	1.478.573	1.518.006
23.	Cianjur	1.194.888	1.691.151	1.466.264	1.413.799
24.	Kota Banjar	998.261	1.462.880	1.499.602	1.397.678
25.	Ciamis	979.415	1.552.189	1.593.251	1.379.048
26.	Pangandaran	1.026.392	1.514.458	1.582.671	1.367.906
27.	Tasikmalaya	880.512	1.515.909	1.452.919	1.258.220
	Jawa Barat	1.277.460	2.129.398	2.130.374	1.951.688

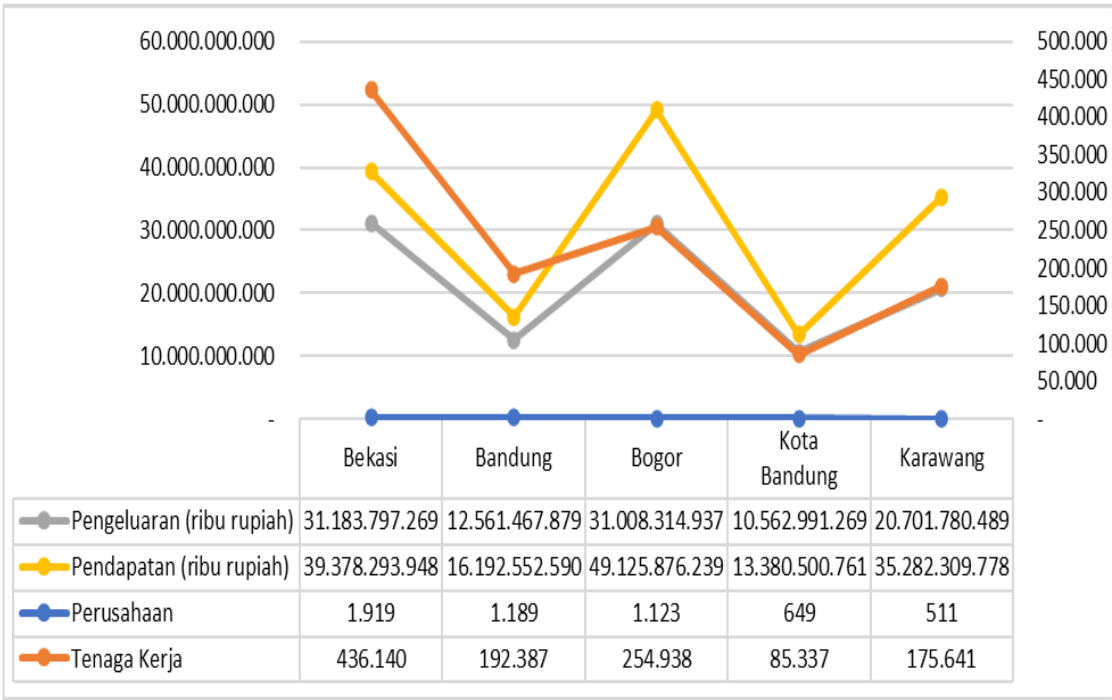
Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Pada industri besar dan sedang, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2020 sebagaimana tahun 2019 meski dengan jumlah perusahaan yang berkurang dari 1.930 perusahaan menjadi sebanyak 1.919 perusahaan. Diikuti oleh Kabupaten Bandung dengan jumlah perusahaan yang juga berkurang dari 1.514 perusahaan di tahun 2019 menjadi sebanyak 1.189 perusahaan di tahun 2020, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang. Selain itu, industri besar dan sedang di Kabupaten Bekasi juga menyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat dengan jumlah tenaga

kerja di tahun 2020 sebanyak 436.140 orang, diikuti oleh Kabupaten Bogor, Bandung, dan Karawang. Sementara Kota Bandung masih kalah dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 128.780 orang. Namun demikian, meski secara jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang Kabupaten Bekasi merupakan yang terbesar di Jawa Barat, namun pendapatan perusahaan tersebut masih kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor dengan pendapatan perusahaan sebesar Rp.49.125.876.239.000,-. Juga masih di bawah Kabupaten Subang dengan pendapatan perusahaan sebesar Rp.48.046.471.261.000,- serta dengan jumlah perusahaan sebanyak 99 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 71.653 orang. Meski tidak masuk ke dalam 5 besar kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja pada industri besar dan sedang terbanyak di Jawa Barat, namun bila dilihat dari selisih pendapatan dan pengeluaran perusahaan, Kabupaten Subang merupakan kabupaten dengan keuntungan perusahaan terbesar di Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp.34.050.113.254.000,-.

Gambar 2.34
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 5 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

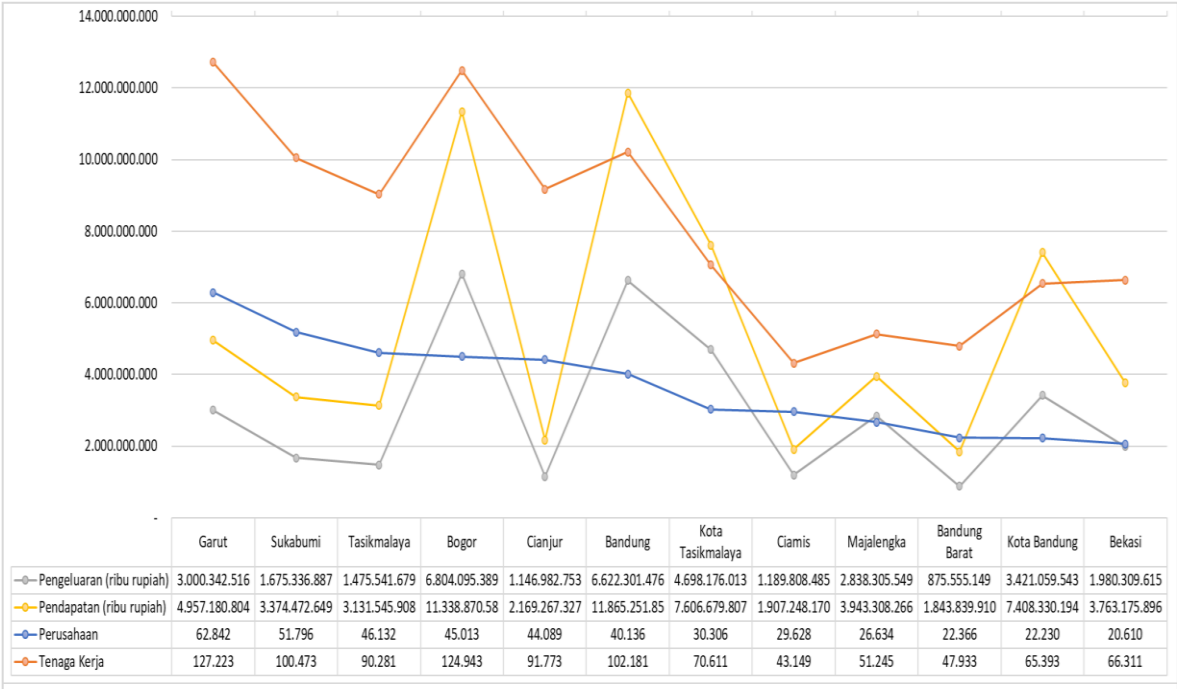


Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Pada industri mikro dan kecil, pada tahun 2021 Kabupaten Bekasi berada di posisi ke-12 di antara kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan sebanyak 20.610 perusahaan. Pada penyerapan tenaga kerja, Kabupaten Bekasi berada pada posisi ke-8 dengan

jumlah tenaga kerja sebanyak 66.311 orang. Sementara pada pendapatan perusahaan, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-11 dengan pendapatan sebesar Rp.3.763.175.896.000,-. Adapun kabupaten/kota yang menduduki posisi pertama dengan jumlah perusahaan terbanyak adalah Kabupaten Garut dengan 62.842 perusahaan, juga menyerap tenaga kerja terbanyak dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 127.223 orang. Walaupun begitu, pendapatan perusahaan terbesar diraih oleh Kabupaten Bandung dengan total pendapatan sebesar Rp.11.865.251.851.000,- berikut keuntungan terbesar bila dilihat melalui selisih antara pendapatan dan pengeluaran dengan keuntungan sebesar Rp.5.242.950.375.000,-.

Gambar 2.35
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran, dan Pendapatan pada Industri Mikro dan Kecil menurut 12 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Pada sektor pertanian, produktivitas padi terbesar di Jawa Barat pada tahun 2022 ditempati oleh Kota Bandung dengan produktivitas sebesar 69,21 Ku/Ha. Sementara posisi ke-2 ditempati oleh Kota Sukabumi dengan produktivitas sebesar 61,34 Ku/Ha. Kabupaten Indramayu dan Karawang yang biasanya berada di urutas teratas di tahun 2022 berada pada urutan ke-3 dan ke-5 dengan produktivitas masing-masing sebesar 61,14 Ku/Ha dan 60,13 Ku/Ha. Sedangkan Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-16 dengan produktivitas sebesar 54,70 Ku/Ha, menurun dibandingkan tahun 2021 dengan produktivitas sebesar 58,56 Ku/Ha.

Tabel 2.35

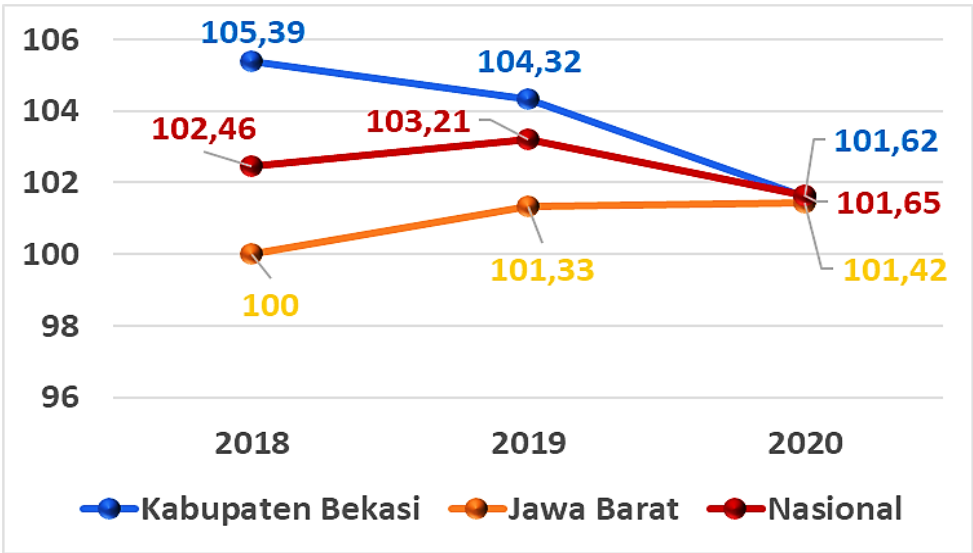
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi Padi (ton)			Produksi Beras (ton)		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1.	Kota Bandung	1.074,49	1.025,58	1.000,87	63,28	69,21	69,16	6.799,08	7.097,77	6.922,37	3.906,11	4.098,84	3.997,55
2.	Kota Sukabumi	2.335,74	2.456,16	2.232,57	62,22	61,57	61,34	14.532,67	15.123,41	13.693,60	8.349,12	8.733,49	7.907,81
3.	Indramayu	226.626,09	227.051,34	245.222,01	60,16	58,12	61,14	1.363.311,87	1.319.623,64	1.499.321,13	783.232,64	762.059,06	865.831,14
4.	Bandung	50.150,32	50.552,68	48.207,94	55,27	61,46	60,16	277.156,28	310.715,20	290.016,36	159.228,31	179.432,48	167.479,26
5.	Karawang	181.915,22	197.916,26	207.475,53	59,80	62,36	60,13	1.087.873,90	1.234.133,75	1.247.615,98	624.991,50	712.690,17	720.475,90
6.	Subang	169.416,08	163.946,73	178.501,54	57,30	58,52	59,21	970.759,74	959.456,43	1.056.843,77	557.708,57	554.068,92	610.308,38
7.	Kota Cimahi	77,49	76,62	65,26	56,45	57,78	58,28	437,44	442,71	380,34	251,30	255,64	219,65
8.	Garut	77.873,41	75.965,56	80.081,14	54,56	58,36	57,59	424.913,90	443.319,91	461.149,85	244.116,16	256.009,32	266.305,80
9.	Cirebon	83.233,39	84.946,29	85.326,91	59,72	54,71	57,28	497.080,10	464.730,69	488.758,85	285.576,14	268.373,64	282.249,48
10.	Majalengka	98.037,63	97.515,62	101.848,63	57,77	54,79	56,15	566.334,48	534.250,18	571.890,55	325.363,32	308.519,92	330.256,56
11.	Kuningan	45.785,65	47.236,30	49.082,22	60,57	58,41	56,08	277.317,90	275.893,22	275.249,65	159.321,16	159.323,40	158.951,75
12.	Kota Tasikmalaya	7.569,30	8.539,85	10.374,47	48,02	57,52	55,87	36.349,80	49.118,08	57.964,38	20.883,22	28.364,81	33.473,40
13.	Tasikmalaya	72.941,41	82.934,85	84.331,04	60,92	53,77	55,63	444.358,24	445.909,19	469.166,35	255.287,06	257.504,59	270.935,18
14.	Ciamis	52.925,20	55.013,02	56.730,52	53,43	58,23	55,48	282.791,46	320.330,73	314.713,74	162.465,77	184.985,27	181.741,56
15.	Kota Banjar	5.344,06	5.723,33	5.978,36	53,09	62,24	55,08	28.371,86	35.624,74	32.925,82	16.299,84	20.572,65	19.014,07
16.	Bekasi	103.171,69	100.338,32	104.199,80	48,86	58,56	54,70	504.103,31	587.586,07	569.924,83	289.611,04	339.320,44	329.121,40
17.	Bogor	55.692,05	57.426,46	57.382,94	53,68	49,66	54,39	298.974,65	285.154,00	312.129,03	171.763,14	164.671,32	180.248,93
18.	Purwakarta	30.315,68	32.930,64	34.578,53	52,76	50,98	54,32	159.957,49	167.865,29	187.841,60	91.896,76	96.939,21	108.475,16
19.	Bandung Barat	29.196,89	27.654,55	30.194,64	56,39	52,97	53,59	164.640,49	146.494,62	161.824,09	94.587,16	84.598,00	93.450,51
20.	Cianjur	113.856,46	113.538,50	118.166,63	54,72	53,88	53,46	622.992,32	611.773,02	631.728,18	357.913,67	353.287,96	364.811,69
21.	Sukabumi	93.371,47	89.510,44	95.979,75	55,85	55,07	53,37	521.459,25	492.926,27	512.267,96	299.582,16	284.656,12	295.825,59
22.	Kota Cirebon	225,82	231,68	159,80	45,67	53,72	52,76	1.031,24	1.244,61	843,13	592,46	718,72	486,91
23.	Sumedang	55.892,07	53.341,28	57.292,36	54,96	49,12	52,67	307.178,00	262.037,84	301.748,27	176.475,99	151.322,18	174.254,23
24.	Kota Bogor	33,32	36,09	30,92	45,70	47,69	51,14	152,26	172,10	158,11	87,48	99,38	91,32
25.	Pangandaran	29.313,07	27.677,79	30.364,72	52,87	50,58	50,53	154.982,57	140.000,72	153.421,61	89.038,63	80.847,91	88.598,22
26.	Kota Depok	30,99	45,39	14,55	61,06	53,83	48,67	189,23	244,35	70,82	108,72	141,11	40,90
27.	Kota Bekasi	483,64	477,98	471,48	56,30	48,21	41,65	2.723,05	2.304,54	1.963,86	1.564,41	1.330,84	1.134,10
	Jumlah	1.586.888,63	1.604.109,31	1.685.295,13	56,82	56,81	57,09	9.016.772,58	9.113.573,08	9.620.534,23	5.180.201,84	5.262.925,39	5.555.686,45

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Pada kesejahteraan petani, selama tahun 2018 dan 2019 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi berada di atas nilai tukar petani Jawa Barat dan Nasional dengan nilai sebesar 105,39 dan 104,32 yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Walaupun demikian nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi terus mengalami penurunan hingga ke angka 101,62 di tahun 2020, lebih rendah dibandingkan nilai petani nasional meski masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tukar petani Jawa Barat.

Gambar 2.36
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional
Tahun 2018-2020



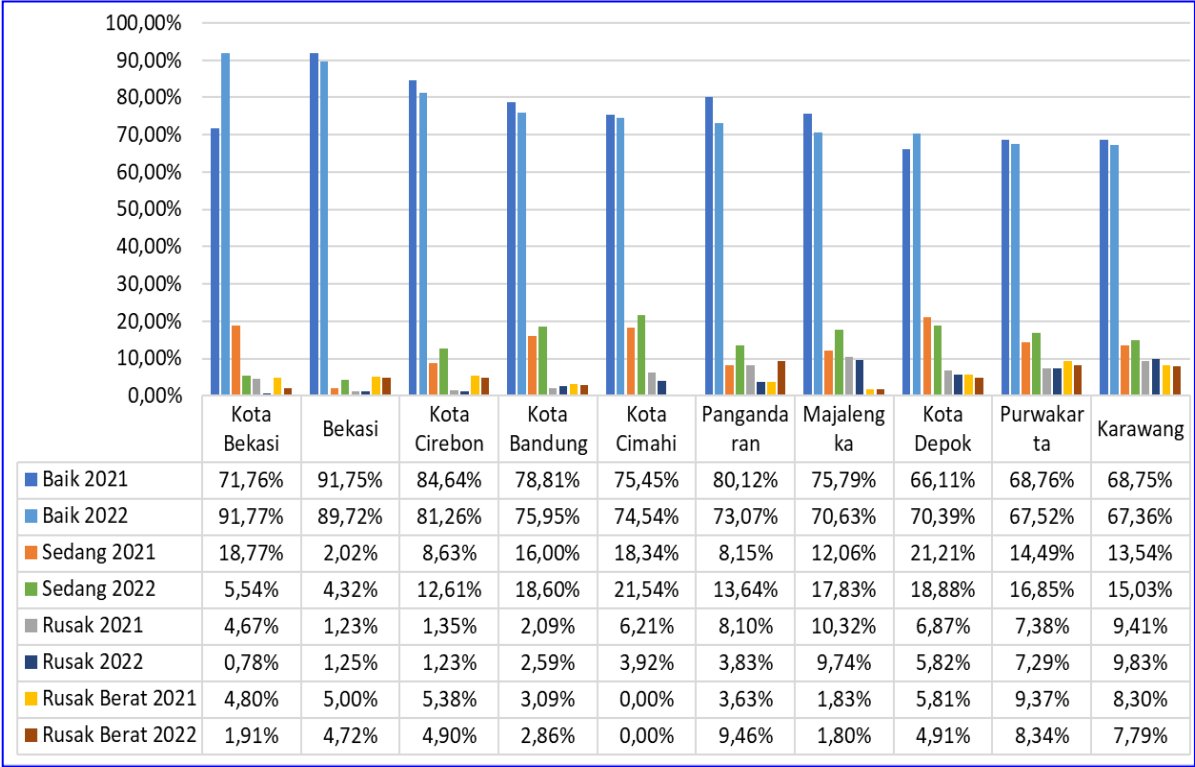
Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat 2020, serta Statistik Nasional Tahun 2020 dan 2022

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Meskipun jarak antara Kabupaten Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat cukup jauh, yakni sejauh 77,84 Km, namun lokasinya yang cukup dekat ke ibukota negara, yakni Jakarta yang hanya sejauh 29 Km memberikan keuntungan terhadap akses maupun fasilitas wilayah. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bekasi terhubung dengan ruas tol Jabodetabek yang juga terhubung dengan ruas tol trans dan nontrans Jawa sehingga memudahkan akses ke dalam dan ke luar Kabupaten Bekasi. Di samping itu, persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya masih berada pada posisi ke-2 dengan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik sebesar 89,72%, kondisi sedang sebesar 4,32%, rusak sebesar 1,25%, dan rusak berat sebesar 4,72%. Sementara yang menduduki posisi teratas untuk kabupaten/kota dengan panjang jalan

kondisi baik terpanjang adalah Kota Bekasi dengan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 91,77%, kondisi sedang sebesar 5,54%, kondisi rusak sebesar 0,78%, dan rusak berat sebesar 1,91%.

Gambar 2.37
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023, diolah

Sementara pada ketersediaan akomodasi pada hotel bintang, pada tahun 2022 Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-3 di Provinsi Jawa Barat dengan akomodasi terbanyak setelah Kota Bandung dan Kota Bogor, dengan jumlah akomodasi sebanyak 35 unit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 33 unit. Begitu pula pada ketersediaan kamar yang juga menempati urutan ke-3 dengan jumlah kamar sebanyak 4.149 kamar, juga meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Meski demikian, ketersediaan tempat tidur yang dimiliki oleh hotel bintang di Kabupaten Bekasi masih kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang berada di urutan ke-4 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 5.738 unit. Dengan ketersediaan akomodasi, kamar, dan tempat tidur pada hotel bintang yang tidak kalah bersaing dengan kabupaten/kota lainnya ini membuat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk penyelenggaraan event atau perjalanan bisnis.

Tabel 2.36
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten/Kota	Akomodasi			Kamar			Tempat Tidur		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
1.	Kota Bandung	201	193	199	19.376	18.545	19.121	30.497	29.643	30.564
2.	Kota Bogor	39	43	44	4.583	4.888	5.001	7.368	7.798	7.979
3.	Bekasi	33	33	35	4.101	3.912	4.149	5.271	4.773	5.062
4.	Bogor	34	33	32	4.202	3.856	3.739	6.625	5.918	5.738
5.	Kota Cirebon	28	28	26	2.133	2.162	2.007	3.108	3.360	3.120
6.	Kota Bekasi	24	26	26	2.915	3.087	3.087	4.018	4.201	4.201
7.	Cianjur	16	19	22	2.003	2.051	2.374	3.635	3.890	4.504
8.	Bandung Barat	20	19	21	1.617	1.203	1.329	2.723	2.113	2.335
9.	Bandung	21	21	18	1.303	1.325	1.135	1.751	1.965	1.684
10.	Karawang	18	18	18	2.300	2.298	2.298	2.903	2.913	2.913
11.	Pangandaran	5	10	16	430	371	593	636	656	1.049
12.	Subang	7	7	12	502	497	852	837	922	1.580
13.	Kota Tasikmalaya	10	11	10	782	831	755	1.221	1.342	1.220
14.	Garut	9	8	9	606	535	601	1.072	901	1.013
15.	Kota Sukabumi	8	8	8	642	637	637	1.052	1.073	1.073
16.	Cirebon	7	7	7	736	738	738	1.080	1.082	1.082
17.	Sukabumi	7	7	7	534	517	517	825	792	792
18.	Kuningan	6	6	7	507	454	529	869	761	887
19.	Sumedang	6	9	6	385	630	420	619	1.022	681
20.	Kota Depok	5	5	5	734	714	714	1.187	1.187	1.187
21.	Indramayu	4	4	4	169	191	191	226	256	256
22.	Purwakarta	3	3	3	337	377	377	522	602	602
23.	Majalengka	1	1	2	101	113	226	176	182	364
24.	Kota Cimahi	1	1	1	88	87	87	216	138	138
25.	Tasikmalaya	1	1	1	39	34	34	56	49	49
26.	Ciamis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	514	521	539	51.125	50.053	51.511	78.493	77.539	80.073

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Pada ketersediaan fasilitas pendidikan, Kabupaten Bekasi menduduki urutan pertama di antara kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah TK terbanyak untuk tahun 2022, yaitu sebanyak 863 TK meskipun jumlah guru yang ada masih di bawah Kota Bekasi yang berada di urutan ke-2. Untuk tahun 2022, jumlah guru dan murid TK yang ada di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 2.323 orang dan 31.426 orang. Sementara Kota Bekasi dengan jumlah TK sebanyak 789 TK, jumlah guru dan muridnya tercatat sebanyak 2.712 orang dan 30.168 orang.

Pada jenjang SD, kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki jumlah SD terbanyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah SD sebanyak 1.886 SD, serta guru dan murid sebanyak 18.699 orang dan 535.957 orang. Setelah Kabupaten

Bogor, posisi ke dua hingga ke enam ditempati oleh Kabupaten Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Sementara itu, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-7 dengan jumlah SD serta guru dan murid SD sebanyak 1.051 SD, 13.839 orang guru, dan 334.664 orang murid.

Pada jenjang SMP, posisi pertama kabupaten/kota dengan jumlah SMP terbanyak di Jawa Barat ditempati oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah sekolah sebanyak 779 SMP, jumlah guru sebanyak 9.189 orang, dan jumlah murid sebanyak 219.148 orang. Sedangkan Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-2 dengan jumlah sekolah sebanyak 424 SMP, jumlah guru sebanyak 5.907 orang, dan jumlah murid sebanyak 122.486 orang.

Tabel 2.37
Jumlah Sekolah, Guru, Rombongan Belajar pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2022/2023

No.	Kabupaten/Kota	TK			SD			SMP		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
1.	Kab. Bogor	675	1.703	21.911	1.886	18.699	535.957	779	9.189	219.148
2.	Kab. Bekasi	863	2.323	31.426	1.051	13.839	334.664	424	5.907	122.486
3.	Kab. Cianjur	353	814	9.474	1.241	10.256	252.596	423	4.728	97.805
4.	Kab. Garut	764	1.629	25.801	1.535	10.287	267.032	421	5.449	103.418
5.	Kab. Sukabumi	302	818	12.161	1.221	8.754	235.293	368	4.111	82.028
6.	Kab. Bandung	642	1.534	23.969	1.422	13.720	356.489	356	6.330	133.154
7.	Kota Bekasi	789	2.712	30.168	719	11.217	225.361	305	4.909	94.365
8.	Kab. Tasikmalaya	352	908	12.241	1.059	7.672	155.221	294	3.833	62.862
9.	Kota Bandung	498	1.641	20.284	483	9.347	203.188	269	5.036	96.910
10.	Kota Depok	496	1.686	18.303	443	7.454	157.888	263	3.855	72.300
11.	Kab. Indramayu	494	1.393	21.461	896	6.948	164.662	218	3.513	60.644
12.	Kab. Cirebon	326	1.291	17.527	881	8.776	199.393	212	4.449	80.053
13.	Kab. Karawang	391	1.336	16.287	950	9.152	236.903	207	3.657	86.703
14.	Kab. Bandung Barat	243	574	9.068	693	6.278	158.280	195	3.080	60.781
15.	Kab. Subang	347	1.206	13.103	886	7.372	141.676	183	3.322	60.010
16.	Kab. Ciamis	304	609	8.326	741	5.897	86.915	134	2.298	37.050
17.	Kab. Sumedang	299	598	9.395	609	5.894	101.268	129	2.460	42.418
18.	Kota Bogor	154	558	6.120	282	4.694	99.946	127	2.063	41.802
19.	Kab. Majalengka	398	970	15.365	674	5.707	113.357	124	2.230	39.714
20.	Kab. Purwakarta	173	486	6.400	420	4.120	100.478	122	1.869	38.233
21.	Kab. Kuningan	333	945	12.592	656	6.052	98.347	112	2.474	40.166
22.	Kota Tasikmalaya	100	424	4.658	230	3.028	62.417	87	1.695	28.228
23.	Kab. Pangandaran	122	263	3.966	287	2.109	31.055	54	958	13.377
24.	Kota Cirebon	101	378	3.840	163	1.876	33.226	52	1.067	17.592
25.	Kota Sukabumi	66	256	2.682	124	1.651	32.479	49	830	14.915
26.	Kota Cimahi	111	327	4.055	116	1.909	47.232	48	988	21.400
27.	Kota Banjar	32	85	933	87	906	14.461	28	502	7.858
	Total	9.728	27.467	361.516	19.755	193.614	4.445.784	5.983	90.802	1.775.420

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Sedangkan terkait dengan urusan kesehatan, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bekasi tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 118 unit, lebih banyak dibandingkan Kota Bekasi dan berada pada posisi ke-3 terbesar di antara kabupaten/kota di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor dan Kota Bandung. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah rumah sakit khusus sebanyak 1 unit sehingga jumlah rumah sakit khusus di Kabupaten Bekasi yang pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 3 unit, bertambah menjadi 4 unit.

Tabel 2.38
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan 2022

No.	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas						Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	Rawat Inap		Non Rawat Inap		Jumlah		2021	2022
						2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1.	Bogor	24	26	5	3	30	30	71	71	101	101	130	130
2.	Kota Bandung	22	23	15	15	7	7	73	73	80	80	117	118
3.	Bekasi	49	49	3	4	11	11	33	35	44	46	96	99
4.	Kota Bekasi	44	43	3	3	-	-	47	48	47	48	94	94
5.	Karawang	22	23	3	2	26	31	24	19	50	50	75	75
6.	Garut	7	7	-	-	32	33	35	34	67	67	74	74
7.	Bandung	10	11	-	-	5	5	57	57	62	62	72	73
8.	Cirebon	9	10	3	2	11	11	49	49	60	60	72	72
9.	Sukabumi	9	9	-	-	5	10	53	48	58	58	67	67
10.	Kota Depok	20	22	4	4	9	-	29	38	38	38	62	64
11.	Indramayu	10	11	1	1	10	10	39	39	49	49	60	61
12.	Cianjur	5	5	-	-	8	39	39	8	47	47	52	52
13.	Subang	8	9	1	1	25	25	15	15	40	40	49	50
14.	Kuningan	11	11	1	1	6	6	31	31	37	37	49	49
15.	Kota Bogor	17	17	5	5	10	-	15	25	25	25	47	47
16.	Ciamis	5	5	1	1	23	23	14	14	37	37	43	43
17.	Tasikmalaya	1	1	1	1	18	19	22	21	40	40	42	42
18.	Bandung Barat	6	6	3	3	6	6	26	26	32	32	41	41
19.	Sumedang	3	3	-	-	17	17	18	18	35	35	38	38
20.	Majalengka	3	3	2	2	9	9	23	23	32	32	37	37
21.	Kota Tasikmalaya	7	8	5	5	6	9	16	13	22	22	34	35
22.	Kota Cirebon	10	9	1	1	-	-	22	22	22	22	33	32
23.	Purwakarta	11	9	-	2	7	7	13	13	20	20	31	31
24.	Kota Sukabumi	6	6	-	-	-	-	15	15	15	15	21	21
25.	Kota Cimahi	7	7	1	1	1	-	12	13	13	13	21	21
26.	Pangandaran	1	1	-	-	11	11	4	4	15	15	16	16
27.	Kota Banjar	4	4	-	-	2	2	8	8	10	10	14	14
	Jumlah	331	338	58	57	295	321	803	780	1.098	1.101	1.487	1.496

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Sementara terkait dengan tenaga kesehatan, meski jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Bekasi merupakan yang terbanyak di Jawa Barat, namun jumlah dokter umum, spesialis dan gigi yang ada di rumah sakit dan puskesmas

berada di urutan ke-5 setelah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 922 orang, menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 593 orang. Demikian halnya dengan dokter umum yang jumlahnya juga berkurang dari 769 orang menjadi 764 orang. Hal yang sama juga terjadi pada dokter gigi yang berkurang dari 156 orang menjadi 148 orang. Pengurangan jumlah dokter spesialis, umum, dan gigi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga dialami oleh Kota Bekasi dan Depok. Sebagaimana fasilitas pendidikan, masyarakat di Kabupaten Bekasi juga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Kabupaten Bogor dan Karawang apabila fasilitas yang tersedia kurang memadai. Dengan akses jalan yang cukup baik dan pilihan transportasi saat ini yang juga tidak kalah banyak, masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat keluar dan masuk ke Kabupaten Bekasi dengan mudah.

Tabel 2.39
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021 dan 2022

Kabupaten/ Kota	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kota Bandung	708	1.266	2.280	2.292	2.367	317	5.355	3.875
Kota Bekasi	1.277	1.018	950	900	210	214	2.437	2.132
Bogor	700	715	818	790	143	151	1.661	1.656
Kota Depok	1.138	832	710	596	224	122	2.072	1.550
Bekasi	922	593	769	764	156	148	1.847	1.505

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Terakhir terkait dengan komunikasi, sampai dengan tahun 2021 terdapat 17 kantor pos pembantu di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dari 187 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi, 176-nya atau sebanyak 94,12% telah terjangkau sinyal 4G/LTE. Sedangkan sisanya sebanyak 10 desa atau 5,35% terjangkau sinyal 3G/H/H+/EVDO, dan 1 desa atau 0,53% terjangkau sinyal 2,5G/E/GPRS. Dengan terjangkaunya seluruh desa/kelurahan dengan sinyal internet walaupun belum seluruhnya 4G/LTE, maka komunikasi masyarakat dengan teman, keluarga, rekan bisnis atau lainnya baik di dalam maupun luar Kabupaten Bekasi menjadi lebih mudah. Pembelajaran maupun bisnis secara online pun dapat dilaksanakan dengan baik.

Fokus Iklim Berinvestasi

Selama tahun 2020-2022, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan nilai investasi penanaman modal asing terbesar di Jawa Barat dengan nilai investasi di tahun 2022 sebesar USD2.031.287.700,-. Diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan nilai investasi sebesar USD2.010.759.500,-. Demikian halnya pada investasi penanaman modal dalam negeri, Kabupaten Bekasi selama 3 tahun terakhir menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp.17.880.344.800.000,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kota Bekasi dengan investasi sebesar Rp.8.934.590.600.000,- serta Kabupaten Karawang dengan investasi sebesar Rp.8.340.734.800.000,-. Untuk lebih jelasnya, realisasi investasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.40
Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri
Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
MODAL ASING (US DOLLAR)				
1.	Kabupaten Bekasi	1.799.475.800	2.156.574.400	2.031.287.700
2.	Kabupaten Karawang	988.858.300	1.275.707.300	2.010.759.500
3.	Kabupaten Purwakarta	256.309.900	150.574.800	397.495.400
4.	Kabupaten Bandung Barat	204.345.700	179.849.100	389.771.800
5.	Kota Bekasi	199.489.700	207.476.900	306.632.200
6.	Kota Bandung	139.024.900	170.487.100	268.680.400
7.	Kabupaten Bandung	197.891.800	79.155.000	184.153.900
8.	Kabupaten Cirebon	324.773.300	326.478.400	163.731.600
9.	Kabupaten Bogor	198.576.500	318.015.500	131.802.800
10.	Kota Cimahi	57.607.400	24.470.200	105.582.900
11.	Kabupaten Subang	289.736.400	177.548.100	91.123.400
12.	Kabupaten Sukabumi	14.698.000	3.325.500	77.870.800
13.	Kabupaten Majalengka	13.780.100	37.576.300	60.245.300
14.	Kabupaten Indramayu	13.129.300	8.528.700	54.123.700
15.	Kota Depok	49.475.300	19.665.100	53.285.000
16.	Kabupaten Cianjur	5.913.600	1.508.100	51.544.500
17.	Kabupaten Garut	28.038.800	57.029.800	50.031.300
18.	Kota Cirebon	698.900	516.700	39.937.300
19.	Kabupaten Sumedang	2.606.600	5.457.600	36.941.700
20.	Kota Bogor	5.681.900	17.675.700	18.779.800
21.	Kabupaten Kuningan	3.065.300	13.900	6.301.500
22.	Kabupaten Tasikmalaya	-	-	1.535.500
23.	Kabupaten Ciamis	4.100	7.500	1.073.200
24.	Kota Sukabumi	268.200	21.900	996.300
25.	Kabupaten Pangandaran	-	-	736.800
26.	Kota Tasikmalaya	257.400	27.700	25.500
27.	Kota Banjar	-	-	300
MODAL DALAM NEGERI (RUPIAH)				

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Bekasi	11.411.416.100.000	11.777.338.500.000	17.880.344.800.000
2.	Kota Bekasi	3.788.747.200.000	5.137.934.300.000	8.934.590.600.000
3.	Kabupaten Karawang	2.500.160.500.000	8.007.088.200.000	8.340.734.800.000
4.	Kabupaten Sukabumi	1.490.129.400.000	1.973.182.500.000	6.995.185.900.000
5.	Kota Bandung	8.623.643.400.000	8.957.383.500.000	3.932.863.700.000
6.	Kota Depok	7.175.435.000.000	3.228.806.300.000	3.250.560.400.000
7.	Kabupaten Bandung	1.096.964.700.000	1.237.274.100.000	3.098.687.200.000
8.	Kabupaten Purwakarta	3.291.093.200.000	2.531.784.000.000	2.633.715.600.000
9.	Kabupaten Sumedang	1.142.822.900.000	4.169.640.000.000	2.485.589.200.000
10.	Kabupaten Majalengka	793.739.700.000	650.688.400.000	1.803.641.200.000
11.	Kabupaten Subang	78.271.300.000	2.833.960.500.000	1.719.866.600.000
12.	Kota Bogor	1.521.396.200.000	360.406.900.000	1.301.954.200.000
13.	Kabupaten Indramayu	355.297.400.000	1.783.530.100.000	1.023.491.800.000
14.	Kabupaten Bandung Barat	174.945.700.000	192.648.400.000	704.358.400.000
15.	Kabupaten Cirebon	278.957.800.000	93.806.900.000	679.680.600.000
16.	Kabupaten Cianjur	508.728.600.000	943.701.500.000	521.570.900.000
17.	Kabupaten Garut	322.553.700.000	457.449.000.000	447.291.300.000
18.	Kota Cimahi	261.506.800.000	48.317.500.000	444.512.500.000
19.	Kabupaten Pangandaran	11.209.700.000	18.942.100.000	404.638.200.000
20.	Kota Cirebon	30.731.500.000	72.586.000.000	218.467.000.000
21.	Kabupaten Tasikmalaya	141.219.500.000	8.599.700.000	189.518.600.000
22.	Kota Tasikmalaya	15.401.100.000	952.800.000	127.438.200.000
23.	Kabupaten Kuningan	1.926.000.000	7.256.400.000	119.304.600.000
24.	Kota Sukabumi	77.707.000.000	197.184.200.000	56.409.200.000
25.	Kota Banjar	5.391.800.000	1.086.900.000	29.562.400.000
26.	Kabupaten Ciamis	254.700.000	3.077.500.000	15.970.700.000
27.	Kabupaten Bogor	6.300.894.400.000	5.253.904.200.000	-

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada keamanan wilayah terhadap bencana, kelas resiko bencana Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 telah turun dari kategori tinggi di tahun 2017 ke kategori sedang dengan indeks resiko bencana di tahun 2022 sebesar 124,10 yang juga menurun bila dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu, resiko bencana Kabupaten Bekasi juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Subang yang juga sama-sama memiliki potensi di sektor industri, serta lebih rendah dibandingkan dengan indeks resiko Jawa Barat dengan nilai indeks sebesar 131,62.

Bencana utama yang terjadi di Kabupaten Bekasi hingga saat ini adalah banjir. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya untuk mengurangi jumlah dan titik rawan banjir, antara lain dengan melakukan normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan drainase, mendorong pembuatan lubang biopori, dan sebagainya. Untuk ke depannya,

banjir masih akan menjadi fokus utama bencana yang akan dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.41
Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2022

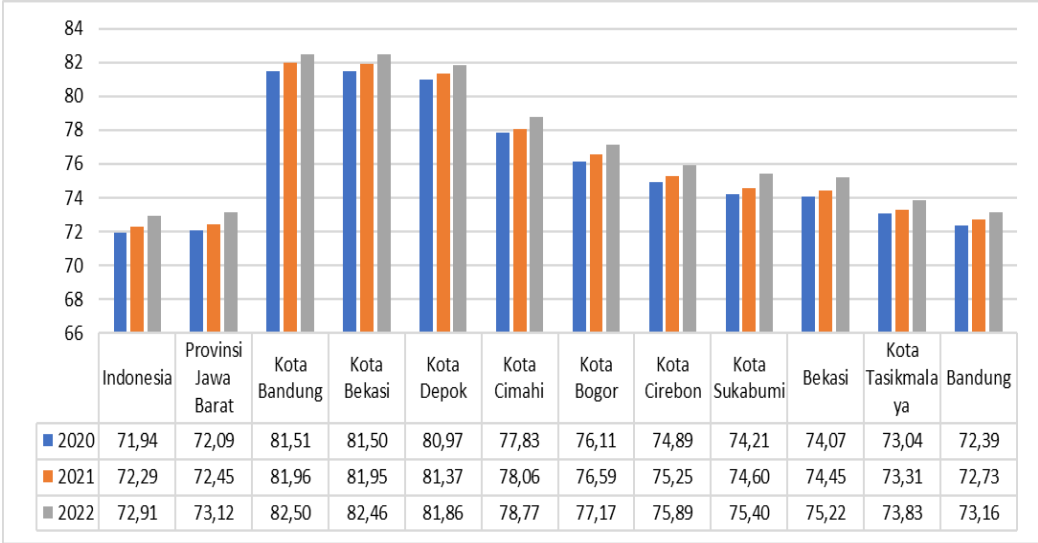
No.	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	Kelas Resiko 2022
1.	Cianjur	215,08	197,08	207,62	Tinggi
2.	Sukabumi	190,75	192,40	186,61	Tinggi
3.	Tasikmalaya	203,01	186,51	174,11	Tinggi
4.	Garut	205,52	185,00	164,91	Tinggi
5.	Karawang	174,43	165,58	157,81	Tinggi
6.	Subang	171,91	168,78	157,25	Tinggi
7.	Cirebon	160,63	147,51	156,58	Tinggi
8.	Bandung	174,00	161,89	145,94	Tinggi
9.	Kota Banjar	152,80	152,80	145,04	Tinggi
10.	Kota Cirebon	172,76	157,19	141,07	Sedang
11.	Pangandaran	145,44	129,21	137,36	Sedang
12.	Majalengka	143,43	124,74	136,35	Sedang
13.	Ciamis	141,57	122,22	133,52	Sedang
14.	Sumedang	142,15	124,39	129,87	Sedang
15.	Purwakarta	137,31	124,53	128,98	Sedang
16.	Kota Bekasi	131,60	123,18	124,95	Sedang
17.	Bekasi	132,89	130,11	124,10	Sedang
18.	Indramayu	136,79	114,59	122,49	Sedang
19.	Bogor	136,88	125,31	116,54	Sedang
20.	Kota Tasikmalaya	119,20	117,37	114,69	Sedang
21.	Kuningan	131,13	131,13	113,58	Sedang
22.	Bandung Barat	110,22	108,18	108,89	Sedang
23.	Kota Bandung	122,32	111,32	103,05	Sedang
24.	Kota Sukabumi	114,40	102,67	92,91	Sedang
25.	Kota Cimahi	105,41	91,71	82,01	Sedang
26.	Kota Depok	89,63	82,56	76,53	Sedang
27.	Kota Bogor	75,75	65,38	71,01	Sedang

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022

Fokus Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022, sebagaimana tahun sebelumnya Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 di antara kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi di Jawa Barat, yakni setelah Kota Bandung, Bekasi, Depok, Cimahi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi dengan nilai IPM sebesar 75,22 atau berada di atas IPM Jawa Barat yang hanya sebesar 73,12 dan Indonesia dengan IPM sebesar 72,91. Sementara di antara kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi berada di urutan teratas, diikuti dengan Kabupaten Bandung dengan nilai IPM sebesar 73,16.

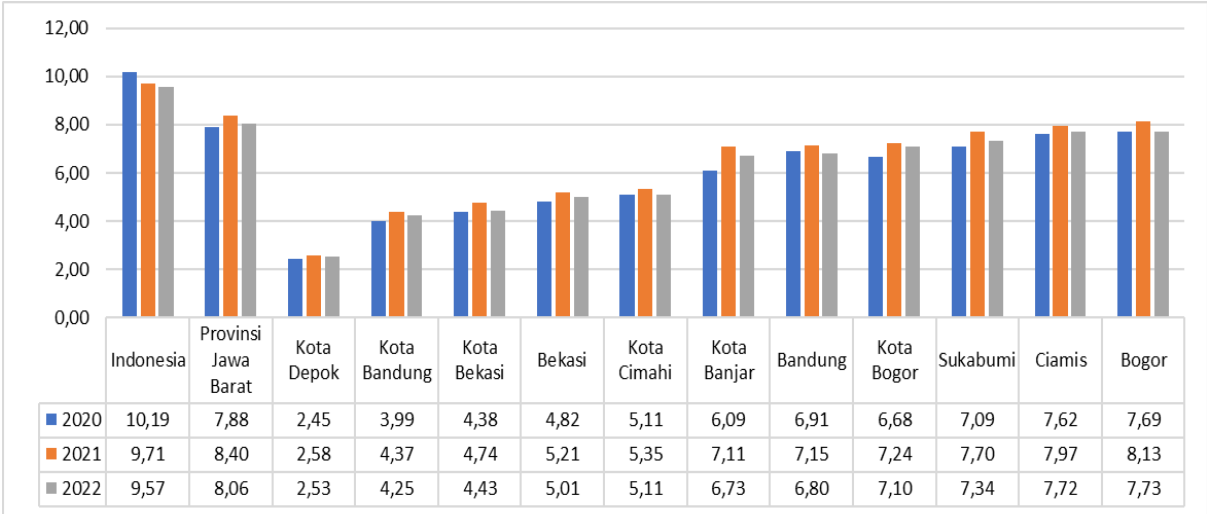
Gambar 2.38
IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi Tahun 2020-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Meskipun Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-7 sebagai salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, dan Indramayu, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 terkecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni setelah Kota Depok, Bandung, dan Bekasi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 201.100 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,01%, menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi juga berada di bawah Jawa Barat dan Indonesia dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,06% dan 9,57%

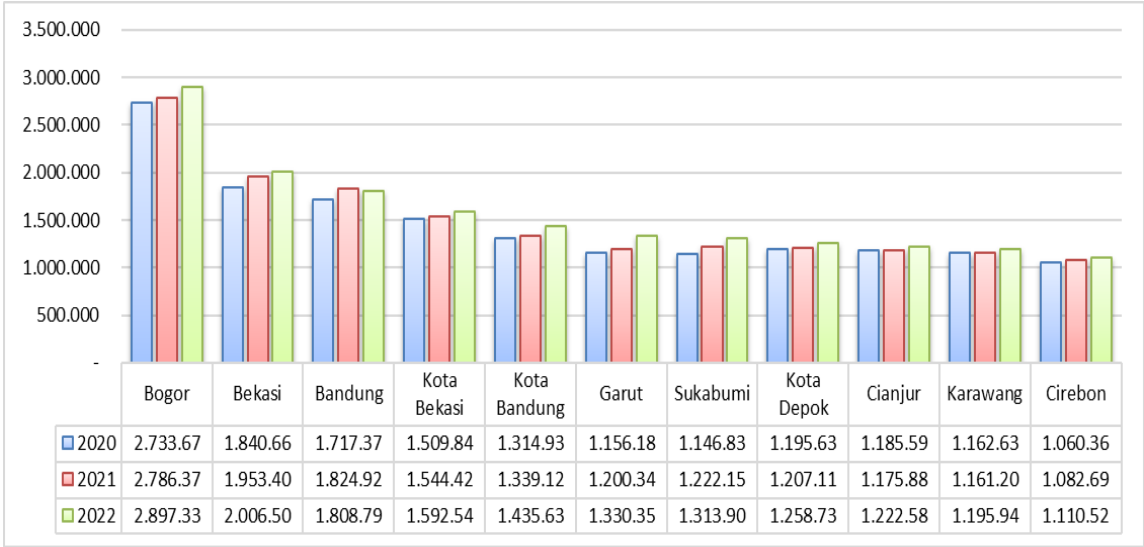
Gambar 2.39
Persentase Penduduk Miskin pada 11 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2020-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Pada sektor ketenagakerjaan, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbanyak ke-2 di tahun 2022 setelah Kabupaten Bogor dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.006.507 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, perusahaan atau industri yang membutuhkan banyak pekerja akan mendapatkan pegawai yang dibutuhkannya dengan mudah dan dapat melakukan seleksi untuk mendapatkan pegawai terbaik dengan banyaknya pilihan dan persaingan di antara angkatan kerja, yang dapat menarik minat perusahaan/industri untuk membangun usahanya di Kabupaten Bekasi. Meski demikian, banyaknya angkatan kerja ini bila tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan beban daerah atas pengangguran. Untuk itu diperlukan adanya upaya dan strategi yang tepat agar seluruh angkatan kerja tersebut dapat bekerja atau memperoleh pekerjaan. Adapun 9 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat yang juga memiliki angkatan kerja yang banyak antara lain: Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.40
11 Kabupaten/Kota dengan Angkatan Kerja Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 disusun dengan mensinergikan kebijakan kabupaten dengan kebijakan pembangunan pusat dan provinsi. Adapun tema pembangunan yang diusung untuk tahun 2022 adalah **Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Kehidupan Masyarakat**

menuju Daya Saing melalui Pembangunan yang Berkualitas dan Bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan prioritas pelaksanaan pembangunan tahun 2022 sebagai berikut:

a. Peningkatan mutu layanan pendidikan

- 1) Penuntasan meubelair SD/SMP/nonformal/kesetaraan
- 2) Pemenuhan alat praktik dan peraga siswa
- 3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- 4) Pembiayaan ujian kesetaraan/nonformal
- 5) Pengembangan kurikulum berkarakter

b. Peningkatan sistem kesehatan daerah

- 1) Peningkatan alat medis/kesehatan
- 2) Peningkatan status fasilitas kesehatan
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- 5) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 6) Peningkatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

c. Penguatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pelayanan dasar, bencana, dan informatika

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar (fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih)
- 2) Pembangunan/pelebaran/peningkatan/rehabilitasi infrastruktur penunjang konektivitas wilayah
- 3) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ekonomi (jalan usaha, tani, jaringan irigasi, sarana distribusi perdagangan, aksesibilitas, destinasi wisata)
- 4) Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi infrastruktur layanan publik dan informatika
- 5) Penanganan dan pengendalian banjir

d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3) Peningkatan kualitas air, udara, dan tanah
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (Darat dan Air)

e. Penguatan perekonomian daerah

- 1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi

- 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian, perikanan, dan angkatan kerja
- 3) Pengembangan destinasi wisata daerah
- 4) Peningkatan nilai tambah produk ekspor dan industri unggulan
- 5) Stabilisasi distribusi dan harga bahan pokok
- 6) Penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat desa
- 7) Penguatan ketahanan pangan daerah

f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial

- 1) Pengembangan inovasi dan kualitas SDM dalam pelayanan publik
- 2) Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Peningkatan layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (SLRT/Puskesmas, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial)

g. Penguatan nilai kesenian, budaya, literasi, pemuda dan olahraga

- 1) Penguatan nilai kesenian dan budaya lokal
- 2) Penguatan literasi masyarakat
- 3) Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi daerah
- 4) Peningkatan kualitas pemuda daerah

h. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah

- 1) Penegakan Peraturan Daerah
- 2) Memperkuat Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial Beragama
- 3) Memperkuat Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa

i. Optimalisasi kegiatan lintas sektoral

- 1) P2WKSS
- 2) Pengarusutamaan Gender
- 3) Kabupaten Layak Anak
- 4) Kampung KB
- 5) Berseka
- 6) Kabupaten Sehat
- 7) Stunting
- 8) Citarum Harum
- 9) Adipura

Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 tetap dilaksanakan. Selanjutnya, beberapa program unggulan strategis dari aspek politik masih direncanakan untuk tetap dilaksanakan, antara lain:

1. Pendidikan gratis
2. Kesehatan gratis
3. Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
4. Peningkatan honor RT dan RW
5. Peningkatan tunjangan kepala desa berikut perangkatnya
6. Bantuan permakanaan bagi anak panti, dhuafa dan disabilitas
7. Bantuan bibit dan pupuk pertanian
8. Pemberian honor imam masjid, marbot, penggali kubur, serta pemandi jenazah
9. Pembangunan taman tematik publik
10. Melahirkan 5.000 wirausahawan baru

Adapun untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilakukan melalui pengukuran capaian realisasi fisik dan keuangan, capaian indikator kinerja utama, dan indikator makro daerah.

2.2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Tahun 2022

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada tahun anggaran 2022 untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Bekasi adalah sebesar 92,24% dengan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 83,04%. Capaian tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dengan capaian kinerja sebesar 91,55% dan keuangan sebesar 80,87%, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan capaian kinerja sebesar 91,90% dan keuangan sebesar 90,04%, urusan pilihan dengan capaian kinerja sebesar 98,03% dan realisasi keuangan sebesar 88,11%, unsur pendukung urusan pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 90,31% dan realisasi anggaran sebesar 59,37%, unsur penunjang urusan pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 99,34% dan keuangan sebesar 91,23%, unsur pengawasan urusan pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 85% dan keuangan sebesar 84,95%, unsur kewilayahan dengan capaian kinerja sebesar 95% dengan penyerapan anggaran yang sebesar 91,76%, serta unsur pemerintahan umum dengan capaian kinerja sebesar 86,80% dan realisasi keuangan sebesar 94,95%. Untuk lebih jelasnya, realisasi fisik dan keuangan tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.42
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	5.033.648.366.316	4.545.397.315.092	91,72	Sangat Tinggi	82,33	Tinggi
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	4.236.091.819.937	3.816.777.971.416	91,55	Sangat Tinggi	80,87	Tinggi
1.01	Pendidikan	1.921.634.601.583	1.713.875.053.990	91,28	Sangat Tinggi	88,5	Tinggi
1.02	Kesehatan	1.262.101.382.047	1.131.726.309.281	98,27	Sangat Tinggi	86,36	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	652.535.948.928	594.336.560.960	80,8	Tinggi	90,92	Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	271.451.079.509	262.304.174.049	95,41	Sangat Tinggi	96,63	Sangat Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	96.183.775.108	85.852.185.602	86,8	Tinggi	89,26	Tinggi
1.06	Sosial	32.185.032.762	28.683.687.534	96,71	Sangat Tinggi	89,12	Tinggi
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	797.556.546.379	728.619.343.676	91,9	Sangat Tinggi	90,04	Tinggi
2.07	Tenaga Kerja	29.513.134.444	25.266.915.273	86,77	Tinggi	85,61	Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.149.837.172	16.181.344.493	91,41	Sangat Tinggi	87,44	Tinggi
2.09	Pangan	14.414.319.800	12.719.265.392	90,24	Tinggi	88,24	Tinggi
2.10	Pertanahan	36.370.044.478	34.315.394.802	97,5	Sangat Tinggi	94,35	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	180.936.272.599	158.417.737.995	97,19	Sangat Tinggi	87,55	Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	45.010.573.500	43.243.760.354	92,07	Sangat Tinggi	96,07	Sangat Tinggi
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.438.337.540	19.580.892.151	91,34	Sangat Tinggi	91,34	Sangat Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.583.879.050	43.605.553.115	88,68	Tinggi	60,3	Rendah
2.15	Perhubungan	76.619.845.000	73.229.707.816	96	Sangat Tinggi	95,58	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	46.364.543.000	37.412.968.674	82,1	Tinggi	80,69	Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.342.548.500	15.707.497.160	99,81	Sangat Tinggi	90,57	Tinggi
2.18	Penanaman Modal	27.868.951.695	26.080.552.273	96,06	Sangat Tinggi	93,58	Sangat Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	185.693.123.300	183.740.213.555	100	Sangat Tinggi	98,95	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	571.716.000	510.942.590	66,72	Sedang	77,85	Tinggi
2.21	Persandian	445.346.000	373.223.000	85	Tinggi	83,81	Tinggi
2.22	Kebudayaan	24.548.677.301	22.805.798.373	95	Sangat Tinggi	92,9	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	1.915.137.000	1.868.096.480	100	Sangat Tinggi	97,54	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	14.770.260.000	13.559.480.180	98,32	Sangat Tinggi	91,8	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN	139.303.775.653	123.516.865.248	98,03	Sangat Tinggi	88,11	Tinggi
3.25	Kelautan dan Perikanan	15.819.889.000	14.185.694.466	100	Sangat Tinggi	84,77	Tinggi
3.26	Pariwisata	19.854.830.200	17.637.861.196	100	Sangat Tinggi	88,83	Tinggi
3.27	Pertanian	47.103.117.870	40.674.653.839	96,45	Sangat Tinggi	86,35	Tinggi
3.30	Perdagangan	43.335.317.583	39.006.668.746	97,11	Sangat Tinggi	90,01	Tinggi
3.31	Perindustrian	12.740.621.000	11.630.582.058	100	Sangat Tinggi	91,29	Sangat Tinggi
3.32	Transmigrasi	450.000.000	381.404.943	94,59	Sangat Tinggi	84,76	Tinggi
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	325.163.344.421	290.166.731.740	90,31	Tinggi	59,37	Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	204.754.889.321	193.057.312.702	95	Sangat Tinggi	94,29	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	120.408.455.100	97.109.419.038	85,62	Tinggi	74,27	Sedang
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.028.408.558.460	965.078.970.801	99,34	Sangat Tinggi	91,23	Sangat Tinggi
5.01	Perencanaan	28.088.403.735	26.810.879.786	98,65	Sangat Tinggi	95,45	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	941.364.211.958	886.621.299.157	98,06	Sangat Tinggi	94,18	Sangat Tinggi
5.03	Kepegawaian	30.044.695.000	24.815.857.627	100	Sangat Tinggi	82,59	Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	10.803.810.000	10.251.699.700	100	Sangat Tinggi	94,89	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	18.107.437.767	16.579.234.531	100	Sangat Tinggi	91,56	Sangat Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	38.020.303.000	32.298.891.329	85	Tinggi	84,95	Tinggi
6.01	Inspektorat	38.020.303.000	32.298.891.329	85	Tinggi	84,95	Tinggi
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	202.689.534.215	186.189.678.645	95	Sangat Tinggi	91,76	Sangat Tinggi
7.01	Kecamatan	202.689.534.215	186.189.678.645	95	Sangat Tinggi	91,76	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.626.625.900	27.180.948.447	86,8	Tinggi	94,95	Sangat Tinggi
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	28.626.625.900	27.180.948.447	86,8	Tinggi	94,95	Sangat Tinggi
	TOTAL	6.795.860.507.965	6.169.829.401.302	92,24	Sangat Tinggi	83,04	Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Adapun tingkat capaian kinerja program dan kegiatan serta anggaran sampai Triwulan IV tahun 2022 sebagaimana disajikan sebelumnya secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan kerja yang telah dipersiapkan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
3. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

B. Faktor Penghambat

1. Terdapat kendala utama di dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) khususnya pada fitur penatausahaan keuangan yang masih belum bisa digunakan oleh *user* perangkat daerah, sehingga proses pencairan/penyerapan anggaran di triwulan IV terhambat.
2. Keterbatasan SDM personal
3. Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, tindak lanjut yang disarankan antara lain:

1. Merumuskan anggaran yang tepat untuk dilakukan *refocussing* ke urusan wajib pelayanan dasar.
2. Melakukan penyerapan anggaran sesuai aliran/ arus kas.
3. Merumuskan suatu inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi di segala bidang.
4. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi agar pembangunan yang dituju tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

6. Merumuskan strategi-strategi pembiayaan dan pendanaan pembangunan sesuai aturan berlaku, yang bisa melibatkan sektor swasta/perusahaan untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

Untuk lebih jelasnya, Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran II dokumen ini.

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2017, indikator sasaran daerah untuk tahun 2017-2022 seluruhnya berjumlah 53 indikator. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, seluruh indikator tersebut kemudian dirumuskan kembali menjadi 14 indikator kinerja utama dengan pendekatan *cascading* kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama daerah, secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2019-2021 telah cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 91,92%, 94,61%, dan 88,32%. Rata-rata capaian yang rendah hanya terjadi di tahun 2018 akibat tidak tercapainya indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan rata-rata capaian sebesar -265%. Dari 14 indikator pada 11 sasaran pada indikator kinerja utama, hanya 2 indikator yang capaiannya masih rendah, yakni indikator predikat kabupaten/kota layak anak yang selama tahun 2019-2022 targetnya tidak tercapai karena kategorinya tidak mengalami peningkatan, serta indikator tingkat pengangguran terbuka dimana tingkat capaiannya selama 3 tahun terakhir sangat rendah. Selain itu, 1 indikator yakni predikat LPPD juga selama 4 tahun terakhir tidak dapat diukur karena tidak keluarnya penetapan peringkat dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2022, capaian kinerja pemerintah daerah menunjukkan 2 sasaran daerah dengan 2 indikator kerjanya melebihi target yang ditetapkan, sedangkan 11 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target yang ditetapkan, dan 1 indikator belum dapat dihitung karena belum keluarnya penetapan peringkat dari Kementerian Dalam Negeri. Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 68,76%.

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Capaian Kinerja														
					2018			2019			2020			2021			2022		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penunjang Urusan																			
1	Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	76,15	80	76,7	95,875	82	79,78	97,29	85	80,03	94,15	87	82,72	95,08	90,00	89,97	99,97
		Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	Ranking	36	36 Nasional (Kabupaten)	27	133,3	30 Nasional (Kabupaten)	tidak keluar penetapan peringkat se-nasional	-	25 Nasional (Kabupaten)	tidak keluar penetapan peringkat se-nasional	-	20 nasional (kabupaten)	belum keluar penetapan peringkat se-nasional	-	10 nasional (kabupaten)	belum keluar penetapan peringkat se-nasional	-
Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																			
2	Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	72,47	80	80,1	100,125	81	55,63	68,68	83	83,21	100,25	85	89,07	104,79	86,00	62,37	72,52
Urusan Keuangan																			
3	Optimalnya penggalian sumber pendapatan daerah serta pengelolaan asset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4,81%	0,18%	-9,42%	(5.233)	6,57%	13,57%	206,54	6,62%	2,28%	34,46	6,67%	6,72%	100,75	6,71%	-0,25%	(3,73)
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WDP	-
Urusan Tenaga Kerja																			
4	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,03%	8,11%	9,69%	83,69	7,47%	8,84%	84,50	6,83%	12%	31,04	6,19%	10,09%	61,35	5,55%	10,31%	53,83
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,55	88,85	88,28	99,36	89,34	88,68	99,26	89,83	88,58	98,60	90,32	88,88	98,41	90,81	89,49	98,55

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Capaian Kinerja															
					2018			2019			2020			2021			2022			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
6	Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	100	Madya	Pratama	-	Nindya	Tidak ada penilaian	-	Utama	Pratama	-	KLA	Pratama	-	
Urusan Pariwisata																				
7	Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	-	20%	12,90%	64,50	40%	16%	40	60%	48%	79,59	80%	84,75%	105,94	100%	97%	97,00	
Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah																				
8	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	Persen	8,00%	20%	20,00%	100,00	40%	32%	80	60%	73%	121,67	80%	113%	141,25	100%	121,80%	121,80	
		Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	Persen	8,00%	20%	28,80%	144,00	40%	35,60%	89	60%	89%	148,00	80%	120,4%	150,50	100%	89,05%	89,05	
Bidang Pendidikan																				
9	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	-	66,22	65,72	99,24	67,66	65,8	97,25	69,07	66,76	96,66	70,52	67,39	95,56	71,93	68,18	94,79	
Urusan Kesehatan Kesehatan																				
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UHH	Poin	73,3	73,34	73,34	100,00	73,39	73,56	100,23	73,44	73,68	100,32	73,49	73,81	100,44	73,54	74,04	100,68	
Urusan Lingkungan Hidup																				
11	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Persen	34,6	13	39,16	301,23	25	33,06	132,24	38	49,63	130,60	51	48,025	94,17	63,00	43,71	69,38	
Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah																				
Kabupaten Bekasi								(265)			91,92				94,61		96,02			

Adapun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama, ditemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja, dengan strategi peningkatan capaian sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 - a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - 1) Metode survei telah menggunakan fasilitas *google form*.
 - 2) Penggunaan *scan barcode* pada ruang pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik, sehingga mempercepat proses penilaian oleh pengguna layanan.
 - 3) Penggunaan aplikasi Sitepak (Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Administrasi Kependudukan) untuk mempercepat pelayanan secara online sehingga mempermudah pelayanan administrasi kependudukan dan pengumpulan data kependudukan.
 - 4) Sebagian besar perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik telah memiliki kebijakan pelayanan berupa standar pelayanan.
 - b. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
 - 1) Masih terdapat perangkat daerah yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat sehingga sulit dalam melaksanakan perbaikan layanan.
 - 2) Masih terdapat jenis pelayanan publik pada perangkat daerah yang belum ditetapkan standar pelayanannya.
 - 3) Masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan perangkat yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk secara *online*.
 - 4) Masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan perangkat yang mendukung pelayanan pencatatan sipil online.
 - 5) Masih terdapat data layanan yang belum sesuai, sehingga menghambat proses pemberian layanan.
 - c. Strategi peningkatan capaian
 - 1) Meningkatkan alokasi dukungan anggaran dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah pengampu pelayanan publik.
 - 2) Pelaksanaan SKM pada perangkat daerah melibatkan Bagian Organisasi (terkait penyampaian rencana pelaksanaan, metode, cara pengambilan sampel dan dalam proses pengolahan data).
 - 3) Sosialisasi penyusunan SKM sesuai Permenpan RB no 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- 4) Inventarisasi jenis pelayanan publik yang belum memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP).
- 5) Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Di pertengahan tahun 2022 perusahaan secara bertahap sudah mulai beroperasi secara normal setelah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas perekonomian mulai berangsur pulih.
 - 2) Integrasi program pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bekasi yang kemudian diaplikasikan melalui program pemagangan kerja.
 - 3) Adanya pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran Daerah guna menjaring calon tenaga kerja lokal mendapatkan lapangan pekerjaan untuk dapat mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Bekasi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya *gap*/kesenjangan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
 - 2) Lemahnya pelaporan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja.
 - 3) Regulasi penempatan tenaga kerja yang masih lemah.
 - 4) Kurikulum sekolah (terutama SMK) dan silabus/program pelatihan LPK/BLK yang belum sesuai dengan standar Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
 - 5) Belum adanya MOU antara DUDI dengan SMK dan LPK.
 - d. Strategi peningkatan capaian
 - 1) Menyusun modul pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi yang di butuhkan perusahaan.
 - 2) Peningkatan kerjasama bursa kerja *online*.
 - 3) Membuat regulasi terkait jaringan kerja sama penempatan tenaga kerja.
 - 4) Penyesuaian kurikulum sekolah (SMK) dengan standar dunia usaha dan dunia industri.
 - 5) Mempercepat pelaksanaan MOU antara DUDI dengan SMK dan LPK.
3. Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional/Indeks Capaian LPPD
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Pemahaman penyusun perangkat daerah mengenai penyusunan dokumen LPPD cukup baik dari tahun ke tahun.
 - 2) Pemanfaatan aplikasi LPPD oleh perangkat daerah mampu menyajikan data IKK yang valid.
 - 3) Pelaksanaan bimbingan teknis telah meningkatkan pemahaman bagi perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Telah dibentuk tim evaluasi mandiri pada masing-masing perangkat daerah untuk mempermudah koordinasi antar bidang selaku penyelenggara IKK dan sekretariat selaku tim penyusun perangkat daerah.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Terdapat IKK dalam satu perangkat daerah, dimana untuk pemenuhan data pendukungnya memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
 - 2) Ketersediaan data pendukung IKK belum optimal.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Memfasilitasi perangkat daerah yang memerlukan data dari perangkat daerah lainnya.
 - 2) Memaksimalkan peran tim evaluasi mandiri dalam meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan ketersediaan data pendukung IKK.
4. Indeks Pembangunan Gender
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
- 1) *Policy Will* kebijakan yang kuat dari *top manager* dalam mengeksekusi Pengarustamaan Gender (PUG) dalam wujud pengejawantahan program dan kegiatan.
 - 2) Alokasi anggaran yang mendukung program sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum dan sosial budaya.
 - 3) Telah terbentuk Kaukus Perempuan Politik Indonesia di Kabupaten Bekasi.
 - 4) Tim pengarusutamaan gender telah terstruktur dengan baik melalui penetapan keputusan Bupati Bekasi.
 - 5) Telah memiliki kebijakan dalam pengarusutamaan gender.
 - 6) Alokasi anggaran untuk mendukung program peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

- 7) Telah memiliki Pokja PUG yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bekasi.
 - 8) Alokasi anggaran yang mendukung perlindungan perempuan dan telah memiliki peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.
 - 9) Alokasi anggaran yang mendukung perlindungan perempuan dan telah memiliki Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA).
 - 10) Alokasi anggaran bagi program-program pemberdayaan perempuan dari bidang ekonomi seperti usaha mikro dan industri kreatif oleh perangkat daerah.
 - 11) Efektifnya pelaksanaan Program P2WKSS dalam pemahaman masyarakat mengenai *profit and benefit* dalam mencapai P2WKSS.
 - 12) Telah memiliki Kader Sekoper Cinta (SEKOCI), Fasilitator dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang menggerakkan Program Sekoci.
 - 13) Telah memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 - 14) Telah memiliki dokumentasi lengkap berupa buku data gender dan anak dalam bentuk data terpilah sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Belum terintegrasi dan terstrukturnya program pengentasan PUG pada Perangkat Daerah.
 - 2) Masih banyak kaum perempuan yang belum memahami dan peduli untuk ikut terlibat dalam partisipasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial.
 - 3) Kesempatan, akses dan peluang yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya masih kurang.
 - 4) Kesenjangan gender masih besar.
 - 5) Angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.
 - 6) Masih rendahnya hak akses perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan teknologi.
 - 7) Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik.
 - 8) Masih terdapat pernikahan anak usia dini.
 - 9) Kurangnya sosialisasi pentingnya kesetaraan gender di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

- 10) Belum optimalnya sosialisasi pencegahan pada seluruh lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan.
 - 11) Belum optimalnya pengetahuan lembaga perlindungan perempuan dalam hal ini Satgas PPA Tingkat Desa mengenai tugas dan fungsinya.
 - 12) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang kekerasan terhadap perempuan baik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun Tindakan Pidana Penjualan Orang (TPPO).
 - 13) Masih belum optimalnya lembaga pencegahan dan penanganan korban kekerasan anak dan perempuan dalam melaksanakan tugasnya.
 - 14) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mensukseskan P2WKSS di wilayahnya masing-masing.
 - 15) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Sekoper Cinta.
 - 16) Minimnya petugas/SDM yang sesuai kebutuhan UPTD PPA, seperti: psikolog klinis, psikolog forensik, pekerja sosial dan analis hukum.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu merumuskan dan merencanakan program pembangunan dengan upaya yang terstruktur dan terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan kecamatan. Prioritas-prioritas untuk meningkatkan IPG terutama meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta program-program ekonomi khususnya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
 - 2) Perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman yang terus menerus dan berkesinambungan untuk kaum perempuan dalam meningkatkan partisipasinya dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.
 - 3) Perlu adanya kebijakan dan konsistensi dari pemangku kepentingan yang bisa menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
 - 4) Perlu adanya kolaborasi yang terencana dan terstruktur dengan baik antara instansi dan lembaga-lembaga yang bisa melakukan

pemberdayaan perempuan dengan menyediakan program yang berkesinambungan.

- 5) Peningkatan potensi diri perempuan agar lebih mandiri dan berkarya.
 - 6) Peningkatan kesadaran peran perempuan dalam pembangunan, dengan mengikutsertakan perempuan dalam proses pembangunan sehingga mampu menjadi perempuan-perempuan yang kuat dan mandiri.
 - 7) Perlu diberikan perhatian khusus pada kecamatan-kecamatan dengan IPG rendah, seperti Cibarusah, Cabangbungin, Bojongmangu, Pebayuran dan Tambun Utara. Kecamatan-kecamatan tersebut termasuk dalam kecamatan dengan jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas sekolah dasar dan menengah yang relatif lebih rendah dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi.
 - 8) Sosialisasi secara berkesinambungan pada lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan.
 - 9) Pembinaan dan penguatan kapasitas pada seluruh Satgas PPA Tingkat Desa agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
 - 10) Sosialisasi secara berkesinambungan terkait KDRT dan PPO.
 - 11) Penguatan koordinasi antar lembaga layanan perlindungan perempuan yang ada di Kabupaten Bekasi sehingga dapat berkolaborasi dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan
 - 12) Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang melalui program industri rumah tangga, industri kreatif, usaha mikro di samping terus menciptakan lapangan pekerjaan yang merata di seluruh kecamatan.
 - 13) Peningkatan sinergitas dan kesadaran masing-masing Perangkat Daerah serta seluruh masyarakat mengenai pentingnya pencapaian P2WKSS pada suatu wilayah sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan daerah lebih masif.
 - 14) Sosialisasi program Sekoper Cinta kepada masyarakat.
 - 15) Penguatan koorinasi dengan Kementerian PPPA terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF).
 - 16) Sinkronisasi data gender dan anak dengan seluruh Perangkat Daerah.
5. Predikat Kabupaten Layak Anak
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Anggaran yang mendukung program KLA pada seluruh dinas/instansi terkait sudah memadai.
- 2) Telah memiliki regulasi terkait Kabupaten Layak Anak yang memadai berupa Peraturan Daerah tentang KLA dan Surat Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA.
- 3) Ketua Gugus Tugas KLA dapat Memfasilitasi Pertemuan antar Dinas/Instansi Terkait dalam mencapai Kabupaten Layak Anak.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Kurangnya komitmen dari Gugus Tugas KLA terhadap program KLA.
- 2) Kurangnya fasilitas sarana prasarana yang ramah anak di sekolah.
- 3) Kurangnya fasilitas informasi layak anak.
- 4) Kurangnya kawasan tanpa rokok.
- 5) Kurang tersedianya fasilitas kegiatan untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- 6) Kurangnya pelayanan bagi anak penyandang disabilitas.
- 7) Kurang fasilitas bantuan bencana untuk anak dengan kondisi darurat yang ramah anak.
- 8) Kurangnya fasilitas laktasi di semua kantor.
- 9) Pemahaman beberapa perangkat daerah dan instansi tentang Perda KLA dan 24 indikator KLA masih Rendah.
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang diberikan untuk pencapaian KLA di Kabupaten Bekasi.

c. Strategi peningkatan capaian

- 1) Bappeda sebagai Ketua Gugus Tugas KLA menekankan komitmen pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha dan media massa untuk bersinergi dalam mencapai Kabupaten Layak Anak.
- 2) Meningkatkan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi dengan perangkat daerah terkait, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah.
- 3) Pemetaan kebutuhan anggaran dalam pencapaian program KLA di Kabupaten Bekasi.

6. Indeks Pendidikan

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Tersedianya dukungan anggaran pemerintah daerah dan sumber daya manusia memadai untuk kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Dukungan dimaksud berupa:
 - Peningkatan kemampuan baca tulis Qur'an (BTQ) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2012.
 - Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2019.
 - Sanggar budaya
 - Sarana olahraga, seni, dan keagamaan
 - 2) Penyediaan tambahan kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
 - 3) Pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan bantuan alokasi dana untuk sosialisasi tata kelola BOS.
 - 4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terutama dari sisi anggaran pendidikan yang dialokasikan lebih dari 20%.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Pembelajaran di sekolah masih menggunakan moda daring/PBJ di Kabupaten Bekasi.
 - 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.
 - 3) Masih kurangnya tenaga ahli dalam berbagai bidang bakat di sekolah.
 - 4) Belum optimalnya sosialisasi kebijakan baru terkait pendidikan.
 - 5) Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan serta implementator pendidikan.
 - 6) Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB- ABK) di setiap satuan pendidikan.
 - 7) Belum meratanya kompetensi pengelola BOS di seluruh satuan pendidikan.
 - 8) Banyaknya PAUD yang belum berizin.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan akses pendidikan.
 - 2) Pemberian pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

- 3) Pemberian beasiswa bagi tenaga pendidik yang kurang mampu namun berprestasi.
 - 4) Pembinaan pada satuan pendidikan PAUD.
 - 5) Peningkatan kompetensi manajerial pada kepala sekolah PAUD seperti kegiatan manajemen berbasis sekolah dan pembinaan sekolah sehat.
 - 6) Pemenuhan sarana belajar atau alat peraga (penunjang peralatan laboratorium, komputer, perpustakaan, akses internet) pada seluruh satuan pendidikan termasuk PAUD.
 - 7) Pemenuhan sarana prasarana pengembangan karir, biaya melanjutkan kuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pendidik.
 - 8) Pemenuhan sarana penunjang satuan pendidikan nonformal.
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) masuk dalam kategori sedang. Hasil Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 tersebut lebih baik dari hasil Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021, sehingga membuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bekasi tahun 2022 lebih baik.
 - 2) Pemantauan kualitas air dan kualitas udara ambien sudah dilakukan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bekasi tahun 2022.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Banyaknya masyarakat yang belum memakai sanitasi yang memadai.
 - 2) Adanya perbedaan pengertian atau satuan IKLH dalam RPJMD dengan yang dihitung. IKLH dalam RPJMD dinyatakan % sementara IKLH sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 yaitu berupa angka saja.
 - 3) Meningkatnya pertumbuhan penduduk tidak dimitigasi dengan baik, diantaranya penyediaan IPAL komunal yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk.

- 4) Proses bisnis untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang melibatkan lintas sektor tidak berjalan dengan baik.
 - 5) Semakin banyaknya industri beroperasi kembali setelah pandemi Covid-19.
 - 6) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) karena belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Pembuatan sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
 - 2) Pembuatan instalasi pengolahan air limbah komunal.
 - 3) Pembahasan lintas sektor penanganan masalah lingkungan hidup dengan *stakeholder* terkait secara rutin.
 - 4) Meningkatkan pengawasan terhadap industri yang beroperasi.
 - 5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS).
 - 6) Penambahan ruang terbuka hijau.
8. Indeks Profesionalitas ASN
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
- 1) Pengukuran IPP dilaksanakan oleh BKN melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
 - 2) Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan minimal S1 cukup tinggi.
 - 3) Adanya pelimpahan kewenangan pemberian hukuman disiplin ASN kepada kepala perangkat daerah untuk meningkatkan pengendalian dan pembinaan disiplin pegawai di masing masing perangkat daerah.
 - 4) Meningkatnya motivasi pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikannya.
 - 5) Efektifnya sosialisasi peraturan pembinaan disiplin pegawai.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Sebelum tahun 2021, pengukuran IP ASN masih dimungkinkan menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui pengukuran mandiri dan melalui SAPK. Sedangkan mulai tahun 2022 (untuk pengukuran IP ASN tahun 2021) hanya dilakukan melalui penarikan data pada SAPK sehingga besar kecilnya nilai IP ASN sangat tergantung kepada data yang sudah di-*entry* ke SAPK.

- 2) *Update data* SAPK biasanya diprioritaskan untuk yang akan naik pangkat terlebih dahulu.
- 3) Target pengukuran IPP masih berdasarkan perhitungan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019. Sedangkan mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pengukuran indeks profesionalitas ASN Kabupaten Bekasi sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sehingga hasilnya jauh di bawah target.
- 4) Anggaran untuk pengembangan kompetensi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan diklat dan sertifikasi bagi seluruh ASN.
- 5) Rendahnya kesadaran pegawai untuk mengisi komponen indeks profesionalitas ASN.
- c. Strategi peningkatan capaian
 - 1) Percepatan *entry* dan *update data* SAPK BKN melalui edaran dari Sekretaris Daerah.
 - 2) Melakukan sosialisasi dan *workshop* bagi operator SAPK perangkat daerah.
 - 3) Meningkatkan anggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi.
 - 4) Implementasi *metode talent pool* dalam rangka mendorong peningkatan sistem Merit.
 - 5) Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja ASN.
9. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Telah diterbitkannya Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.304-Bapenda/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.305-Bapenda/2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

- 2) Pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - 3) Pelaksanaan pelayanan keliling pembayaran PBB-P2.
 - 4) Pemberian penghargaan (*reward*) kepada desa/kelurahan atas keberhasilan pemungutan PBB-P2.
 - 5) Dilakukan pembinaan kepada perangkat daerah pengelola pendapatan daerah dari sektor retribusi dan lain-lain pad yang sah.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 tentang Sumber Tenaga Listrik sebagai Objek Pajak Penerangan Jalan sehingga Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari selain PLN tidak dapat dipungut.
 - 2) Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) belum bisa dipungut sampai Peraturan Daerah selesai diundangkan.
 - 3) Adanya penurunan tingkat suku bunga deposito dari 4% menjadi 3% sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dari bunga deposito.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan pemungutan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga retribusi PTKA dapat segera dipungut.
 - 2) Percepatan penetapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah (tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).
 - 3) Menyiapkan Rancangan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru sebagai salah satu komponen pendukung ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
 - 5) Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nomor: KU.03.01/60/PKS/TKKSD-Bapenda/2022, KU.03.01/61/PKS/TKKSD-Bapenda/2022 dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi

Jakarta Raya Nomor: KU.03.01/62/PKS/TKKSD-Bapenda/2022, sebagai dasar untuk intensifikasi pajak daerah.

10. Opini BPK

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Laporan keuangan seluruhnya tersaji secara lengkap.
- 2) Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 3) Pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai.
- 4) Tidak terdapat adanya kondisi yang dikecualikan dalam laporan keuangan.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Masih perlunya perbaikan aplikasi untuk mendukung efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
- 2) Belum adanya sinergitas aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Aplikasi SIPD) dengan aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Aplikasi SIMDA).

c. Strategi peningkatan capaian

- 1) Melaksanakan percepatan penyelesaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.
- 2) Melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Aplikasi SIPD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Aplikasi SIMDA).
- 3) Penyajian laporan keuangan sesuai SAP.
- 4) Melakukan perbaikan pada aplikasi yang telah ada seperti kecepatan jaringan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

11. Persentase Pertumbuhan UMKM baru

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Adanya kebijakan berupa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 tahun 2020 tentang Pola Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
- 2) Adanya bantuan bagi pelaku usaha mikro dan wirausaha baru/pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.
- 3) Peluang kemitraan usaha mikro dengan usaha besar terbuka luas karena posisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri.

- 4) Adanya bantuan CSR dari perusahaan bagi pelaku usaha mikro serta dukungan dari Perbankan, BUMN dan stakeholder lainnya.
- 5) Dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat bagi pelaku usaha mikro.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Minimnya permodalan, usaha mikro cenderung mengandalkan keuangan pribadi untuk memulai usahanya dan sulit mengakses lembaga keuangan.
- 2) Sumber daya manusia wirausaha masih banyak yang belum memahami teknologi.
- 3) Belum maksimalnya bantuan CSR bagi wirausaha.
- 4) Kurangnya kemampuan manajemen bagi UMKM.
- 5) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar wirausaha yang pada umumnya merupakan unit usaha perorangan.
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan UMKM.
- 7) Kondisi pandemi Covid-19 telah membuat daya beli masyarakat berkurang terhadap produk UMKM.

c. Strategi peningkatan capaian

- 1) Meningkatkan kelas wirausaha baru dari *Star Up* menjadi *Scale Up*.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- 3) Melakukan perluasan strategi pemberdayaan dan pemasaran melalui lembaga/instansi lainnya.
- 4) Penguatan jaringan usaha dan kompetensi berbasis kemampuan penetrasi pasar wirausaha yang pada umumnya merupakan unit usaha perorangan.
- 5) Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana usaha sesuai kebutuhan serta pelatihan *Market Place* bagi pelaku usaha mikro.

12. Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Penyelenggaraan pameran pada wirausaha baru sektor industri kecil menengah.
- 2) Banyaknya pelatihan, sosialisasi, serta *workshop* yang diberikan kepada para wirausahawan baru.

- 3) Peningkatan keahlian dan keterampilan pelaku IKM.
- 4) Pembinaan kerjasama antara industri kecil menengah dengan industri besar.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Adanya wabah Covid-19 menyebabkan pelaksanaan pelatihan, sosialisasi ataupun workshop kepada para pelaku wirausaha baru sektor IKM tidak optimal.
- 2) Motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha masih rendah.
- 3) Akses permodalan yang masih sulit didapatkan.

c. Strategi peningkatan capaian

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan secara lebih jelas peluang pasar hasil produksi IKM.
- 2) Menarik minat masyarakat di Kabupaten Bekasi untuk menjadi wirausaha baru.
- 3) Pelatihan, sosialisasi, *workshop*, pendampingan yang lebih beragam terhadap pengembangan wirausaha baru.
- 4) Melaksanakan kemitraan dengan industri besar dan *stakeholder* lainnya.
- 5) Menggerakkan para pelaku IKM untuk memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- 6) Peningkatan fasilitasi dalam bidang promosi dan pemasaran serta permodalan.
- 7) Peningkatan kualitas hasil produksi IKM dengan meningkatkan variasi dan diversifikasi produk.

13. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Dukungan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi.
- 2) Banyaknya kelompok penggiat pariwisata di destinasi wisata.
- 3) Sarana dan prasarana sebagai pendukung destinasi wisata cukup memadai.
- 4) Fasilitas di destinasi telah optimal.
- 5) Dukungan sumber daya manusia dan sarana media promosi (aplikasi dan media sosial).
- 6) Masyarakat sudah menggunakan *smartphone* dalam mencari informasi pariwisata.
- 7) Banyaknya jumlah pengunjung ke *stand* pameran pariwisata.

- 8) Telah memiliki aplikasi kunjungan wisata untuk mengakses informasi kepariwisataan dan data kunjungan wisatawan.
 - 9) Tingginya minat dan peran para pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung industri pariwisata.
 - 10) Tingginya minat para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk atau merek dagang.
 - 11) Tingginya semangat penggiat pariwisata dalam mengembangkan destinasi di wilayahnya.
 - 12) Tingginya antusias masyarakat, pelajar, pengajar untuk mengikuti pelatihan dasar tentang kepariwisataan.
 - 13) Tersertifikasinya tenaga kerja bidang pariwisata.
 - 14) Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif.
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Akses jalan menuju destinasi wisata belum memadai.
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan pelayanan wisata.
 - 3) Minimnya akses infrastruktur menuju destinasi wisata.
 - 4) Terbatasnya sarana penunjang pariwisata dan amenitas pariwisata (*home stay* dan jejaring wisata).
 - 5) Belum optimalnya promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.
 - 6) Terbatasnya penggunaan aplikasi kunjungan wisatawan karena saat ini hanya bisa diakses oleh pengguna android.
 - 7) Infrastruktur pendukung ekonomi kreatif belum optimal.
 - 8) Keterbatasan pengetahuan para pelaku ekonomi kreatif terhadap perlindungan hasil kreativitas.
 - 9) Belum maksimalnya kolaborasi antara penggiat pariwisata dengan stakeholdernya.
 - 10) Keterbatasan sarana dan media edukasi bagi SDM Pariwisata untuk belajar secara langsung ke lapangan/kunjungan ke destinasi.
 - 11) Keterbatasan dukungan anggaran terhadap sertifikasi profesi pariwisata.
- c. Strategi peningkatan capaian
- 1) Pemenuhan akses jalan menuju destinasi wisata.
 - 2) Pembinaan terhadap pengelola destinasi wisata secara berkesinambungan.

- 3) Kolaborasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk mendukung akses menuju destinasi wisata.
- 4) Peningkatan kualitas amenities di destinasi wisata.
- 5) Promosi dan publikasi sarana dan prasarana destinasi wisata di Kabupaten Bekasi.
- 6) Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
- 7) Fasilitasi bagi pengelola destinasi dan pelaku ekonomi kreatif dalam mempromosikan produknya.
- 8) Fasilitasi wisatawan dalam mengakses informasi pariwisata melalui aplikasi. Sedangkan untuk jasa usaha pariwisata dapat meng-*input* informasi kepariwisataan serta data kunjungan wisatawan.
- 9) Menyiapkan fasilitas infrastruktur yang diperlukan para pelaku ekonomi kreatif.
- 10) Memfasilitasi dan mengasah kreativitas pelaku ekonomi kreatif untuk berkreasi dan mampu bersaing di dunia industri kreatif.
- 11) Pembinaan bagi penggiat pariwisata secara berkala.
- 12) Fasilitasi SDM kepariwisataan untuk berlatih secara mudah dengan sarana yang memadai dan tepat sasaran.
- 13) Memaksimalkan fungsi inovasi dengan menggerakkan *stakeholder*, komunitas, media dan pengusaha untuk melakukan peningkatan ketrampilan di bidang pariwisata.
- 14) Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) Kelompok Penggiat Pariwisata.

14. Usia Harapan Hidup

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Pelayanan ibu hamil yang sesuai standar sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100,14%. Hal ini dikarenakan kesadaran ibu hamil yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan peran serta kader dan petugas kesehatan yang rutin melakukan penyuluhan di posyandu.
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar sudah mencapai target dengan capaian 100,03%. Hal ini dikarenakan peran aktif kader dan tenaga kesehatan yang melakukan penyuluhan di posyandu.
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sudah mencapai target dengan capaian sebesar 104,68%. Hal ini dikarenakan adanya

kesadaran ibu untuk memeriksa bayi baru lahir di posyandu maupun tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan rumah.

- 4) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sudah mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan petugas kesehatan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan melakukan skrining kesehatan.
- 5) Tenaga kesehatan yang sudah terampil melakukan skrining kesehatan.

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kewenangan.
- 2) Kurangnya alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang belum memadai di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Kurangnya rasio jumlah puskesmas di Kabupaten Bekasi.
- 4) Kurangnya fasilitas rujukan yang mempunyai NICU untuk menangani kasus neonatal.
- 5) Meningkatnya prevalensi stunting.
- 6) Capaian pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular yang masih rendah.
- 7) Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) yang masih rendah.
- 8) Kurangnya akses pelayanan kesehatan rujukan di wilayah perdesaan.
- 9) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bermutu belum optimal.
- 10) Belum tercapainya terget UHC.
- 11) Belum tercapainya desa ODF (BAB sembarangan) 46 desa dari 187 desa.

c. Strategi peningkatan capaian

- 1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan.
- 2) Meningkatkan penyediaan obat serta pengawasan terhadap mutu obat dan makanan.
- 3) Meningkatkan jumlah puskesmas.
- 4) Meningkatkan promosi pelayanan ibu bersalin di posyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan puskesmas membuat inovasi untuk pelayanan terhadap ibu bersalin (kunjungan rumah).
- 5) Meningkatkan kebijakan manajemen kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan.
- 6) Melakukan pemeriksaan kesehatan dengan metode *google form*.

- 7) Melaksanakan pelatihan kader khusus untuk kegiatan lansia di masyarakat.

2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah Tahun 2017-2022

Selama tahun 2017-2018, dari 14 indikator makro daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, terdapat 1 indikator makro daerah yang capaiannya di bawah 80% baik terhadap target RPJMD maupun terhadap target RKPD setiap tahunnya, yakni tingkat pengangguran dengan capaian sebesar 63,9% dan 66,02%. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, namun tingkat pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya dari 10,97% menjadi sebesar 9,74%. Adapun 13 indikator makro daerah lainnya memiliki capaian yang cukup baik dengan rentang capaian di atas 90%. Sementara untuk tahun 2019, selain tingkat pengangguran, indikator lainnya yang capaian di bawah 80% adalah laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat capaian sebesar 67,18% dengan menurunnya laju pertumbuhan dari 6,02% di tahun 2018 menjadi sebesar 3,95%.

Selanjutnya di tahun 2020, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi masih merupakan 2 indikator makro yang capaiannya berada di bawah 80% bila dibandingkan dengan target RPJMD, dengan capaian sebesar 45,58% dan -56,67%. Sementara bila dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2020, capaian kedua indikator makro tersebut juga masih berada di bawah 80% dengan capaian sebesar 78,19% untuk tingkat pengangguran, dan -76,92% untuk laju pertumbuhan ekonomi. Rendahnya capaian pada laju pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pengangguran diakibatkan oleh Covid-19 yang menghambat seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah melambat dari 3,95% ke angka -3,4% dan tingkat pengangguran meningkat dari 9% menjadi 11,54% dengan banyaknya pegawai yang dirumahkan dan perusahaan yang gulung tikar. Melambatnya perekonomian daerah tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Bekasi saja, tapi juga dihadapi oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Pada tahun 2021, selain tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi yang capaiannya bila dibandingkan target RPJMD masih berada di bawah 80%, bertambah 1 indikator lagi yang capaiannya tidak mencapai 80%, yakni indikator persentase penduduk miskin. Meski tidak mencapai target, namun Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 dengan persentase penduduk

miskin terendah di Jawa Barat. Sedangkan bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2021, seluruh capaian target indikator makro daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 berada di atas 80%.

Begitu pula halnya di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target RPJMD, tingkat pengangguran dan persentase penduduk miskin merupakan indikator dengan capaian berada di bawah 80%. Namun dengan membaiknya perekonomian daerah, laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi meningkat sehingga capaiannya berada di atas 80%. Walaupun begitu, posisinya digantikan oleh inflasi yang hanya mampu mencapai 79,7% Sedangkan bila dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022, hanya inflasi yang capaiannya berada di bawah 80% dengan capaian sebesar 45,62%.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian indikator makro daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, maka terdapat 3 indikator yang harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan indikator makro daerah lainnya, yaitu: tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Meski laju pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022 telah membaik, namun realisasinya belum mampu kembali ke angka capaian tahun 2017 dan 2018 sehingga harus ada upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi. Sementara inflasi tidak menjadi perhatian karena realisasinya berfluktuasi selama 5 tahun terakhir dengan capaian yang cukup rendah di tahun 2020 dan 2021. Sementara untuk tahun 2022, inflasi meningkat diperkirakan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang ikut memicu kenaikan harga barang-barang lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah 2 indikator yang sulit untuk dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi dikendalikan oleh industri besar yang menguasai 70% ekonomi daerah. Sedangkan pada inflasi, kesulitan dalam mengendalikan inflasi dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal yang absolut, dimana kebijakan moneter dan fiskal merupakan kewenangan pemerintah pusat. Contohnya adalah ketika pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak, meski pemerintah daerah telah menjaga pasokan pangan, alur distribusi, maupun pasar murah, namun harga bahan pokok tetap mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga inflasi meningkat. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang mendukung dan sinergis dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR	SATU AN	2020									2021									2022								
			TARGET				REALI SASI	CAPAIAN		JABAR	INDON ESIA	TARGET				REALI SASI	CAPAIAN		JABAR	INDON ESIA	TARGET				REALI SASI	CAPAIAN		JABAR	INDON ESIA
			RPJMD	RKPD		% RPJMD		% RKPD	RPJMD			RKPD		% RPJMD	% RKPD		RPJMD	RKPD			% RPJMD	% RKPD	RPJMD	RKPD					
				PESIMI S	MODER AT							OPTIMI S	PESIMIS					MODERA T						OPTIMI S		PESIMI S	MODE RAT		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	74,4	74	74,32	74,4	74,07	99,56%	99,77%	72,09	71,94	75,03	74,08	74,46	75,03	74,45	99,23%	99,90%	72,45	72,29	75,64	74,75	74,82	75,64	75,22	99,44%	100,20%	73,12	72,91
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,58	8,86	9,02	9,58	9,12	95,20%	99,64%	8,55	8,48	9,78	9,16	9,19	9,78	9,3	95,09%	99,18%	8,61	8,54	9,97	9,34	9,38	9,97	9,53	95,59%	99,65%	8,78	8,69
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,93	13,1	13,34	13,37	13,09	93,97%	98,64%	12,5	12,98	13,65	13,1	13,27	13,65	13,1	95,97%	98,20%	12,61	13,08	13,93	13,11	13,59	13,93	13,11	94,11%	96,80%	12,62	13,1
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,54	73,57	73,6	73,7	73,68	100,19%	100,08%	73,04	71,47	73,49	73,69	73,94	74,3	73,81	100,44%	99,77%	73,23	71,57	73,54	74,17	74,27	74,64	74,04	100,68%	99,57%	73,52	71,85
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	Juta Rp	338.301.317	325.226.67	327.747.177	333.967.614	317.779.740	93,93%	96,60%	2.084.620.250	15.438.017.500	356.758.404	330.507.631	335.333.865	356.758.404	340.431.180	95,42%	99,87%	2.209.822.380	16.970.789.200	375.215.490	355.796.738	369.661.131	375.215.490	367.573.270	97,96%	100,19%	2.422.782.320	19.588.445.600
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	Juta Rp	274.537.727	260.181.333	262.197.742	267.174.091	242.959.090	88,50%	92,32%	1.453.380.720	10.723.054.800	286.169.581	248.758.358	252.390.849	286.169.581	251.828.570	88,00%	95,96%	1.507.746.390	11.118.868.500	298.123.222	260.811.329	261.901.713	264.243.719	265.130.820	88,93%	101,07%	1.589.984.930	11.710.397.800
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	Rupiah	88.071.620	83.412.477	84.058.925	85.654.311	102.466.000	116,34%	121,44%	43.288.700	57.269.800	90.076.762	81.927.493	83.123.838	90.076.762	107.801.000	119,68%	126,76%	45.299.580	62.236.440	91.964.546	111.137.562	115.468.278	117.203.252	114.338.000	124,33%	99,77%	49.038.000	71.030.850
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	Rupiah	71.471.736	66.729.982	67.247.140	68.523.449	78.341.000	109,61%	116,06%	30.180.540	39.778.890	72.254.021	61.663.171	62.563.607	72.254.021	79.744.000	110,37%	121,76%	30.907.590	40.775.880	73.069.390	81.467.681	81.808.276	82.539.831	82.472.000	112,87%	100,65%	32.182.000	42.463.780
9.	Rasio Gini	indeks	0,33	0,373	0,351	0,33	0,372	88,71%	94,44%	0,403	0,385	0,33	0,381	0,368	0,33	0,34	97,06%	105,78%	0,412	0,381	0,33	0,395	0,376	0,33	0,373	88,47%	98,39%	0,417	0,381
10.	Persentase (%) Penduduk Miskin	%	4,31	5,28	4,31	3,77	4,82	89,42%	92,39%	7,88	10,19	4,15	4,75	4,16	4,15	5,21	79,65%	83,56%	8,4	9,71	4	5,6	4,07	4	5,01	79,84%	90,95%	8,06	9,57
11.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	%	5,26	9,58	9,37	8,12	11,54	45,58%	78,19%	10,46	7,07	4,68	11,15	10,45	9,24	10,09	46,38%	101,88%	9,82	6,49	4,1	10,19	10,05	8,85	10,31	39,77%	94,05%	8,31	5,86
12.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	Rupiah	10.812	10.359	10.494	10.812	11.241	103,97%	106,50%	10.845	11.013	10.905	11.317	11.579	11.617	11.341	104,00%	98,58%	10.934	11.156	10.998	11.441	11.748	11.819	11.757	106,90%	100,75%	11.277	11479
13.	Inflasi (dalam persen)	%	4,55	3	4	4,55	1,79	254,19%	215,08%	2,18	1,7	4,42	2,69	2,69	2,69	1,61*	274,53%	167,08%	1,69	1,87	4,28	2,45	2,45	2,45	5,37*	79,70%	45,62%	6,04	5,51
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	%	6	3,23	4,03	6	-3,4	-56,67%	-76,92%	-2,52	-2,1	6,2	2,29	3,78	4,24	3,65	58,87%	106,21%	3,74	3,7	6,5	3,57	4	4,93	5,30	81,59%	127,28%	5,45	4,13
15.	Jumlah Penduduk Miskin	orang	tidak ditargetkan	tidak ditargetkan			186.300	0,00%	0,00%	3.920.200	27.549.690	tidak ditargetkan	167.417			202.700	0,00%	121,07%	4.195.300	26.503.650	tidak ditargetkan	209.278			201.100	0,00%	96,09%	4.071.000	26.363.270

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022, BPS, diolah

2.2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UN Summit on MDGs 2010 merumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015 sebelum Millennium Development Goals (MDGs) berakhir yang diperkuat dengan disepakatinya dokumen *The Future We Want* dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal tersebut mendorong disusunnya agenda pembangunan pasca 2015 yang kemudian disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs dapat dikatakan sebagai penyempurna MDGs karena bersifat lebih komprehensif, dimana penyusunannya melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan, inklusif dengan secara spesifik menasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*), melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media. Apabila MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, maka SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*). Juga, SDGs tidak hanya memuat tujuan tapi juga sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). Untuk itu, beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2030. Adapun TPB/SDGs dirumuskan ke dalam 17 (tujuh belas) tujuan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Untuk Kabupaten Bekasi, 189 indikator capaian TPB/SDGs yang dihitung mencatat 113 indikator telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SS), 49 indikator juga telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB), 23 indikator tidak ada datanya (NA), dan 4 indikator lainnya belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB/TTT). Indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai antara lain: indikator bauran energi terbarukan dan intensitas energi primer pada tujuan ke-7; indikator jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister pada tujuan ke-12; serta indikator proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tujuan ke-15. Untuk lebih jelasnya, capaian indikator TPB/SDGs selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,37	4,01	4,82	5,21	5,01	SS	Dinas Sosial
		Sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	97,04	98,84	n/a	91,16	97	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	348,656	356,277	267,710	285,409	300,124	SB	Dinas Sosial
		Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	140 orang	175 orang	290 orang	180 orang	440 orang	SS	Dinas Sosial
		Sosial	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	60.499 KPM	70.392 KPM	78.287 KPM	72.554 KPM	56.239 KPM	SS	Dinas Sosial
		Sosial	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	91,65	87,37	64,87	100	100	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	95,65	97	86	74,61	93	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	50,29%	49,01%	-	70,31%	71,65%	SS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	60,31	42,98	86,46	86,59	SB	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	50,29%	49,01%	-	70,31%	71,65%	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	99,12	99,03	99,21	98,85	97,58	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	81,28	80,82	85,82	81.64	81.83	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	58,13	57,61	79,38	94,12	93,67	SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Sosial	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	34,06	100	100	100	100	SS	PLN
		Sosial	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	19.641	146.148	13.920	34.166	70.762	SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosial	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	4 Desa	4 Desa	2 Desa	7 Desa	46 Desa dan 23 Kecamatan	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	800 orang	800 orang	800 orang	900 orang	900 orang	SB	Dinas Sosial
		Sosial	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	-	SB	Dinas Sosial
		Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	n/a	n/a	n/a	25,75	30,16	SB	Kemenag
		Sosial	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	133,03	133,03	132,89	130,11	124,1	SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosial	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	155.000.000	249.800.000	n/a	1.110.000.000	994.200.000	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sosial	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Sosial
		Sosial	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	2,05	2,04	2,26	2,38	4,3	SS	Dinas Ketahanan Pangan
		Sosial	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	7,72	3,51	3,08	3,5	2	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan
		Sosial	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan
		Sosial	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	22,42	3,46	4,35	4,2	1,6	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	22,42	3,46	4,35	4,2	1,6	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	0,03	2,28	2,99	3,42	1,5	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	1	1	1	4	5	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	59,21	56,95	65,53	72,62	71,2	SS	Dinas Kesehatan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	85,9	83,7	90,04	86,22	84,59	SB	Dinas Ketahanan Pangan
		Sosial	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	60440	60440	52035	52129	52129	SS	Dinas Pertanian
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	50	28	37	45	30,61	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	92,80	100,12	97,17	100,97	100	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	91,65	96,73	95,26	100	100	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	0,05	0,01	0	0	0	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1,02	0,44	0,19	0,12	0,3	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	0	0,01	0,01	0	0,01	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	98,93	100	100	66,84	93,6	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	4	n/a	n/a	18	10,7	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	-	8,765	8,775	8,775	8,545	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	n/a	n/a	10,09	16,07	24,87	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	189	343	221	180	228	SB	Dinas Kesehatan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	n/a	n/a	16,02	15,27	n/a	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	7,2	27,88	15,43	9,49	13,31	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	21,87	n/a	n/a	n/a	20,2	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	n/a	57,73	58,57	62,49	66,14	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NA	BNN
		Sosial	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	50,29%	49,01%	-	70,31%	71,65%	SS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	17,48%	17,03%	n/a	16,63%	16,69%	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	n/a	2,7	3,0	2,4	n/a	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	52,74	37,12	45,38	n/a	n/a	SB	Dinas Kesehatan
		Sosial	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	2.562.527	2.643.882	2.621.909	2.755.487	3.040.636	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	97,04	98,84	n/a	91,16	97	SS	Dinas Kesehatan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0	1	0	0	0	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	n/a	28,34	16,02	15,27	n/a	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	91	93	89	99	88	SS	Dinas Kesehatan
		Sosial	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	2.147	3.084	2.962	2.871	2.989	SS	Dinas Kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	n/a	93.78	97,65	97,86	98,12	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	n/a	n/a	97.24	98.74	97.98	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	n/a	n/a	93.75	97.98	85.20	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	105,12	107,66	107,16	108,37	101,76	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	99,53	91,6	92,62	92,01	87,46	SB	Dinas Pendidikan
		Sosial	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8,84	8.94	9.12	9.30	9.53	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	n/a	n/a	77,18	85,17	85,85	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	n/a	n/a	100	n/a	n/a	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	99,12	99,03	99,21	n/a	n/a	SS	Dinas Pendidikan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	97,12	98,48	98,08	100	100	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	97,12	98,48	98,08	100	100	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	n/a	n/a	100	100	100	SS	Dinas Pendidikan
		Sosial	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	n/a	n/a	77,13	67,81	63,05	SS	Dinas Pendidikan
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	88,28	88,68	88,58	88,88	89,37	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	39	64	48	83	226	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	27	58	69	45	116	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	34	64	69	83	40	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosial	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	45	64	100	91	35	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	n/a	n/a	1,49	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	n/a	11	11	11	11	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	11%	11%	12%	13%	14%	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosial	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	17,11%	16,64%	-	24,53%	24,16%	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	17,48%	17,03%	n/a	16,63%	16,69%	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sosial	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	66,94	70,49	68,3	n/a	0	SB	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	n/a	60,31	42,98	86,46	86,59	SB	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Lingkungan	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	60,31	42,98	86,46	86,59	SB	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Lingkungan	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	92,11	SS	Dinas Kesehatan
		Lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	83,56	86,97	81,71	81,02	1434 Unit yang dibangun Tahun 2022 Realisasi Keuangan 99,32 dan Realisasi Fisik 100%	SS	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	182	162	165	187	187	SS	Dinas Kesehatan
		Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	10	15	42	55	65	SS	Dinas Kesehatan
		Lingkungan	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	-	-	-	-	NA	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Lingkungan	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	n/a	n/a	2220 Rumah Tangga	2330 Rumah Tangga	2506 Rumah Tangga	SS	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Lingkungan	Kualitas air danau.	Meningkat	n/a	47,33	43,33	n/a	n/a	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	31,12	32,92	23,81	48,025	28,06	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	3 Recana	3 Recana	3 Recana	3 Recana	3 Recana	SS	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Lingkungan	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	2	2	2	2	2	SB	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Lingkungan	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	n/a	1	1	1	1	SB	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS	Dinas Lingkungan Hidup
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Ekonomi	Bauran energi terbarukan.	10-16%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BB/ TTT	Sekretariat Daerah
		Ekonomi	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BB/ TTT	Sekretariat Daerah
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,3	SS	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	66 636	68 158	78 345	107788	114338	SS	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	n/a	-5,22	-4,24	n/a	n/a	SB	Dinas Ketenagakerjaan
		Ekonomi	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	n/a	31,63	41,85	n/a	n/a	SS	Dinas Ketenagakerjaan
		Ekonomi	Persentase tenaga kerja formal.	51%	n/a	68,37	58,15	n/a	n/a	SS	Dinas Ketenagakerjaan
		Ekonomi	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	n/a	92,99	n/a	n/a	n/a	SS	Dinas Pertanian
		Ekonomi	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	28,200	21,463	18,464	35,910	45,202	SS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Ekonomi	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	22,184	24.311	26,005	27,098	27,098	SS	Dinas Ketenagakerjaan
		Ekonomi	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	9,74	9	11,54	10,09	10,31	SB	Dinas Ketenagakerjaan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Ekonomi	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	1,35	DPP 2,71 DISNAKER 1,91	DPP 9,01 DISNAKER 5,85	6,3	3,78	SB	Dinas Ketenagakerjaan
		Ekonomi	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	n/a	21,72	24,07	n/a	27,33	SS	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Ekonomi	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	SB	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	815184	558333	123057	284149	427214	SS	Dinas Pariwisata
		Ekonomi	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	1222776	1869201	492228	1136559	1708856	SS	Dinas Pariwisata
		Ekonomi	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Pariwisata
		Ekonomi	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	n/a	n/a	38,66	44,04	34,11	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	3	3	4	4	4	SS	Dinas Perhubungan
		Ekonomi	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	78,28%	77,74%	77,20%	77,21%	77,38%	SS	Dinas Perindustrian
		Ekonomi	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-	3,14%	-3,99%	3,48%	5,82%	SS	Dinas Perindustrian
		Ekonomi	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	4444	4489	4566	904	1297	SS	Dinas Perindustrian
		Ekonomi	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Perindustrian
		Ekonomi	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Ekonomi	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,00238%	0,00243%	0,00120%	0,00223%	0,00%	SS	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Ekonomi	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	71,22	73,25	76,54	n/a	n/a	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Ekonomi	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	66,94	70,49	68,3	n/a	0	SB	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Ekonomi	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	53,93	62,58	68,32	n/a	n/a	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,356	0,354	0,372	0,34	0,373	SS	BPS
		Ekonomi	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,37	4,01	4,82	5,21	5,01	SS	Dinas Sosial
		Ekonomi	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	n/a	2,22%	4,44%	12,22%	28,89%	SS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Ekonomi	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	n/a	12,43	16	n/a	n/a	SB	Dinas Sosial
		Ekonomi	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	-	-	-	-	70,28	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Ekonomi	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	n/a	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.2-HUK/2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2019	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.48-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.191-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.115-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022	SS	Kejaksanaan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Ekonomi	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	348,656	356,277	267,710	285,409	300,124	SB	Dinas Ketenagakerjaan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	60,34	68,24	77,05	2450 Unit dibangun pada tahun 2021 Realisasi Keuangan 93,12 dan Realisasi Fisik 100%	2516 Unit RTLH dibangun pada tahun 2022 Realisasi Keuangan 97,07 dan Realisasi Fisik 100%	SS	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Lingkungan	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	-	-	-	-	-	NA	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Lingkungan	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	-	-	-	-	-	NA	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Lingkungan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	19.641	146.148	13.920	34.166	70.762	SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Lingkungan	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	133,03	133,03	132,89	130,11	124,1	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Lingkungan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	2	2	2	2	2	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Lingkungan	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	155.000.000	249.800.000	n/a	1.110.000.000	994.200.000	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Lingkungan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	53%	56,50%	86,25%	88,71%	88,82%	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	Jumlah limbah B3 yang terkelola	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	1954785,3181 / 97%	684100,2802 / 84%	289398,8832 / 74%	4887459,0634 / 98%	27683037,8118 / 99%	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	7	7	SB	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	212	220	SS	Dinas Lingkungan Hidup

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Lingkungan	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	1	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BB/ TTT	Dinas Lingkungan Hidup
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	SS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Lingkungan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	19.641	146.148	13.920	34.166	70.762	SB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Lingkungan	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Meningkat menjadi 87%	n/a	n/a	100	100	100	SS	Dinas Perikanan
		Lingkungan	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	2199	2199	3392	3392	3392	SS	Dinas Perikanan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	4,17%	4,17%	4,17%	0,20%	0,17%	SB	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	BB/ TTT	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS	Dinas Lingkungan Hidup
		Lingkungan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	1	SS	Dinas Lingkungan Hidup

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
		Hukum & Tata Kelola	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	5	26	40	30	9	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Hukum & Tata Kelola	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	39	58	85	54	116	SB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Hukum & Tata Kelola	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	n/a	18	9	16	8	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Ekonomi	Proporsi individu yang menggunakan internet		66,38	53,93	62,58	68,32	n/a	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Hukum & Tata Kelola	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	n/a	n/a	63	64	87	SS	Inspektorat
		Hukum & Tata Kelola	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Hukum & Tata Kelola	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	SB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Hukum & Tata Kelola	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	62,74	6345	65,08	65,53	65,17	SB	Sekretariat Daerah
		Hukum & Tata Kelola	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	872 Paket	993 Paket	445 Paket	571 Paket	555 Paket	SS	Sekretariat Daerah

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Hukum & Tata Kelola	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	n/a	50	50	50	50	SS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Hukum & Tata Kelola	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	10,81	10,81	11,76	12,90	14,29	SS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Hukum & Tata Kelola	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	n/a	73,43	65,64	n/a	n/a	SB	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Hukum & Tata Kelola	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Hukum & Tata Kelola	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	58,13	57,61	79,38	94,12	93,67	SS	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Hukum & Tata Kelola	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Hukum & Tata Kelola	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	n/a	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.2-HUK/2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2019	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.48-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.191-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021	1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.115-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022	SS	Sekretariat Daerah

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,69	0,75	0,75	0,75	0,69	SB	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,54	0,61	0,61	0,59	0,57	SB	Badan Pendapatan Daerah
		Ekonomi	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	NA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Ekonomi	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	53,93	62,58	68,32	n/a	n/a	SB	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Ekonomi	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	53,93	62,58	68,32	n/a	n/a	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Ekonomi	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	n/a	n/a	85,08	85,51	100	SS	BPS
		Ekonomi	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	114	114	114	114	198	SS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Ekonomi	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Ekonomi	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	n/a	n/a	85,08	85,51	100	SS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Sumber: Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan isu strategis daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Isu utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi adalah bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan adalah sebuah lingkaran yang terus berulang akibat ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya serta terbatasnya kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga terus terjebak dalam kemiskinan, maka isu terkait pengentasan kemiskinan yang akan diangkat untuk pembangunan selama 4 (tahun) ke depan adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu yang dihadapi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, air minum yang bersih, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi lingkungan yang buruk, belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa, terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya, serta rentannya pemuda terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal.

b. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Isu yang dihadapi terkait dengan pengangguran dan kesempatan kerja adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu perhatian utama lainnya setelah kemiskinan dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh luas ke banyak sektor. Sebagaimana terjadi di tahun 2020, dengan jatuh bebasnya laju pertumbuhan ekonomi daerah ke -3,3% akibat Covid-19 telah menjadikan pengeluaran per kapita penduduk ikut menurun, meningkatkan rasio gini dan jumlah pengangguran, meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan lainnya.

Namun, PDRB Kabupaten Bekasi yang didominasi oleh industri pengolahan yang dikuasai oleh industri besar menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan secara langsung untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah karena kebijakan ekonomi dan moneter serta pengaturan industri besar diatur oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkat isu lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Lemahnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
 - Kualitas ASN yang tersedia belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
 - Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan.
 - Sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi.
 - Penduduk Kabupaten Bekasi yang plural menyebabkan tingkat kerentanan terjadinya konflik suku, ras, agama, dan golongan menjadi lebih tinggi.

- 3) Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Kinerja pengelolaan persampahan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.
 - Pencemaran terhadap air, udara, dan tanah belum dapat dikendalikan sepenuhnya.
 - Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang.
- 4) Infrastruktur dan konektivitas wilayah, dengan isu yang dihadapi yaitu:
 - Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan yang diperlukan.
 - Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, serta saran dan masukan baik yang masuk melalui musrenbang, maupun forum lainnya, permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan berkaitan dengan isu strategis Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026, yakni kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Terkait dengan masalah kemiskinan, ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan dengan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Pendidikan

- Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal
- Rentannya anak usia sekolah terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal
- Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan

b. Perpustakaan

- Rendahnya minat masyarakat untuk membaca

c. Kesehatan

- Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan
- Belum optimalnya layanan rumah sakit umum daerah
- Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan

d. Pertanahan

- Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan

e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya layanan air minum perpipaan bagi masyarakat

f. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Kesehatan lingkungan, khususnya pada lingkungan masyarakat miskin, belum terjaga secara optimal, yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh

g. Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga
- Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif

h. Pertanian

- Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian

i. Kelautan dan Perikanan

- Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan

j. Perdagangan

- Terus meningkatnya harga bahan pangan
- Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM

k. Pangan

- Pangan segar yang beredar di masyarakat seringkali tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan

- Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya akibat terus meningkatnya harga bahan pangan

l. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
- Belum adanya kerjasama antardesa yang mendukung kegiatan ekonomi
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial
- Hak dan suara anak seringkali diabaikan

o. Sosial

- Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya

p. Kebudayaan

- Kemudahan akses informasi menyebabkan budaya lokal mulai tergerus oleh budaya asing yang belum tentu positif

q. Pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

r. Perindustrian

- Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri

s. Tenaga Kerja

- Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan
- Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya

t. Transmigrasi

- Belum optimalnya peran program transmigrasi dalam penyerapan tenaga kerja

u. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

v. Penanaman Modal

- Belum optimalnya pengembangan penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sebagaimana halnya dengan masalah kemiskinan, juga ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan yang mempengaruhi investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan

- Integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah belum terwujud seluruhnya
- Kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan belum optimal

b. Sekretariat Daerah

- Laporan capaian kinerja yang tersusun belum seluruhnya sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Rekomendasi perbaikan program dan kegiatan belum seluruhnya ditindaklanjuti
- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan
- Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi

c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan belum tersedia seluruhnya dan *ter-update* secara berkala

d. Inspektorat Daerah

- Rendahnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah
- Pengendalian intern pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan sampai ke tingkat perangkat daerah

e. Kepegawaian

- Sistem pengadaan ASN belum sepenuhnya efektif, transparan dan akuntabel

- Manajemen kinerja serta *reward and punishment* bagi ASN belum berjalan sehingga motivasi kerja ASN menjadi rendah

f. Pendidikan dan Pelatihan

- Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya

g. Penelitian dan Pengembangan

- Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum seluruhnya ditindaklanjuti

h. Komunikasi dan Informatika

- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal
- Data dan informasi capaian pembangunan belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah

i. Statistik

- Data dan informasi capaian pembangunan belum tersedia seluruhnya dan *ter-update* secara berkala

j. Persandian

- Keamanan informasi masih rentan untuk diretas oleh pihak luar

k. Penanaman Modal

- Kinerja layanan penanaman modal belum optimal

l. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah

m. Kecamatan

- Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan di kecamatan
- Rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

n. Keuangan

- Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Pendapatan asli daerah belum tergali dengan optimal

o. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih ada gedung pemerintah yang belum memiliki sertifikat laik fungsi

- Kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja sesuai standar belum semuanya terpenuhi
- Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas
- Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus
- Lahan yang tersedia tidak cukup untuk peningkatan kapasitas jalan/jembatan atau pembangunan jalan/jembatan baru untuk menambah aksesibilitas jalan
- Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal
- Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga belum dapat dicegah atau dikendalikan sepenuhnya
- Belum optimalnya perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang

p. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih ada jalan dan jembatan pada perumahan yang rusak atau terputus dan tidak memiliki perlengkapan jalan
- SPM bidang perumahan rakyat dan permukiman yang berkaitan dengan pasca bencana belum ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan

q. Perhubungan

- Masih ditemukan adanya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan berkendara di jalan umum
- Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas

r. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal
- Kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana belum optimal
- Masih terjadinya kejahatan dan konflik yang mengganggu ketertiban di masyarakat

s. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi
- Perbedaan agama dan egosentris keagamaan di masyarakat seringkali menyebabkan konflik agama
- Tidak semua masyarakat memahami tentang wawasan kebangsaan

t. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat

u. Lingkungan Hidup

- Layanan pengelolaan persampahan belum optimal
- Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

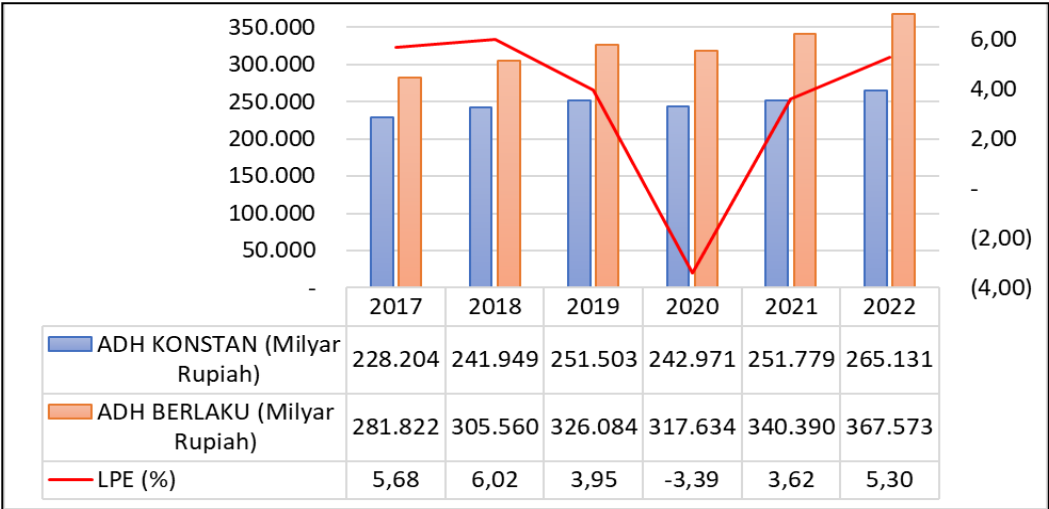
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017-2022

PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, dimana untuk harga berlaku meningkat ke angka Rp.326.084 milyar dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.281.822 milyar, serta harga konstan yang meningkat dari Rp.228.204 milyar menjadi Rp.251.503 milyar. Sayangnya, dengan menyebarnya Covid-19 di awal tahun 2020 serta kebijakan pembatasan kegiatan dan berkumpul masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi penyebaran Covid-19 telah menghalangi roda perekonomian daerah, dari usaha kecil hingga industri besar yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2020 menurun ke angka -3,39%. Seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh dunia usaha, mulai terbiasa dan menurunnya ketakutan masyarakat terhadap Covid-19, serta program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, perekonomian Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik di tahun 2021 yang ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk naik ke angka 3,65% dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.340.431 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp.251.829 milyar. Keadaan ini terus membaik di tahun 2022 sehingga PDRB Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.367.573 milyar, PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.265.131 milyar, dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Gambar 3.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara bila dilihat dari distribusi persentasenya selama 6 tahun terakhir, industri pengolahan masih menjadi penyumbang utama dalam PDRB Kabupaten Bekasi. Diikuti oleh konstruksi yang berkontribusi kurang lebih sebesar 6%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi kurang lebih sebesar 5%. Sedangkan lainnya hanya memberikan kontribusi antara 0%-1%.

Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

KATEGORI	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02%	0,98%	0,92%	0,99%	1,01%	0,98%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,05%	0,96%	0,89%	0,87%	0,79%	0,73%
C	Industri Pengolahan	78,69%	78,83%	78,22%	77,74%	77,63%	78,01%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54%	0,48%	0,47%	0,43%	0,46%	0,47%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
F	Konstruksi	6,43%	6,51%	6,69%	6,44%	6,39%	6,07%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,78%	5,65%	5,96%	5,80%	5,86%	5,77%
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04%	1,05%	1,07%	1,11%	1,10%	1,12%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48%	0,50%	0,52%	0,52%	0,53%	0,56%
J	Informasi dan Komunikasi	1,18%	1,22%	1,32%	1,92%	1,96%	2,00%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88%	0,88%	0,90%	0,94%	0,92%	0,86%
L	Real Estate	0,42%	0,44%	0,47%	0,56%	0,63%	0,65%
M,N	Jasa Perusahaan	0,12%	0,13%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,63%	0,60%	0,61%	0,62%	0,65%	0,63%
P	Jasa Pendidikan	0,89%	0,90%	0,94%	1,05%	1,05%	1,09%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,22%	0,23%	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,59%	0,61%	0,63%	0,61%	0,62%	0,65%
Produk Domestik Regional Bruto		100%	100%	100%	100%	100%	100%

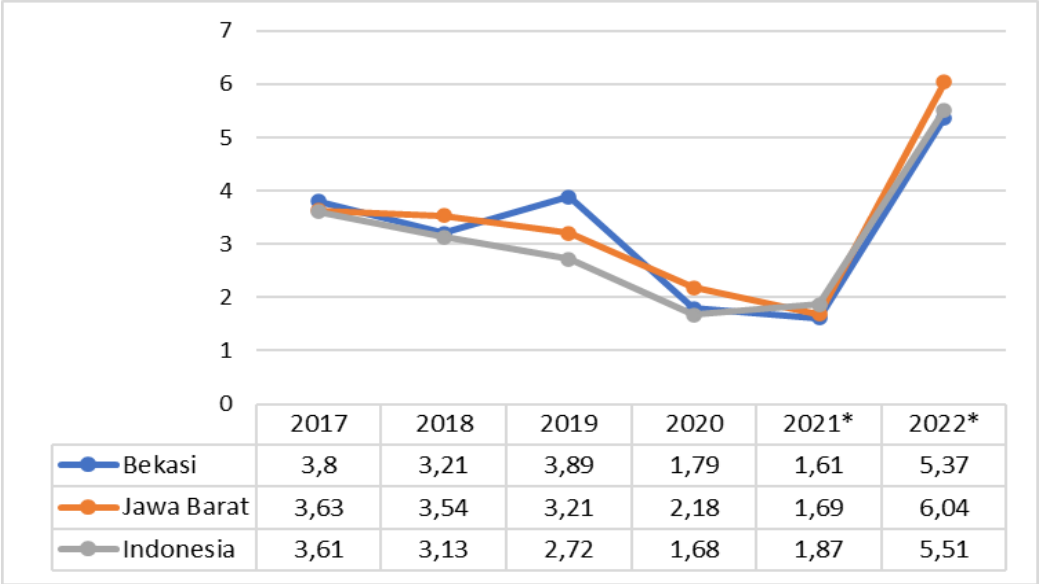
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi menurut Lapangan Usaha 2017-2022

Sejalan dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, pemotongan dan keterlambatan pemberian gaji akibat keadaan perusahaan yang memburuk karena Covid-19 menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi ikut menurun yang pada akhirnya menurunkan inflasi di Kabupaten Bekasi. Hal ini tidak

hanya terjadi di Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga terjadi di regional Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020, inflasi di Kabupaten Bekasi menurun dari angka 3,89 di tahun 2019 menjadi 1,79 di tahun 2020. Di tingkat regional Jawa Barat, nilai inflasi menurun dari angka 3,21 ke angka 2,18. Sedangkan di tingkat nasional, inflasi menurun ke angka 1,68 dari sebelumnya sebesar 2,72.

Di tahun 2021, inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia tetap rendah, dimana inflasi Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat kembali turun dengan nilai masing-masing sebesar 1,61 dan 1,69. Inflasi kembali meningkat di tahun 2022 seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak yang ikut memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya sehingga inflasi Kabupaten Bekasi mencatat angka 5,37. Meski meningkat cukup tajam, namun inflasi Kabupaten Bekasi masih di bawah Jawa Barat dan Indonesia.

Gambar 3.2
Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dan BPS
*menggunakan data Kota Bekasi

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2023
Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022 dan dampaknya meluas ke berbagai negara di dunia akibat tingginya tensi geopolitik. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi seperti minyak dan gas, serta komoditas pangan gandum dunia sehingga

dengan adanya perang, *supply* kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2022. Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tercermin pada perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022. Perang Rusia dan Ukraina juga memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022 serta memicu krisis energi, pangan, dan peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Pada tahun 2023, trend harga komoditas diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022 dengan peningkatan suku bunga acuan oleh bank sentral berbagai negara serta kekhawatiran akan risiko resesi dan perlambatan global pada tahun 2023

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan pada *Baltic Dry Index* (BDI). Penurunan aktivitas perdagangan global terutama disebabkan oleh gangguan rantai pasok, kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, tingginya harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi. Volume perdagangan dunia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami trend perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 3,5 dan 1,0%, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,7% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan *Purchasing Managers' Index* (PMI) hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022.

Dengan berbagai perkembangan terkini, per Januari 2023 *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 2,9%. Sementara, lembaga internasional lain, seperti *World Bank* dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1,7 dan 2,2%. Inflasi global yang masih tinggi diperkirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023.

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah trend perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9%, menjadi US\$4.783,9 atau setara Rp.71,0 juta pada tahun 2022. Dengan

pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9%. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9% seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5%, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi Covid-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3% pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5% dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2%. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7%, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa. Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, *World Conference on Creative Economy*, *International E-Sport Federation World E-Sport Championship*, *World Super Bike*); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta

pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3%, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3%, tumbuh sebesar 4,9%. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5%.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5%. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Secara umum, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 meski di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 juga diharapkan akan terakselerasi.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2022 tumbuh positif sebesar 4,61% (yoy). Pertumbuhan perekonomian Jawa Barat terutama ditopang oleh permintaan domestik seiring dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang terus berjalan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan masih

terjaganya ekspor. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga tersebut tidak terlepas dari masih baiknya daya beli masyarakat, salah satunya sebagai dampak dari program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, masih tingginya harga komoditas dan dominasi komoditas bernilai tambah tinggi pada ekspor Jawa Barat turut mendukung pertumbuhan ekspor yang tetap positif pada triwulan IV 2022. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan positif ditopang oleh sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Kinerja positif berbagai sektor ini sejalan dengan menguatnya permintaan domestik sebagai dampak peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berbagai aktivitas seperti pembelajaran tatap muka, aktivitas haji dan umroh, *event* dengan skala besar, serta pariwisata berangsur pulih.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,04% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 6,12% (yoy). Mulai meredanya inflasi Jawa Barat tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan *stakeholders* dalam kerangka pengendalian inflasi. Beberapa program yang dilakukan antara lain Operasi Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah, penguatan sisi hulu sektor pertanian melalui pengembangan sarana produksi pangan, *urban farming* melalui *screen house* dan *organic tower garden*, serta perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Memasuki tahun 2023, kinerja ekonomi global diperkirakan melambat dibandingkan 2022. IMF dalam WEO Januari 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mencapai 2,9%, didukung oleh masih kuatnya permintaan domestik di Amerika Serikat dan dibukanya kembali ekonomi China. Namun demikian, masih berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina tetap menimbulkan ketidakpastian global di tahun ini. Perekonomian Indonesia 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 4,5%-5,3% (yoy). Permintaan domestik masih menunjukkan peningkatan tersebut, searah dengan terkendalinya pandemi Covid-19 serta didukung masih positifnya kinerja ekspor dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Optimisme tersebut sejalan dengan semangat bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 yang terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional, tentunya kebijakan ekonomi yang bersifat *pro-stability* dan *pro-growth*.

Searah dengan perkiraan kondisi perekonomian nasional, perekonomian Jawa Barat 2023 diperkirakan tumbuh positif pada rentang 4,7%-5,5% (yoy). Kondisi ini ditopang oleh permintaan domestik yang resilien dan realisasi

investasi yang diperkirakan terus berlanjut. Peningkatan mobilitas masyarakat Jawa Barat tahun 2023 yang diperkirakan semakin tinggi memberikan *multiplier effect* pada sektor ekonomi lainnya termasuk yang terkait dengan pariwisata yaitu sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Inflasi Indonesia tahun 2023 diperkirakan melanjutkan trend penurunan dan berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Keyakinan terhadap penurunan inflasi ini didorong oleh inflasi inti dan inflasi pada kelompok *administered price* yang menurun serta inflasi kelompok bahan pangan (*volatile food*) yang terjaga. Inflasi gabungan kota di provinsi Jawa Barat tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Mengingat trend kenaikan harga saat ini lebih dimotori oleh penyesuaian berbagai harga yang diatur pemerintah (*administered price*).

Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bekasi

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun 2022 dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi dari 3,62 menjadi 5,3 di tahun 2022, serta perkiraan positif akan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 dan 2024 juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif meski menurun dibandingkan tahun 2022 dengan perkiraan berada pada kisaran 3%. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap optimis dan menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi di tahun 2023 dan 2024 berada pada kisaran 4,7 atau lebih dengan mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi didominasi oleh industri pengolahan yang terus mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Menurunnya target ini dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan di tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kecenderungan kejenuhan pertumbuhan ekonomi setelah peningkatan di tahun 2021 dan 2022 akibat mulai pulihnya ekonomi daerah pasca Covid-19, ancaman terjadinya relokasi industri dengan adanya kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, serta 70% ekonomi Kabupaten Bekasi yang dikuasai oleh industri pengolahan yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan intervensi dalam rangka menggenjot laju pertumbuhan perekonomian daerah.

Sementara pada sisi inflasi juga diperkirakan masih tetap tinggi di tahun 2023 dan 2024 akibat kenaikan bahan bakar minyak di tahun 2022 yang memicu kenaikan harga, semakin baiknya keadaan ekonomi daerah, serta pernyataan

Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengumumkan bahwa Covid-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global sehingga pembatasan aktivitas masyarakat tidak lagi dilaksanakan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di hari-hari besar nasional dan keagamaan. Nilai inflasi Kabupaten Bekasi diperkirakan berada pada kisaran 5% di tahun 2023 dan 6% di tahun 2024. Sebagaimana halnya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan tetap berupaya agar inflasi di Kabupaten Bekasi di tahun 2023 dan 2024 dapat ditekan ke angka 3-4%.

Adapun tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Bekasi di tahun 2023 dan 2024 adalah bagaimana mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, menekan angka inflasi, serta mendorong sektor ekonomi lain selain industri pengolahan, seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan sektor lainnya agar tumbuh positif sehingga dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan pengangguran yang diperkirakan akan semakin meningkat dengan masuknya para pencari kerja baru dari luar daerah untuk mencari pekerjaan dengan semakin baiknya kondisi ekonomi Kabupaten Bekasi dan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Bekasi yang cukup menarik. Tantangan lainnya adalah menurunkan jumlah penduduk miskin secara lebih signifikan, menurunkan pertumbuhan penduduk dari sektor urban, pemekaran wilayah, perkembangan teknologi yang merubah pola produksi dan aktivitas perekonomian, serta kondusivitas daerah memasuki persiapan pemilu dan pilkada serentak. Untuk lebih jelasnya, proyeksi dan target indikator ekonomi daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi dan Target Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	PROYEKSI		TARGET	
			2022	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	3,66	3,53	4,7-5,3	4,7
2.	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rp	367.573.270	385.744.736	403.949.247	385.744.736	403.949.247
3.	PDRB atas dasar Harga Konstan	Juta Rp	265.130.822	274.830.702	284.540.307	277.591.970	290.638.793
4.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku	Rupiah	114.338.000	118.294.311	122.150.164	118.294.311	122.150.164
5.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan	Rupiah	82.472.000	84.280.887	86.042.109	85.127.671	87.886.229

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	PROYEKSI		TARGET	
			2022	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Rasio Gini	Indeks	0,37	0,384	0,392	0,329	0,324
7.	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/ Tahun	11.757	11.949	12.141	11.813	11.892
8.	Inflasi	%	5,37	5,19	6,15	3,55	3,44
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,31	9,77	9,39	9,40	9,02
10.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,01	5,09	5,15	4,69	4,66
11.	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	201.100	206.688	212.275	153.449	152.468
12.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,53	9,56	9,67	9,56	9,67
13.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,11	13,12	13,13	13,72	13,95
14.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,04	74,39	74,72	74,07	74,20

Adapun proyeksi dan target PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut Lapangan Usaha untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi dan Target PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha untuk tahun 2023 dan 2024

KATEGORI	URAIAN	REALISASI	PROYEKSI		TARGET	
		2022	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.593.003	2.698.385	2.823.427	2.714.875	2.842.474
B	Pertambangan dan Penggalian	1.939.164	1.866.014	1.792.863	2.030.305	2.125.729
C	Industri Pengolahan	206.837.718	214.664.919	222.492.121	216.559.091	226.737.368
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.234.212	1.227.417	1.220.622	1.292.220	1.352.954
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	80.309	86.480	92.652	84.083	88.035
F	Konstruksi	16.082.985	16.081.745	16.080.500	16.838.885	17.630.313
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.288.908	15.830.365	16.371.823	16.007.486	16.759.838
H	Transportasi dan Pergudangan	2.968.204	3.128.890	3.292.663	3.107.709	3.253.772
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.478.513	1.541.283	1.604.053	1.548.003	1.620.759
J	Informasi dan Komunikasi	5.298.853	5.672.755	6.046.658	5.547.899	5.808.651
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.292.656	2.411.403	2.503.124	2.400.411	2.513.230
L	Real Estate	1.726.783	1.867.909	2.009.036	1.807.941	1.892.915
M,N	Jasa Perusahaan	326.900	343.624	360.349	342.264	358.351

KATEGORI	URAIAN	REALISASI	PROYEKSI		TARGET	
		2022	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.658.347	1.709.465	1.774.593	1.736.289	1.817.894
P	Jasa Pendidikan	2.898.445	3.140.838	3.383.231	3.034.672	3.177.301
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	700.833	744.516	788.199	733.772	768.259
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.724.990	1.814.692	1.904.394	1.806.064	1.890.949
Produk Domestik Regional Bruto		265.130.822	274.830.702	284.540.307	277.591.970	290.638.793

Sumber: PDRB Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Usaha 2011-2022, diolah

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan nasional tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

a) Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024

(i) Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

(ii) Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(iii) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi

energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

(iv) Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

b) Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga di tengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, biofuel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar, didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga didorong oleh kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dan kebijakan perdagangan yang kondusif.

Investasi didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah dengan strategi diarahkan melalui (i) peningkatan investasi untuk mendorong hilirisasi industri berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru; (ii) optimalisasi fasilitasi investasi yang berkualitas, produktif, dan berorientasi ekspor secara menyeluruh utamanya untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas dan strategis; serta (iii) meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perizinan melalui penuntasan regulasi terkait penanaman modal, serta penyelesaian sistem perizinan dan kemudahan berusaha terintegrasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

Di sisi lapangan usaha, sektor industri didorong perbaikan rantai pasok pascapandemi serta pemulihan permintaan akibat perbaikan kondisi ekonomi domestik dan beberapa mitra dagang. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024 antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat selama Pemilu mendorong konsumsi terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama

(*durable*); (ii) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v) operasional beberapa kawasan industri dan *smelter*; (vi) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (viii) peningkatan diversifikasi produk ekspor ke arah yang lebih kompleks.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam industri pengolahan akan dilaksanakan melalui strategi (i) harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks; (ii) peningkatan hilirisasi SDA untuk peningkatan ekspor produk bernilai tambah yang didukung oleh peningkatan investasi, termasuk di kawasan industri; (iii) perluasan penerapan industri 4.0 dan transformasi digital dalam proses bisnis dan produksi perusahaan; (iv) peningkatan inovasi dan riset industri; (v) peningkatan partisipasi industri domestik dalam rantai pasok global; (vi) peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga kerja industri, termasuk dalam hal adopsi teknologi, melalui penyediaan pelatihan teknis sesuai kebutuhan perusahaan; (vii) perluasan penerapan industri hijau dan industri yang mendukung ekonomi biru; (viii) pengembangan industri dan infrastruktur halal melalui penguatan standar kualitas, rantai pasok, dan kawasan industri halal terintegrasi; (ix) penguatan infrastruktur industri dan pendukungnya guna peningkatan daya saing industri nasional; serta (x) gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Sektor pertanian akan didorong oleh peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengembangan *Food Estate* (FE), serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian. Sektor konstruksi akan didorong oleh penuntasan proyek pembangunan pada tahun akhir periode RPJMN 2020-2024 serta pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor pertambangan akan didorong melalui peningkatan produksi hasil tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas tambang. Sektor perdagangan akan didukung peningkatan mobilitas serta terjaganya daya beli masyarakat.

Produktivitas sektor pariwisata akan didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, *event* olah raga, beserta pelaksanaan festival nasional. Peningkatan perjalanan wisatawan internasional juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi

pariwisata prioritas sejalan dengan stabilitas kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara. Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi; (i) peningkatan daya saing dan daya dukung kepariwisataan Indonesia di tingkat dunia; (ii) peningkatan tenaga kerja terampil melalui re-skilling dan up-skilling serta sertifikasi kompetensi; (iii) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas SDM, dan diversifikasi produk dan layanan; (iv) peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan rantai pasok destinasi pariwisata; (v) integrasi pola perjalanan di destinasi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan *event* dan MICE dengan standar layanan pariwisata yang baik; (vi) penguatan pemasaran *Wonderful Indonesia*, *Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)*, dan *Bangga Buatan Indonesia*; (vii) *refocusing* pasar wisatawan mancanegara berkualitas (*quality tourism*) yang didukung oleh aturan visa dan kemudahan berwisata; (viii) penguatan komersialisasi dan kapitalisasi kekayaan intelektual; (ix) pengembangan ekosistem film yang didukung investasi konten; (x) perluasan program gastrodiploasi “*Indonesia Spice Up The World*”; (xi) integrasi rantai pasok dan penguatan SDM di kabupaten/kota kreatif; dan (xii) *scaling up start-up* ekonomi kreatif dan digital.

c) Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2024, kinerja NPI diperkirakan masih tetap tangguh dalam menopang stabilitas eksternal Indonesia. Diversifikasi ekspor yang semakin kuat terutama didukung kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor baru akan terus menjaga surplus neraca barang sekitar US\$49,5–47,2 miliar. Pulihnya kunjungan wisman turut menekan defisit neraca jasa menjadi semakin rendah pada kisaran US\$16,2–15,7 miliar. Neraca pendapatan sekunder semakin meningkat menjadi US\$6,7–6,9 miliar ditopang kinerja penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara mitra yang telah pulih disertai dengan peningkatan keahlian teknis. Dengan perkiraan tersebut, kinerja neraca transaksi berjalan tetap mencatat surplus US\$7,2–6,9 miliar. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial semakin berkembang menjadi US\$3,7–10,5 miliar ditopang oleh investasi langsung yang tetap tinggi sekitar US\$15,3–15,5 miliar di tengah berbagai proyek strategis yang terus berjalan dan keberhasilan Indonesia melewati

periode politik sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan sinyal ke pasar terkait prospek ekonomi Indonesia yang tetap kondusif dan terus berkembang. Sementara itu, tekanan investasi portofolio semakin minimal sehingga mencapai defisit rendah sekitar US\$5,7–0,2 miliar. Posisi cadangan devisa juga terus meningkat menjadi US\$149,1–150,2 miliar atau setara 6,0–5,8 bulan impor, seiring dengan kinerja NPI yang tetap solid dalam menopang ketahanan eksternal serta mendukung sektor riil.

d) Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, *Major Project* dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (ii) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Kebijakan pendapatan negara diarahkan melalui akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif, penggalan sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi, serta optimalisasi PNBPN dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah.

b. Belanja Negara

Kebijakan Belanja Negara (Belanja K/L, Non-K/L, dan TKD) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

c. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran diarahkan konsolidatif namun tetap mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2023 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun 2024 yaitu pengendalian inflasi, penghapusan

kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan anggaran sebagai berikut: (i) pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara prudent dan akuntabel; (ii) peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi *stakeholders*, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang *sustainable* dan lebih masif; serta (iii) pemanfaatan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Vehicle Purpose* (SVP) yang tepat dan efisien.

e) Stabilitas Moneter

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50% (yoy). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (*Food Estate*), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi. Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi melakukan koordinasi dari sisi *supply*, dengan (i) mengarahkan belanja APBN/APDB kepada subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi, bantuan sosial tepat sasaran, dan operasi pasar; (ii) melakukan percepatan implementasi *Major Project Food Estate*; (iii) mendorong implementasi *Major Project* terkait digitalisasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi seperti pengolahan produk hasil pertanian dan mendukung kelancaran distribusi; (iv) mengoptimalkan DAK Fisik tematik ketahanan pangan yaitu Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan KSPP/Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian dan Perikanan) serta konektivitas daerah; dan (v)

memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) untuk penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RKP melalui forum koordinasi perencanaan untuk menyelaraskan strategi dan kebutuhan anggaran pengendalian inflasi. Dalam rangka mitigasi risiko yang bersumber dari perlambatan ekonomi global serta normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara *Advanced Economies* (AEs) pada tahun 2024, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil. Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (iii) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas; (iv) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (v) mengembangkan *local currency settlement* untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dollar AS. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Penguatan sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

f) Stabilitas Sistem Keuangan

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya di antaranya (i) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (iii) perluasan basis investor ritel, (iv) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (v) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (vi) peningkatan pembiayaan hijau, serta (vii) implementasi harmonisasi kebijakan.

g) Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebecerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

b. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan, yaitu (i) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh K/L/D untuk melakukan penyaluran program; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah hingga level desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (iii) penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial adaptif yang dilakukan K/L/D; (iv) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial beserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritasnya dengan program pemberdayaan, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (v) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (vi) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

c. Rasio Gini

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi melalui empat strategi utama yaitu: (i) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan, dan pelatihan kapasitas masyarakat secara

berkelanjutan; (ii) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (iii) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (iv) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian target IPM tahun 2024 diarahkan melalui: (i) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional; (ii) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan (iii) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Upaya kuat mendorong berjalannya transformasi ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkatkan emisi GRK sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan mobilitas penduduk. Ekonomi hijau, melalui implementasi aksi pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program transformasi ekonomi harus

berjalan beriringan, sebagai fondasi untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak *green jobs*, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, melalui (i) upaya pemulihan lahan berkelanjutan; (ii) peningkatan bauran EBT dan efisiensi energi; (iii) penerapan industri hijau; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan sirkular ekonomi; serta (v) aktivitas rendah karbon pesisir dan laut (*blue carbon*). Untuk ke depannya, penerapan ekonomi sirkular berpotensi besar dalam mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon. Penerapan ekonomi sirkular pada industri berfokus pada *resource efficiency* berpotensi untuk mengurangi emisi GRK, menghemat penggunaan air, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja hijau baru (*green jobs*). Di samping untuk menurunkan emisi GRK, meningkatkan penggunaan material daur ulang, dan mengurangi kebutuhan material baru, kebijakan ekonomi sirkular kedepannya akan fokus pada standardisasi produk sirkular. Penerapan ekonomi hijau dan rendah karbon tidak terlepas dari adanya investasi hijau untuk dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau diarahkan pada (i) mendorong perbaikan regulasi investasi yang komprehensif; (ii) mendorong transfer teknologi, dan strategi perbaikan skema pendanaan serta keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau; (iii) program inovasi pembiayaan pembangkit EBT blended financing; (iv) penerapan program pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar; dan (v) perbaikan skema insentif untuk mendorong investasi transportasi ramah lingkungan.

f. Nilai Tukar Petani (NTP)

Arah kebijakan dalam rangka pencapaian NTP menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga pertanian dan harga barang yang dikonsumsi. Kebijakan dari sisi harga pertanian mencakup: (a) pengendalian harga produk pertanian, utamanya melalui kerja sama lintas K/L, BUMN seperti Bulog (beras dan bahan pokok) dan Kementerian Perdagangan (kelapa sawit, hortikultura, dan produk turunan pangan); (b) inovasi sistem logistik pangan melalui platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok daring untuk menjamin hasil produksi petani dapat dipasarkan secara merata; (c) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan

konektivitas produksi dan peningkatan infrastruktur distribusi termasuk pergudangan dan *cold storage*; (d) pembentukan *food estate* (kawasan sentra produksi pangan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (e) penguatan pertanian keluarga dan peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan produktivitas usaha pertanian; (f) modernisasi pertanian (pertanian presisi) termasuk *Climate Smart Agriculture* dan pertanian digital (digital based agriculture), serta pertanian regeneratif dan konservasi lahan produktif agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan; serta (g) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian melalui diversifikasi turunan produk pangan untuk menambah nilai produk pertanian. Kebijakan pengendalian dari sisi harga barang konsumsi meliputi (a) pengendalian inflasi terutama inflasi bahan makanan melalui peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang konsumsi petani hingga pedesaan; (b) jaminan ketersediaan agro input seperti pupuk, pestisida benih, sarana dan prasarana pertanian baik melalui rantai pasok konsumsi petani hingga tingkat desa; (c) fasilitasi sarana prasarana pertanian berbasis hayati seperti Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) serta pembenihan/*nursery* berbasis kelompok tani untuk membangun kemandirian petani dan menekan biaya pokok produksi tani serta meningkatkan efisiensi usaha tani; (d) pembentukan korporasi petani dan nelayan berbasis koperasi kelompok tani, yang didukung dengan digital *backbone* dan penguatan *enabling factors*, agar barang konsumsi petani dapat ditekan dan secara mandiri meningkatkan produksi dengan menjamin ketersediaan barang konsumsi petani; serta (e) regenerasi petani dengan berbagai strategi untuk meningkatkan minat anak petani/petani muda milenial melalui program tani milenial.

g. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin, logistik perikanan dan pemasaran hasil perikanan; (3) peningkatan kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan,

termasuk fasilitasi jaminan sosial nelayan; (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan; dan (7) menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, terutama pasokan BBM dan kebutuhan pokok rumah tangga nelayan.

h. Pemerataan Pembangunan

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas penduduk. Proyek strategis nasional (PSN) seperti LRT Jabodebek serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikembangkan. Selain itu, pembangunan KEK Lido, Gresik, Singhasari, Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan KI Wilmar Serang dan KI Terpadu Batang juga menjadi pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Wilayah Jawa- Bali.

Di tingkat regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Efisiensi dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, Jabar *Zero New Stunting*, dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Di tingkat kabupaten, seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, kegiatan perekonomian tahun 2023 dan 2024 diharapkan terus maju dan berkembang, terutama setelah Covid-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Namun perekonomian Kabupaten Bekasi yang 70%-nya didominasi oleh industri pengolahan yang merupakan industri besar membuat Pemerintah Kabupaten Bekasi sulit untuk melakukan intervensi secara langsung. Oleh karenanya, arah kebijakan yang diambil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menarik investasi adalah dengan mendorong peningkatan kualitas faktor-faktor ekonomi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti: tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang dapat menurunkan *cost* dan mempermudah akses ekonomi, kondusivitas wilayah

yang dapat menjamin usaha ekonomi dapat berjalan dengan stabil dan lancar, serta kualitas lingkungan hidup yang merupakan penunjang roda perekonomian. Dengan meningkatnya kualitas faktor-faktor ekonomi tersebut diharapkan dapat menarik investasi untuk masuk dan mendorong pembukaan usaha ekonomi baru di Kabupaten Bekasi, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil, menengah, dan mikro. Adapun dalam rangka peningkatan kualitas faktor-faktor ekonomi di atas, maka strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - 1) Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah
 - 2) Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan melalui peningkatan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan melalui peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong tindak lanjut rekomendasi perbaikan program dan kegiatan, serta mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan
 - 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan melalui peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - 5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah
 - 6) Mendorong pelaksanaan sistem merit melalui peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, peningkatan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN, peningkatan kualitas manajemen kinerja serta *reward and punishment* bagi ASN
 - 7) Meningkatkan kompetensi ASN dengan mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi
 - 8) Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat, mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan, serta peningkatan kualitas kebijakan bidang ekonomi

- 9) Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi melalui peningkatan kualitas deregulasi kebijakan, kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah, serta kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah
- 10) Mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun serta mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan
- 11) Mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi melalui peningkatan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah
- 12) Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik serta peningkatan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral
- 13) Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui peningkatan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah
- 14) Meningkatkan kinerja layanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha, serta peningkatan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- 15) Meningkatkan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah dengan mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah
- 16) Mengoptimalkan peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakat melalui tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat, peningkatan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan, peningkatan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, serta pencegahan konflik sosial ekonomi

melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif

- 17) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah, mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah
- 18) Mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk membiayai program pembangunan daerah melalui penyusunan rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah, peningkatan kinerja penagihan pajak daerah, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah
- 19) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja ASN sesuai standar melalui peningkatan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan
- 20) Meningkatkan jumlah bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi dengan mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah, peningkatan layanan persetujuan bangunan gedung, serta pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah

- 1) Meningkatkan konektivitas jalan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan desa dan jalan perumahan, membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa dan jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan, mendorong pengalihan aset prasarana dan sarana utilitas umum perumahan ke pemerintah daerah, serta penyediaan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas melalui peningkatan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor, peningkatan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, serta menurunkan derajat kejenuhan jalan

3. Peningkatan kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi

- 1) Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
- 2) Meningkatkan *response time* petugas pada kejadian bencana melalui peningkatan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan,

penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana, serta pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran

- 3) Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanganan bencana banjir dan kekeringan melalui peningkatan kinerja penanganan banjir dan kekeringan, serta membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai
 - 4) Meningkatkan capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui peningkatan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah
 - 5) Mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat melalui peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
 - 6) Mengoptimalkan peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat melalui optimalisasi peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 - 7) Meningkatkan ketertiban di masyarakat melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan kinerja pengamanan lingkungan
 - 8) Meningkatkan kerukunan antarumat beragama melalui peningkatan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan, serta peningkatan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial
 - 9) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui peningkatan cakupan layanan pengelolaan persampahan dan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis
 - 2) Meningkatkan kinerja pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan melalui penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan dan penjagaan luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati, peningkatan kinerja pengendalian

- pengelolaan limbah B3, mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat, serta menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan
- 3) Mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga melalui peningkatan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat serta penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan
 - 4) Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib ruang melalui peningkatan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah

Selain arah kebijakan di atas, juga ditetapkan arah kebijakan ekonomi lainnya dalam rangka mendorong peningkatan dan pembukaan usaha masyarakat baru yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta menurunkan kemiskinan sebagai bentuk pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19. Strategi dan arah kebijakan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, industri, serta penanaman modal untuk mendorong kemandirian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru	Pengembangan Destinasi Wisata	Destinasi	4	Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan lembaga pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	50%	850.000.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Persentase pengembangan SDM pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata		50%	Pariwisata		Dinas Pariwisata	
				Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	50%	1.095.235.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	50%	793.696.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksanya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17 Destinasi	2.527.361.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	27	Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	100%	977.434.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						persentase Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang terfasilitasi	100%		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase kepatuhan koperasi	58%	1.615.885.720	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	358.682.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan Peningkatan kompetensi SDM Koperasi	3,90%	1.000.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	7,56%	1.770.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	Persen	9	Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kelembagaan Usaha Mikro	15%	5.425.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	0,93%	1.450.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Nilai Realisasi penanaman modal	Rp triliun	45,00	Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1 Dokumen	283.500.000	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	2 Dokumen	441.000.000	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Laporan	315.000.000	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengembangan sentra industri	Sentra	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	2.630.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Laporan Data Industri	2 Laporan	1.550.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian
				Meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Laporan Pengawasan IUI Perusahaan Industri	120 Dokumen	850.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Persen	4	Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Produk Unggulan berorientasi ekspor	2,68%	700.000.000	Perdagangan	Dinas Perdagangan
				Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Distribusi	20%	568.000.000	Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Persentase Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	20%		Perdagangan	Dinas Perdagangan

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Persentase peningkatan PA-B2 yang diawasi	50%		Perdagangan	Dinas Perdagangan
				Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang Mendapatkan Pelayanan	100%		Perdagangan	Dinas Perdagangan
Mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	2,55	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun	1,5%	10.059.753.631	Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan	20%		Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)	0,94%		Pertanian	Dinas Pertanian

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan	4,50%		Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun	2,2%		Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang diawasi	15%		Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun	1,5%	9.229.135.251	Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani		Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong	77,50%		Pertanian	Dinas Pertanian

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan	14%	1.798.913.840	Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan OPT tanaman pangan	3,0%	1.536.213.840	Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase penurunan luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim	1,0%		Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase penurunan serangan OPT tanaman holtikultura dan perkebunan	2,8%		Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya	20%	576.700.000	Pertanian	Dinas Pertanian

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Persentase permohonan rekomendasi praktik dokter hewan yang ditindaklanjuti	100%		Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jenis metode dan informasi penyuluhan pertanian	33%	3.103.692.400	Pertanian	Dinas Pertanian
						Peningkatan kelompok tani yang naik kelas dalam setahun	45 kelompok tani		Pertanian	Dinas Pertanian
						Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat nilai evaluasi mandiri	23%		Pertanian	Dinas Pertanian
	Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	5	Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5%	1.400.000.000	Perikanan	Dinas Perikanan
						Persentase Pertumbuhan Kelompok Nelayan	5%		Perikanan	Dinas Perikanan

STRATEGI	INDIKATOR SASARAN SKPD	SATUAN	TARGET 2024	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	5%	4.766.323.017	Perikanan	Dinas Perikanan
				Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina	5%	1.200.000.000	Perikanan	Dinas Perikanan
						Persentase Produksi hasil olahan perikanan	5%		Perikanan	Dinas Perikanan
Mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan yang beredar	Indeks Harga Konsumen	Poin	122,96	Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6%	2.404.704.800	Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Cakupan Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	130%		Perdagangan	Dinas Perdagangan
JUMLAH								61.276.230.499		

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024, diolah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagaimana sebelumnya, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana tahun sebelumnya, kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2024 adalah kembali mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
4. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 melalui pemberian penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan/desa atas pengelolaan pajak PBB-P2 buku 1, 2, dan 3.
5. Membuat skala prioritas pemutakhiran data hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah sesuai dengan potensi wilayah.
6. Melakukan penilaian atas objek pajak PBB-P2 dan pemutakhiran data baik tekstual maupun spasial serta harga transaksi BPHTB secara berkesinambungan dengan skala prioritas potensi wilayah.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bekasi Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	Proyeksi/Target pada Tahun 2025
		2021	2022	APBD Murni 2023	RKPD 2024	RPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PENDAPATAN	6.015.699.034.836	5.896.615.937.108	6.061.448.290.468	6.441.283.415.835	6.819.004.918.137
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.543.991.978.764	2.537.931.758.052	2.742.994.835.814	2.934.145.759.777	3.212.889.606.961
1.1.1	Pajak daerah	2.008.212.741.030	2.108.062.451.837	2.300.015.920.949	2.468.876.628.280	2.738.632.406.490
1.1.2	Retribusi daerah	154.412.191.215	123.797.025.411	159.179.935.018	149.162.092.263	150.947.946.275
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.729.447.485	15.829.605.755	21.210.696.267	20.315.323.402	20.315.323.402
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	362.637.599.034	290.242.675.049	262.588.283.580	295.791.715.832	302.993.930.794
1.2	Pendapatan Transfer	3.144.687.876.072	3.358.684.179.056	3.318.453.454.654	3.507.137.656.058	3.606.115.311.176
	Transfer Pemerintah Pusat					
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	577.003.493.601	435.319.461.521	440.556.443.000	380.748.140.000	383.748.140.000
1.2.2	Dana alokasi umum	1.096.895.278.000	1.078.419.088.021	1.206.835.341.000	1.476.638.169.058	1.532.608.027.176
1.2.3	Dana alokasi khusus	308.540.213.841	576.380.580.226	571.193.061.000	579.296.758.000	579.296.758.000
1.2.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	312.843.662.348	-	-	-	-
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	14.160.353.000	-	-	-
1.2.6	Dana Desa	-	264.353.007.000	253.694.685.000	264.353.007.000	264.353.007.000
	Tranfer Antardaerah					
1.2.7	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	694.721.609.822	852.726.285.128	846.173.924.654	806.101.582.000	846.109.379.000
1.2.8	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	154.683.618.460	137.325.404.160	-	-	-
1.2.9	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	327.019.180.000	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	327.019.180.000	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian dan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada belanja wajib serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara umum, kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2024 diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai
2. Belanja yang telah diarahkan (*earmark*)
3. Belanja yang sifatnya rutin mengikat, seperti: air, listrik, telepon, BBM kendaraan operasional pengangkut sampah/lainnya
4. Belanja program/kegiatan prioritas/proyek strategis daerah
5. *Money follow program* atau penganggaran program/kegiatan/subkegiatan yang berorientasi hasil dan mendukung prioritas daerah tahun 2024
6. Pemenuhan *mandatory spending*
7. Dukungan pilkada serentak
8. Belanja prioritas lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan

Belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja lainnya yang menunjang fungsi pemerintahan serta menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun dalam rangka efisiensi belanja daerah, kategori belanja yang tidak boleh atau dibatasi penganggarnya pada tahun 2024, antara lain:

1. Tidak diperkenankan adanya usulan kegiatan yang sifatnya studi banding atau kunjungan kerja kecuali yang menghasilkan produk kebijakan daerah peraturan daerah/peraturan bupati dan/atau keputusan bupati dan anggarannya dialokasikan pada Sekretariat Daerah.
2. Tidak diperkenankan adanya belanja pengadaan pakaian olahraga, seragam, pengadaan tas dan sebagainya pada peringatan hari besar. Pengadaan dimaksud hanya diperkenankan untuk menunjang Hari Jadi Kabupaten Bekasi dan HUT RI.
3. Tidak diperkenankan adanya belanja pengadaan pakaian seragam kecuali untuk pengiriman kontingen.
4. Belanja alat tulis kantor (ATK) dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/*workshop*/bimbingan

- teknis/pelatihan atau sejenisnya, serta kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, dan kegiatan lainnya yang dipersyaratkan.
5. Belanja perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, kegiatan lainnya yang dipersyaratkan, serta kegiatan yang sifatnya pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi.
 6. Belanja modal peralatan dan mesin dengan spesifikasi umum dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, kegiatan lainnya yang dipersyaratkan.

Untuk tahun 2024, total belanja daerah yang dianggarkan adalah sebesar Rp.7.135.254.132.872,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.5.529.577.663.433,-, belanja modal yang diperkirakan sebesar Rp.612.229.805.963,-, belanja tidak terduga sebesar Rp.100.000.000.000,-, dan belanja transfer sebesar Rp.893.446.663.476,-. Adapun pada belanja operasi terdapat beberapa earmark dan prioritas yang telah dianggarkan, antara lain: BOS Reguler sebesar Rp.327.766.880.000,-, DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp.248.850.878.000,-, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp.2.679.000.000,-, BLUD FKTP (JKN Puskesmas) sebesar Rp.92.466.715.832,-, BLUD RSUD Cabangbungin sebesar Rp.10.000.000.000,-, BLUD RSUD Cibitung sebesar Rp.143.325.000.000,-, Hibah kepada KPU sebesar Rp.70.200.000.000,-, Hibah kepada Bawaslu sebesar Rp.10.800.000.000,-, Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp.8.573.808.000,-, Hibah Pengamanan kepada Polres dan Kodim sebesar Rp.11.891.271.538,-, Dukungan Patroli Himbauan/Penertiban APK dan Satgas Sat Set sebesar Rp.2.984.639.200,-, serta Desk Pilkada sebesar Rp.200.000.000,-. Meski demikian, alokasi anggaran tersebut masih dapat berubah di tahap penganggaran, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, realisasi dan proyeksi alokasi belanja daerah tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	Proyeksi/Target pada Tahun 2025
		2021	2022	APBD Murni 2023	RKPD 2024	RPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	BELANJA	6.192.203.225.387	6.169.829.401.302	6.876.799.778.476	7.135.254.132.872	7.162.566.918.137
2.1	Belanja Operasi	4.468.689.299.632	4.672.636.760.728	5.200.340.339.765	5.529.577.663.433	5.324.636.342.635
2.1.1	Belanja Pegawai	2.088.671.378.560	2.104.393.714.626	2.481.538.604.776	2.270.965.382.100	2.273.279.432.100
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.207.194.963.957	2.330.745.802.202	2.494.680.646.189	3.157.147.201.795	3.034.966.625.535
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	118.967.963.115	176.531.243.900	159.355.588.800	101.465.079.538	16.390.285.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	53.854.994.000	60.966.000.000	64.765.500.000	-	-
2.2	Belanja Modal	726.057.096.351	745.404.155.756	915.428.193.428	612.229.805.963	759.606.478.996
2.3	Belanja Tidak Terduga	59.051.822.571	8.429.384.721	5.748.584.283	100.000.000.000	100.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	938.405.006.833	743.359.100.097	755.282.661.000	893.446.663.476	978.324.096.506
2.4.1	Belanja Bagi hasil	221.184.135.000	210.042.130.000	245.919.587.000	256.337.887.078	280.689.986.350
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	717.220.871.833	533.316.970.097	509.363.074.000	637.108.776.398	697.634.110.156

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian dan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

3.2.3 Arah Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 masih difokuskan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), meskipun tidak menutup kemungkinan pembiayaan dari sumber lainnya apabila memungkinkan, seperti: transfer dari dana cadangan daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau penerimaan piutang daerah.

Target penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2023 dalam RKPD tahun 2024 dialokasikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.693.970.717.037,-. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 diperkirakan akan semakin optimal akibat upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk terus mendorong perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan maupun capaian kinerja masing-masing perangkat daerah. Sementara pada pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah belum menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Walaupun demikian, pengeluaran pembiayaan masih dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan serta timbal baliknya kepada pemerintah daerah.

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2022 serta
Proyeksi/Target Murni Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	Proyeksi/Target pada Tahun 2025
		2021	2022	APBD Murni 2023	RKPD 2024	RPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1.233.147.053.568	1.055.718.782.273	890.351.488.008	693.970.717.037	343.562.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	1.233.147.053.568	1.055.718.782.273	890.351.488.008	693.970.717.037	343.562.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	6.914.894.265	75.000.000.000	-	-
3.2.1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	-	6.914.894.265	75.000.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	1.154.165.332.192	1.048.803.888.008	815.351.488.008	693.970.717.037	343.562.000.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian dan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk tahun 2020-2024, visi pembangunan RPJMN disusun berdasarkan arahan berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025, yaitu: **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi tersebut diwujudkan kembali melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian
 - b. 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial
 - c. 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu
 - d. 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
 - e. 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif
 - f. Indeks Perlindungan Anak: 73,49
 - g. Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67
 - h. Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39
 - i. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18

- j. 49,8% Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
 - k. 66,7% lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
 - l. 40% hasil inovasi Prioritas Riset Nasional
 - m. 3 Medali Emas. baik *Olympic Games* maupun *Paralympic Games* tahun 2024
 - n. 50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi
 - o. Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
 - p. Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
 - q. Indeks Pembangunan Masyarakat: 0,65
 - r. Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
 - s. Nilai Budaya Literasi: 71,0
 - t. Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
 - u. Median usia kawin pertama perempuan: 22,1
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
- a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - 70% rumah tangga menempati hunian layak
 - 100% hunian dengan akses air minum layak
 - 90% hunian dengan akses sanitasi layak
 - 30% hunian dengan akses air minum perpipaan
 - 500.000 Ha jaringan irigasi baru
 - 50 m³/detik tambahan air baku industri dan domestik
 - 63 bendungan multiguna
 - 3 m³/kg produktivitas air untuk padi
 - 20 provinsi beresiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana
 - b. Infrastruktur Ekonomi
 - Kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
 - Kereta api (Makasar-Parepare)
 - Jaringan pelabuhan utama terpadu
 - 43 rute jembatan udara
 - 2.500 km jalan tol baru dan/atau beroperasi

- 3.000 km jalan nasional baru
- 97% kondisi mantap jalan nasional
- 1,9 jam/100 km waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
- 27% rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*)
- c. Infrastruktur Perkotaan
 - Sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan
 - 80% penanganan dan 20% pengurangan sampah (hunian dengan akses sampah terkelola baik)
- d. Energi dan Ketenagalistrikan
 - 1.400 kWh Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional
 - 100% rasio elektrifikasi
 - 4 juta sambungan rumah baru jaringan gas kota
 - 6 unit pembangunan dan pengembangan kilang minyak (2 *Grass Root Refinery/GRR* dan 4 *Refinery Development Master Plan/RDMP*)
- e. Transformasi Digital
 - 95% desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar
 - 60% kecamatan cakupan jaringan tetap pita lebar
 - 80% populasi terjangkau siaran digital
 - 3 *start up unicorn* baru
- 3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. Tersusunnya rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja
 - b. Menuju 40 untuk Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)
- 4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. 4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
 - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (predikat baik)
 - c. 2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (*dwelling time*)
- 5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. 21% kontribusi PDB industri pengolahan
- b. 18,9% kontribusi PDB industri pengolahan non migas
- c. 15,7% kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
- d. USD 30 miliar devisa pariwisata
- e. Rp.1.846 triliun nilai tambah ekonomi kreatif
- f. Rp. 600 triliun nilai transaksi *e-commerce*

Untuk tahun 2024, Pemerintah Pusat menetapkan tema pembangunan dengan **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Percepatan transformasi ekonomi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. Sedangkan pembangunan inklusif diwujudkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan ibukota nusantara. Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Selain itu, tema tersebut juga mencakup perwujudan stabilitas di berbagai bidang pembangunan sebagai fondasi bagi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

Selanjutnya, sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7%, (b) tingkat pengangguran terbuka dengan target 5-5,7%, (c) rasio gini dengan target 0,374-0,377, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca dengan target 27,27%;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dengan target 73,99-74,02, dan (b) tingkat kemiskinan dengan target 6,5-7,5%.

Pada tingkat provinsi, dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026. Adapun tema pembangunan tahun 2024

yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah **Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** dengan tujuan dan sasaran pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 3) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat
 - 4) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda
 - 5) Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan daerah
 - 3) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
 - 4) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif
3. Pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - 3) Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah
4. Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran
 - 1) Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi
 - 2) Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah
 - 3) Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

Adapun untuk Kabupaten Bekasi, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bekasi di 22 Juni 2022 dan kosongnya kursi bupati definitif sampai dengan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, maka visi dan misi yang digunakan untuk tahun 2023 hingga terpilihnya bupati berikutnya adalah visi misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi: Masyarakat Agamis yang Unggul dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata

- Misi: 1. Meningkatkan Peran Serta dan Pembinaan Institusi Keagamaan dalam Pembangunan di Segala Bidang.
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasarnya secara Layak.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Lokal, Tingkat Nasional dan Global dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
4. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah yang Handal dan Terintegrasi serta Lingkungan Hidup yang Asri dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.
6. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Ketertiban yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Publik secara Terpadu dan Penuh Inovasi yang Berorientasi kepada Kepuasan Masyarakat secara Adil dan Merata.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup

luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

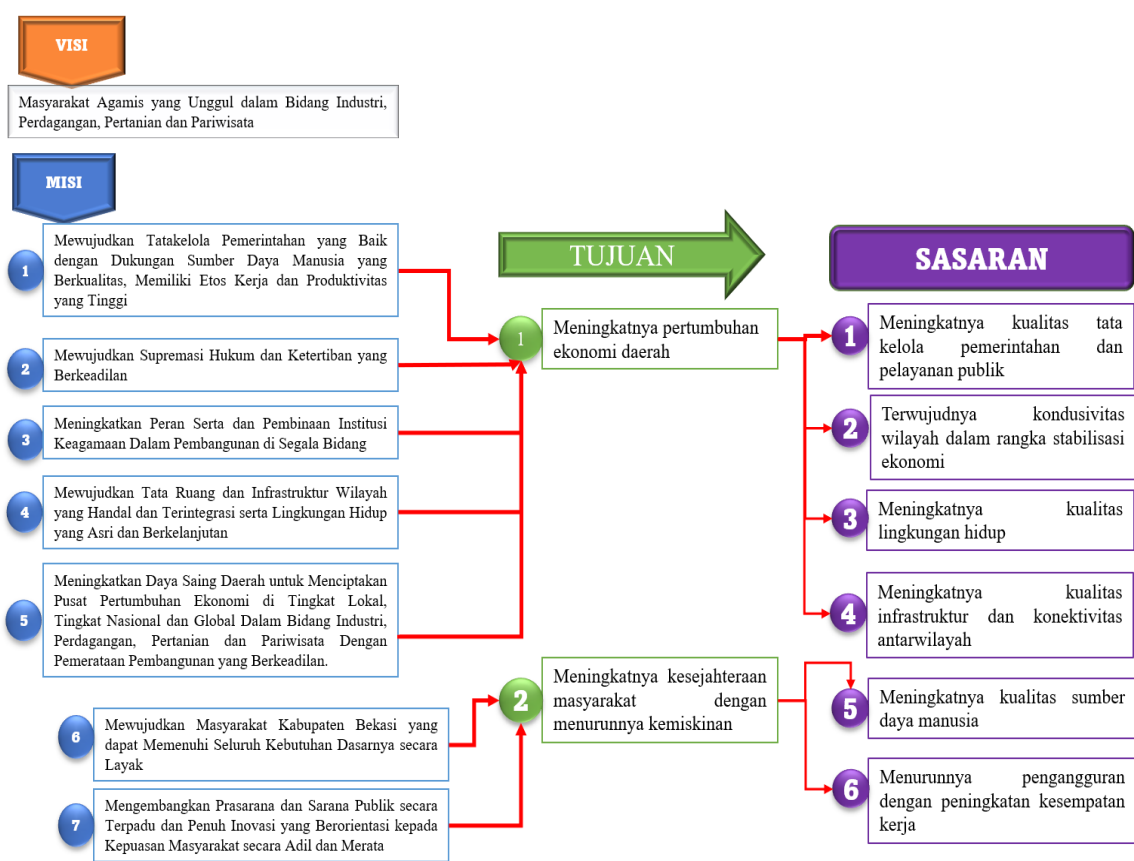
1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
6. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja

Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026 dengan
Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025



Selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, perumusan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023-

2026 di atas juga memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi
dengan Sasaran RPJMN dan RPD Jawa Barat

Sasaran RPJMN		Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
(1)		(2)		(3)	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S6	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S2	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
		S7	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan		
		S8	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S9	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha		
S3	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.	S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
		S14	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan		
S4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
				S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
S6	Terpenuhinya layanan dasar	S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus		
		S2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat		
		S12	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		

Sasaran RPJMN		Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
(1)		(2)		(3)	
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga		
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S10	Terkendalinya tingkat kemiskinan		
		S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat		
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S11	Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja		
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus		
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus		
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat		
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S9	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus		
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus		
		S2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S14	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah

Sasaran RPJMN		Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
(1)		(2)		(3)	
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S14	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan		
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S20	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S9	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	S15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S13	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
S23	Pembangunan Rendah Karbon	S13	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	S16	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
		S17	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		S18	Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel		
		S19	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas		
		S20	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		

Sumber: Hasil Olah Data Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut, dengan target IPM dan IKLH yang disesuaikan dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator tersebut di tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dan 2024:

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bekasi dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi: Masyarakat Agamis yang Unggul dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata									
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasarnya secara Layak									
Misi 7: Mengembangkan Prasarana dan Sarana Publik secara Terpadu dan Penuh Inovasi yang Berorientasi kepada Kepuasan Masyarakat secara Adil dan Merata									
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,01	4,69	4,66					
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,22	75,95	76,43	Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Indeks Pendidikan (Poin)	0,7	0,71	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar
									Mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dan kesetaraan
									Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar
									Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri
									Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan	Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional (Persen)	1	1,2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan
					Meningkatkan budaya literasi masyarakat agar mampu mengembangkan dirinya secara mandiri	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	7,41	7,71	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno
					Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Poin)	83,18	83,38	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan
									Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
									Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan
									Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
					Meningkatkan standar mutu rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar nasional	Capaian Standar Mutu Nasional Rumah Sakit (Persen)	74,33	87,00	Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit
									Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan sesuai dengan standar layanan fasilitas kesehatan	Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan (Persen)	10	14	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan
					Meningkatkan pemenuhan penyediaan lahan untuk fasilitas umum	Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi (Persen)	35	40	Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum
									Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah
									Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
					Meningkatkan akses air minum yang bersih kepada masyarakat	Cakupan layanan air minum (Persen)	44,09	49,09	Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat
									Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan
					Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (Persen)	44,08	44,95	Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani
									Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh
					Meningkatkan kualitas pembangunan olahraga	Indeks pembangunan olahraga berdasarkan dimensi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, ruang terbuka olahraga dan SDM Keolahragaan (Poin)	0,01	0,02	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian (Persen)	2,33	2,55	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian
									Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan
									Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani
									Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
									Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
									Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian
									Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian
						Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan (Persen)	5	5	Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan
					Mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan yang beredar	Indeks Harga Konsumen (Poin)	118,96	122,96	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur
									Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor
									Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan
									Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Ketersediaan Pangan Pokok (Persen)	97,96	97,97	Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	86,8	86,9	Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan
									Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah
					Memastikan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pangan	Cakupan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan (Persen)	40	50	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan
					Menekan angka kelahiran untuk mengurangi beban penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Anak)	2,4	2,3	Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan
									Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga
									Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Meningkatkan kemandirian desa	Tingkat Desa Mandiri (Persen)	8,33	8,33	Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa
									Mendorong peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa
									Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa
									Membantu desa dalam melakukan penataan desa
									Mendorong pembentukan kawasan perdesaan
									Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada
					Mendorong peningkatan pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (Persen)	88,96	89,04	Mendorong pencapaian target indikator PUG
									Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga
									Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data
					Mendorong perwujudan kabupaten layak anak	Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) (poin)	602	612	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
									Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak
					Meningkatkan cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Tingkat Cakupan PPKS yang ditangani (Persen)	21,16	23,28	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan
									Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan
									Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
									Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
									Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan
									Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana
					Mendorong pemuda untuk aktif dalam aktivitas positif dan berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan dimensi pemuda yang aktif, pemuda berprestasi dan wirausaha muda (Poin)	30,25	30,50	Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan
									Mendorong peningkatan pemuda berprestasi
									Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan
					Menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang positif melalui pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan berdasarkan dimensi ekonomi budaya, warisan budaya dan ekspresi budaya (Poin)	31	35	Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional
									Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal
									Melestarikan cagar budaya daerah
									Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,31	9,4	9,02	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, industri, serta penanaman modal untuk mendorong kemandirian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru	Pengembangan Destinasi Wisata (Destinasi)	3	4	Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata
									Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan
									Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual
									Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
						Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas (Persen)	22	27	Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam
									Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi
									Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian
									Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas (Persen)	6	9	Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM
						Nilai Realisasi penanaman modal (Rp triliun)	44,12	45,00	Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah
									Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi
									Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
						Pengembangan sentra industri (Sentra)	1	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten
									Meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha industri
						Pertumbuhan Nilai Ekspor (Persen)	2	4	Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal
									Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor
					Mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi para pencari kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	66,00	66,10	Membantu penempatan pencari kerja terdaftar
									Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat
									Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja
									Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan
									Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi
Misi 1: Meningkatkan Peran Serta dan Pembinaan Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan di Segala Bidang.									
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Lokal, Tingkat Nasional dan Global Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.									
Misi 4: Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah yang Handal dan Terintegrasi serta Lingkungan Hidup yang Asri dan Berkelanjutan.									
Misi 5: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.									
Misi 6: Mewujudkan Supremasi Hukum dan Ketertiban yang Berkeadilan.									

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	4,7-5,3	4,7					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	71,95	73,99	Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan (Poin)	84,17	86,67	Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah
					Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah (Poin)	65	70	Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
					Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai Sakip Pemda (Poin)	68,59	69,76	Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
									Mendorong tindak lanjut rekomendasi perbaikan program dan kegiatan
									Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan
					Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Indeks Kependudukan (poin)	75	80	Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
					Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Kapabilitas APIP (poin)	2	3	Meningkatkan kapabilitas APIP
						Indeks Maturitas SPIP (poin)	2	3	Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah
					Mendorong pelaksanaan sistem merit	Indeks Sistem Merit (Poin)	273	282	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel
									Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN
									Meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta <i>reward and punishment</i> bagi ASN
					Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi (Poin)	15	16,5	Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi
					Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah	Nilai Kualitas Kebijakan (Poin)	73	75	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
									Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi
					Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi	Cakupan Nilai Reformasi Birokrasi Dimensi Deregulasi Kebijakan, Pelaksanaan Tata Laksana, Manajemen Perubahan, Pelayanan Publik dan Penguatan Organisasi (Persen)	62,57	67,53	Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan
									Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
									Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah
									Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah
					Mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Inovasi (Poin)	30	33	Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun
									Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan
					Mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	2,6	2,9	Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) (Poin)	65	70	Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik
									Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral
					Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Poin)	175	185	Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah
					Meningkatkan kinerja layanan penanaman modal	Nilai Kinerja Pelayanan Publik (Poin)	80,32	81,92	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha
									Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
					Meningkatkan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan (Poin)	75,5	76	Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah
					Mengoptimalkan peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	86,00	87,00	Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat
									Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan
									Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum
					Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah (Poin)	30,28	30,28	Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah
									Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah
									Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah
					Mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk membiayai program pembangunan daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	7,5	8	Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah
									Meningkatkan kinerja penagihan pajak daerah
									Meningkatkan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah
					Meningkatkan jumlah bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi	Tingkat bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang laik fungsi (Persen)	5	6	Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah
									Meningkatkan layanan persetujuan bangunan gedung

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi
					Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan standar sarana prasarana kerja pemerintah daerah (Persen)	82,4	82,9	Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	N/A	55,24	63,36	Meningkatkan konektivitas jalan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan	Tingkat Konektivitas Antar Jalan Kabupaten (Persen)	81,38	87,71	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten
						Tingkat Konektivitas antar Permukiman dan Perumahan (Persen)	30,33	42,37	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa
									Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan
									Mendorong pengalihan aset prasarana dan sarana utilitas umum perumahan ke pemerintah daerah
									Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan
									Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya
						Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi (Persen)	35	40	Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas	Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dimensi Perlengkapan Jalan, Kendaraan Laik Jalan, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Persen)	54	60	Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor
									Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Menurunkan derajat kejenuhan jalan
Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,10	120,56	113,46	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Poin)	0,45	0,46	Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
					Meningkatkan <i>response time</i> petugas pada kejadian bencana	Pencapaian ketepatan waktu tanggap (<i>response time</i>) petugas pada setiap kejadian (Persen)	81	82	Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana Meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanganan bencana banjir dan kekeringan	Tingkat Efektifitas Mitigasi Pengendalian Banjir dan kekeringan (Persen)	18,12	19,51	Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan
									Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai
	Indeks Demokrasi (Poin)	N/A	70,28	71,88	Meningkatkan capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Persen)	100	100	Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah
					Mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat	Indeks Demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik (Poin)	70,28	71,88	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					Mengoptimalkan peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi (Persen)	100	100	Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
						Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan (Persen)	100	100	

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tingkat Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif (Persen)	100	100	
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	79,84	82,09	Meningkatkan ketertiban masyarakat di	Indeks Ketertiban Masyarakat (poin)	31,36	33,16	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
									Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan
					Meningkatkan kerukunan antarumat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	23,7	24	Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan
									Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan
					Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	Indeks Wawasan Kebangsaan (Poin)	24,78	24,93	Meningkatkan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial
									Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43,71	43,72	43,73	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	21,00	21,25	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan
						Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis			
					Meningkatkan kinerja pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Udara (IKU) (Poin)	69	69,01	Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
						Indeks Kualitas Air (IKA) (Poin)	28,8	28,81	Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
						Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)	22,60	22,60	Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati
									Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3
									Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN
			2023	2024			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat
									Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan
					Mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga	Cakupan akses sanitasi aman komponen pelayanan (Persen)	5	7	Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat
						Tingkat Akses Sanitasi Layak dan Aman (Persen)	85,38	85,56	Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan
					Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib ruang	Indeks perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang (Poin)	0,6	0,68	Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
									Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Hasil Evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas dan sasaran tersebut antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) porsi EBT dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
 - 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan PDRB KTI, (b) IPM KTI, dan (c) persentase penduduk miskin KTI.
 - 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, dan (c) persentase penduduk miskin KBI.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong: (a) angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR), dan (b) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong: (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong: (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balitas, (f) insidensi tuberkulosis, (g) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta, (i) prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) nilai rata-rata hasil PISA: membaca, (l) nilai rata-rata hasil PISA: matematika, (m) nilai rata-rata hasil PISA: sains, (n) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) harapan lama sekolah.
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong: (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan mendorong: (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, (c) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university top 200*, (d) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university top 300*, (e) jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university top 500*, dan (f) peringkat *Global Innovation Index*.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong: (a) Indeks Capaian Revolusi Mental, (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.

- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong indeks pembangunan kebudayaan.
 - 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong indeks pembangunan masyarakat.
 - 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong indeks kerukunan umat beragama.
 - 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mendorong: (a) indeks pembangunan keluarga, dan (b) median usia kawin pertama perempuan.
 - 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong nilai budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong: (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
 - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong: (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) persentase rute pelayanan yang saling terhubung (loop), (c) kondisi jalur KA sesuai standar *track quality index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) persentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi udara.
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong: (a) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong: (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi.
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan mendorong indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
 - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
 - 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong: (a) persentase penurunan emisi GRK – kumulatif, (b) persentase penurunan emisi GRK – tahunan, dan (c) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong: (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
 - 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
 - 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong indeks pembangunan hukum.
 - 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik nasional.
 - 5) Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dengan mendorong persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam pelaksanaannya, tujuh PN di atas didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan, jumlah MP mengalami perubahan. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Pada RKP Tahun 2022 kembali bertambah menjadi 45 MP dan menjadi 44 MP pada RKP Tahun 2024.

Adapun pada RKP Tahun 2024 ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), dan (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga), (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Penekanan kebijakan dimaksud tidak bermakna bahwa pada tahun 2024 hanya dilaksanakan 16 *highlight* MP, melainkan seluruh MP tetap dilaksanakan sesuai dengan progresnya.

Sementara itu, prioritas pembangunan daerah Jawa Barat untuk tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis Jawa Barat, antara lain: kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar, serta reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Adapun program prioritas pembangunan Jawa Barat untuk tahun 2024, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata
2. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama
3. Penguatan sistem kesehatan daerah
4. Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
5. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa
6. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Di samping itu, kegiatan di tahun 2024 juga diarahkan pada penormalan ekonomi; operasi, pemeliharaan, optimalisasi, rehabilitasi proyek strategis; keberlanjutan Program Jabar Juara; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); reformasi birokrasi; serta penyelesaian program strategis.

4.2.2 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2024, identifikasi permasalahan daerah yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

NO.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekolah lapang untuk pertanian dan peternakan	belum optimalnya produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2.	Pelatihan budidaya pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian		
4.	Perbaikan rumah tidak layak huni	masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Kawasan Permukiman
5.	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan	belum optimalnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6.	Pelatihan budidaya perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7.	Fasilitasi pembuatan badan hukum koperasi	Belum optimalnya pengembangan sektor koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
8.	Penyediaan sarana dan prasarana UMKM		
9.	Pembangunan/penataan gerai UMKM/usaha bersama		Program Pengembangan UMKM
10.	Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal	Program Penanggulangan Bencana
11.	Pelatihan dan Pembinaan desa tangguh bencana (Destana)		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
12.	Pelatihan dan pencegahan bencana kebakaran		
13.	Penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan PJU	Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas akibat sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14.	Peningkatan kompetensi pencari kerja	Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Pembangunan/perbaikan/pena- taan/penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
16.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
17.	Pembangunan/perbaikan/peny- ediaan sarana dan prasarana pendidikan/gedung sekolah	Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
18.	Pembangunan/peningkatan/pe- rbaikan/pelebaran jembatan	Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas	Program Penyelenggaraan Jalan
19.	Pembangunan/peningkatan/pe- rbaikan/pelebaran jalan kabupaten		
20.	Pembangunan/peningkatan/pe- rbaikan/pelebaran Jalan Lingkungan Perumahan dan permukiman	Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus	Program Pengembangan Permukiman
21.	Pembangunan/pengadaan/pen- yediaan sarana dan prasaran pengelolaan persampahan	Layanan pengelolaan persampahan belum optimal	Program Pengelolaan Persampahan
22.	Pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah		
23.	Pembangunan/penataan/penye- diaan RTH	Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
24.	Penataan TPU		Program Pengelolaan Tanah Kosong
25.	Pembangunan/penataan destinasi wisata	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
26.	Pelatihan perempuan	Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
27.	Pembinaan kader posyandu	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
28.	Penyediaan sarana posyandu		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
29.	Pelatihan ketahanan keluarga	Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
30.	Normalisasi sungai	Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
31.	Pembuatan dan Penataan Situ Atau Embung		

NO.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Pembangunan/perbaikan tembok penahan tanah (TPT)/turap/tanggul sungai/lenning/pintu air		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
33.	Pembuatan sumur bor/satelit		
34.	Pembangunan/peningkatan/pe rbaikan/normalisasi drainase jalan		

Sumber: Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2023, Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

4.2.3 Saran dan Masukan Forum Konsultasi Publik

Melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 dalam rangka memperoleh saran dan masukan atas rancangan awal RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024, diperoleh saran dan masukan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Telaahan Saran/Masukan Forum Konsultasi Publik Tahun 2023

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM Pendidikan	Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Zona selamat sekolah	Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.	Penanganan terkait gizi buruk, libatkan HIPMI dalam penanganannya	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pendidikan KesMas	Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.	Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat	Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	
		Belum optimalnya layanan rumah sakit umum daerah	
6.	Dukungan semua sektor dalam akselerasi penurunan stunting	Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Kesehatan lingkungan khususnya pada lingkungan masyarakat miskin belum terjaga secara optimal yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
7.	Pembebasan lahan untuk perluasan RSUD Kabupaten Bekasi menjadi prioritas Tahun 2024	Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan	Program Penatagunaan Tanah
8.	Peningkatan kualitas manusia yang terpapar HIV, isu kesehatan terkait HIV tetap menjadi prioritas, intervensi masyarakat miskin dengan HIV serta memperhatikan aspek-aspek kemiskinan pada orang dengan HIV dan AIDS	Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Peningkatan fasilitasi daerah dalam pencapaian SPM bidang Kesehatan	Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan	
10.	Penyediaan lapangan pekerjaan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak	Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya peran program transmigrasi dalam penyerapan tenaga kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11.	Pelatihan dan Bantuan untuk korban kekerasan perempuan	Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial	Program Perlindungan Perempuan
12.	Bantuan untuk korban kekerasan anak	Hak dan suara anak seringkali diabaikan	Program Perlindungan Khusus Anak
13.	Keikutsertaan pemuda dalam pembangunan	Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
14.	Inventarisasi koperasi berdasarkan klasifikasi koperasi masyarakat, koperasi unit desa dalam hal kualifikasi penilaian kesehatan koperasi dan koperasi tidak mengikuti penilaian kesehatan diberikan sanksi untuk edukasi dan perbaikan koperasi	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
15.	Pengembangan dan perlindungan koperasi, kemudahan mengurus perizinan, terbukanya izin investasi bagi koperasi, pengembangan usaha koperasi, fasilitasi kemitraan dan pemenuhan sistem digitalisasi koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
16.	Penekanan legal formal bersifat wajib PAD, Nomor induk Koperasi, Nomor induk berusaha, SKDU dan NPWP		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
17.	Diperkuat kerjasama antar koperasi		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
18.	Seminar kewirausahaan dan peningkatan pengelolaan usaha bagi yang sudah berjalan, terutama bagi kami pelaku ekonomi kreatif subsektor fotografi	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19.	Pelatihan, bantuan sosial, alat bahan untuk praktek UMKM, digitalisasi pemasaran produk UMKM	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
20.	Optimalisasi peran pasar tradisional	Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
21.	Lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) agar segera dibahas dan ditetapkan	Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Pelatihan-pelatihan budidaya pertanian kepada petani dan pemuda ditingkatkan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
23.	Harus ada riset teknologi di bidang pertanian		Program Penyuluhan Pertanian
24.	Sarana dan prasarana pertanian		
25.	Normalisasi saluran irigasi		
26.	Sarana dan prasarana perikanan	Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
27.	Meningkatkan keamanan, ketersediaan, keterjangkauan pangan	Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya	Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan
28.	Dipercepat penanganan kemiskinan dengan melibatkan semua stakeholder yang ada dan harus terfokus bukan hanya sekedar program	Kemiskinan	Semua program yang mendukung pencapaian tujuan penurunan persentase kemiskinan
29.	Penanganan ODGJ, LANSIA, orang terlantar, disabilitas, dan masalah sosial lainnya agar dijadikan prioritas	Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya	Program Pemberdayaan Sosial
30.	Upaya penangan kemiskinan yang lebih konkret	Kemiskinan	Semua program yang mendukung pencapaian tujuan penurunan persentase kemiskinan
31.	Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
32.	Peningkatan lapangan kerja	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
33.	Penanganan sampah lebih diutamakan, buat konsep menyeluruh tentang penanganan kebersihan	Layanan pengelolaan persampahan belum optimal	Program Pengelolaan Persampahan
34.	Sarana dan prasarana persampahan agar segera disediakan		
35.	Dukungan program/kegiatan pengendalian banjir dalam program pemanfaatan ruang, pengendalian tata ruang pada sempadan sumber air	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
36.	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
37.	Peningkatan fasilitasi tagana dan sosialisasi pencegahan bencana	Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal	Program Penanggulangan Bencana
38.	Peningkatan akses air minum kepada masyarakat melalui pembangunan sumur bor, bagi desa yang mengalami kesulitan air bersih	Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
39.	Pengendalian lahan untuk dukungan infrastruktur pengendali banjir seperti lahan-lahan fasos, fasum untuk kolam retensi, folder, embung, resapan air, dan lainnya		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
40.	Normalisasi kali ulu serta pembangunan dan peningkatan saluran drainase		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

NO.	SARAN/MASUKAN	HASIL TELAAHAN	
		PERMASALAHAN PADA RPD KABUPATEN BEKASI 2023-2026	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	Kemacetan	Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
42.	Jembatan penyeberangan dan penerangan jalan di daerah strategis	Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
43.	Peningkatan jalan umum dan trotoar	Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
44.	Jaringan sarana air	Belum optimalnya layanan air minum perpipaan bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
45.	Pemerataan pembangunan fisik	Belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
46.	Memprioritaskan pengangguran untuk pemenuhan standar pelayanan publik, dengan mengalokasikan anggaran untuk program-program inovasi yang di buat khususnya dalam memberikan pelayanan yang diterima kepada masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintah di kecamatan	Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
47.	Pendidikan ataupun pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai	Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
48.	Peningkatan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban umum menghadapi pemilu 2024	Masih terjadinya kejahatan dan konflik yang mengganggu ketertiban di masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
49.	Anggaran forum pembauran kebangsaan kecamatan agar dianggarkan setiap tahun	Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
50.	Peningkatan kesejahteraan guru ngaji, majelis taklim, dan TPQ	Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Saran/Masukan Forum Konsultasi Publik Tahun 2023, Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas indikator kinerja utama, indikator makro daerah, telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, saran dan masukan yang bersumber dari Forum Konsultasi Publik, serta isu strategis dan permasalahan daerah berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dirumuskan isu strategis daerah untuk tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Isu Strategis Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kemiskinan	Predikat kabupaten/kota layak anak selama tahun 2019-2022 kategorinya tidak mengalami peningkatan	Kemiskinan		Kemiskinan	Rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak memiliki daya saing dan memiliki kemampuan untuk mandiri	Rendahnya tingkat pendidikan	Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal	Pendidikan	1. Kemiskinan a. Kualitas sumber daya manusia b. Pengangguran dan Kesempatan kerja
Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal	Tingkat pengangguran terbuka capaiannya selama 3 tahun terakhir sangat rendah	Tingkat pengangguran					Rentannya anak usia sekolah terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal	Pendidikan	
			Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan				Pendidikan		
Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan	Opini BPK predikatnya mengalami penurunan di tahun 2022		Rendahnya minat masyarakat untuk membaca				Perpustakaan		
			Rendahnya kesehatan masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, air minum yang bersih, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi lingkungan yang buruk			Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat	Kesehatan		
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan				Kesehatan			
		Belum optimalnya layanan rumah sakit umum daerah				Kesehatan			
		Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan				Kesehatan			
		Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan				Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan	Pertanahan		
Belum optimalnya layanan air minum perpipaan bagi masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024					
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
Kesehatan lingkungan khususnya pada lingkungan masyarakat miskin belum terjaga secara optimal yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh			Masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh				Kesehatan lingkungan khususnya pada lingkungan masyarakat miskin belum terjaga secara optimal yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
			Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga				Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga	Kepemudaan dan Olahraga						
Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian			belum optimalnya produksi pertanian				Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian	Pertanian						
Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan			belum optimalnya produksi perikanan				Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan						
Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya			Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal				Terus meningkatnya harga bahan pangan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya	Perdagangan Pangan						
							Pangan segar yang beredar di masyarakat seringkali tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan	Pangan						
							Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa											Belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Belum adanya kerjasama antardesa yang mendukung kegiatan ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial			Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial			Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya	Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Hak dan suara anak seringkali diabaikan			Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif			Rentannya pemuda terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal	Hak dan suara anak seringkali diabaikan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya							Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya	Sosial	
Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif							Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif	Kepemudaan dan Olahraga	
Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru			Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata		Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan	Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru	Pariwisata	
			Belum optimalnya pengembangan sektor koperasi dan UMKM					Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
								Penanaman Modal	
								Perindustrian	
								Perdagangan	
Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan			Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya		Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya	Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan	Tenaga Kerja		
Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya						Tenaga Kerja			
Belum optimalnya peran program transmigrasi dalam penyerapan tenaga kerja						Transmigrasi			

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024		
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan	Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Lemahnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan atas program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	Integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah belum terwujud seluruhnya	Perencanaan	2. Pertumbuhan ekonomi daerah		
							Kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan belum optimal	Perencanaan		a. Peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	
							Laporan capaian kinerja yang tersusun belum seluruhnya sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan	Sekretariat Daerah			b. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemerataan
							Rekomendasi perbaikan program dan kegiatan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah			
							Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan	Sekretariat Daerah			
							Data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan belum tersedia seluruhnya dan ter-update secara berkala	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		c. Kondisi pendukung stabilitas ekonomi	
							Rendahnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	Inspektorat Daerah			
							Pengendalian intern pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan sampai ke tingkat perangkat daerah	Inspektorat Daerah		d. Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	
						Kualitas ASN yang tersedia belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan	Sistem pengadaan ASN belum sepenuhnya efektif, transparan dan akuntabel	Kepegawaian			
							Manajemen kinerja serta reward and punishment bagi ASN belum berjalan sehingga motivasi kerja ASN menjadi rendah	Kepegawaian			
Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya	Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya	Pendidikan dan Pelatihan									

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAHAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat						Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sekretariat Daerah	
Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya							Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi	Sekretariat Daerah	
							Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya	Penelitian dan Pengembangan	
							Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Penelitian dan Pengembangan	
							Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal	Komunikasi dan Informatika	
							Data dan informasi capaian pembangunan belum tersedia seluruhnya, ter-update secara berkala, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah	Komunikasi dan Informatika	
							Keamanan informasi masih rentan untuk diretas oleh pihak luar	Statistik	
							Kinerja layanan penanaman modal belum optimal	Penanaman Modal	
							Masih rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah	Kearsipan	
							Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Kecamatan	
Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa dan kelurahan	Kecamatan							
	Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Kecamatan							
	Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Keuangan							
	Pendapatan asli daerah belum tergali dengan optimal	Keuangan							
						Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan			

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024		
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						Sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan	Masih ada gedung pemerintah yang belum memiliki sertifikat laik fungsi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
					Kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja sesuai standar belum semuanya terpenuhi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
			Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi	Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan yang diperlukan	Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus			Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
						Masih ada jalan dan jembatan pada perumahan yang rusak atau terputus dan tidak memiliki perlengkapan jalan	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
						Lahan yang tersedia tidak cukup untuk peningkatan kapasitas jalan/jembatan atau pembangunan jalan/jembatan baru untuk menambah aksesibilitas jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
			Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal			Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal	Masih ditemukan adanya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan berkendara di jalan umum	Perhubungan			
			Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas			Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Perhubungan				
			Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal			Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal	Kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masih kerap terjadi	Kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi		Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
										Kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana belum optimal	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

PERMASALAHAN BERDASARKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN BERDASARKAN EVALUASI INDIKATOR MAKRO DAERAH	PERMASALAHAN BERDASARKAN PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD	PERMASALAHAN BERDASARKAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026					ISU STRATEGIS 2024	
				MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	FAKTOR PENYEBAB	BIDANG URUSAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal			Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal				Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
							SPM bidang perumahan rakyat dan permukiman yang berkaitan dengan pasca bencana belum ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Penduduk Kabupaten Bekasi yang plural menyebabkan tingkat kerentanan terjadinya konflik suku, ras, agama, dan golongan menjadi lebih tinggi						Belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi	Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Belum optimalnya peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat	Sekretariat Dprd			
						Masih terjadinya kejahatan dan konflik yang mengganggu ketertiban di masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
						Perbedaan agama dan egosentris keagamaan di masyarakat seringkali menyebabkan konflik agama	Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Tidak semua masyarakat memahami tentang wawasan kebangsaan		Kesatuan Bangsa dan Politik					
Layanan pengelolaan persampahan belum optimal					Layanan pengelolaan persampahan belum optimal	Kualitas lingkungan hidup yang merupakan salah satu penunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat masih rendah	Kinerja pengelolaan persampahan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan	Layanan pengelolaan persampahan belum optimal		Lingkungan Hidup
Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan			Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan		Pencemaran terhadap air, udara, dan tanah belum dapat dikendalikan sepenuhnya		Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Lingkungan Hidup		
							Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga belum dapat dicegah atau dikendalikan sepenuhnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
							Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang	Belum optimalnya perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Selain berdasarkan hasil evaluasi atas indikator kinerja utama, indikator makro daerah, telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, saran dan masukan yang bersumber dari Forum Konsultasi Publik, serta isu strategis dan permasalahan daerah berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, perumusan isu strategis Kabupaten Bekasi untuk tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan nasional dan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan keterkaitan sebagaimana tersaji pada table berikut:

Tabel 4.5
Keterkaitan antara Arah Kebijakan Nasional
dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi Tahun 2024

No.	Arah Kebijakan Nasional 2024	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat 2024	Isu Strategis Kabupaten Bekasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi daerah
2.	Pelaksanaan Pemilu 2024	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	• Kondisi pendukung stabilitas ekonomi
3.	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara		• Peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
4.	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan	• Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
5.	Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Infrastruktur Dasar	• Infrastruktur dan konektivitas wilayah
6.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Extrem	Kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia	Kemiskinan
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		• Kualitas Sumber Daya Manusia
8.	Penguatan Daya Saing Usaha		• Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Sejalan dengan tema pembangunan pusat dan provinsi, Kabupaten Bekasi menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2024, yaitu: **Peningkatan Pelayanan Publik dan Infrastruktur, serta Pemeliharaan Kondusivitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak.** Tema pembangunan tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur yang sebelumnya sempat terkendala akibat Covid-19, juga dukungan

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan diarahkan juga untuk menyelesaikan isu strategis daerah tahun 2024 yang telah selaraskan dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan nasional dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dan Kaitannya
dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat

ISU STRATEGIS 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemiskinan			
Kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Pengangguran dan Kesempatan kerja	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Pertumbuhan ekonomi daerah			
Peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penyediaan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemerataan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Kondisi pendukung stabilitas ekonomi	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Rancangan RKP Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas diwujudkan melalui pencapaian sasaran daerah tahun 2024 dengan strategi, arah kebijakan, dan program-program sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran, dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2024

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA														
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,22	75,95	76,43	Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Indeks Pendidikan (Poin)	0,70	0,71	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	62.52 %	695.918.571.800	Dinas Pendidikan
											Persentase anak 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100%		Dinas Pendidikan
											Persentase anak 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100%		Dinas Pendidikan
											Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	64,70%		Dinas Pendidikan
									Mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dan kesetaraan					
									Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan hasil assessment nasional	2,01 poin		Dinas Pendidikan
											Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan hasil assessment nasional	2,00 poin		Dinas Pendidikan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan hasil asssestment nasional	2,01 poin		Dinas Pendidikan
											Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan hasil asssestment nasional	2,00 poin		Dinas Pendidikan
											Cakupan guru yang berkualitas	60%		Dinas Pendidikan
									Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri					
									Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	60%	300.000.000	Dinas Pendidikan
									Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Relevan	100%	1.325.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (Persen)	Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional (Persen)	1,00	1,20	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase peningkatan sarana prasarana bangunan pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan ruang sesuai standar nasional	30%	267.728.464.981	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
							7,41	7,71	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	40,61 poin	2.919.093.254	Dinas Arsip dan Perpustakaan
											Persentase peningkatan kunjungan	36%		Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Meningkatkan budaya literasi masyarakat agar mampu mengembangkan dirinya secara mandiri	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)			Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100%	10.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
							83,18	83,38	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi	100%	624.480.000	Dinas Kesehatan
									Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase usaha kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar	100%	425.000.000	Dinas Kesehatan
											Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar	100%		Dinas Kesehatan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting	14%	292.243.471.287	Dinas Kesehatan
											Kabupaten/ Kota Sehat	1 Kabupaten		Dinas Kesehatan
											Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80%		Dinas Kesehatan
											Jumlah Angka Kematian Ibu	14 Kasus		Dinas Kesehatan
											Jumlah Angka Kematian Bayi	0 Kasus		Dinas Kesehatan
									Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar	85%		Dinas Kesehatan
									Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan		Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar	60%		Dinas Kesehatan
											Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar	100%		Dinas Kesehatan
											Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Dinas Kesehatan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Dinas Kesehatan
											Persentase kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular yang berhasil tertangani	100%		Dinas Kesehatan
											Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan UPTD	81 poin		Dinas Kesehatan
									Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri	44%	2.320.000.000	Dinas Kesehatan
											Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	100%		Dinas Kesehatan
											Persentase posyandu aktif dengan predikat purnama dan mandiri	65%		Dinas Kesehatan
					Meningkatkan standar mutu rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar nasional	Capaian Standar Mutu Nasional Rumah Sakit (Persen)	74,33	87,00	Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	83,33%	41.150.793.015	Rumah Sakit Umum Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	83,33%	280.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan sesuai dengan standar layanan fasilitas kesehatan	Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan (Persen)	10,00	14,00	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan sarana prasarana bangunan kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan ruang sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	30%	31.400.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
					Meningkatkan pemenuhan penyediaan lahan untuk fasilitas umum	Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi (Persen)	35,00	40,00	Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum	Program Penatagunaan Tanah	persentase pemenuhan target tahunan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	40,50%	109.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
									Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU	Program Pengelolaan Tanah Kosong	persentase pengelolaan tanah kosong untuk TPU	25,92%	4.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
									Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persentase Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik pemerintah Daerah	29%	360.640.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
											persentase pemenuhan data masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	52%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Meningkatkan akses air minum yang bersih kepada masyarakat	Cakupan layanan air minum (Persen)	44,09	49,09	Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	0,64%	5.160.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
									Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan		persentase pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan	100,00%		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (Persen)	44,08	44,95	Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani	Program Kawasan Permukiman	persentase penanganan kawasan kumuh yang belum terselesaikan	6,36%	10.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4,30%	33.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Meningkatkan kualitas pembangunan olahraga	Indeks pembangunan olahraga berdasarkan dimensi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, ruang terbuka olahraga dan SDM Keolahragaan (Poin)	0,01	0,02	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	indeks partisipasi masyarakat berolahraga	0,02 Poin	56.400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga		indeks ruang terbuka olahraga	0,02 Poin		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan		indeks SDM Keolahragaan	0,02 Poin		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian (Persen)	2,33	2,55	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun	1,5%	10.059.753.631	Dinas Pertanian
											Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan	20%		Dinas Pertanian

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur)	0,94%		Dinas Pertanian
											Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan	4,50%		Dinas Pertanian
											Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun	2,2%		Dinas Pertanian
											Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang diawasi	15%		Dinas Pertanian
									Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun	1,5%	9.229.135.251	Dinas Pertanian
									Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani		Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong	77,50%		Dinas Pertanian
									Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan	14%	1.798.913.840	Dinas Pertanian

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan OPT tanaman pangan	3,0%	1.536.213.840	Dinas Pertanian
											Persentase penurunan luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim	1,0%		Dinas Pertanian
											Persentase penurunan serangan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan	2,8%		Dinas Pertanian
									Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya	20%	576.700.000	Dinas Pertanian
											Persentase permohonan rekomendasi praktik dokter hewan yang ditindaklanjuti	100%		Dinas Pertanian
									Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jenis metode dan informasi penyuluhan pertanian	33%	3.103.692.400	Dinas Pertanian
											Peningkatan kelompok tani yang naik kelas dalam setahun	45 kelompok tani		Dinas Pertanian
											Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat nilai evaluasi mandiri	23%		Dinas Pertanian

BAB-IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024														
PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan (Persen)	5,00	5,00	Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5%	1.400.000.000	Dinas Perikanan
											Persentase Pertumbuhan Kelompok Nelayan	5%		Dinas Perikanan
									Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	5%	4.766.323.017	Dinas Perikanan
									Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina	5%	1.200.000.000	Dinas Perikanan
											Persentase Produksi hasil olahan perikanan	5%		

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan yang beredar	Indeks Harga Konsumen (Poin)	118,96	122,96	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Tertib Ukur	25%	2.014.642.495	Dinas Perdagangan
									Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri	10%	615.475.249	Dinas Perdagangan
									Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang bersih dan tertata	25%	3.759.090.199	Dinas Perdagangan
									Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6%	2.404.704.800	Dinas Perdagangan
											Cakupan Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	130%		Dinas Perdagangan
					Ketersediaan Pangan Pokok (Persen)		97,96	97,97	Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah	99,86 % per tahun	5.434.341.905	Dinas Ketahanan Pangan
											Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,9		Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	86,80	86,90	Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	71%	1.366.927.200	Dinas Ketahanan Pangan
									Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Ketersediaan Pangan yang Berfungsi Baik	48%	1.492.313.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Memastikan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pangan	Cakupan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan (Persen)	40,00	50,00	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan keamanan PSAT	4 tahap per tahun	1.283.750.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Menekan angka kelahiran untuk mengurangi beban penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Anak)	2,40	2,30	Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	100%	367.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100%	544.760.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan Pelayanan KB	118 Faskes	8.323.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatkan kemandirian desa	Tingkat Desa Mandiri (Persen)	8,33	8,33	Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa	90%	3.125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Tingkat Kepatuhan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Terhadap Peraturan Perundang undangan	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa		Cakupan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi pemerintahan, keuangan dan aset.	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Membantu desa dalam melakukan penataan desa	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa	90%	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Mendorong pembentukan kawasan perdesaan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penyusunan kawasan perdesaan	90%	5.387.950.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan	90%	2.464.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan ekonomi	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Persentase kelembagaan desa yang memenuhi standar kompetensi	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Mendorong peningkatan pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (Persen)	88,96	89,04	Mendorong pencapaian target indikator PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase Indikator PUG dalam pemberdayaan perempuan	87,90%	896.368.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Presentase peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan	88%	178.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga	100%	2.374.367.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Kualitas data gender dan anak	100%	389.473.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Mendorong perwujudan kabupaten layak anak	Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) (poin)	602,00	612,00	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	presentase peningkatan kualitas Pemenuhan Hak Anak	100%	583.008.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak	100%	390.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Tingkat Cakupan PPKS yang ditangani (Persen)	21,16	23,28	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan peningkatan Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	2.127.400.000	Dinas Sosial
									presentase keluarga pahlawan dan janda PKRI yang diberikan santunan	100%	Dinas Sosial			
									Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang diberikan bantuan serta pelayanan sosial untuk peningkatan fungsi serta kesejahteraan sosial	0%	-	Dinas Sosial
									Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20%	4.050.000.000	Dinas Sosial

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang telah didata	74.90%	1.361.660.000	Dinas Sosial
									Cakupan KPM yang Mendapatkan Bantuan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat		9.90%	Dinas Sosial		
									Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi		100%	Dinas Sosial		
									Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin					
									Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat	100%	30.000.000	Dinas Sosial
					Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban dampak Bencana yang ditangani	100%	2.914.000.000	Dinas Sosial				
					Mendorong pemuda untuk aktif dalam aktivitas positif dan berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berdasarkan dimensi pemuda yang aktif, pemuda berprestasi dan wirausaha muda (Poin)	30,25	30,50	Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi	35%	4.950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Persentase Pemuda yang berwusaha	35%		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Mendorong peningkatan pemuda berprestasi		Persentase Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	35%		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	15%	1.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang positif melalui pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan berdasarkan dimensi ekonomi budaya, warisan budaya dan ekspresi budaya (Poin)	31,00	35,00	Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kebudayaan	Nilai dimensi ekspresi budaya	35 Poin	2.634.918.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
										Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Nilai dimensi ekonomi budaya	35 Poin	835.320.325	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal	Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM Sejarah lokal	35%	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
									Melestarikan cagar budaya daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	indeks dimensi warisan budaya	35 Poin	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

BAB-IV		RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024												
PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk bekasi yang mengunjungi museum dalam satu tahun	35%	4.028.680.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PENINGKATAN DAYA SAING DAN KESEMPATAN KERJA														
Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,31	9,40	9,02	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, industri, serta penanaman modal untuk mendorong kemandirian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru	Pengembangan Destinasi Wisata (Destinasi)	3,00	4,00	Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan Lembaga pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	50%	850.000.000	Dinas Pariwisata
											Persentase pengembangan SDM pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata	50%		Dinas Pariwisata
									Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	50%	1.095.235.000	Dinas Pariwisata
									Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	50%	793.696.000	Dinas Pariwisata

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17 Destinasi	2.527.361.000	Dinas Pariwisata
						Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas (Persen)	22,00	27,00	Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	100%	977.434.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
											persentase Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang terfasilitasi	100%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase kepatuhan koperasi	58%	1.615.885.720	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
										Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	358.682.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan Peningkatan kompetensi SDM Koperasi	3,90%	1.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	7,56%	1.770.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas (Persen)	6,00	9,00	Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kelembagaan Usaha Mikro	15%	5.425.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
										Program Pengembangan UMKM	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	0,93%	1.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Nilai Realisasi penanaman modal (Rp triliun)	44,12	45,00	Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1 Dokumen	283.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	2 Dokumen	441.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Laporan	315.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengembangan sentra industri (Sentra)	1,00	1,00	Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	2.630.000.000	Dinas Perindustrian
										Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Laporan Data Industri	2 Laporan	1.550.000.000	Dinas Perindustrian
									Meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Laporan Pengawasan IUI Perusahaan Industri	120 Dokumen	850.000.000	Dinas Perindustrian
						Pertumbuhan Nilai Ekspor (Persen)	2,00	4,00	Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Produk Unggulan berorientasi ekspor	2,68%	700.000.000	Dinas Perdagangan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Distribusi	20%	568.000.000	Dinas Perdagangan
											Persentase Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	20%		Dinas Perdagangan
											Persentase peningkatan PA-B2 yang diawasi	50%		Dinas Perdagangan
									Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor		Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang Mendapatkan Pelayanan	100%		Dinas Perdagangan
					Mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi para pencari kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	66,00	66,10	Membantu penempatan pencari kerja terdaftar	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	40 Persen	4.179.500.000	Dinas Ketenagakerjaan
									Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat		Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	5 Persen		Dinas Ketenagakerjaan
											Persentase lowongan kerja yang terinformasikan	55 Lowongan		Dinas Ketenagakerjaan
									Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	5.796.445.549	Dinas Ketenagakerjaan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	100 Persen	13.465.690.000	Dinas Ketenagakerjaan
											Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi	20 Persen		Dinas Ketenagakerjaan
									Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi	100 Persen	922.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	71,95	73,99	Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan (Poin)	84,17	86,67	Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.167.055.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Propinsi dan Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah	73%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	4.835.278.748

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	73%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	73%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	73%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah (Poin)	65,00	70,00	Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah	70%	4.341.233.623	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	1.259.654.790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	70%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai Sakip Pemda (Poin)	68,59	69,76	Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,42 poin	670.109.000	Sekretariat Daerah
										Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Perbaikan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti	100%	1.029.725.100	Sekretariat Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SAKIP sesuai dengan ketentuan	100%	244.000.000	Sekretariat Daerah
					Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Indeks Kependudukan (poin)	75,00	80,00	Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	80%	5.569.950.700	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
										Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	80%	1.360.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
										Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola	80%	8.908.067.300	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Kapabilitas APIP (poin)	2,00	3,00	Meningkatkan kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Pengelolaan SDM dan Struktur dan Tata Kelola	20%	7.911.547.000	Inspektorat
											Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional	20%		Inspektorat
											Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Budaya dan Hubungan Kerja	20%		Inspektorat

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan	20%		Inspektorat
						Indeks Maturitas SPIP (poin)	2,00	3,00	Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%	3.038.195.000	Inspektorat
											Persentase Peningkatan Kualitas SPIP Perangkat Daerah sesuai dengan Unsur SPIP	100%		Inspektorat
					Mendorong pelaksanaan sistem merit	Indeks Sistem Merit (Poin)	273,00	282,00	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit Dimensi Perencanaan Kebutuhan	35	6.953.635.787	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi Pengadaan	34		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi Sistem Informasi	21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi Pengembangan Karir	60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi Promosi dan Rotasi	27,5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Nilai Sistem Merit Dimensi Manajemen Kinerja	62,5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi Penggajian, penghargaan dan disiplin	30		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Nilai Sistem Merit Dimensi perlindungan dan pelayanan kepada pegawai	12		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi (Poin)	15,00	16,50	Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat struktural yang memiliki riwayat Diklat Pim	74%	10.045.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Persentase pejabat Fungsional yang memiliki riwayat Diklat Fungsional	76%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Persentase PNS yang memiliki riwayat diklat teknis	20%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Persentase PNS yang memiliki riwayat seminar/workshop/magang/ kursus dan sejenisnya	16%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah	Nilai Kualitas Kebijakan (Poin)	73,00	75,00	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	75 poin	64.304.817.000	Sekretariat Daerah
											Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	75 poin		Sekretariat Daerah
									Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan		Persentase kerjasama yang menyelesaikan permasalahan pembangunan yang signifikan	100%		Sekretariat Daerah
						Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi			Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	75 poin	1.160.000.000	Sekretariat Daerah
					Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi	Cakupan Nilai Reformasi Birokrasi Dimensi Deregulasi Kebijakan, Pelaksanaan Tata Laksana, Manajemen Perubahan, Pelayanan Publik dan Penguatan Organisasi (Persen)	62,57	67,53	Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Deregulasi Kebijakan	58 poin	886.655.809	Sekretariat Daerah
									Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	Level 8	3.002.835.316	Sekretariat Daerah
									Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah	100%	2.405.350.000	Sekretariat Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai penguatan organisasi	2,75 poin	935.200.000	Sekretariat Daerah
										Nilai pelayanan publik	2,50 poin	Sekretariat Daerah		
										Nilai penataan ketatalaksanaan	2,62 poin	Sekretariat Daerah		
										Nilai Manajemen Perubahan	2,54 poin	Sekretariat Daerah		
					Mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Inovasi (Poin)	30,00	33,00	Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan rekomendasi kebijakan daerah dan inovasi daerah yang dilaksanakan	55%	5.799.022.691	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
									Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	2,60	2,90	Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Mendapat Layanan Aksesibilitas TIK	100%	21.788.783.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
					Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) (Poin)	65,00	70,00	Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	100%	9.167.555.205	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
									Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral	Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	Tersedianya Hasil Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral	2 Laporan	1.477.529.600	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Poin)	175	185,00	Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilayani Persandian dan Keamanan Informasi	80%	1.392.646.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statisti
					Meningkatkan kinerja layanan penanaman modal	Nilai Kinerja Pelayanan Publik (Poin)	80,32	81,92	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	1.600 Pelaku usaha	1.680.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
									Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	580.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Meningkatkan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan (Poin)	75,50	76,00	Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	20%	1.534.486.400	Dinas Arsip dan Perpustakaan
											Persentase arsip dinamis di PD yang telah dibuatkan daftar arsip	10%		Dinas Arsip dan Perpustakaan
					Mengoptimalkan peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	86,00	87,00	Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	190.277.056	Kecamatan Cibitung
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	224.866.254	Kecamatan Cabangbungin

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	206.098.680	Kecamatan Bojongmangu
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	202.112.680	Kecamatan Babelan
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	159.532.000	Kecamatan Kedungwaringin
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti	100%	120.000.000	Kecamatan Setu
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	194.714.120	Kecamatan Pebayuran
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	278.595.564	Kecamatan Tarumajaya
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	275.000.000	Kecamatan Karangbahagia

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	176.200.000	Kecamatan Muaragembong
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	227.619.934	Kecamatan Tambun Utara
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	218.171.959	Kecamatan Cibarusah
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	268.667.680	Kecamatan Cikarang Selatan
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	436.039.000	Kecamatan Tambelang
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	193.366.561	Kecamatan Cikarang Utara
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	180.275.748	Kecamatan Cikarang Pusat

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	194.000.000	Kecamatan Cikarang Barat
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	291.341.520	Kecamatan Serang Baru
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	195.764.680	Kecamatan Sukatani
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	425.069.000	Kecamatan Tambun Selatan
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	158.200.000	Kecamatan Cikarang Timur
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	168.722.360	Kecamatan Sukakarya
										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti	100%	167.206.000	Kecamatan Sukawangi

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	230.000.000	Kecamatan Cibitung
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	215.926.625	Kecamatan Cabangbungin
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	268.090.480	Kecamatan Bojongmangu
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	491.405.631	Kecamatan Babelan
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	159.200.000	Kecamatan Kedungwaringin
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	240.800.000	Kecamatan Setu
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	692.738.770	Kecamatan Pebayuran

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	278.086.448	Kecamatan Tarumajaya
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	138.611.163	Kecamatan Karangbahagia
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	403.568.000	Kecamatan Muaragembong
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	320.040.000	Kecamatan Tambun Utara
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	210.400.000	Kecamatan Cibusah
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	364.037.845	Kecamatan Cikarang Selatan
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	246.567.000	Kecamatan Tambelang

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	350.013.289	Kecamatan Cikarang Utara
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	187.631.561	Kecamatan Cikarang Pusat
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	285.000.000	Kecamatan Cikarang Barat
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	291.791.040	Kecamatan Serang Baru
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	185.897.500	Kecamatan Sukatani
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	195.000.000	Kecamatan Tambun Selatan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	235.000.000	Kecamatan Cikarang Timur
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	222.178.571	Kecamatan Sukakarya
										Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	456.975.000	Kecamatan Sukawangi
									Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	1.040.432.875	Kecamatan Cibitung
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	490.908.991	Kecamatan Cabangbungin
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	547.289.200	Kecamatan Bojongmangu
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	1.376.998.840	Kecamatan Babelan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	667.120.000	Kecamatan Kedungwaringin
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan / Kelurahan	100%	725.000.000	Kecamatan Setu
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan / Kelurahan	100%	1.364.174.740	Kecamatan Pebayuran
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	579.461.766	Kecamatan Tarumajaya
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	741.200.000	Kecamatan Karangbahagia
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	608.444.000	Kecamatan Muaragembong

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	770.000.000	Kecamatan Tambun Utara
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	597.097.406	Kecamatan Cibarusah
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	684.848.000	Kecamatan Cikarang Selatan
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	600.515.000	Kecamatan Tambelang
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	909.407.226	Kecamatan Cikarang Utara
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	563.157.761	Kecamatan Cikarang Pusat

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	1.112.430.000	Kecamatan Cikarang Barat
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	803.540.240	Kecamatan Serang Baru
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	857.080.448	Kecamatan Sukatani
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	1.209.746.000	Kecamatan Tambun Selatan
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	831.010.797	Kecamatan Cikarang Timur
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	707.202.658	Kecamatan Sukakarya
										Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	664.676.285	Kecamatan Sukawangi

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	5.316.000.000	Kecamatan Cibitung
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	190.737.259	Kecamatan Cabangbungin
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	306.388.840	Kecamatan Bojongmangu
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	11.125.108.784	Kecamatan Babelan
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	254.200.000	Kecamatan Kedungwaringin
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	295.000.000	Kecamatan Setu
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	661.700.200	Kecamatan Pebayuran

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	445.057.925	Kecamatan Tarumajaya
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	169.200.000	Kecamatan Karangbahagia
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	358.800.000	Kecamatan Muaragembong
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	435.159.448	Kecamatan Tambun Utara
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	521.459.563	Kecamatan Cibusah
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	433.868.480	Kecamatan Cikarang Selatan
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	224.004.000	Kecamatan Tambelang

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	536.804.485	Kecamatan Cikarang Utara
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	513.176.080	Kecamatan Cikarang Pusat
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	1.744.750.000	Kecamatan Cikarang Barat
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	416.302.080	Kecamatan Serang Baru
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	388.753.430	Kecamatan Sukatani
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	2.759.724.000	Kecamatan Tambun Selatan
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	1.478.231.362	Kecamatan Cikarang Timur

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	404.619.601	Kecamatan Sukakarya
										Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	332.719.715	Kecamatan Sukawangi
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2%	650.000.000	Kecamatan Cibitung
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2,41%	485.481.167	Kecamatan Cabangbungin
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	22,58%	560.395.000	Kecamatan Bojongmangu
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2,95%	747.778.160	Kecamatan Babelan
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2,80%	440.000.000	Kecamatan Kedungwaringin

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,50%	629.043.000	Kecamatan Setu
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	3,08%	766.627.000	Kecamatan Pebayuran
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	0,8%	170.000.000	Kecamatan Tarumajaya
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2%	450.000.000	Kecamatan Karangbahagia
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2%	874.390.000	Kecamatan Muaragembong
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	4,5%	623.573.618	Kecamatan Tambun Utara
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	12%	532.000.000	Kecamatan Cibarusah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,4%	519.927.827	Kecamatan Cikarang Selatan
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	4%	432.761.000	Kecamatan Tambelang
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	4,08%	763.577.209	Kecamatan Cikarang Utara
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	9,06%	534.759.734	Kecamatan Cikarang Pusat
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,37%	868.700.000	Kecamatan Cikarang Barat
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,29%	620.584.000	Kecamatan Serang Baru
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,87%	835.337.250	Kecamatan Sukatani

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	1,5%	773.410.000	Kecamatan Tambun Selatan
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2%	679.800.000	Kecamatan Cikarang Timur
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	3%	633.950.555	Kecamatan Sukakarya
										Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum	2%	642.000.000	Kecamatan Sukawangi
					Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah (Poin)	30,28	30,28	Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dimensi pengalokasian belanja dalam APBD	15 poin	996.772.502.379	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
											Dimensi penyerapan anggaran	14,28 poin		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
									Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik	100%	2.414.314.533	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk membiayai program pembangunan daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	7,50	8,00	Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pengembangan PAD yang disediakan	100%	5.845.914.400	Badan Pendapatan Daerah
											Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%		Badan Pendapatan Daerah
											Peningkatan pengendalian dan evaluasi Wajib Pajak Daerah	100%		Badan Pendapatan Daerah
					Meningkatkan jumlah bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi	Tingkat bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang laik fungsi (Persen)	5,00	6,00	Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase SLF yang diterbitkan	32%	4.900.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
											Persentase rekomendasi teknis PBG yang diterbitkan	42%		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
									Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan perusahaan jasa konstruksi yang dibina	15%	1.115.730.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
					Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan standar sarana prasarana kerja pemerintah daerah (Persen)	82,40	82,90	Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase peningkatan bangunan negara lainnya dalam kondisi baik	44,8%	85.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH														
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	N/A	55,24	63,36	Meningkatkan konektivitas jalan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan	Tingkat Konektivitas Antar Jalan Kabupaten (Persen)	81,38	87,71	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	87,71%	556.991.710.515	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
						Persentase jembatan dalam kondisi layak	43,77%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi						
						Persentase pengawasan jalan dan jembatan	100,00%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi						
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa	Tingkat Konektivitas antar Permukiman dan Perumahan (Persen)	30,33	42,37	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan desa yang terbangun	76,49%	34.035.561.679	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase pembangunan infrastruktur permukiman	0%		-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan			
						Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan			Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase desa yang terbangun	16,23%	15.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Mendorong pengalihan aset prasarana dan sarana utilitas umum perumahan ke pemerintah daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase PSU yang diserahterimakan	15,50%	54.800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
									Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan		persentase pemenuhan jalan perumahan	16,50%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
									Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan		persentase pemenuhan drainase di perumahan	14,85%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
									Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya		persentase PJUL yang dibangun	38,61%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
											Persentase taman yang dibangun	28,00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
						Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi (Persen)	35,00	40,00	Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan	Program Penyelenggara n Jalan	Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi	58,3%	93.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas	Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dimensi Perlengkapan Jalan, Kendaraan Laik Jalan, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Persen)	54,00	60,00	Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan bermotor wajib uji Yang Laik Jalan	91%	52.157.200.000	Dinas Perhubungan
									Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan		Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	50%		Dinas Perhubungan
									Menurunkan derajat kejenuhan jalan		Tingkat v/c ratio di wilayah Kabupaten Bekasi	40%		Dinas Perhubungan
PENINGKATAN KONDUSIVITAS WILAYAH DALAM RANGKA STABILISASI EKONOMI														
Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,1	120,56	113,46	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Poin)	0,45	0,46	Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Nilai Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sesuai kewenangannya	0,20	6.787.202.491	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sesuai kewenangannya	0,43		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sesuai kewenangannya	0,30		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											Nilai Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sesuai kewenangannya	0,34		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB-IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024														
PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sesuai kewenangannya	0,30		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatkan response time petugas pada kejadian bencana	Pencapaian ketepatan waktu tanggap (<i>respon time</i>) petugas pada setiap kejadian (Persen)	81,00	82,00	Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Waktu tanggap penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	82%	10.537.064.630	Dinas Pemadam Kebakaran
											Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penyelamatan	82%		Dinas Pemadam Kebakaran
											Meningkatnya jumlah bangunan yang terproteksi terhadap bahaya kebakaran	82%		Dinas Pemadam Kebakaran
					Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanganan bencana banjir dan kekeringan	Tingkat Efektifitas Mitigasi Pengendalian Banjir dan kekeringan (Persen)	18,12	19,51	Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan banjir	19,51%	128.890.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
											persentase penanganan kekeringan	20,59%		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	27,73%	14.959.500.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					Meningkatkan capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Persen)	100	100	Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah korban bencana yang ditangani	100%	32.750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
											persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang ditangani	100%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
											persentase penerbitan dokumen pertelaan rumah susun	100%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Indeks Demokrasi (Poin)	N/A	70,28	71,88	Mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat	Indeks Demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik (Poin)	70,28	71,88	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	91,67%	104.567.805.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH				
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
					Mengoptimalkan peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi (Persen)	100	100	Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	100%	26.290.754.000	Sekretariat DPRD				
						Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan (Persen)	100	100			Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100%		Sekretariat DPRD				
						Tingkat Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif (Persen)	100	100			Presentase capaian fasilitasi layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%		Sekretariat DPRD				
					Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	79,84	82,09	Meningkatkan ketertiban di masyarakat	Indeks Ketertiban Masyarakat (poin)	31,36	33,16	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda	30%	15.432.622.985	Satuan Polisi Pamong Praja
													Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	22,50%		Satuan Polisi Pamong Praja
													Persentase rasio Linmas per RT		7,90%	Satuan Polisi Pamong Praja		
Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP	22,50%	Satuan Polisi Pamong Praja																

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Meningkatkan kerukunan antarumat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	23,70	24,00	Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91,20%	675.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	92,38%	720.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Meningkatkan kerjasama antarinstitusi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	68,96%	1.958.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat	Indeks Wawasan Kebangsaan (Poin)	24,78	24,93	Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Bangsa	62%	2.696.644.162	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43,71	43,72	43,73	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	21,00	21,25	Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah terhadap cakupan layanan pengelolaan persampahan	54%	83.862.839.803	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis		Persentase pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis	30%		Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatkan kinerja pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Udara (IKU) (Poin)	69,00	69,01	Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	1.706.200.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Air (IKA) (Poin)	28,80	28,81	Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	10 - 14	6.126.160.000	Dinas Lingkungan Hidup
											Indeks Equivalen Udara (IE _u)	0.98 - 0.97		Dinas Lingkungan Hidup
											Persentase Ketersediaan Inventarisasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	15%		Dinas Lingkungan Hidup
											Parameter Terakreditasi	62,50%		Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Poin)	22,60	22,60	Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Taman Keanekaragaman Hayati	20%	297.450.000	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	100%	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
									Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dalam izin lingkungan dan izin PPLH	100%	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
									Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah penerima penghargaan lingkungan hidup	42,86%	251.858.000	Dinas Lingkungan Hidup
										Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang tertangani	100%	290.073.475
					Mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga	Cakupan akses sanitasi aman komponen pelayanan (Persen)	5,00	7,00	Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan air limbah domestik	7%	9.789.298.471	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
						Tingkat Akses Sanitasi Layak dan Aman (Persen)	85,38	85,56	Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan jumlah penduduk bebas BABS	86,48%	16.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
						Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib ruang	Indeks perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang (Poin)	0,60	0,68	Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Perencanaan Ruang	0,38	6.796.768.045

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	REALISASI 2022	TARGET		STRATEGI	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024		PERANGKAT DAERAH
			2023	2024			2023	2024				(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah		Indeks Pemanfaatan Ruang	0,74		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
											Indeks Kepatuhan Ruang	0,915		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH												4.332.657.937.069		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Selain itu, juga ditetapkan beberapa beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam prioritas daerah tahun 2024, antara lain:

1. Penggunaan Teknologi Pengelolaan Persampahan
2. Pembangunan TPST dan TPS3R
3. Penataan Jalan Kabupaten, Jalan Kalimalang, CBL, dan Jalan Penghubung Antarkecamatan
4. Peningkatan Akses Sarana Air Minum Perpipaan
5. Pembangunan Drainase, Sumur Resapan dan Kolam Retensi
6. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, khususnya Penanggulangan Stunting
7. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pendidikan
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah
9. Pelatihan Calon Tenaga Kerja dan Kewirausahaan
10. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pembenihan dan Budidaya Ikan
11. Pembangunan Sarana Olahraga Terpadu di Kecamatan
12. Penataan Destinasi Wisata Daerah

Selain itu, untuk mendukung prioritas Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan beberapa program pembangunan yang bersinergi dengan prioritas nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.8 dan 4.9. Sebagai tambahan, dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), juga telah dialokasi anggaran di beberapa subkegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.10. Adapun ketiga tabel dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	19,2	1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)			-	-	-
				Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)		17,4	2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter)			-	-
				3	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi		Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)			-	-	-	
							penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)						
				4	Peningkatan pemenuhan energi domestik		Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)			-	-	-	
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)													
5	Pengembangan industri pendukung EBT	TKDN sektor pembangkit EBT (Persen)			-	-	-						

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		2	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan	Produktivitas air (water productivity) (kg/m3)g	3	1	Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (Juta ha)			-	-	-
						2	Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)			-	-	-
						3	Penyediaan air untuk pertanian	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)			-	-	-
								Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.847.721.411
						4	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-
5	Pemelihara an, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistem Nya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan (Hektar)		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	-	-							

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						6	Pengembangan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)(m3)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000
		3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,00–108,00	1	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ta hun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	200.000.000
				Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2100			Konsumsi daging (kg/kapita/ta hun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000
				Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57			Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita /tahun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000
				Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	5			Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita /hari)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	1.889.626.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	4		Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	250.000.000
							Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	1.283.750.000
							Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	2.015.000.000
							Persentase pangsa pangan organik** (Persentase)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	2.015.000.000
					2	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)			-	-	-
							Ketersediaan Beras (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
							Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Produksi jagung (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
								Produksi daging (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	480.299.749
								Produksi umbi-umbian (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
						3	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	3.103.692.400
								Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	3.103.692.400
								Nilai tukar petani					
						4	Peningkatan berkelanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	890.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	170.000.000
							Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Akses)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	936.000.000
						5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index		-	-	-
						1	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)		-	-	-
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1a) (juta ha)	30		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1a) (%)	Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)				

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Produksi perikanan (juta ton)	32,75			Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)					
				Produksi garam (juta ton)	2	2	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan			-	-	-	
				Nilai Tukar Nelayan	107–110	3	Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Produksi ikan (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	710.000.000
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	1.175.000.000	
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	3.591.323.017	
										Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Produksi rumput laut (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	3.591.323.017
							Produksi garam (Juta ton)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	1.175.000.000
						4	Peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			-	-	-
						5	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan			-	-	-
		5	Penguatan kewirausahaan, Usah Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (%) (8.10.1)	22	1	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar			-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pertumbuhan wirausaha (%)	2,9	2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (Persen)			-	-	-
				Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,5			Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (Persen)			-	-	-
						3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	jumlah koperasi moderen yang dikembangkan (unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000
						4	Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000
							Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)		Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000
							Penumbuhan startup (unit)			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000
						5	Peningkatan nilai tambah usaha sosial			-	-	-
						1	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non argo yang terintegrasi hulu-hilir			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor rill, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	5,80–6,20		Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2.630.000.000
				Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,90–18,20		Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9 .2.1*) (Persen)					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.347,00		Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000
				Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	22,5		Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)			Pengawasan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
				Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)a) (%)	15,7		Peningkatan produksi kakao (Persen)			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
				Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)a) (juta orang)	22,08		Peningkatan produksi kopi (Persen)			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
				Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	22,74		Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
				Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	1.450–1.650		Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
				Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	662,7–731,1		Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	3,60– 3,80			Peningkatan produksi sayuran (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
								Peningkatan produksi florikultura (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	3.740.712.362
						2	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000
						3	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000
								Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000
								Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000
							Destinasi wisata bahari (Destinasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000
						4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	793.696.000
							Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (Kab/kota	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000
							Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan(Kab/ kota)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikem bangkan (Lokasi)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000
								Revitalisasi ruang kreatif (Unit)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000
								Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	793.696.000
						5	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagaker jaan	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha jumlah prosedur dan waktu (Ranking EoDB)			-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp triliun)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	315.000.000
							Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)					
							Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
							Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	283.500.000
							Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	1.680.000.000
						6 Pengembangan industri halal	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	2.630.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	47,2–49,5	1	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000
				Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	9,8			Ekspor hasil pertanian (US\$ juta)					
				Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1a) (juta kunjungan)	9,5–14,3			Ekspor hasil perikanan (USD miliar)					
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)h	1.250–1500			Kontribusi ekspor industri pengolahan (Persen)					
				Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	11,5			Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (Persen)					
								Pertumbuhan ekspor non migas (Persen)					
								Rasio ekspor jasa terhadap PDB (Persen)					
								Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000
							Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen)					
							Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)					
					3	Pengelolaan Impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249
							Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)					
							Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)					
								Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-
								Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.102.361.000
								Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						4	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	615.475.249
						5	Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	993.446.663.476
						6	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (Juta orang)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-
									Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.102.361.000
									Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1.400.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	700.000.000
						7	Peningkatan efektifitas <i>Prefential Trade Agreement</i> (PTA) / <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (Negara)			-	-
								Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Negara)			-	-
								Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)			-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA									
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR		PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
							Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi) PTA/FTA/CE PA yang disepakati	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		700.000.000				
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Tingkat inflasi pangan bergejolak (%)	3,0-5,0	1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Rasio M2/PDB (Persen)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-		1.160.000.000			
				Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,57– 4,58			Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	
				Rasio Uang Beredar M2/PDB (%)	50,5–51,2			Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Skor logistic performance index (skor)	3,5	2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan <i>Industry 4.0</i>	Kontribusi ekonomi digital (Persen)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	650.000.000
				Peringkat travel and tourism development index (peringkat)j)	NA			Nilai transaksi <i>e-commerce</i> (Rp triliun)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-
				Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	100			Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-
				Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	menurun	3	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Skor <i>Logistic Performance Index</i>			-	-	-
				Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat (%)	34,94			Tingkat inflasi (Persen)			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	920.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database)	11	4	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjut an di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000
								Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)					
						5	Reformasi Fiskal	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen)			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	795.000.000
								Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administra tion system</i>) (Persen)			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.310.023.500
								Imbal hasil (yield) surat berharga negara (Persen)			-	-	-
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000						

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						6 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman , Pariwisata, ekonomi Kreatif, dan ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base) Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base) Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)			-	-	-
	JUMLAH PN 1											1.389.526.305.842
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)	5,2–5,5	1 Pengembangan Kawasan Strategis		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	5.000.000.000 4.500.000.000 500.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min–maks)	73,65–82,57	2	Pengembangan Sektor Unggulan		Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	300.000.000
				Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	7,00–7,50	3	Pengembangan Kawasan Perkotaan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	33.000.000.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		6.000.000.000
											Pengelolaan Leger Jalan		250.000.000
											Survey Kondisi Jalan/Jembatan		1.100.000.000
											Pembangunan Jalan		143.899.448.450
											Pelebaran Jalan Menuju Standar		6.196.417.500

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Rekonstruksi Jalan	158.790.249.060	
											Pemeliharaan Berkala Jalan	20.000.000.000	
											Pemeliharaan Rutin Jalan	20.000.000.000	
											Pembangunan Jembatan	185.000.000.000	
											Rehabilitasi Jembatan	4.000.000.000	
											Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11.755.595.505	
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	200.000.000	
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000	
											Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	37.040.000.000	
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500.000.000	
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.500.000.000	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000
											Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	501.600.000	
											Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	396.000.000
											Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000
												Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	997.600.000
												Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.750.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000
											Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000
										Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000
											Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	500.000.000
											Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	7.397.000.000
											Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000
										Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	75.000.000
										Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	50.000.000
										Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
						4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	522.000.000
											Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000
											Penyuluhan Transmigrasi		150.000.000
											Pelatihan Transmigrasi		100.000.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		93.300.000.000
											Pembangunan Jalan Strategis Desa		34.035.561.679

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						5	Kelembagaan dan Keuangan Daerah		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	166.500.000
												Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	490.000.000
												Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650.000.000
												Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.310.023.500
												Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.669.900
												Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	795.000.000
												Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	297.550.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
												Penetapan Pajak Daerah	Wajib	286.000.000
												Pelayanan dan Konsultasi Daerah	Pajak	259.105.000
												Penagihan Daerah	Pajak	728.945.000
												Penyelesaian Keberatan Daerah	Pajak	78.900.000
												Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Daerah	Pajak	223.221.000
												Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		144.000.000
												Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		150.000.000
									Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	127.300.000	
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.000.000	
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	217.000.000	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	150.000.000
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	250.000.000
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	250.000.000
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	140.360.000
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.600.000
												Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran	720.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000
											Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.000.000
												Penatausahaan Pembiayaan Daerah	400.000.000
												Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000
												Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.150.000
												Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.428.903
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100.000.000
											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55.000.000
											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	60.000.000
											Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	637.108.776.398
												Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000
												Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	256.337.887.078
	JUMLAH PN 2											1.783.324.888.973	
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	1	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan				-	-	-
				Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	100	2	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan				-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	3	Pendampingan dan Layanan Terpadu				-	-
				Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun (%)	100							
				Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	50							
						4	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-
												250.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial				Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	481.506.000
				Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	98	1	Sistem jaminan sosial nasional			-	-	-
				Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	11	2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1.361.660.000
				Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	<10,00			Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1.361.660.000
				Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%)	20			Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1.361.660.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal (%); Pekerja informal (%)	74,57; 25,94		Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000
				Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja)	20	3	Perlindungan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000
						4	Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.361.660.000
							Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	3.694.329.000
				Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)								

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	920.000.000
		3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Persentase persalinan di fasyankes (%)	95	1	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000
				Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) (%)	63,41					-	-	-	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,4	2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	18			Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	428.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	90		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000
				Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000
				Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000.000
				Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota)	95		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	420		Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000
				Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)	514		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000
				Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100		Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000
				Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	100		Jumlah desa endemis <i>schistosomia</i> sis yang mencapai eliminasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000
				Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	83		Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	90		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	480.000.000
				Persentase obat memenuhi syarat (%)	97	4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	480.000.000
				Persentase makanan memenuhi syarat (%)	88	5	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	49.480.000
										Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	49.480.000
							Persentase RSUD kabupaten/ kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.455.000.000
							Persentase rumah sakit terakreditasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000
							Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	279.386.107.487
							Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
							Persentase obat memenuhi syarat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	120.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase makanan memenuhi syarat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	140.000.000
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA /Sederajat; Pendidikan tinggi	0,83; 0,43	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580
				Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca; Matematika; Sains					34,10; 30,90; 44	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%): Literasi; Numerasi	61,20; 43,54			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2.826.262.000
				Tingkat penyelesaian pendidikan (%): SD/MI/Sederajat; SMP/MTs/Sederajat; SMA/SMK/MA/Sederajat	98,94; 93,33; 71,71			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580
				Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	64,38			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	299.830.777.401
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	32,28			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2.826.262.000
						2	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi			-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi			-	-	-
						3	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			-	-	-
						4	Penjaminan Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	299.830.777.401
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2.826.262.000
								Perguruan Tinggi Terakreditasi A		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.765.000.000
						5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.765.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	8,74	1	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	295.069.200
				Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	menurun	2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	270.000.000
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,16-81,21			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	169.450.000	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	456.918.500	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	menurun	3	Kualitas Pemuda		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	4.100.000.000	
				Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	82,58					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	850.000.000
				Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,72									
				Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	0,55									

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (%)	6,87								
		6	Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	50	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000
				Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	300.120	2	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	5.425.000.000
								Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya					
				Pengembangan kewirausahaan sosial									

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA										
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
						3	Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agrari			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-					
							Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh pemberdayaan											
						4	Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)								-	-	-
		7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	2,8	1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	2.507.933.800					
				Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	40,95			PT Vokasi berakreditasi A										
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	61,71	Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)																

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	243			Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)					
				Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	600			Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)					
				Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	210			Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)					
				Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	3.000			Jumlah pemagangan luar negeri (orang)					
				Jumlah paten granted (domestik) (paten)	1.000	2	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan			-	-	-
				Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	20			Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	138		Jumlah sitasi di jurnal internasional					
				Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)	10		Jumlah KI yang didaftarkan					
				Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan: Berbasis perguruan tinggi (unit); Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	8; 5	3	Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi			-	-	-
				Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	40		Jumlah paten yang diberikan (resident)					
				Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi); Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	24; 35	4	Prestasi Olahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.100.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	3			Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	11.300.000.000
				Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	3			Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>					
								Peringkat pada Asian Games Peringkat pada Asian Para Games					
	JUMLAH PN 3												3.237.030.542.930
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	79,38	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	658.482.063.580
				Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	73,95			1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	299.830.777.401
				Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	78,08			1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	66,39			2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	4.100.000.000
				Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	73,65	2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	-	1.179.200.000
				Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	75,01			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	3.572.113.787	
				Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	79,42			Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	1.156.522.000	
				Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	79,07	3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	270.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (nilai)	75,43				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	821.690.600
				Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	72,72	4	Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000
				Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	10	5	Pembangu nan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	2.696.644.162

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Indeks Karakter Remaja (nilai)	69,92	6	Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	2.696.644.162
		2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	57,6	1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000
				Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	39,01	2	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000
				Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	50	3	Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						4	Pengembangan Diploması Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1.679.918.000
						5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	955.000.000
		3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	73,39	1	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000
						2	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000
				Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	77,33								

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	76,96	3	Penyelarasan relasi agama dan budaya		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000
						4	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000
						5	Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan		Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000
		4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	15	1	Peningkatan budaya literasi		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	532.319.650
						2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
						3	Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	1.438.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						4Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
JUMLAH PN 4												987.834.693.342
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,26	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4.500.000.000
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94,18					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	83,55			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	75,99		Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	92,76		Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum amanf) (%)	15		Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	25,53		Jumlah kabupaten/kota yang mengimplem entasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	4.900.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	67,23		Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	10.000.000.000
				Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	100			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	86 layak termasuk 12 aman	2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471
				Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	3			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaane) (%)	80 penanganan dan 20 pengurangan			skala permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000
				Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	22			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000
				Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	97			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000
				Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	66,34			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	54.800.000.000
				Persentase luas sawah beririgasi (%)	69,1			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	11.956		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000
							Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471
						3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Tambahan penyediaan air baku dari sumber air berkelanjutan (m3/detik)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000
							Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	
							Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	128.465.000.000	
						4	Keselamatan dan Kemanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)			-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)					
							Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)					
							Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)					
						5	Ketahanan dan Kemananan Transportasi	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	39.340.000.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	601.600.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	8.272.000.000
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	75.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	75.000.000
										Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
						6	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan pangan bencana (hidrometeor ologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)			-	-
										Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)		

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA					
					KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
					7	Waduk <i>Multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	425.000.000	
							Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (kumulatif)						
							Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)						
							Presentase daerah irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif)						
							Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)						
						Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	7.647.721.411		
		2	Infrastruktur Ekonomi	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/kota (%)	95/74/64	1	Konektivitas Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	684.327.272.194

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (km)	1.513		Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)					
				Panjang jalan baru yang terbangun (km)	2.410		Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)					
				Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)	7.255		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota (65%)					
				Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	7	2	Konektivitas Kereta Api			-	-	-
				Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	35							
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	23 (17 selesai, 6 berlanjut)							
							Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)					
							Persentase kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> kategori 1 dan 2 (persen)					
							Panjang jalur KA yang beroperasi (km)					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	12 (selesai)		Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)			-	-	-
				Jumlah rute jembatan udara (rute)	44	3	Konektivitas Laut					
							Jumlah pelabuhan-pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi)					
							Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)			-	-	-
						4	Konektivitas Udara					
							Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (Rute)					
							Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)					
							Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)					
							Jumlah bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						5	Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberang an baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-
		3	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underrpass (kumulatif) (kota)	10	1	Transportasi Perkotaan	Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)			-	-	-
				Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	6			Jumlah jalur khusus BRT yang dibangun/di kembangkan (kota)					
				Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	10			Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000
						2	Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)			-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA						
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
						3	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/kota)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	26.339.298.471	
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.160.000.000		
						4	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	10.000.000.000	
						4	Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	431. 281,20	1	Keberlanju tan penyedia an energi dan ketenagalis trikan	Penurunan intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)		
		Penurunan emisi CO2 pembangkit (juta ton)	6,07	Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)										
		Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	85.216	2	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan			SAIDI menjadi (jam/ pelanggan)				-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah)	4.010. 445	3	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	Penyediaan gas (SBM)				
				Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.276. 000							
		5	Transformasi Digital	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	8,8	1	Penuntasan Infrastruktur TIK	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses <i>mobile broadband</i>	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
				Persentase pengguna internet (%)	82,3			Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)				
				Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam (%)	75,7			Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)				
												9.167.555.205

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Persentase rasio harga layanan <i>mobile boardband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)					
							Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital					
							Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik					
						2	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB			-	-
							Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	1.680.000.000
						3	Fasilitas pendukung transformasi digital	Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital			-	-
JUMLAH PN 5												1.583.152.641.165

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	55,5	1 Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	5.726.160.000
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	60,5		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan dan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000
				Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	84,5		Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahan kan secara nasional (juta ha)					
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	65,5		Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap <i>baseline</i> rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen)					
							Luas kawasan konservasi (juta ha)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	297.450.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)					
								Akurasi informasi meteorologi (persen)					
								Akurasi informasi klimatologi (persen)					
						2	Penanggula ngan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803
								Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i> (persen)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803
								Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)					
								Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen)					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						3	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)			Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota	-	-
							Jumlah lahan terkontamina si limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)						
							Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)						
							Jumlah spesies TSL punah yang ditingkatkan populasinya (jenis) terancam						
						4	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	290.073.475
							Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)					
							Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)					
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	0,1	1	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)		-	-	-
				Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	1,15			Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilitas Ekonomi	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	4.603.202.491

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3	2	Peningkatan Ketahanan Iklim			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
								Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	1.536.213.840
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
		3	Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%) kumulatif, tahunan	10,15; 11,8	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)		-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA								
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
				Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)_kumulatif, tahunan	37,79; 57,2			Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)								
				Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)_kumulatif, tahunan	6,99; 9,4			Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)								
				Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)_kumulatif, tahunan	5,24; 2,87	2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	-	-	
				Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)_kumulatif, tahunan	6,90; 7,30			Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)								
								Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B (persen)								
									3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	-	82.262.839.803

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)					
							Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)					
							Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)					
						4	Pengembangan Industri Hijau Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000
						5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)			-	-	-
JUMLAH PN 6												262.747.819.215

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	83,71	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	104.567.805.000
				IDI Aspek Kebebasan (nilai)	72,53	2	Penguaitan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	104.567.805.000
				IDI Aspek Kesetaraan (nilai)	81,94			Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan dengan Intervensi Kebijakan) Proyeksi					
				Jumlah Regulasi/Kebijak an Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	11			Indeks Kerawanan Pemilu					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI			-	-	-
								Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	103.400.000
								Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/ Kota			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	103.400.000
						3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	9.167.555.205
							Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas						

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional					
							Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim					
							Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI					
							Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular					
							Indeks citra Indonesia di dunia internasional					
							Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral					
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	16	1	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri			-	-	-
				Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	4							
				Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	92	2	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional			-	-	-
						3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional			-	-	-
						4	Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global			-	-	-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN			KABUPATEN/KOTA				
						KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	4,14	1	Penataan Regulasi	Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA			-	-	-
						2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>enforcing contracts</i>			-	-	-
								EoDB Indonesia untuk aspek <i>resolving insolvency</i>					
								Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>getting credits</i>					
								Persentase Pelaku Residivis					
						3	Penguatan Sistem Anti Korupsi	IPAK			-	-	-
		4	Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap keadilan			-	-	-				
		4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Indeks Pelayanan Publik (nilai) (Kementerian/L embaga; Provinsi; Kabupaten/ Kota)	4,2; 4; 3,80	1	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Keatas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	1.156.522.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA										
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
								Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas										
								Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas										
								Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas										
												2	Transformasi instansi pemerintahan dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	8.272.000.000
														Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	75.000.000
														Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	50.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						3	Penataan Kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	12.868.783.000
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas					
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas					
						4	Reformasi Sitem Akuntabili tas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah (Kementerian /Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP Pusat			-	-	-
								Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	315.000.000
								Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	315.000.000

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP			-		-
								Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	-	1.179.200.000
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	-	1.179.200.000
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	-	1.179.200.000
		5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,21	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000
				Indeks Terorisme Global (nilai)	4,29			Indeks Risiko Terorisme (Target)					
				Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di	>60			Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara					

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Area Tempat Tinggalnya (%)	3,3			Angka Kejadian Konflik					
				Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)				Angka Korban Pengungsi Internal					
				2		Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Pemenuhan MEF			-	-	-	
							Persentase Kontribusi Industri Pertahanan						
				3		Penguatan Keamanan Laut	Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut			-	-	-	
				4		Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	720.000.000	
							Crime Rate	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			-

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		INDIKATOR	TARGET 2024	PERATURAN PRESIDEN		KABUPATEN/KOTA					
						KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pelayanan Publik Polri yang Prima	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	104.567.805.000
						5	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor Global Cyber Security Index	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1.958.800.000
	JUMLAH PN 7												356.264.075.205

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Tabel 4.9
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	124.662.635.815
2.	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	150.150.168.922
		Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	4.472.596.000
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	27.003.408.753
3.	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	393.385.246.535
4.	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusivitas Wilayah	97.550.000.000
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	65.861.581.809
5.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan	93.829.581.278
		Peningkatan Konektivitas Wilayah	52.157.200.000
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	6.668.958.923
6.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	974.772.977.472
	JUMLAH		1.990.514.355.507

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Tabel 4.10

Program/Kegiatan/Subkegiatan Penunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	3	2	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	10.450.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			1	3	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	500.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1	5	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	184.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	5	3	2.02	6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	12	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	35.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	1	5	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.768.202.491	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	10	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1	5	3	2.03	4	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	5	3	2.02	09	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	2	12	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	500.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	12	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	12	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	12	3	2.02	10	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	150.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1	2	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	212.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	2	2	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	2	2	2.02	29	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	250.000.000	Dinas Kesehatan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1	1	2	2.01	29	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235.104.940.000	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1	1	2	2.02	42	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	92.661.940.000	Dinas Pendidikan
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	45.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6.423.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode			Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			2	14	3	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	229.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.03	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.04	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.04	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	115.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	115.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	107.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	110.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1	6	5	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	363.600.000	Dinas Sosial
			1	6	5	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Sosial
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	6	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30.000.000	Dinas Sosial
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1	6	2	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	652.200.000	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1	6	2	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.200.000	Dinas Sosial
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1	6	2	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Sosial

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan			Program		Kegiatan			Subkegiatan			Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)			(8)			(9)	(10)
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	1	6	2	2.03	4	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Pemberdayaan	Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Potensi Sosial	Sumber Daerah	Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.185.000.000	Dinas Sosial	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1	6	2	2.03	5	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Pemberdayaan	Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Potensi Sosial	Sumber Daerah	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		40.000.000	Dinas Sosial	
			1	6	3	2.01	1	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		0,00	Dinas Sosial			
			1	6	4	2.01	1	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan		2.462.749.000	Dinas Sosial			
			1	6	4	2.01	2	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang		200.000.000	Dinas Sosial			
			1	6	4	2.01	3	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu		132.000.000	Dinas Sosial			

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1	6	4	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	115.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	220.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	10	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	65.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	11	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	499.580.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	12	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	Dinas Sosial
			1	6	4	2.02	7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	217.000.000	Dinas Sosial

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan			Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1	6	4	2.02	13	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	138.671.000	Dinas Sosial
			1	6	5	2.02	3	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	698.060.000	Dinas Sosial
			1	6	5	2.02	4	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250.000.000	Dinas Sosial
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1	6	6	2.01	1	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	2.089.000.000	Dinas Sosial
			1	6	6	2.01	4	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	700.000.000	Dinas Sosial
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1	6	6	2.01	5	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	0,00	Dinas Sosial
JUMLAH TPB 1													365.217.142.491		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	1	2	2	2.02	15	Urusan Kesehatan	Pemerintahan	Bidang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	330.000.000	Dinas Kesehatan
		Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	1	2	2	2.02	15	Urusan Kesehatan	Pemerintahan	Bidang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.963.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.													

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.											
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	1	2	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	428.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1	2	2	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2	9	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	650.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2	9	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	242.313.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	2	9	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan		Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	2	9	2	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	2	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	370.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	620.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan			Program		Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		
			2	9	3	2.01	5	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	187.915.905	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.01	6	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	206.800.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.02	1	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.02	2	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	40.000.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.02	3	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.675.000.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.03	1	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	50.000.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.04	1	Urusan Pangan	Pemerintahan	Bidang	Program Diversifikasi Ketahanan Masyarakat	Peningkatan dan Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	70.000.000	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2	9	3	2.04	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.359.626.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	3	2.04	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	460.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	4	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	4	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	916.927.200	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	5	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	186.027.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	5	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	125.030.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	5	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	162.693.000	Dinas Ketahanan Pangan
			2	9	5	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	810.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	3	27	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.202.387.214	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.538.325.148	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	500.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.909.913.840	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.052.827.680	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	480.299.749	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.04	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	270.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.05	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	711.000.000	Dinas Pertanian

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3	27	2	2.05	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	225.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	2	2.06	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	170.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	200.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	200.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	490.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.847.721.411	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.250.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	350.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000.000	Dinas Pertanian

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan		Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3	27	3	2.02	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	691.413.840	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	556.413.840	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	212.500.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	160.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	400.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.04	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	200.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.04	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	120.000.000	Dinas Pertanian

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			3	27	4	2.04	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	4	2.05	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	50.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	5	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	688.713.840	Dinas Pertanian
			3	27	5	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	587.500.000	Dinas Pertanian
			3	27	5	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	260.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	6	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	476.700.000	Dinas Pertanian
			3	27	6	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	100.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	7	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	690.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	7	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	386.400.000	Dinas Pertanian
			3	27	7	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.577.292.400	Dinas Pertanian

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3	27	7	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000	Dinas Pertanian
JUMLAH TPB 2											38.722.741.067		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	1	2	2	2.02	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	90.000.000	Dinas Kesehatan
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1	2	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	212.000.000	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI).	1	2	2	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	2	2	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	440.000.000	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	2	2	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	120.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.											
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	1	2	2	2.02	12	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000	Dinas Kesehatan
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1	2	2	2.02	11	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	1	2	2	2.02	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	230.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.											
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).											
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.											

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											
		Proporsi kematian akibat keracunan.											
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	1	2	2	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	250.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1	2	2	2.02	21	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	120.000.000	Dinas Kesehatan
			1	2	2	2.02	10	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1	2	2	2.02	26	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	225.648.279.200	Dinas Kesehatan
		Unmet need pelayanan kesehatan.											
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.											

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	1	2	2	2.01	16	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	4.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1	2	3	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	49.480.000	Dinas Kesehatan
			1	2	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.000.000	Dinas Kesehatan
			1	2	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Kesehatan
			1	2	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	2	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			2	14	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	35.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.											

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	2	14	4	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	2	14	4	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2	14	4	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.080.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Total Fertility Rate (TFR).	2	14	4	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	4	2.01	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	155.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	4	2.01	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	14	4	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34.680.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
JUMLAH TPB 3												234.509.519.200		
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1	1	2	2.01	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	0	Dinas Pendidikan	
			1	1	2	2.02	25	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	0	Dinas Pendidikan	
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1	1	2	2.01	23	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.664.250.000	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1	1	2	2.01	24	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100.000.000	Dinas Pendidikan
				1	1	2	2.01	25	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.100.000.000	Dinas Pendidikan
				1	1	2	2.01	29	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235.104.940.000	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan		Program		Kegiatan			Subkegiatan		Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)		(7)			(8)		(9)	(10)
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	1	1	2	2.01	28	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.950.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.01	38	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.01	39	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	550.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.01	30	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350.000.000	Dinas Pendidikan			
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1	1	2	2.02	36	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.897.150.000	Dinas Pendidikan			
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	1	1	2	2.02	41	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.450.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.02	43	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.02	51	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.02	52	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	Dinas Pendidikan			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1	1	2	2.02	42	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	92.661.940.000	Dinas Pendidikan			
			1	1	2	2.02	37	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	Dinas Pendidikan			

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program		Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	1	2	2.02	38	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	100.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	12	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	610.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	15	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	471.250.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	16	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	895.012.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	17	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	19	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	200.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.03	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	Dinas Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	1	1	2	2.04	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	709.800.000	Dinas Pendidikan
		Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	1	1	2	2.04	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	576.000.000	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1	1	2	2.04	16	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	18	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	28	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	17	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.04	22	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	747.133.800	Dinas Pendidikan
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	1	1	2	2.01	29	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235.104.940.000	Dinas Pendidikan
		Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	1	1	2	2.01	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	202.475.650.000	Dinas Pendidikan

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			1	1	2	2.01	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.097.896.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.02	39	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.832.550.000	Dinas Pendidikan
			1	1	2	2.02	40	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700.000.000	Dinas Pendidikan
JUMLAH TPB 4											931.023.511.800		
5	Mencapai Kesenjaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2	16	3	2.02	9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5.487.933.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			2	16	3	2.02	12	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2	8	2	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2	8	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	66.050.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	2	8	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Perlindungan Anak	103.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
									Kabupaten/Kota	Ekonomi			
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2	8	2	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	194.791.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	2	8	2	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	262.127.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	2	8	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	178.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	2	8	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	4	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	264.515.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	4	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.264.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	8	4	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.986.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	4	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.440.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	4	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.078.161.850	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	2	14	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	45.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2	14	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6.423.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	2	14	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	2	14	3	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	2	14	3	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	229.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.03	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	80.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.04	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.04	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	75.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	115.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	115.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	107.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	110.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	97.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2	14	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
JUMLAH TPB 5												17.960.068.950	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	1	3	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.785.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	3	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	660.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1	3	3	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1	3	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.155.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1	3	5	2.01	15	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			1	3	5	2.01	16	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sarana dan Prasarana IPLT	500.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode			Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			1	3	5	2.01	17	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	100.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1	3	5	2.01	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	2.250.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			1	3	5	2.01	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	4.939.298.471	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	1	2	5	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	480.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1	2	5	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	500.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	1	2	2	2.02	29	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	250.000.000	Dinas Kesehatan
		Kualitas air danau.	2	11	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.479.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	2	11	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.798.980.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2	11	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	2	11	8	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	3	5	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			1	3	5	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	15.800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			1	3	5	2.01	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			JUMLAH TPB 6									40.618.178.471	
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Bauran energi terbarukan.	4	1	3	2.04	3	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	200.000.000	Sekretariat Daerah
		Intensitas energi primer.											
												200.000.000	
JUMLAH TPB 7												200.000.000	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5	2	4	2.01	1	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	166.500.000	Badan Daerah	Pendapatan
		PDB per kapita.	5	2	4	2.01	2	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	490.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	3	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	4	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.310.023.500	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	5	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.669.900	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	6	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	795.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	7	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	297.550.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	8	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	286.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	9	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	259.105.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	11	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	728.945.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	12	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	78.900.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	13	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	223.221.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	14	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	15	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	150.000.000	Badan Daerah	Pendapatan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2	19	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	125.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			2	19	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			2	19	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	125.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			2	19	2	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	3.400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			2	19	2	2.01	8	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			2	19	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	19	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	650.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2	7	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.240.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	2	7	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	750.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase tenaga kerja formal.	2	7	3	2.04	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	700.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Upah rata-rata per jam pekerja.	2	7	3	2.05	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	980.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2	7	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	350.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat setengah pengangguran.	2	7	4	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	720.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	272.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	237.500.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	400.000.000	Dinas Ketenagakerjaan

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan		Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2	7	4	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.04	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	650.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.04	3	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	4	2.05	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	5	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Industrial Hubungan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	116.280.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	5	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Industrial Hubungan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	58.160.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	5	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Industrial Hubungan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.309.865.549	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	5	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Industrial Hubungan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.164.640.000	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode			Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			2	7	5	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	160.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	5	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1.987.500.000	Dinas Ketenagakerjaan
			3	32	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	522.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			3	32	3	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			3	32	3	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			3	32	3	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Transmigrasi	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.550.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
			2	7	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.245.690.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2	17	7	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	2	17	7	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	7	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	8	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3	26	2	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.102.361.000	Dinas Pariwisata
		Jumlah devisa sektor pariwisata.	3	26	2	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	Dinas Pariwisata
		Jumlah wisatawan mancanegara.	3	26	2	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3	26	2	2.03	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.200.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	2	2.04	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	25.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	170.235.000	Dinas Pariwisata

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			3	26	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	3	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	500.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	4	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan	263.706.000	Dinas Pariwisata
			3	26	4	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	129.990.000	Dinas Pariwisata
			3	26	4	2.02	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	209.700.000	Dinas Pariwisata
			3	26	4	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perlindungan Hasil Kreativitas	190.300.000	Dinas Pariwisata
			3	26	5	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000	Dinas Pariwisata

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			3	26	5	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Pariwisata
			3	26	5	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Pariwisata
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	3	26	5	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000	Dinas Pariwisata
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	3	27	7	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	690.000.000	Dinas Pertanian
			3	27	7	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	386.400.000	Dinas Pertanian
			3	27	7	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000	Dinas Pertanian
		JUMLAH TPB 8										46.102.241.949	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	5	5	2	2.01	1	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	390.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5			5	2	2.01	4	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	40.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5			5	2	2.01	8	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	85.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			5	5	2	2.01	9	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	97.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.01	10	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	105.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.01	11	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	105.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	231.366.147	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	2	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	140.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	4	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	75.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	7	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	8	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	9	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	152.116.146	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	235.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	322.140.398	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	227.600.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	435.600.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	276.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5	5	2	2.04	1	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	638.800.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	2	16	3	2.02	9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5.487.933.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	16	3	2.02	12	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Proporsi individu yang menggunakan internet											
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	2	17	7	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	650.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	7	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	17	7	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	8	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah dermaga penyeberangan.	2	15	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	2	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500.000.000	Dinas Perhubungan	
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3	31	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	650.000.000	Dinas Perindustrian	
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3	31	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	423.000.000	Dinas Perindustrian	
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3	31	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	500.000.000	Dinas Perindustrian	
	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	3	31	2	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	323.000.000	Dinas Perindustrian	
		3	31	2	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	270.000.000	Dinas Perindustrian	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			3	31	2	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	464.000.000	Dinas Perindustrian
			3	31	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000	Dinas Perindustrian
			3	31	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	650.000.000	Dinas Perindustrian
			3	31	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.150.000.000	Dinas Perindustrian
			3	31	4	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	200.000.000	Dinas Perindustrian
			3	31	4	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	200.000.000	Dinas Perindustrian
			JUMLAH TPB 9									20.638.555.691	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Indeks Kebebasan Sipil.	8	1	2	2.01	3	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	318.136.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	2	2.01	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.343.260.162	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	2	2.01	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.248.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	3	2.01	3	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	103.270.070.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	3	2.01	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.239.210.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			8	1	3	2.01	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.525.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	4	2.01	3	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	4	2.01	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	4	2.01	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	5	2.01	3	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	5	2.01	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			8	1	5	2.01	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	6	2.01	1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	175.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	6	2.01	3	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	6	2.01	4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			8	1	6	2.01	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	1	6	2.01	6	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2	7	5	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.309.865.549	Dinas Ketenagakerjaan
		Jumlah Desa Mandiri.	2	13	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	2	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	219.255.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5.168.695.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan		Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
			2	13	4	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	11	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	450.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	4	2.01	15	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	5	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	13	5	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	5	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	5	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	5	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	13	5	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2	13	5	2.01	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	814.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Koefisien Gini.	1	6	5	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	363.600.000	Dinas Sosial	
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	6	5	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Sosial	
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	1	6	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	2.462.749.000	Dinas Sosial	

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan			Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1	6	4	2.01	2	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	200.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	3	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	132.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	5	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	115.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	6	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	220.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	10	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	65.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	11	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	499.580.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.01	12	Urusan Sosial	Pemerintahan	Bidang	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	0,00	Dinas Sosial

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1	6	4	2.02	7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	217.000.000	Dinas Sosial
			1	6	4	2.02	13	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	138.671.000	Dinas Sosial
			1	6	5	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	698.060.000	Dinas Sosial
			1	6	5	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250.000.000	Dinas Sosial
JUMLAH TPB 10											130.816.724.711		
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1	5	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	184.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	5	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			1	5	3	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.768.202.491	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.02	10	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	5	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	4	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1	5	3	2.03	4	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.04	6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	5	3	2.02	09	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Bencana	Penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	2	11	11	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Persampahan	Pengelolaan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	75.769.111.194	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			2	11	11	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.496.626.436	Dinas Hidup	Lingkungan	
			2	11	11	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Hidup	Lingkungan	
			2	11	11	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	897.102.173	Dinas Hidup	Lingkunan	
			2	11	11	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	120.000.000	Dinas Hidup	Lingkungan	
			2	11	11	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1.480.000.000	Dinas Hidup	Lingkungan	
		Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	1	4	2	2.06	3	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	500.000.000	Dinas Rakyat, Perumahan, dan Pertanahan	Perumahan	
			1	4	2	2.07	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000	Dinas Rakyat, Perumahan, dan Pertanahan	Perumahan	
		Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1	4	3	2.03	02	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.000.000.000	Dinas Rakyat, Perumahan, dan Pertanahan	Perumahan	
			1	4	4	2.01	01	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	33.000.000.000	Dinas Rakyat, Perumahan, dan Pertanahan	Perumahan	
		JUMLAH TPB 11											128.385.042.294		

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola	2	11	5	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	175.000.000	Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	11	11	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	897.102.173	Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	2	11	6	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	2	11	10	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	290.073.475	Dinas Hidup	Lingkungan
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	2	11	9	2.01	01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	251.858.000	Dinas Hidup	Lingkungan
JUMLAH TPB 12											2.014.033.648			
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	5	3	2.02	09	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	200.000.000	Badan	Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1	5	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	Badan	Penanggulangan Bencana Daerah

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1	5	3	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	5	3	2.03	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	184.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH TPB 13											684.000.000		
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	3	25	6	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Perikanan
		Jumlah nelayan yang terlindungi.	3	25	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000	Dinas Perikanan
			3	25	3	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	660.000.000	Dinas Perikanan
			3	25	3	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	415.000.000	Dinas Perikanan
			3	25	3	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	50.000.000	Dinas Perikanan
			3	25	3	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	225.000.000	Dinas Perikanan
JUMLAH TPB 14											1.550.000.000		

BAB-IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	2	11	4	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	297.450.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	2	11	6	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengurusan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	2	11	6	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2	11	8	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH TPB 15											1.417.450.000		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	5	3	2	2.02	3	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	950.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	5	2	2	2.01	1	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	127.300.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	2	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	3	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	217.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	4	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	5	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	6	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	7	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	140.360.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	8	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	9	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	720.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	11	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.04	8	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	637.108.776.398	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	5	2	2	2.02	1	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.02	4	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	400.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.02	5	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.02	9	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.150.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.02	10	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.02	11	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.428.903	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.03	3	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.03	4	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.03	5	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			5	2	2	2.03	9	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	1	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	300.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	3	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	125.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	4	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	125.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	5	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	580.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	7	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	9	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	75.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	10	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	3	2.01	13	Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	109.314.533	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2	12	3	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	500.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	2	12	3	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	2	12	3	2.02	8	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	12	3	2.02	10	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	150.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2	16	2	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	300.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	2	8	6	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	157.939.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2	8	6	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	6	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	6	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.069.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	7	2.02	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2	8	7	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	2	8	7	2.03	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	2	8	3	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	178.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	2	8	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	66.050.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	6	1	2	2.01	1	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	950.000.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	2	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.839.224.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	3	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	715.842.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	4	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	250.000.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	5	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	1.202.520.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	6	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	200.000.000	Inspektorat
			6	1	2	2.01	7	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.000.000	Inspektorat
			6	1	2	2.02	2	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.453.961.000	Inspektorat
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	1	5	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	7.541.033.785	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode				Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			1	5	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	4	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	304.118.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	7	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.01	9	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.02	1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.392.471.200	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	5	2	2.02	2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			1	5	2	2.02	3	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
			1	5	2	2.03	1	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	995.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	4	1	3	2.03	1	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.177.664.128	Sekretariat Daerah	
			4	1	3	2.03	2	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	690.273.161	Sekretariat Daerah	
			4	1	3	2.03	3	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	834.898.027	Sekretariat Daerah	
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	4	1	2	2.03	1	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	170.644.000	Sekretariat Daerah	
			4	1	2	2.03	3	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	153.886.809	Sekretariat Daerah	
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	4	1	1	2.13	1	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	355.000.000	Sekretariat Daerah	
			4	1	1	2.13	2	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	190.200.000	Sekretariat Daerah	
			4	1	1	2.13	3	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.000.000	Sekretariat Daerah	
			4	1	1	2.13	4	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	180.000.000	Sekretariat Daerah	
			4	1	1	2.13	5	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	244.000.000	Sekretariat Daerah	
		JUMLAH TPB 16											673.627.124.144	

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
17	Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5	2	4	2.01	1	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	166.500.000	Badan Daerah	Pendapatan
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5	2	4	2.01	2	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	490.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	3	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	4	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.310.023.500	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	5	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.669.900	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	6	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	795.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	7	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	297.550.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	8	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	286.000.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	9	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	259.105.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	11	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	728.945.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	12	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	78.900.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	13	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	223.221.000	Badan Daerah	Pendapatan
			5	2	4	2.01	14	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144.000.000	Badan Daerah	Pendapatan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5	2	4	2.01	15	Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
			5	2	2	2.01	1	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	127.300.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	2	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	3	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	217.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	4	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	5	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	6	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	7	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	140.360.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	8	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	9	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	720.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.01	11	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	2	2	2.04	8	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	637.108.776.398	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	5	1	2	2.02	1	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.092.223.623	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	1	2	2.02	2	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	1	2	2.02	3	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	1	2	2.03	3	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	650.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	1	3	2.01	7	Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	347.676.881	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	1	3	2.01	8	Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	992.622.760	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	2	16	3	2.02	9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5.487.933.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	2	16	3	2.02	12	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	700.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2	20	2	2.01	1	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	220.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Kode					Bidang urusan			Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	2	20	2	2.01	2	Urusan Pemerintahan	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
			2	20	2	2.01	3	Urusan Pemerintahan	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	570.529.600	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
			2	20	2	2.01	4	Urusan Pemerintahan	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	165.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
			2	20	2	2.01	5	Urusan Pemerintahan	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur	262.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
			2	20	2	2.01	6	Urusan Pemerintahan	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	110.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
JUMLAH TPB 17												656.126.816.662			

4.3 Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya untuk mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menyelenggarakan lomba inovasi bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun inovasi perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2022

No.	Judul Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi	Tanggal Penerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gerakan Bersama Obati Tuberculosis (Gebot)	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	02-01-2020
2	Pancoranmas (Pantau Corona Bersama Masyarakat)	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	01-06-2020
3	Milemia (Milenial Bebas Anemia)	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	11-01-2021
4	Optimalisasi Perencanaan Pembangunan melalui Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pendidikan (Sigedik) di Kabupaten Bekasi	Digital	OPD	Pendidikan	Penerapan	08-12-2021
5	Gesit (Gemuk Jadi Singset)	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	01-03-2020
6	Rumah Sapa (Rumah Sakit Sayang Pasien)	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	10-11-2020
7	Perpustakaan Digital iBekasiKab	Digital	OPD	Perpustakaan	Penerapan	03-02-2020
8	Aplikasi Berani (Kebencanaan Berbasis Android)	Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penerapan	10-10-2021
9	Bebunge	Digital	OPD	Komunikasi dan Informatika	Penerapan	20-08-2021
10	Pelayanan Administrasi Terintegrasi "Pasti" di Lingkungan Kecamatan Cikarang Barat	Digital	OPD	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerapan	01-10-2020
11	Aplikasi Sistem Web Register	Digital	OPD	Kuangan	Penerapan	09-09-2020
12	Ruang Vappe	Digital	OPD	Perencanaan	Penerapan	01-01-2022
13	Aplikasi Sikawan (Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil)	Digital	OPD	Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian	Penerapan	01-12-2021
14	Lentera (Layanan Pendampingan Psikologi Terhadap ASN)	Non Digital	OPD	Kepegawaian	Penerapan	01-12-2021
15	Bebeli (Bekasi Berani Beli)	Digital	OPD	Fungsi Penunjang lainnya	Uji Coba	18-07-2022
16	Aplikasi Bang-Komar (Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi)	Digital	OPD	Kepegawaian	Penerapan	23-06-2021

No.	Judul Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi	Tanggal Penerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pemutakhiran Aplikasi Bisma (Bekasi Integrated System Management Asn)	Digital	OPD	Kepegawaian	Penerapan	24-06-2021
18	Berparas Cantik (Berani Tanpa Kekerasan- Cintai anak, istri dan keluarga)	Non Digital	OPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penerapan	28-12-2021
19	Bu Tani (Buku Tamu Online Kecamatan Sukatani)	Digital	OPD	Kepegawaian	Penerapan	01-12-2021
20	Layanan Arsip Statis Sejarah (Film Dokumenter)	Digital	OPD	Kearsipan	Penerapan	09-04-2021
21	Silinda (Sistem Layanan Inovasi Daerah)	Digital	OPD	Penelitian dan Pengembangan	Penerapan	10-01-2022
22	Tim Amphibi DLH Anti Permukaan Sampah Sungai	Non Digital	OPD	Lingkungan Hidup	Penerapan	01-05-2021
23	Inovasi Retribusi Online Pasar (Rolpas)	Digital	OPD	Perdagangan	Penerapan	15-06-2020
24	Optimalisasi Pelaporan Kehadiran (Absensi) Berbasis Administrasi Komputerisasi di Puskesmas Lambangsari Kabupaten Bekasi	Digital	ASN	Kepegawaian	Penerapan	30-07-2021
25	SiPKaLi (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan)	Digital	ASN	Kelautan dan Perikanan	Penerapan	23-05-2022
26	Sistem Informasi Manajemen Program Legislasi "Simple"	Digital	Anggota DPRD	Komunikasi dan Informatika, Fungsi Penunjang Lainnya	Uji Coba	13-09-2021
27	Sidanta (Sistem Informasi dan Dokumentasi Desa Tamansari)	Digital	ASN	Fungsi Penunjang Lainnya	Uji Coba	29-10-2021
28	Gercep (Gerai Cepat) Layanan Publik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)	Non Digital	OPD	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerapan	01-01-2020
29	Sawarna Pasti (Sekolah Berwawasan Pangan Sehat dan Lestari)	Digital	OPD	Pangan	Uji Coba	02-01-2020
30	Pangan Aman, Keluarga Sehat	Digital	OPD	Pangan	Inisiatif	02-01-2020
31	Mangrove Potensi Pangan Lokal Yang Menjanjikan	Non Digital	OPD	Pangan	Uji Coba	02-01-2020
32	Sibagoes (Sistem Informasi Bappeda Go To Paperless)	Digital	ASN	Perencanaan	Uji Coba	06-01-2020
33	Internet Banking Corporate	Digital	OPD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Uji Coba	28-11-2020
34	Satuan Tugas Sigap Cepat Tanggap (SAT SET) Trantibum	Digital	OPD	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penerapan	22-01-2021
35	MPO ATMI (Model Pojok ATM Inovasi) di Kabupaten Bekasi	Non Digital	OPD	Penelitian dan Pengembangan	Penerapan	17-03-2021

No.	Judul Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi	Tanggal Penerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dan Hukum Melalui Kerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bekasi	Non Digital	ASN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penerapan	29-07-2021
37	SIMPPD (Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah)	Digital	OPD	Perencanaan	Penerapan	01-04-2021
38	E-LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Elektronik)	Digital	OPD	Perencanaan	Penerapan	01-02-2021
39	Aplikasi Surat Masuk/Keluar	Digital	ASN	pendidikan	Uji Coba	31-12-2021
40	Digitalisasi Pemetaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah	Digital	ASN	Perencanaan	Uji Coba	06-01-2020
41	Lumbung Pakan Ternak	Non Digital	ASN	Pertanian	Penerapan	06-04-2021
42	Start Up Agribisnis / E-Commerce	Digital	ASN	Pertanian	Uji Coba	21-10-2021
43	Pelayanan kesehatan hewan keliling (Yankeswanling)	Non Digital	ASN	Pertanian	Inisiatif	21-06-2021
44	Siremot (Sistem Informasi Retribusi Online Pengujian Kendaraan Bermotor)	Digital	OPD	Perhubungan	Uji Coba	17-09-2021
45	Podcast Youtube Ngobras (Ngobrolin Arsip) dan Video Animasi Layanan Informasi Kearsipan	Digital	Kepala Daerah	Kearsipan	Inisiatif	01-02-2022
46	L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Digital	OPD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup	Uji Coba	01-01-2022
47	Sipaman (Sistem Informasi Pelayanan Perempuan dan Anak) Kec. Pebayuran	Non Digital	OPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penerapan	01-08-2022
48	Aplikasi Sikaka	Digital	OPD	Perencanaan, Kepegawaian	Penerapan	08-02-2021
49	Digempur "Digitalisasi Arsip Dokumen Melalui Pemanfaatan Cloud Googe Drive"	Digital	ASN		Penerapan	07-12-2020
50	Sistem Informasi Pendapatan Tarif	Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	01-04-2020
51	Centini (Cegah Stunting Sejak Dini)	Non Digital	Kepala Daerah	Kesehatan	Penerapan	10-09-2020
52	Replika (Rekapitulasi Perjalanan Dinas dan laporan realisasi keuangan)	Non Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	01-09-2020
53	Bumil Pelakor (ibu hamil perang lawan korona)	Non Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	15-05-2021
54	KP-Asi Kasihi Asih	Non Digital	OPD	Kesehatan	Penerapan	02-01-2020

No.	Judul Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi	Tanggal Penerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55	Sistem Aplikasi Pengawasan (Aplikasi Siap)	Digital	OPD	Fungsi Penunjang lainnya	Inisiatif	10-08-2022

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Sementara untuk tahun 2023, sampai dengan awal Juli tahun 2023 telah ditetapkan 10 (sepuluh) besar inovasi perangkat daerah dalam lomba inovasi tahun 2023, antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Peringkat Sepuluh Besar dalam Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

No.	Nama Instansi	Judul Inovasi
(1)	(2)	(3)
Kategori Perangkat Daerah/RSUD/Setda		
1.	Dinas Pemadam Kebakaran	Aplikasi Pemeriksaan dan Penilaian Alat Pemadam Kebakaran
2.	Dinas Koperasi dan UMKM	Kopi Panas (Konsultasi, Pendampingan Pengembangan Usaha dan Advokasi bagi Koperasi)
3.	Dinas Pertanian	Gerobak Kuring (Gerakan Pengobatan Ternak dan Edukasi Keliling)
4.	Badan Pendapatan Daerah	Sapa Bekasi (Sistem Aplikasi Pajak)
5.	Dinas Perikanan	Sipkali (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan)
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Boss (Bekasi One Stop Service)
7.	RSUD Cabangbungin	Rusa Berlian (Rumah Sakit Berorientasi Pelayanan)
8.	RSUD Kabupaten Bekasi	Cantingmas (Cegah dan Tangani Stunting bersama Masyarakat)
9.	Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik	Satu Peta Kabupaten Bekasi
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Botram (Berkolaborasi Terus Melayani)
Kategori Kecamatan/Kelurahan/UPTD		
1.	Kelurahan Kebalen	Pusat Ekonomi Rakyat Kebalen (Perak)
2.	Kecamatan Babelan	Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tingkat Kecamatan Babelan untuk Mendukung Penanganan Permasalahan Sosial dan Kesehatan Warga Kecamatan Babelan
3.	Kelurahan Kebalen	Inovasi Pelayanan Publik Malam (Night Public Service)
4.	Puskesmas Lambangsari	Dasi Emas (Inovasi Penanggulangan Masalah Hipertensi)
5.	Kecamatan Sukakarya	Pemanfaatan "Catrik" untuk Efektivitas dan Efisiensi Penyemprotan Tanaman Padi
6.	Puskesmas Jatimulya	Lobster Kepiting (Layanan Observasi Terpadu Kenali dan Peduli Stunting)
7.	Puskesmas Sukadami	Posting Sapa (Posbindu Inklusi Gerakan Sehat Tanpa Penyakit Tidak Menular Nusa Indah VIII Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan)
8.	Puskesmas Lemahabang	Keswana (Kesehatan Jiwa Paripurna)

No.	Nama Instansi	Judul Inovasi
(1)	(2)	(3)
9.	Puskesmas Sukadami	Gelang Mas (Gerakan Enam Langkah Cegah Stunting Menuju Masyarakat Sehat)
10.	UPTD PSC 119	Tombol Sirine (Bekasi Integrasi Respon Online)

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan Tahun 2023-2026

Perwujudan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dituangkan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dengan penyeragaman program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimulai pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; urusan/unsur/bidang urusan/program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama tahun 2023-2026 adalah sebanyak 8 urusan/unsur, 40 bidang urusan/unsur, 140 program urusan/unsur, dan 1 program non urusan/unsur/rutin. Urusan, bidang, dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial

2) Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

3) Pendidikan

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum

4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6) Kesehatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Pertanahan

- Program Penatagunaan Tanah
- Program Pengelolaan Tanah Kosong
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

2) Tenaga Kerja

- Program Hubungan Industrial
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Perlindungan Perempuan

4) Pangan

- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

5) Lingkungan Hidup

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Pencatatan Sipil
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk

9) Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10) Komunikasi dan Informatika

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

11) Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

12) Statistik

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

13) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pengembangan UMKM
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

14) Penanaman Modal

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal

15) Kebudayaan

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pengelolaan Permuseuman
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

16) Kepemudaan dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

17) Perpustakaan

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Program Pembinaan Perpustakaan

18) Kearsipan

- Program Pengelolaan Arsip

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) Transmigrasi

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2) Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3) Pariwisata

- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

4) Pertanian

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian

5) Perdagangan

- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

6) Perindustrian

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1) Perencanaan**

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2) Keuangan

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- Program Kepegawaian Daerah

4) Pendidikan dan Pelatihan

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1) Inspektorat Daerah

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

2) Sekretariat DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

8. UNSUR KEWILAYAHAN

1) Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

9. NON URUSAN/UNSUR

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 139 program, yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 138 program urusan/unsur. Jumlah program ini tidak memperhatikan perangkat daerah pelaksana sehingga program yang sama dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah akan dihitung sebanyak 1 (satu) kali. Program-program tersebut beserta pagu anggaran dan perangkat daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
	Program Pengelolaan Pendidikan	695.918.571.800	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	1.325.000.000	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	267.728.464.981	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.919.093.254	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	624.480.000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	425.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	292.243.471.287	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.320.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.150.793.015	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.400.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
	Program Penatagunaan Tanah	109.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	4.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	360.640.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.160.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Program Kawasan Permukiman	10.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	33.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	56.400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.059.753.631	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.229.135.251	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.798.913.840	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.536.213.840	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	576.700.000	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	3.103.692.400	Dinas Pertanian
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.400.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.766.323.017	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.200.000.000	Dinas Perikanan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.014.642.495	Dinas Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	615.475.249	Dinas Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.759.090.199	Dinas Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.404.704.800	Dinas Perdagangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.434.341.905	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.366.927.200	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.492.313.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.283.750.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Program Pengendalian Penduduk	367.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	544.760.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.323.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan Desa	1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	5.387.950.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.464.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	896.368.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	178.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.374.367.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	389.473.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	583.008.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	390.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
	Program Pemberdayaan Sosial	2.127.400.000	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	4.050.000.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.361.660.000	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	2.914.000.000	Dinas Sosial
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.634.918.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	835.320.325	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pembinaan Sejarah	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengelolaan Permuseuman	4.028.680.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PENINGKATAN DAYA SAING DAN KESEMPATAN KERJA		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	850.000.000	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	1.095.235.000	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	793.696.000	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.527.361.000	Dinas Pariwisata
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	977.434.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1.615.885.720	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	358.682.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.770.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	5.425.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	1.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	283.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	441.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	315.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.630.000.000	Dinas Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.550.000.000	Dinas Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	850.000.000	Dinas Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	700.000.000	Dinas Perdagangan
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	568.000.000	Dinas Perdagangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.179.500.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Hubungan Industrial	5.796.445.549	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	13.465.690.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	922.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perencanaan		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.167.055.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.835.278.748	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.341.233.623	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.654.790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sekretariat Daerah		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	670.109.000	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.029.725.100	Sekretariat Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Non Urusan		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	244.000.000	Sekretariat Daerah
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Pendaftaran Penduduk	5.569.950.700	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	1.360.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.908.067.300	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Inspektorat Daerah		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.911.547.000	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.038.195.000	Inspektorat
	Kepegawaian		
	Program Kepegawaian Daerah	6.953.635.787	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pendidikan dan Pelatihan		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.045.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	64.304.817.000	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.160.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	886.655.809	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.002.835.316	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.405.350.000	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	935.200.000	Sekretariat Daerah
	Penelitian dan Pengembangan		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.799.022.691	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	21.788.783.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9.167.555.205	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.477.529.600	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.392.646.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statisti

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.680.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	580.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
	Program Pengelolaan Arsip	1.534.486.400	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Kecamatan		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.277.056	Kecamatan Cibitung
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	224.866.254	Kecamatan Cabangbungin
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	206.098.680	Kecamatan Bojongmangu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	202.112.680	Kecamatan Babelan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	159.532.000	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	120.000.000	Kecamatan Setu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	194.714.120	Kecamatan Pebayuran
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	278.595.564	Kecamatan Tarumajaya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	275.000.000	Kecamatan Karangbahagia
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	176.200.000	Kecamatan Muaragembong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	227.619.934	Kecamatan Tambun Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	218.171.959	Kecamatan Cibarusah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	268.667.680	Kecamatan Cikarang Selatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	436.039.000	Kecamatan Tambelang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	193.366.561	Kecamatan Cikarang Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	180.275.748	Kecamatan Cikarang Pusat

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	194.000.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	291.341.520	Kecamatan Serang Baru
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	195.764.680	Kecamatan Sukatani
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	425.069.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	158.200.000	Kecamatan Cikarang Timur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	168.722.360	Kecamatan Sukakarya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	167.206.000	Kecamatan Sukawangi
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	230.000.000	Kecamatan Cibitung
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	215.926.625	Kecamatan Cabangbungin
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	268.090.480	Kecamatan Bojongmangu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	491.405.631	Kecamatan Babelan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	159.200.000	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240.800.000	Kecamatan Setu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	692.738.770	Kecamatan Pebayuran
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	278.086.448	Kecamatan Tarumajaya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.611.163	Kecamatan Karangbahagia
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	403.568.000	Kecamatan Muaragembong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	320.040.000	Kecamatan Tambun Utara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	210.400.000	Kecamatan Cibusah
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	364.037.845	Kecamatan Cikarang Selatan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	246.567.000	Kecamatan Tambelang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	350.013.289	Kecamatan Cikarang Utara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	187.631.561	Kecamatan Cikarang Pusat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	285.000.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	291.791.040	Kecamatan Serang Baru
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	185.897.500	Kecamatan Sukatani
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	195.000.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	235.000.000	Kecamatan Cikarang Timur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.178.571	Kecamatan Sukakarya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	456.975.000	Kecamatan Sukawangi
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.040.432.875	Kecamatan Cibitung
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	490.908.991	Kecamatan Cabangbungin
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	547.289.200	Kecamatan Bojongmangu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.376.998.840	Kecamatan Babelan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	667.120.000	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	725.000.000	Kecamatan Setu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.364.174.740	Kecamatan Pebayuran
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	579.461.766	Kecamatan Tarumajaya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	741.200.000	Kecamatan Karangbahagia
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	608.444.000	Kecamatan Muaragembong

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	770.000.000	Kecamatan Tambun Utara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	597.097.406	Kecamatan Cibarusah
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	684.848.000	Kecamatan Cikarang Selatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.515.000	Kecamatan Tambelang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	909.407.226	Kecamatan Cikarang Utara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	563.157.761	Kecamatan Cikarang Pusat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.112.430.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	803.540.240	Kecamatan Serang Baru
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	857.080.448	Kecamatan Sukatani
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.209.746.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	831.010.797	Kecamatan Cikarang Timur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	707.202.658	Kecamatan Sukakarya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	664.676.285	Kecamatan Sukawangi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.316.000.000	Kecamatan Cibitung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	190.737.259	Kecamatan Cabangbungin
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	306.388.840	Kecamatan Bojongmangu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.125.108.784	Kecamatan Babelan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	254.200.000	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	295.000.000	Kecamatan Setu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	661.700.200	Kecamatan Pebayuran

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	445.057.925	Kecamatan Tarumajaya
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	169.200.000	Kecamatan Karangbahagia
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	358.800.000	Kecamatan Muaragembong
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	435.159.448	Kecamatan Tambun Utara
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	521.459.563	Kecamatan Cibarusah
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	433.868.480	Kecamatan Cikarang Selatan
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	224.004.000	Kecamatan Tambelang
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	536.804.485	Kecamatan Cikarang Utara
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	513.176.080	Kecamatan Cikarang Pusat
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.744.750.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	416.302.080	Kecamatan Serang Baru
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	388.753.430	Kecamatan Sukatani
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.759.724.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.478.231.362	Kecamatan Cikarang Timur
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	404.619.601	Kecamatan Sukakarya
	Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	332.719.715	Kecamatan Sukawangi
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	650.000.000	Kecamatan Cibitung
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	485.481.167	Kecamatan Cabangbungin
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	560.395.000	Kecamatan Bojongmangu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	747.778.160	Kecamatan Babelan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	440.000.000	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	629.043.000	Kecamatan Setu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	766.627.000	Kecamatan Pebayuran
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	170.000.000	Kecamatan Tarumajaya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.000.000	Kecamatan Karangbahagia
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	874.390.000	Kecamatan Muaragembong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	623.573.618	Kecamatan Tambun Utara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	532.000.000	Kecamatan Cibarusah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	519.927.827	Kecamatan Cikarang Selatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	432.761.000	Kecamatan Tambelang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	763.577.209	Kecamatan Cikarang Utara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	534.759.734	Kecamatan Cikarang Pusat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	868.700.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	620.584.000	Kecamatan Serang Baru
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	835.337.250	Kecamatan Sukatani
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	773.410.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	679.800.000	Kecamatan Cikarang Timur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	633.950.555	Kecamatan Sukakarya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	642.000.000	Kecamatan Sukawangi
	Keuangan		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	996.772.502.379	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.414.314.533	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.845.914.400	Badan Pendapatan Daerah
	Program Penataan Bangunan Gedung	4.900.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.115.730.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH			
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Program Penyelenggaraan Jalan	556.991.710.515	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Jalan	34.035.561.679	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	54.800.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Jalan	93.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	52.157.200.000	Dinas Perhubungan
PENINGKATAN KONDUSIVITAS WILAYAH DALAM RANGKA STABILISASI EKONOMI			
Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
	Program Penanggulangan Bencana	6.787.202.491	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10.537.064.630	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	128.890.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.959.500.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Pengembangan Perumahan	32.750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	104.567.805.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sekretariat DPRD		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	26.290.754.000	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.432.622.985	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	720.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.958.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.696.644.162	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
	Program Pengelolaan Persampahan	83.862.839.803	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.706.200.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.126.160.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	297.450.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	251.858.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	290.073.475	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.789.298.471	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.796.768.045	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
JUMLAH ANGGARAN PRIORITAS (I)		4.332.657.937.069	
NON PRIORITAS	Non Urusan		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.097.074.970.296	Dinas Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	365.566.284.832	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	213.731.193.000	Rumah sakit Umum Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.362.026.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.055.384.310	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.759.961.400	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.333.209.000	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.587.416.345	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.108.144.388	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.415.258.919	Dinas Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.363.375.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.138.431.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.318.568.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.039.112.954	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.574.224.391	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.613.241.222	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.045.613.640	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.684.141.806	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.871.982.400	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.518.755.707	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.730.082.203	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.645.811.922	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.271.741.623	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.155.289.018	Dinas Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.973.758.247	Dinas Pariwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.778.339.665	Dinas Pertanian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.994.431.108	Dinas Perdagangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.108.694.091	Dinas Perindustrian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	113.227.384.928	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.007.758.400	Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.068.845.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.886.646.534	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	142.314.718.240	Badan Pendapatan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.367.174.100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.277.117.318	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.126.464.600	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.795.203.688	Kecamatan Babelan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.508.390.276	Kecamatan Bojongmangu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.795.190.025	Kecamatan Cabangbungin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.064.504.888	Kecamatan Cibirusah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.206.146.336	Kecamatan Cibitung
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.062.629.000	Kecamatan Cikarang Barat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.086.145.000	Kecamatan Cikarang Pusat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.261.862.040	Kecamatan Cikarang Selatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.999.944.000	Kecamatan Cikarang Timur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.974.505.408	Kecamatan Cikarang Utara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.560.363.000	Kecamatan Karangbahagia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.113.016.490	Kecamatan Kedungwaringin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.369.663.000	Kecamatan Muaragembong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.599.182.000	Kecamatan Tambelang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.605.691.470	Kecamatan Serang Baru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.283.733.680	Kecamatan Sukakarya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.182.861.008	Kecamatan Sukatani
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.368.220.247	Kecamatan Tarumajaya

PRIORITAS/ SASARAN DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.480.169.000	Kecamatan Tambun Utara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.508.238.000	Kecamatan Tambun Selatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.717.333.000	Kecamatan Sukawangi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.583.988.000	Kecamatan Setu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.121.460.040	Kecamatan Pebayuran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.252.204.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH ANGGARAN NON PRIORITAS (II)		2.802.596.195.803	
JUMLAH TOTAL ANGGARAN (I+II)		7.135.254.132.872	

Sumber: Hasil Olah Data Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan pada 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 922 kegiatan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam program urusan/unsur sebanyak 487 kegiatan, dan 435 kegiatan lainnya termasuk ke dalam program non urusan/non unsur. Sedangkan subkegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 2.679 subkegiatan dengan jumlah subkegiatan urusan/unsur sebanyak 1.374 subkegiatan, dan non urusan/non unsur sebanyak 1.305 subkegiatan. Jumlah kegiatan dan subkegiatan ini tidak memperhitungkan *double* kegiatan atau subkegiatan yang dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yang sama karena keberadaan subunit organisasi sehingga judul kegiatan/subkegiatan yang *double* akan dihitung 1 (satu) kali. Jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan di atas dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 dan penyempurnaan lainnya di tahap penganggaran (rencana program dan kegiatan terlampir). Adapun anggaran berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2023	RKPD 2024		
			NON URUSAN	URUSAN	JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan	1.800.015.247.680	1.097.074.970.296	697.543.571.800	1.794.618.542.096
2.	Dinas Kesehatan	639.360.766.923	365.566.284.832	295.612.951.287	661.179.236.119
3.	Rumah sakit Umum Daerah	257.794.707.600	213.731.193.000	41.430.793.015	255.161.986.015

NO.	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2023	RKPD 2024		
			NON URUSAN	URUSAN	JUMLAH
4.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	571.945.599.000	32.362.026.000	706.001.210.515	738.363.236.515
5.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	346.155.395.000	25.055.384.310	406.730.261.497	431.785.645.807
6.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	457.437.236.000	23.759.961.400	403.696.201.679	427.456.163.079
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	31.023.630.000	18.333.209.000	10.537.064.630	28.870.273.630
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.462.320.000	10.587.416.345	6.787.202.491	17.374.618.836
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.234.668.200	17.108.144.388	15.432.622.985	32.540.767.373
10.	Dinas Sosial	24.252.100.400	12.415.258.919	10.483.060.000	22.898.318.919
11.	Dinas Ketenagakerjaan	35.520.948.400	24.363.375.000	24.363.635.549	48.727.010.549
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.857.108.600	10.138.431.200	4.811.617.750	14.950.048.950
13.	Dinas Ketahanan Pangan	19.266.558.200	11.318.568.000	9.577.332.105	20.895.900.105
14.	Dinas Lingkungan Hidup	191.920.766.405	50.039.112.954	93.829.581.278	143.868.694.232
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	36.140.240.373	16.574.224.391	15.838.018.000	32.412.242.391
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.974.799.200	11.613.241.222	12.476.950.000	24.090.191.222
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.000.000.000	20.045.613.640	9.234.760.000	29.280.373.640
18.	Dinas Perhubungan	78.160.517.400	17.684.141.806	52.157.200.000	69.841.341.806
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	48.380.887.000	16.871.982.400	33.826.513.805	50.698.496.205
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.235.900.400	9.518.755.707	12.597.001.720	22.115.757.427
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.386.911.000	24.730.082.203	3.299.500.000	28.029.582.203
22.	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	249.427.452.380	14.645.811.922	71.148.918.325	85.794.730.247
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.800.000.000	13.271.741.623	4.463.579.654	17.735.321.277
24.	Dinas Perikanan	18.476.382.000	12.155.289.018	7.366.323.017	19.521.612.035
25.	Dinas Pariwisata	17.205.333.000	11.973.758.247	5.266.292.000	17.240.050.247
26.	Dinas Pertanian	59.293.595.289	29.778.339.665	26.304.408.962	56.082.748.627
27.	Dinas Perdagangan	51.114.883.420	39.994.431.108	10.061.912.743	50.056.343.851
28.	Dinas Perindustrian	14.205.999.000	10.108.694.091	5.030.000.000	15.138.694.091
29.	Sekretariat Daerah	201.774.945.214	116.811.934.928	71.054.142.225	187.866.077.153
30.	Sekretariat DPRD	109.343.988.600	78.007.758.400	26.290.754.000	104.298.512.400
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.774.646.076	20.068.845.400	12.603.222.361	32.672.067.761
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	868.941.037.808	65.886.646.534	999.186.816.912	1.065.073.463.446
33.	Badan Pendapatan Daerah	140.595.507.000	142.314.718.240	5.845.914.400	148.160.632.640
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.940.616.000	20.367.174.100	16.998.635.787	37.365.809.887
35.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.288.572.567	9.277.117.318	5.799.022.691	15.076.140.009
36.	Inspektorat	42.183.654.000	33.126.464.600	10.949.742.000	44.076.206.600
37.	Kecamatan Babelan	24.308.234.072	9.795.203.688	13.943.404.095	23.738.607.783
38.	Kecamatan Bojongmangu	7.438.303.620	5.508.390.276	1.888.262.200	7.396.652.476
39.	Kecamatan Cabangbungin	7.452.300.376	5.795.190.025	1.607.920.296	7.403.110.321
40.	Kecamatan Cibarusah	8.185.865.620	6.064.504.888	2.079.128.928	8.143.633.816
41.	Kecamatan Cibitung	18.962.370.448	11.206.146.336	7.426.709.931	18.632.856.267
42.	Kecamatan Cikarang Barat	12.545.539.000	8.062.629.000	4.204.880.000	12.267.509.000
43.	Kecamatan Cikarang Pusat	7.102.331.000	5.086.145.000	1.979.000.884	7.065.145.884
44.	Kecamatan Cikarang Selatan	7.579.517.000	5.261.862.040	2.271.349.832	7.533.211.872
45.	Kecamatan Cikarang Timur	11.653.504.000	7.999.944.000	3.382.242.159	11.382.186.159
46.	Kecamatan Cikarang Utara	8.784.325.200	5.974.505.408	2.753.168.770	8.727.674.178
47.	Kecamatan Karangbahagia	7.370.163.000	5.560.363.000	1.774.011.163	7.334.374.163

NO.	PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2023	RKPD 2024		
			NON URUSAN	URUSAN	JUMLAH
48.	Kecamatan Kedungwaringin	6.828.318.520	5.113.016.490	1.680.052.000	6.793.068.490
49.	Kecamatan Muaragembong	7.840.300.000	5.369.663.000	2.421.402.000	7.791.065.000
50.	Kecamatan Tambelang	7.579.737.936	5.599.182.000	1.939.886.000	7.539.068.000
51.	Kecamatan Serang Baru	9.080.792.432	6.605.691.470	2.423.558.880	9.029.250.350
52.	Kecamatan Sukakarya	7.463.385.000	5.283.733.680	2.136.673.745	7.420.407.425
53.	Kecamatan Sukatani	8.897.866.181	6.182.861.008	2.462.833.308	8.645.694.316
54.	Kecamatan Tarumajaya	11.112.452.000	6.368.220.247	1.751.201.703	8.119.421.950
55.	Kecamatan Tambun Utara	8.906.543.000	6.480.169.000	2.376.393.000	8.856.562.000
56.	Kecamatan Tambun Selatan	16.361.908.000	10.508.238.000	5.362.949.000	15.871.187.000
57.	Kecamatan Sukawangi	7.027.737.936	4.717.333.000	2.263.577.000	6.980.910.000
58.	Kecamatan Setu	8.636.988.000	6.583.988.000	2.009.843.000	8.593.831.000
59.	Kecamatan Pebayuran	10.065.859.000	6.121.460.040	3.679.954.830	9.801.414.870
60.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.722.517.000	8.252.204.000	110.618.249.162	118.870.453.162
	JUMLAH	6.876.799.778.476	2.806.180.745.803	4.329.073.387.069	7.135.254.132.872

Sumber: Hasil Olah Data Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Dari 2.679 subkegiatan, direncanakan 84 subkegiatan untuk menunjang pencapaian target SPM di tahun 2024 dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.995.680.854.507,- atau sebesar 13,95% dari total belanja daerah. Adapun untuk indikator dan target per subkegiatan penunjang SPM dimaksud, dapat dilihat pada lampiran I. Program/kegiatan/subkegiatan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah
Penunjang Pencapaian Target SPM Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2024
(1)	(2)	(3)
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	100.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	471.250.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	895.012.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	610.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Pengadaan Mebel Sekolah	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.664.250.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	100.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.100.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2024
(1)	(2)	(3)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	202.475.650.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.097.896.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.950.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235.104.940.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru	44.800.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	106.598.310.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Pengadaan Mebel Sekolah	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.897.150.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.000.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.832.550.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.450.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	92.661.940.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru	7.550.400.216
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	47.388.737.185
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	709.800.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	576.000.000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	-
URUSAN BIDANG KESEHATAN		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	428.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	212.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	440.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	168.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	800.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2024
(1)	(2)	(3)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	128.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	250.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	350.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	800.000.000
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	4.000.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	-
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	15.800.000.000
	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	750.000.000
	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2.250.000.000
URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-
	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	100.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2.000.000.000
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	8.000.000.000
URUSAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	7.541.033.785
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2024
(1)	(2)	(3)
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	304.118.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.000.000.000
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.000.000.000
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	-
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.392.471.200
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	700.000.000
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	995.000.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	50.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	2.768.202.491
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	250.000.000
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	750.000.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	750.000.000
	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	250.000.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	-
	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	184.000.000
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	500.000.000
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	250.000.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	30.000.000
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2024
(1)	(2)	(3)
	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	350.000.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	-
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	9.444.143.630
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	350.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	300.000.000
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	100.000.000
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	75.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	100.000.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	-
URUSAN BIDANG SOSIAL		
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan permakanan	2.462.749.000
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	332.000.000
	Pemberian layanan kedaruratan	65.000.000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	499.580.000
	Pemberian layanan rujukan	138.671.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Penyediaan makanan	2.089.000.000
JUMLAH		995.680.854.507

Sumber: Hasil Olah Data Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Adapun secara lebih rinci, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran I dokumen ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk diukur sehingga dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Adapun pengukuran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator pembangunan yang dianggap dapat mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan indikator kinerja daerah baru berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2017-2021. Indikator kinerja daerah untuk tahun 2023-2026 dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator makro daerah. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan 8 indikator kinerja utama yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran kabupaten berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah. Meski demikian, berdasarkan hasil capaian indikator tahun 2022, terdapat 1 indikator yang mengalami penyesuaian target di tahun 2024, yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang targetnya dinaikkan dari 75,59 poin menjadi sebesar 76,43 poin setelah mempertimbangkan capaian tahun 2022 sebesar 75,22 poin, target perangkat daerah terkait, dan perkiraan indeks pengeluaran yang diperkirakan realisasinya akan terus meningkat hingga tahun 2024 dengan positifnya perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di tahun 2023 dan 2024. Selain itu, target lainnya yang mengalami perubahan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meningkat targetnya dari 43,28 poin menjadi sebesar 43,73 poin setelah mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang telah melebihi target tahun 2023. Target lainnya yang berubah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dari 4,7-5,3% menjadi 4,7% berdasarkan hasil kesepakatan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan kecenderungan jenuhnya pertumbuhan ekonomi setelah peningkatan selama 2 tahun terakhir, serta ancaman relokasi industri. Adapun untuk indikator lainnya tidak mengalami perubahan target.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,01	4,69	4,66
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,22	75,95	76,43
2.	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,31	9,40	9,02
II.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	4,7-5,3	4,7
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	71,95	73,99
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	N/A	55,24	63,36
3.	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,1	120,56	113,46
		Indeks Demokrasi (Poin)	N/A	70,28	71,88
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	79,84	82,09
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43,71	43,72	43,73

Sumber: BPS, IRBI Tahun 2022, RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024

Untuk membantu pencapaian indikator kinerja utama, ditetapkan 95 indikator kinerja kunci yang akan menjadi indikator kinerja utama kepala perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Meskipun terdapat perubahan target IPM untuk tahun 2024, namun target indeks pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan dengan mempertimbangkan bahwa peningkatan akan lebih banyak didorong oleh indeks pengeluaran. Adapun indikator kinerja kunci yang targetnya mengalami perubahan adalah Indeks kualitas udara (IKU) yang targetnya meningkat dari 57,7 poin menjadi 69,01 poin, Indeks kualitas lahan (IKL) yang targetnya meningkat dari 22,48 poin menjadi 22,6 poin, serta Indeks kualitas air (IKA) yang targetnya menurun dari 39,85 poin menjadi 28,81 poin. Penurunan target IKA ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting saat ini, dimana sebagian besar status mutu sungai di Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kategori tercemar berat sehingga diperlukan upaya pengendalian pencemaran air dalam bentuk kebijakan pengendalian dari sumber pencemar (Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air), serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar-pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten bekasi, yang mana hal tersebut membutuhkan proses perencanaan dan tahapan pelaksanaan dalam jangka waktu yang lama. Untuk lebih jelasnya, target indikator kinerja kunci untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bekasi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1.	Indeks pendidikan	Poin	0,7	0,71	Dinas Pendidikan
2.	Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional	Persen	1	1,2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	7,41	7,71	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4.	Indeks kesehatan	Poin	83,18	83,38	Dinas Kesehatan
5.	Capaian standar mutu nasional rumah sakit	Persen	74,33	87	Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	Persen	10	14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7.	Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi	Persen	35	40	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Cakupan layanan air minum	Persen	44,09	49,09	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
9.	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Persen	44,08	44,95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
10.	Indeks pembangunan olahraga berdasarkan dimensi angka partisipasi masyarakat berolahraga, ruang terbuka olahraga dan SDM keolahragaan	Poin	0,01	0,02	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11.	Tingkat pertumbuhan produksi pertanian	Persen	2,33	2,55	Dinas Pertanian
12.	Tingkat pertumbuhan produksi perikanan	Persen	5	5	Dinas Perikanan
13.	Indeks harga konsumen	Poin	119	123	Dinas Perdagangan
14.	Ketersediaan pangan pokok	Persen	97,96	97,97	Dinas Ketahanan Pangan
15.	Skor pola pangan harapan (PPH)	Poin	86,8	86,9	Dinas Ketahanan Pangan
16.	Cakupan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	Persen	40	50	Dinas Ketahanan Pangan
17.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Anak	2,4	2,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Tingkat desa mandiri	Persen	8,33	8,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.	Indeks pembangunan gender	Poin	88,96	89,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20.	Skor capaian kabupaten layak anak (KLA)	Poin	602	612	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21.	Tingkat cakupan PPKS yang ditangani	Persen	21,16	23,28	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Indeks pembangunan pemuda (IPP) berdasarkan dimensi pemuda yang aktif, pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Poin	30,25	30,5	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
23.	Indeks pembangunan kebudayaan berdasarkan dimensi ekonomi budaya, warisan budaya dan ekspresi budaya	Poin	31	35	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
II. Tingkat Pengangguran Terbuka					
1.	Pengembangan destinasi wisata	Destinasi	3	4	Dinas Pariwisata
2.	Tingkat pertumbuhan koperasi berkualitas	Persen	22	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.	Tingkat pertumbuhan UMKM naik kelas	Persen	6	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Nilai realisasi penanaman modal	Rp triliun	44,12	45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Pengembangan sentra industri	Sentra	1	1	Dinas Perindustrian
6.	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	2	4	Dinas Perdagangan
7.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	66	66,1	Dinas Ketenagakerjaan
III. Indeks Reformasi Birokrasi					
1.	Indeks perencanaan	Poin	84,17	86,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Indeks kinerja pengendalian pembangunan daerah	Poin	65	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Nilai Sakip Pemda	Poin	68,59	69,76	Sekretariat Daerah
4.	Indeks kependudukan	poin	75	80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.	Indeks kapabilitas APIP	poin	2	3	Inspektorat
6.	Indeks maturitas SPIP	poin	2	3	Inspektorat
7.	Indeks sistem merit	Poin	273	282	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Indeks profesionalisme ASN dimensi kompetensi	Poin	15	16,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Nilai kualitas kebijakan	Poin	73	75	Sekretariat Daerah
10.	Cakupan nilai reformasi birokrasi dimensi deregulasi kebijakan, pelaksanaan tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik dan penguatan organisasi	Persen	62,57	67,53	Sekretariat Daerah
11.	Indeks inovasi	Poin	30	33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2,6	2,9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
13.	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP)	Poin	65	70	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14.	Indeks keamanan informasi (KAMI)	Poin	175	185	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
15.	Nilai kinerja pelayanan publik	Poin	80,32	81,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Nilai pengawasan kearsipan	Poin	75,5	76	Dinas Arsip dan Perpustakaan
17.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cibitung
18.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cabangbungin
19.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	95	96	Kecamatan Bojongmangu
20.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Babelan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Kedungwaringin
22.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	88,2	88,7	Kecamatan Setu
23.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85,5	86	Kecamatan Pebayuran
24.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Tarumajaya
25.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Karangbahagia
26.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Muaragembong
27.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Tambun Utara
28.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	86	Kecamatan Cibusah
29.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cikarang Selatan
30.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85	86	Kecamatan Tambelang
31.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cikarang Utara
32.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cikarang Pusat
33.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cikarang Barat
34.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85,5	86	Kecamatan Serang Baru
35.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	88	88,5	Kecamatan Sukatani
36.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Tambun Selatan
37.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Cikarang Timur
38.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Sukakarya
39.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86	87	Kecamatan Sukawangi
40.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Poin	30,28	30,28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
41.	Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah	Persen	7,5	8	Badan Pendapatan Daerah
42.	Tingkat bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi	Persen	5	6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
43.	Persentase pemenuhan standar sarana prasarana kerja pemerintah daerah	Persen	82,4	82,9	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
IV.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah				
1.	Tingkat konektivitas antar jalan kabupaten	Persen	81,38	87,71	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
2.	Tingkat konektivitas antar permukiman dan perumahan	Persen	30,33	42,37	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
3.	Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi	Persen	35	40	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
4.	Tingkat keselamatan lalu lintas dimensi perlengkapan jalan, kendaraan laik jalan, manajemen rekayasa lalu lintas	Persen	54	60	Dinas Perhubungan
V.	Indeks Resiko Bencana				
1.	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Poin	0,45	0,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pencapaian ketepatan waktu tanggap (respon time) petugas pada setiap kejadian	Persen	81	82	Dinas Pemadam Kebakaran
3.	Tingkat efektifitas mitigasi pengendalian banjir dan kekeringan	Persen	18,12	19,51	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4.	Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persen	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
VI.	Indeks Demokrasi				
1.	Indeks demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik	Poin	70,28	71,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Tingkat fasilitasi kapasitas, hubungan kelembagaan DPRD dan pembahasan Perda dan penjangkaran aspirasi	Persen	100	100	Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Tingkat fasilitasi Perda inisiatif dewan	Persen	100	100	Sekretariat DPRD
4.	Tingkat fasilitasi rekomendasi DPRD terhadap eksekutif	Persen	100	100	Sekretariat DPRD
VII. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban					
1.	Indeks ketertiban masyarakat	poin	31,36	33,16	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	23,7	24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Indeks wawasan kebangsaan	Poin	24,78	24,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VIII. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
1.	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	21	21,25	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	69	69,01	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	28,8	28,81	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Indeks kualitas lahan (IKL)	Poin	22,6	22,6	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Cakupan akses sanitasi aman komponen pelayanan	Persen	5	7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6.	Tingkat akses sanitasi layak dan aman	Persen	85,38	85,56	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
7.	Indeks perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang	Poin	0,6	0,68	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2022

Sementara dalam rangka mengukur dampak pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap indikator pembangunan lainnya yang tidak menjadi indikator utama atau indikator kinerja kunci daerah, juga ditetapkan indikator makro daerah sebagaimana tercantum pada RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Untuk tahun 2024, terdapat 7 indikator yang mengalami penyesuaian target dengan mempertimbangkan hasil realisasi tahun 2022 dan penyesuaian target IPM untuk tahun 2023 dan 2024, antara lain: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang targetnya naik dari 9,56 tahun menjadi 9,67 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) yang targetnya turun dari 14,09 tahun menjadi 13,95 tahun, PDRB atas dasar Harga Berlaku yang targetnya naik dari Rp.386.579.354.000.000,- menjadi Rp.403.949.247.000.000,-, PDRB atas dasar Harga Konstan yang targetnya naik dari Rp.285.900.096.000.000,- menjadi Rp.290.638.793.000.000,-, PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku yang targetnya naik dari Rp.118.153.574,- menjadi Rp.122.150.164,-, PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan yang targetnya naik dari Rp.87.382.106,- menjadi Rp.87.886.229,-, serta Pengeluaran per Kapita yang targetnya naik dari Rp.11.641.000,- orang per tahun menjadi Rp.11.892.000,- orang per tahun.

Tabel 6.3
Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI	TARGET	
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,53	9,56	9,67
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,11	13,72	13,95
3.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,04	74,07	74,20
4.	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rp	367.573.270	385.744.736	403.949.247
5.	PDRB atas dasar Harga Konstan	Juta Rp	265.130.822	277.591.970	290.638.793
6.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku	Rupiah	114.338.000	118.294.311	122.150.164
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan	Rupiah	82.472.000	85.127.671	87.886.229
8.	Rasio Gini	Indeks	0,37	0,329	0,324
9.	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/Tahun	11.757	11.813	11.892
10.	Inflasi	%	5,37	3,55	3,44
11.	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	201.100	153.449	152.468

Sumber: BPS, RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke 2 (dua) dari RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan sumber lainnya yang sah, setiap Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan.
2. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
3. Seluruh perangkat daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
4. Untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan dan rencana anggaran, RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2024.
5. Dalam hal kemampuan keuangan pada perkiraan KUA dan PPAS serta rancangan APBD tidak mencukupi untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pada RKPD Tahun 2024, maka dipilih prioritas kegiatan berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026.
6. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak diperkirakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan atas RKPD Tahun 2024.
7. Perangkat daerah yang melakukan perubahan program dan kegiatan, wajib menyusun perubahan Renja tahun berkenaan.
8. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (program dan kegiatan) serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.

9. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Selanjutnya, agar RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2024 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN